

**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI NTT





**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI NTT





Peta Pembinaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Usna Aning Yulianti, S.Stat
2. Mardha Tilla Pratiwi, S.Si
3. Ristiyan Widiaswati, S.I.P

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	3
C. TUJUAN	4
D. RUANG LINGKUP	4

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

A. KABUPATEN ALOR	7
B. KABUPATEN BELU	8
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	9
Aspek Satuan Inovasi Daerah	10
C. KABUPATEN FLORES TIMUR	18
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	19
Aspek Satuan Inovasi Daerah	20
D. KABUPATEN KUPANG	28
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	29
Aspek Satuan Inovasi Daerah	30
E. KABUPATEN LEMBATA	38
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	39
Aspek Satuan Inovasi Daerah	40
F. KABUPATEN MALAKA	48
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	49
G. KABUPATEN MANGGARAI	50
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	51
Aspek Satuan Inovasi Daerah	52
H. KABUPATEN MANGGARAI BARAT	60
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	61
Aspek Satuan Inovasi Daerah	62
I. KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	70
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	71
Aspek Satuan Inovasi Daerah	72
J. KABUPATEN NOGEKEO	80
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	80
Aspek Satuan Inovasi Daerah	80
K. KABUPATEN NGADA	81
L. KABUPATEN ROTE NDAO	82
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	82
Aspek Satuan Inovasi Daerah	83

M. KABUPATEN SABU RAIJU	90
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	90
Aspek Satuan Inovasi Daerah	91
N. KABUPATEN SIKKA	97
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	97
Aspek Satuan Inovasi Daerah	98
O. KABUPATEN SUMBA BARAT	104
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	104
Aspek Satuan Inovasi Daerah	105
P. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	111
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	111
Aspek Satuan Inovasi Daerah	112
Q. KABUPATEN SUMBA TENGAH	118
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	119
Aspek Satuan Inovasi Daerah	120
R. KABUPATEN SUMBA TIMUR	125
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	126
Aspek Satuan Inovasi Daerah	127
S. KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN	133
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	134
Aspek Satuan Inovasi Daerah	135
T. KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA	140
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	141
Aspek Satuan Inovasi Daerah	142
U. KOTA KUPANG	148
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	148
Aspek Satuan Inovasi Daerah	149

BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

156

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Alor
- Gambar 2. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Belu
- Gambar 3. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Belu
- Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Belu
- Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Belu
- Gambar 6. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Belu
- Gambar 7. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Belu
- Gambar 8. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Belu
- Gambar 9. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Belu
- Gambar 10. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Belu
- Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Belu
- Gambar 12. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Belu
- Gambar 13. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Flores Timur
- Gambar 14. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Flores Timur
- Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Flores Timur
- Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Flores Timur
- Gambar 17. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Flores Timur
- Gambar 18. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Flores Timur
- Gambar 19. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Flores Timur
- Gambar 20. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Flores Timur

Gambar 21. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Flores Timur

Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur

Gambar 23. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sabu Raijua

Gambar 24. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kupang

Gambar 25. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kupang

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kupang

Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kupang

Gambar 28. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kupang

Gambar 29. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kupang

Gambar 30. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kupang

Gambar 31. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kupang

Gambar 32. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kupang

Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kupang

Gambar 34. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Kupang

Gambar 35. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lembata

Gambar 36. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lembata

Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Lembata

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Lembata

Gambar 39. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Lembata

Gambar 40. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Kabupaten Lembata

Gambar 41. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Lembata

Gambar 42. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Lembata

Gambar 43. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Lembata

Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lembata

Gambar 45. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Lembata

Gambar 46. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Malaka

Gambar 47. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Malaka

Gambar 48. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Manggarai

Gambar 49. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manggarai

Gambar 50. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Manggarai

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Manggarai

Gambar 52. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Manggarai

Gambar 53. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Manggarai

Gambar 54. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Manggarai

Gambar 55. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Manggarai

Gambar 56. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Manggarai

Gambar 57. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai

Gambar 58. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai

Gambar 59. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 60. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 61. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 63. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 64. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 65. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 66. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Manggarai Barat

Gambar 67. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 68. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 69. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 70. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Manggarai Timur

Gambar 71. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manggarai Timur

Gambar 72. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Manggarai Timur

Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Manggarai Timur

Gambar 74. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Manggarai Timur

Gambar 75. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Manggarai Timur

Gambar 76. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Manggarai Timur

Gambar 77. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Manggarai Timur

Gambar 78. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Manggarai Timur

Gambar 79. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Gambar 80. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 81. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Ngada

Gambar 82. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Rote Ndao

Gambar 83. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Rote Ndao

Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Rote Ndao

Gambar 85. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Rote Ndao

Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Rote Ndao

Gambar 87. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Rote Ndao

Gambar 88. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Rote Ndao

Gambar 89. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Rote Ndao

Gambar 90. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Rote Ndao

Gambar 91. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao

Gambar 92. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao

Gambar 93. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sabu Raijua

Gambar 94. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sabu Raijua

Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sabu Raijua

Gambar 96. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sabu Raijua

Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sabu Raijua

Gambar 98. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sabu Raijua

Gambar 99. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sabu Raijua

Gambar 100. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sabu Raijua

Gambar 101. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sabu Raijua

Gambar 102. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sabu Raijua

Gambar 103. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sabu Raijua

Gambar 104. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sikka

Gambar 105. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sikka

Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sikka

Gambar 107. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sikka

Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sikka

Gambar 109. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sikka

Gambar 110. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sikka

Gambar 111. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sikka

Gambar 112. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sikka

Gambar 113. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sikka

Gambar 114. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka

Gambar 115. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumba Barat

Gambar 116.Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumba Barat

Gambar 117.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat

Gambar 118.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat

Gambar 119.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat

Gambar 120.Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Kabupaten Sumba Barat

Gambar 121.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat

Gambar 122.Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumba Barat

Gambar 123.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumba Barat

Gambar 124.Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Barat

Gambar 125.Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Barat

Gambar 126.Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar 127.Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar 128.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar 129.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar 130.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar 131.Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar 132.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar 133.Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar 134.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar 135.Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar 136.Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar 137.Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumba Tengah

Gambar 138.Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumba Tengah

Gambar 139.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumba Tengah

Gambar 140.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumba Tengah

Gambar 141.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumba Tengah

Gambar 142.Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumba Tengah

Gambar 143.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumba Tengah

Gambar 144.Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Rote Ndao

Gambar 145.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumba Tengah

Gambar 146.Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Tengah

Gambar 147.Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Tengah

Gambar 148.Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumba Timur

Gambar 149.Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumba Timur

Gambar 150.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumba Timur

Gambar 151.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumba Timur

Gambar 152.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumba Timur

Gambar 153.Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumba Timur

Gambar 154.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumba Timur

Gambar 155.Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumba Timur

Gambar 156.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumba Timur

Gambar 157.Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Timur

Gambar 158.Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Timur

Gambar 159.Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Gambar 160.Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Gambar 161.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Gambar 162.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Gambar 163.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Gambar 164.Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Timor Tengah Selatan

Gambar 165.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Gambar 166.Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Gambar 167.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Gambar 168.Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Gambar 169.Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Gambar 170.Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Gambar 171.Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Gambar 172.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Gambar 173.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Gambar 174.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Gambar 175.Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Timor Tengah Utara

Gambar 176.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Gambar 177.Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Gambar 178.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Gambar 179.Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Gambar 180.Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Gambar 181.Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Kupang

Gambar 182.Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Kupang

Gambar 183.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Kupang

Gambar 184.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Kupang

Gambar 185.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Kupang

Gambar 186.Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Kupang

Gambar 187.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Kupang

Gambar 188.Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Kupang

Gambar 189.Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Kupang

Gambar 190. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Kupang

Gambar 191. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Kupang

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah
- Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Belu beserta Skor Kematangannya
- Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Sabu Raijua beserta Skor Kematangannya
- Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Kupang beserta Skor Kematangannya
- Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Lembata beserta Skor Kematangannya
- Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Manggarai beserta Skor Kematangannya
- Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Manggarai Barat beserta Skor Kematangannya
- Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Manggarai Barat beserta Skor Kematangannya
- Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Rote Ndao beserta Skor Kematangannya
- Tabel 10. Daftar Inovasi Kabupaten Sabu Raijua beserta Skor Kematangannya
- Tabel 11. Daftar Inovasi Kabupaten Sikka beserta Skor Kematangannya
- Tabel 12. Daftar Inovasi Kabupaten Sumba Barat beserta Skor Kematangannya
- Tabel 13. Daftar Inovasi Kabupaten Sumba Barat Daya beserta Skor Kematangannya
- Tabel 14. Daftar Inovasi Kabupaten Sumba Timur beserta Skor Kematangannya
- Tabel 15. Daftar Inovasi Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta Skor Kematangannya
- Tabel 16. Daftar Inovasi Kabupaten Timor Tengah Utara beserta Skor Kematangannya
- Tabel 17. Daftar Inovasi Kota Kupang beserta Skor Kematangannya

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk

inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelebagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan demikian dapat

dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah;
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek

SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

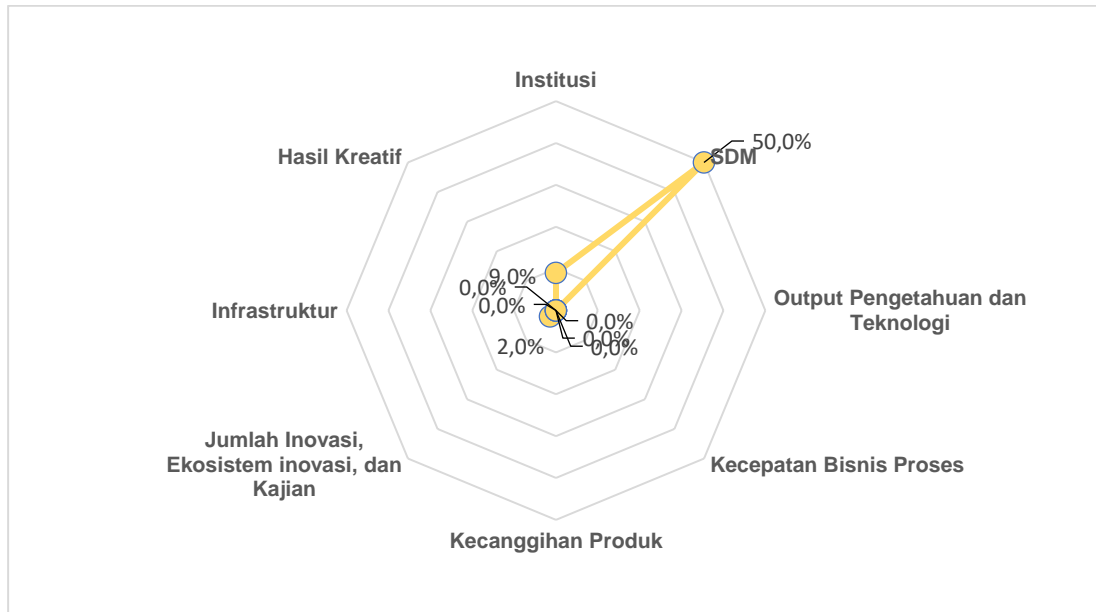
Aspek	Variabel	Indikator
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
		Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian
	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	
	Roadmap SiDA	
	SDM	Nilai IPM
		Penghargaan Bagi Inovator
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
Kecepatan Inovasi		

Aspek	Variabel	Indikator
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah

BAB II

***INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN
DAN KLASTER KOTA***

A. KABUPATEN ALOR

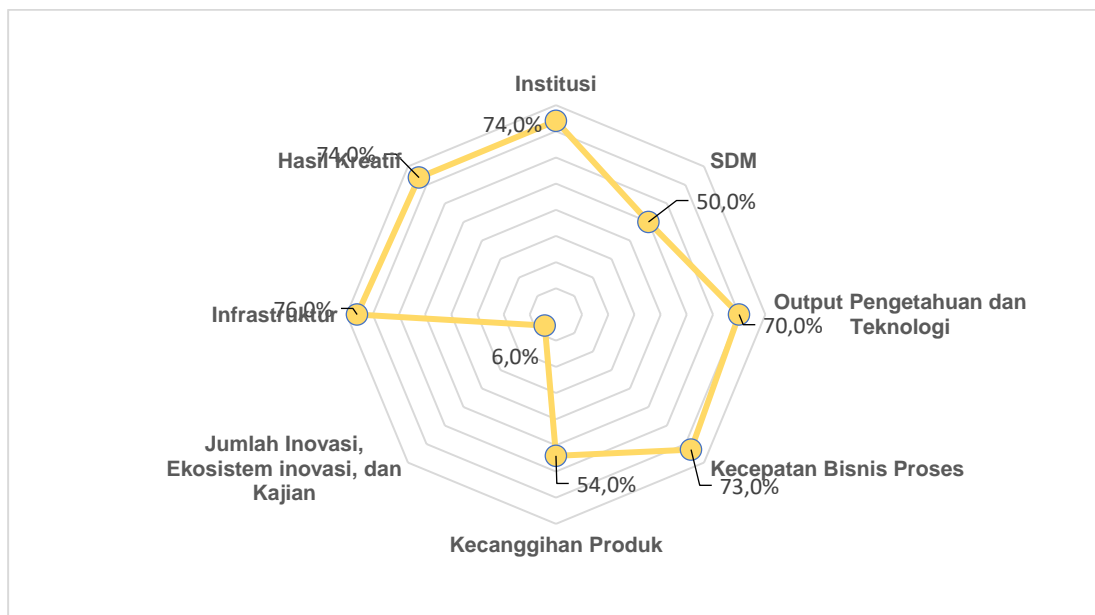


Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Alor

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Alor memiliki skor tertinggi pada variabel SDM, yaitu 50.0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Pada variabel intitusi memperoleh skor 9.0%.

Selanjutnya, pada variabel lainnya seperti Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecepatan Bisnis Proses, Kecanggihan Produk, Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian, Infrastruktur serta Hasil Kreatif tidak ada data yang dapat direkap dikarenakan pemerintah Kabupaten Ngada belum melaporkan inovasi tahun 2021.

B. KABUPATEN BELU



Gambar 2. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Belu

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Belu memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur, yaitu 76.0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel Infrastruktur sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Selanjutnya, variabel dengan skor di bawah Infrastruktur ialah variabel Institusi, Hasil Kreatif, Kecepatan Bisnis Proses dan Output Pengetahuan dan Teknologi dengan nilai skor berada di sekitar angka 70%. Variabel Kecanggihan Produk dan SDM memiliki skor yang lebih rendah yakni di sekitar angka 50%. Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masuk kategori rendah, yaitu hanya 6.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut belum maksimal atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 3. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Belu

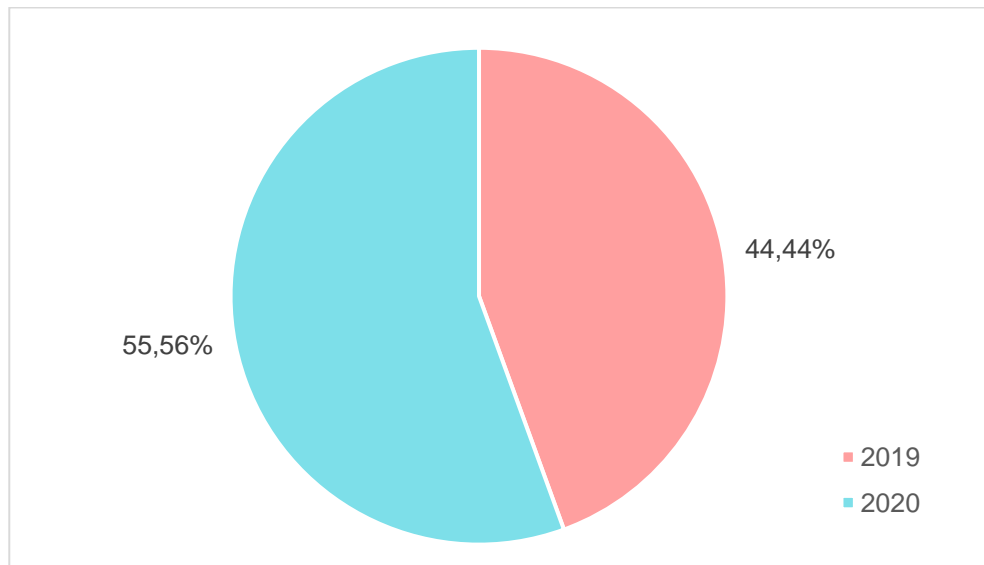
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Belu telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan, meskipun masih dalam standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yaitu penurunan maksimal 1.85%. Selanjutnya, pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, terlihat ada peningkatan sebesar 0.17% berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Belu.

Nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 0.14%. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 22.75% melampaui standar nasional parameter IID, yakni kenaikan minimal sebesar 5%. Pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, terdapat penurunan sebesar 2.42%, dimana nilai ini masih jauh di bawah standar nasional IID yaitu dengan kenaikan sebesar 8%. Selanjutnya, pada indikator Jumlah Peningkatan Investasi terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 93.27%, di atas standar nasional parameter IID, nilai tersebut di atas standar nasional parameter IID yang

mengharuskan naik sebesar 5%. Terakhir, pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Rote Belu menunjukkan kenaikan sebesar 0.29%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

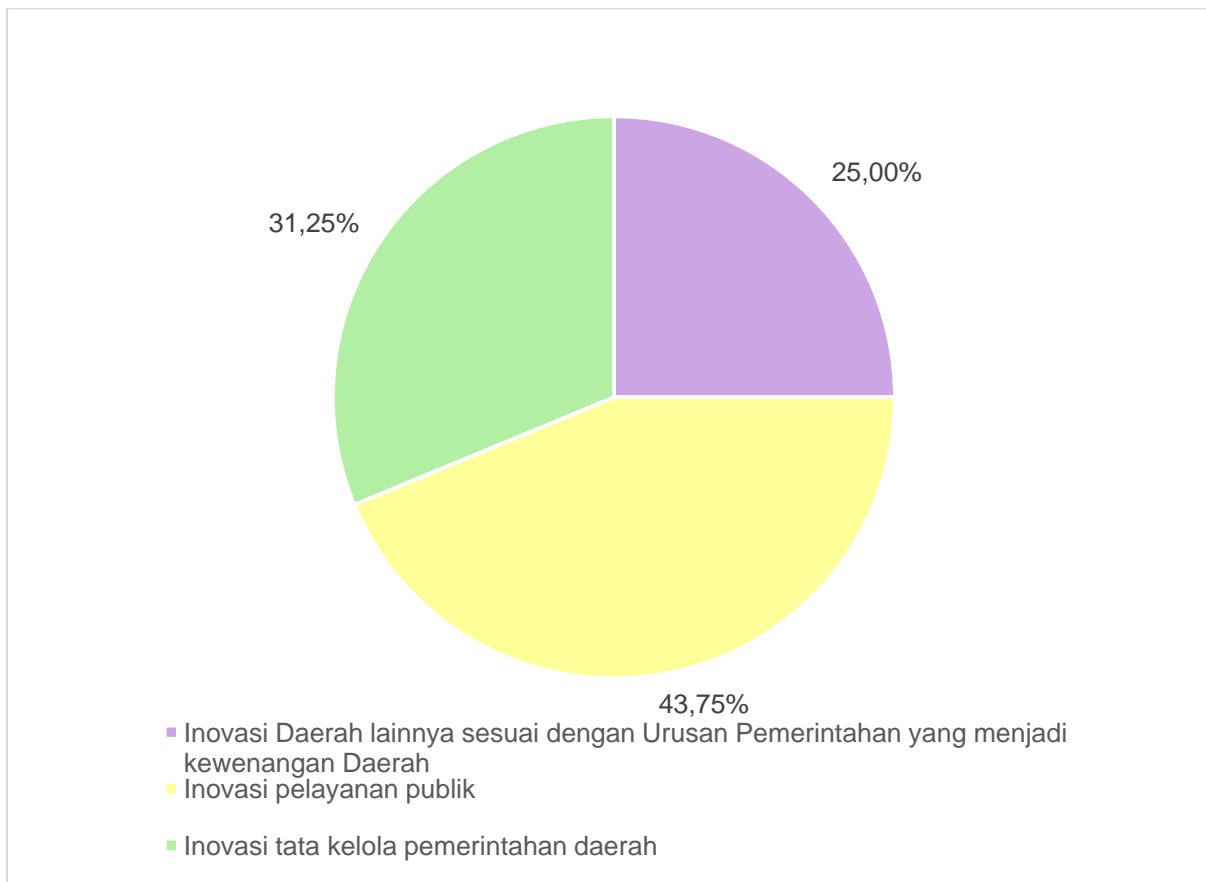
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Belu

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Belu telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 13 (81.25%) inovasi dari 16 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 3 (18.75%) inovasi lainnya diterapkan pada 2020.

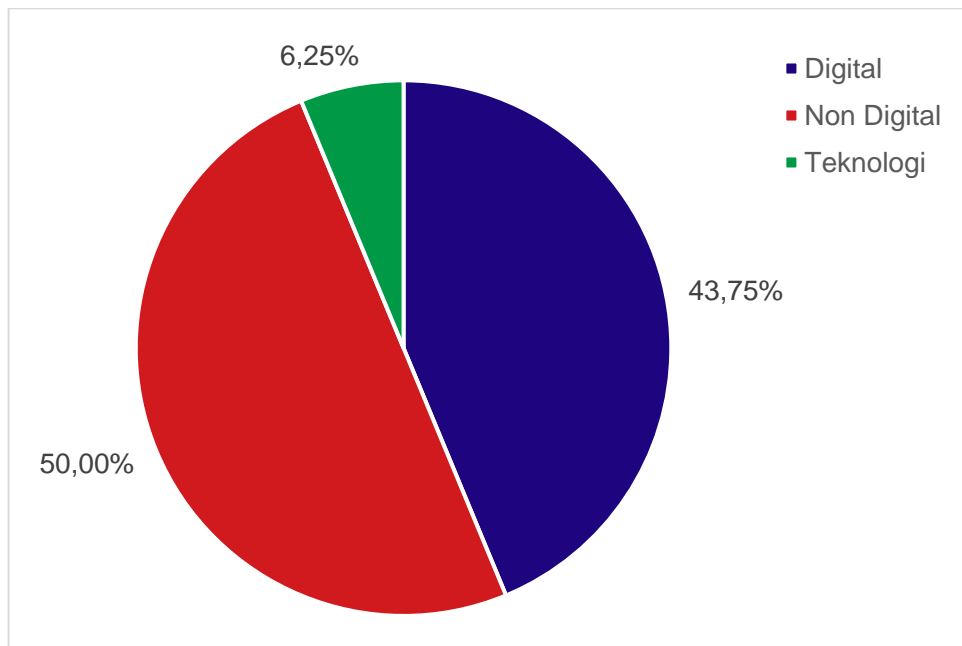
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Belu

Berdasarkan bentuknya terdapat sebanyak 7 (43.75%) inovasi berbentuk Pelayanan Publik adalah inovasi yang paling banyak dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Belu. Selanjutnya 4 (25%) inovasi adalah Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Urusan Pemerintahan. Sisanya sebanyak 5 (31.25%) inovasi adalah inovasi dalam bentuk Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

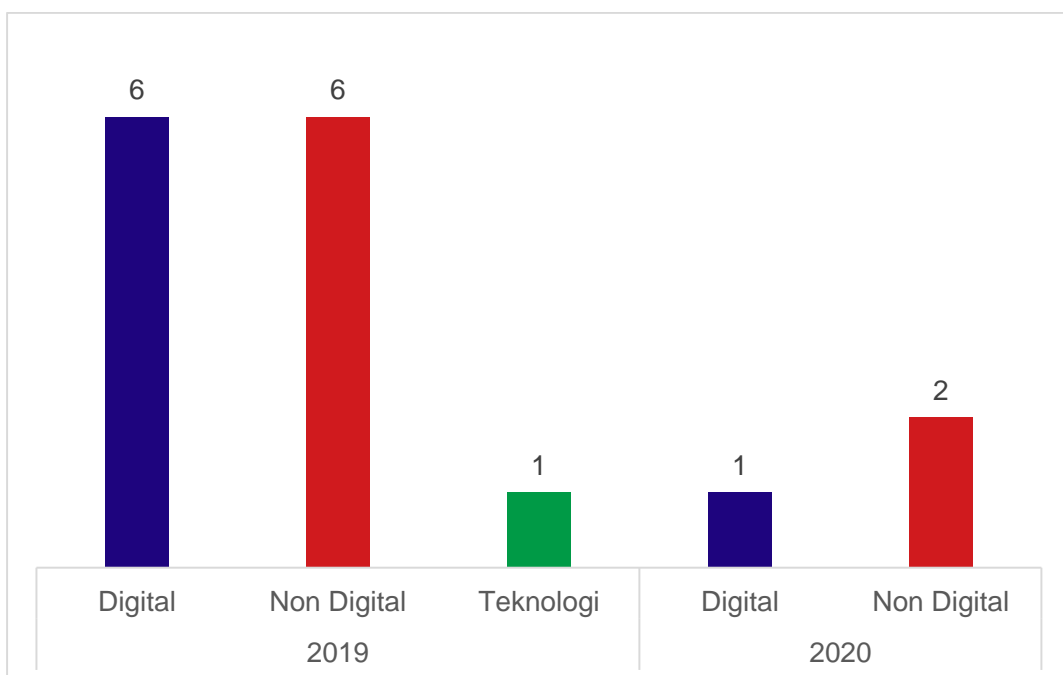
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 6. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Belu

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 8 (50%) dari 16 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Belu merupakan inovasi Non Digital. Sementara itu, 7 (43.75%) inovasi berjenis Digital dan sisanya sebanyak 1 (6.25%) inovasi daerah berjenis Teknologi.

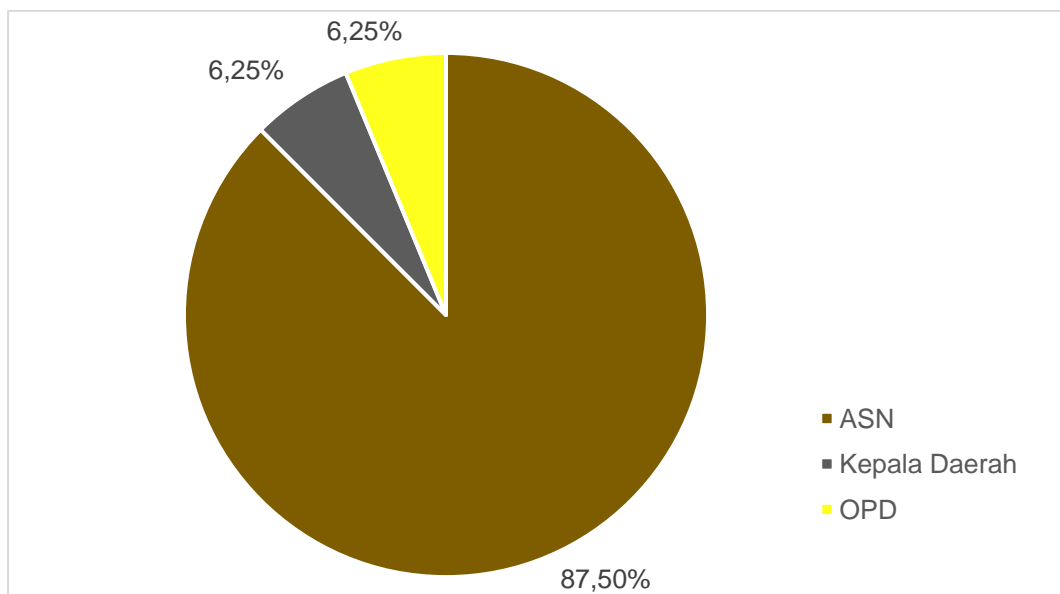
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 7. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Belu

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi Digital, inovasi Non Digital maupun inovasi Teknologi. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun menjadi 1 inovasi dari semulanya 6 inovasi pada tahun 2019. Demikian pula dengan inovasi Non Digital mengalami penurunan dari 6 inovasi pada tahun 2019 menjadi 2 inovasi pada tahun 2020. Sementara pada tahun 2019 yang semula terdapat 1 inovasi Teknologi tereduksi sehingga pada tahun 2020 sama sekali tidak ada inovasi Teknologi.

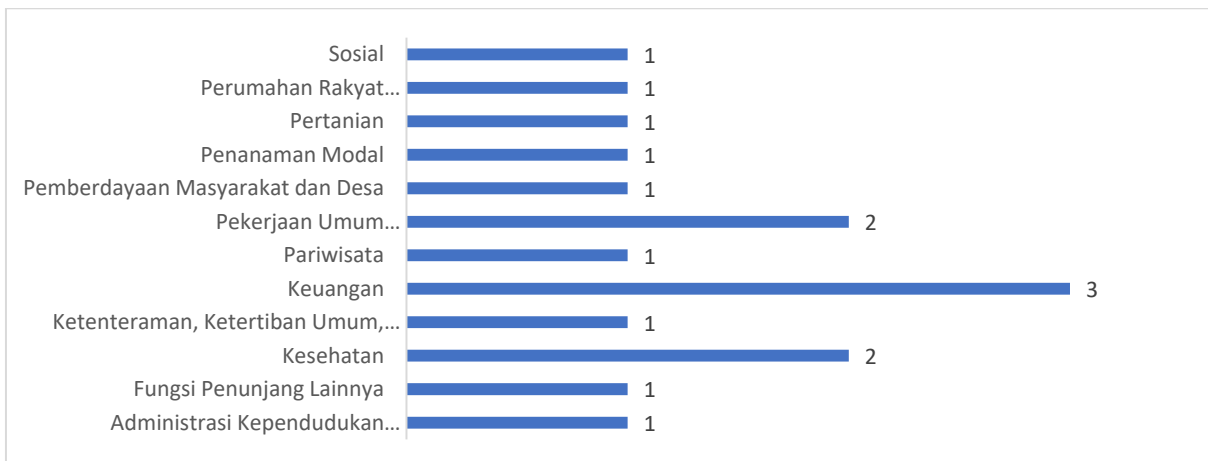
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 8. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Belu

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2021 diinisiasi oleh Aparatur Sipil Negara, yaitu sejumlah 14 (87.50%) inovasi. Selanjutnya, inovasi yang dilaporkan oleh Kepala Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah masing-masing berjumlah 1 inovasi (6.25%).

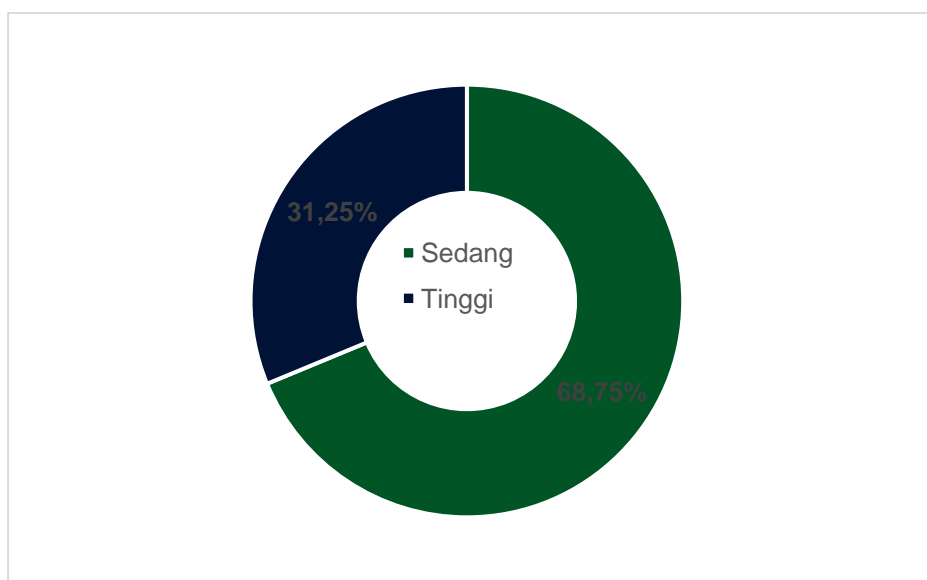
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 9. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Belu

Sebaran inovasi daerah menurut laporan pemerintah Kabupaten Belu berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata kecuali pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Keuangan, dan Kesehatan dimana masing-masing terdapat 2, 3, dan 2 inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Belu. Terdapat 5 dari 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaporkan, yakni Urusan Sosial, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Trabtibumlinmas, dan Kesehatan.

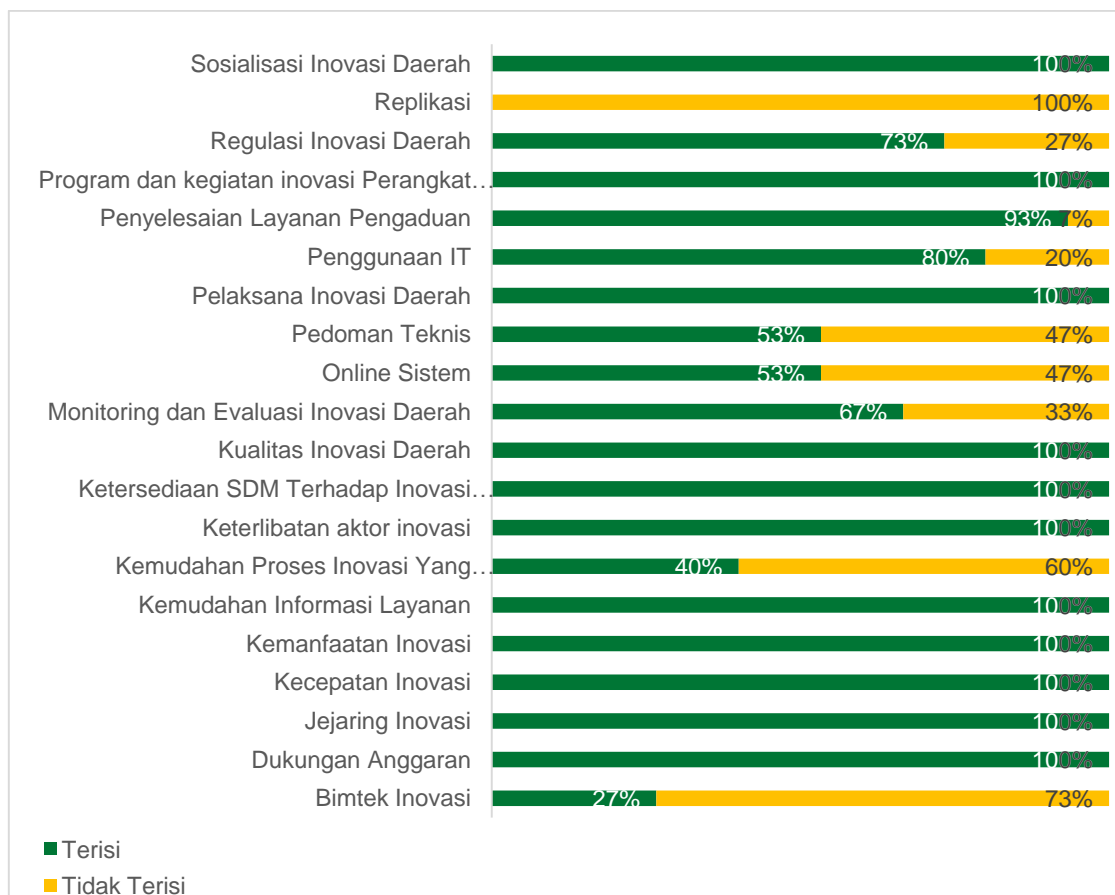
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 10. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Belu

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Belu sebanyak 11 (68.75%) inovasi masih berada pada kategori sedang. Sedangkan 5 (31.25%) inovasi lainnya sudah memiliki skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

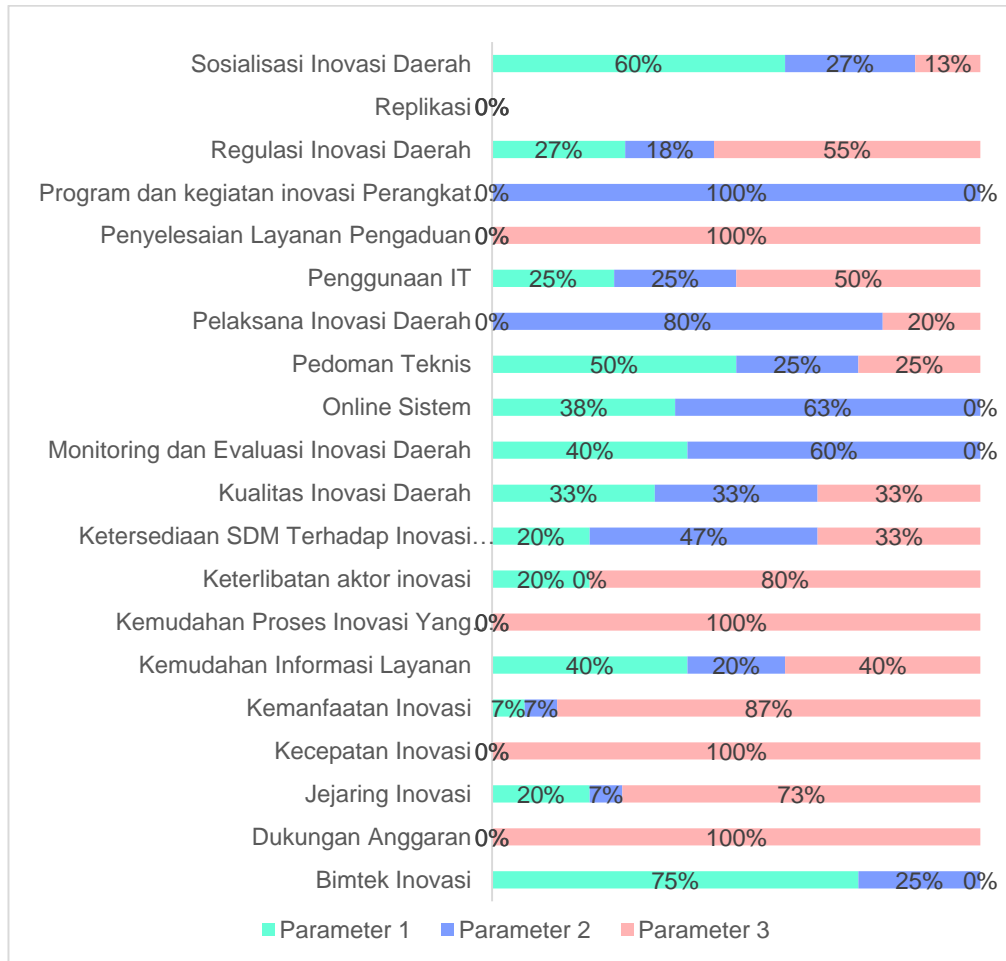


Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Belu

Dari 16 inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Belu, 79.33% dari total inovasi telah terisi data pendukung. Sedangkan sisanya, 20.67% masih belum terisi data pendukung. Sebagian besar tingkat indikator keterisian bukti dukung telah mencapai angka tertinggi yakni 100% yang meliputi indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Lunak Daerah dalam RKPD, Pelaksana Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan aktor inovasi, Kemudahan Informasi Layanan,

Kemanfaatan Inovasi, Keepatan Inovasi, Jejaring Inovasi, dan Dukungan Anggaran. Indikator dengan tingkat keterisian terendah ialah replika sebesar 0%.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 12. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Belu

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Pelayanan Pengaduan, Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan, Kecepatan Inovasi dan Dukungan Anggaran yaitu sebesar 100%. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD yakni sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 75%. Berarti 75%

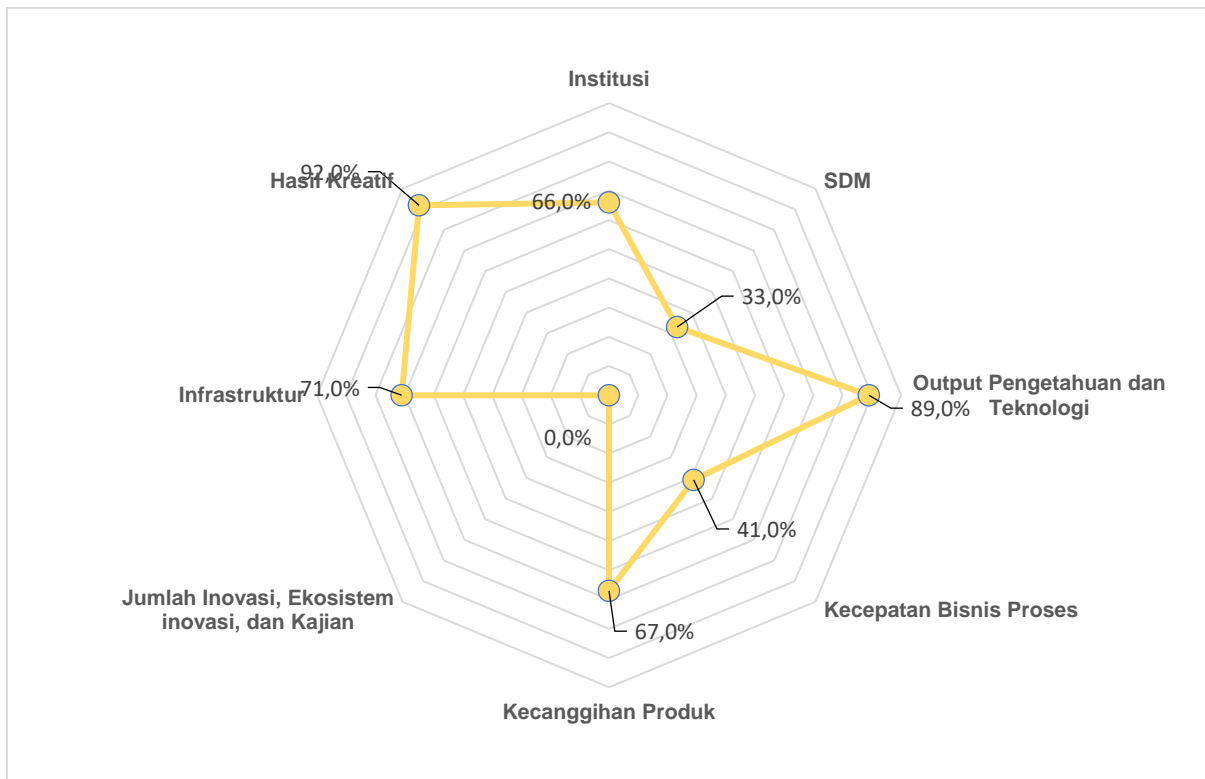
inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Bimtek Inovasi masuk dalam kategori parameter 1 (satu).

j. Daftar Inovasi Kabupaten Belu beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Belu beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Penerapan Si Ana Bela Guna Mengoptimalkan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu	78
Sistem Pengelolaan Darah Melalui Tranfusi Darah (Si Lola Dara Muda) Pada RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua	97
Optimalisasi Penanganan Kemiskinan Melalui Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Basis Data Terpadu (Si Tangis Badut) Pada Dinas Sosial Kabupaten Belu	83
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Upaya Pengendalian Sampah di Kota Atambua	99
PAMUNGKAS (Pengembangan Pusat Unggulan Kreatifitas Desa)	76
Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua	127
Pengelolaan Sarana Air Bersih Di Daerah Pedesaan Bermitra Dengan BUMDES	85
Optimalisasi Sirkulasi Pelayanan Administrasi Terpadu (OPSIR PAT) Di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Belu	96
Penyehatan Lingkungan Permukiman Melalui Penyediaan " JAM CELA TERJANG"	97
Berwisata ke Belu dengan Jari	86
Penataan Sistem Dengan Dokumentasi Digital Dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Si Dodi Tangguh)	90
Sistem Informasi Farmasi "SIMFARMA" RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua	93
Penataan Sistem Penagihan Pajak Daerah Berbasis Online (E-Pajak Rai Belu) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	103
"Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Secara Terpadu di Perkotaan Atambua melalui Pengembangan Saluran Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Si PeTaRung)"	100
Peningkatan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Melalui Sistem Jemput Bola (APEL SI JEMPOL) di Kabupaten Belu	104
Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Melalui Sistem Pelaporan Yang Terintegrasi (SIMPELTRI)	103

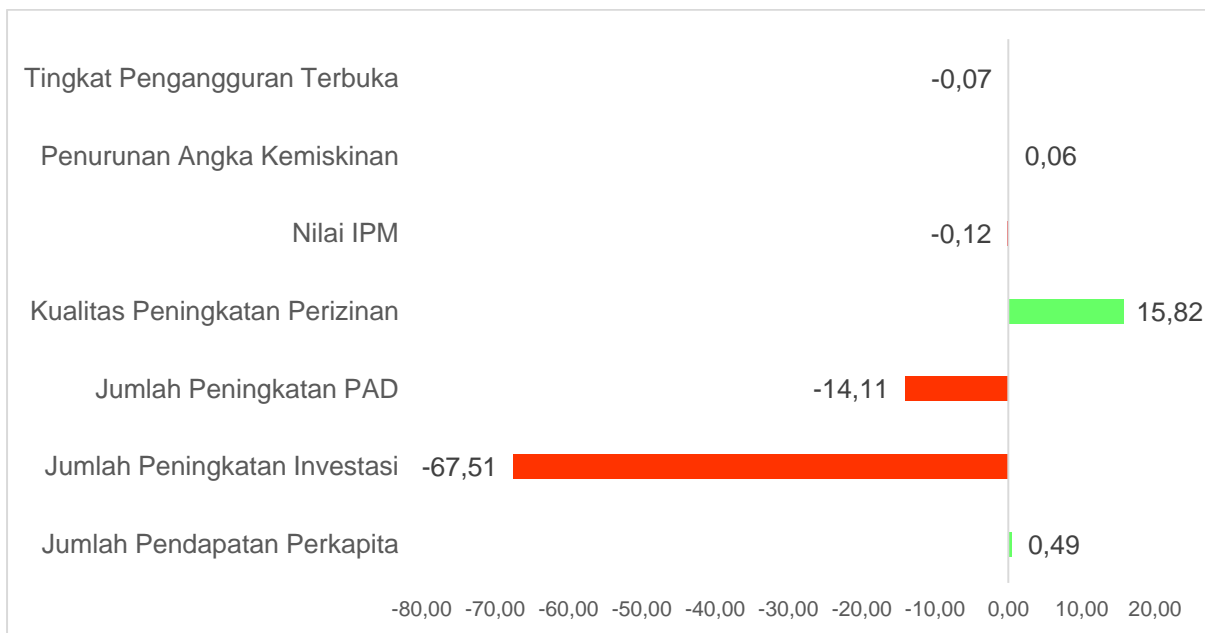
C. KABUPATEN FLORES TIMUR



Gambar 13. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel Hasil Kreatif pada Kabupaten Flores Timur adalah variabel ukur indeks inovasi daerah dengan skor maksimal (parameter 3) dengan capaian tertinggi yaitu sebesar 62.0%. Selanjutnya, variabel dengan capaian yang rendah atau tidak maksimal (parameter 1) adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi dan Kajian yaitu sebesar 0.0%.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 14. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Flores Timur

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Flores Timur sudah mengalami perkembangan namun belum signifikan untuk semua indikator.

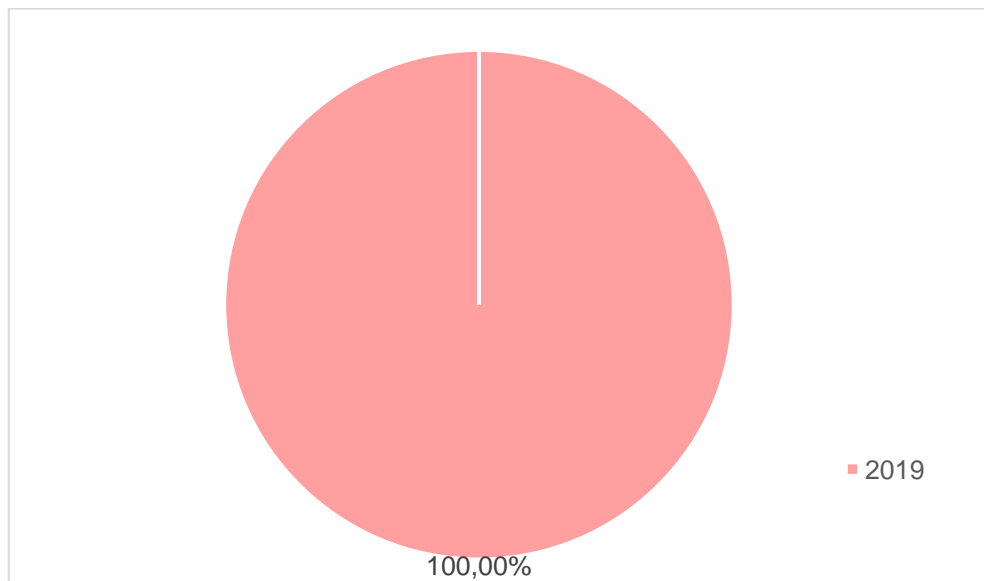
Pada grafik terlihat bahwa indikator Tingkat Pengangguran Terbuka terdapat penurunan sebesar 0.07% namun angka tersebut masih di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yang seharusnya turun 0.92%. Pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan terdapat peningkatan sebesar 0.06%, angka tersebut sedikit di atas dari standar nasional parameter IID yaitu meningkat 0.02%. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami penurunan sebesar 0.12% dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan standar nasional parameter IID sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 15,82%, jauh di atas standar nasional parameter IID yang mengharuskan meningkat 5%.

Peningkatan PAD pada Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan penurunan 14.11%, nilai tersebut jauh lebih rendah dari standar nasional parameter IID yang seharusnya mengalami kenaikan minimal 8%. Jumlah Peningkatan Investasi yang

dilaporkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalami penurunan sebesar 67.51% jauh di bawah standar parameter IID yang mengharuskan peningkatan minimal sebesar 0.45%. Selanjutnya Jumlah Pendapatan Perkapita naik sebesar 0.49%, lebih tinggi dari standar nasional parameter IID yaitu penurunan maksimal 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

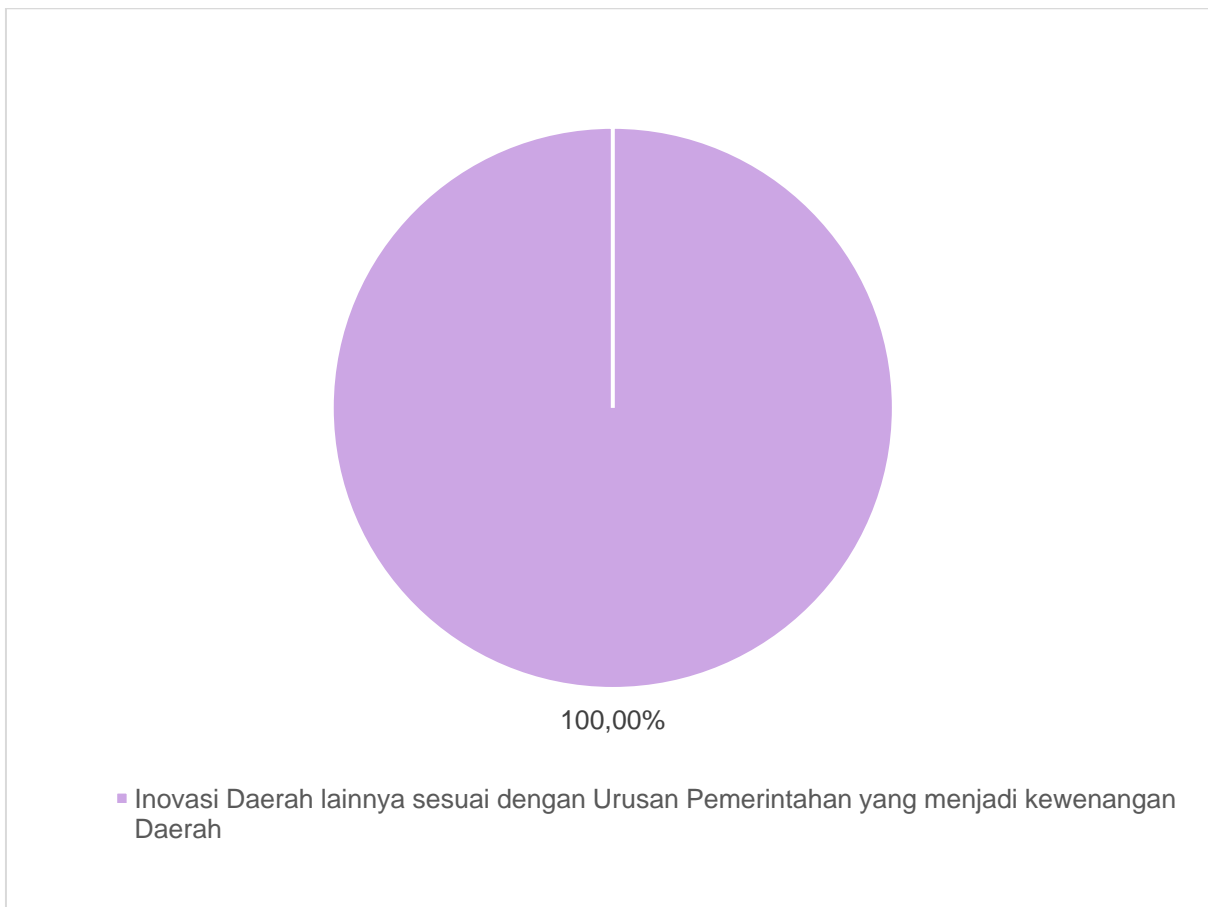
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Flores Timur

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sejumlah 1 inovasi daerah hanya diterapkan pada tahun 2019 oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur.

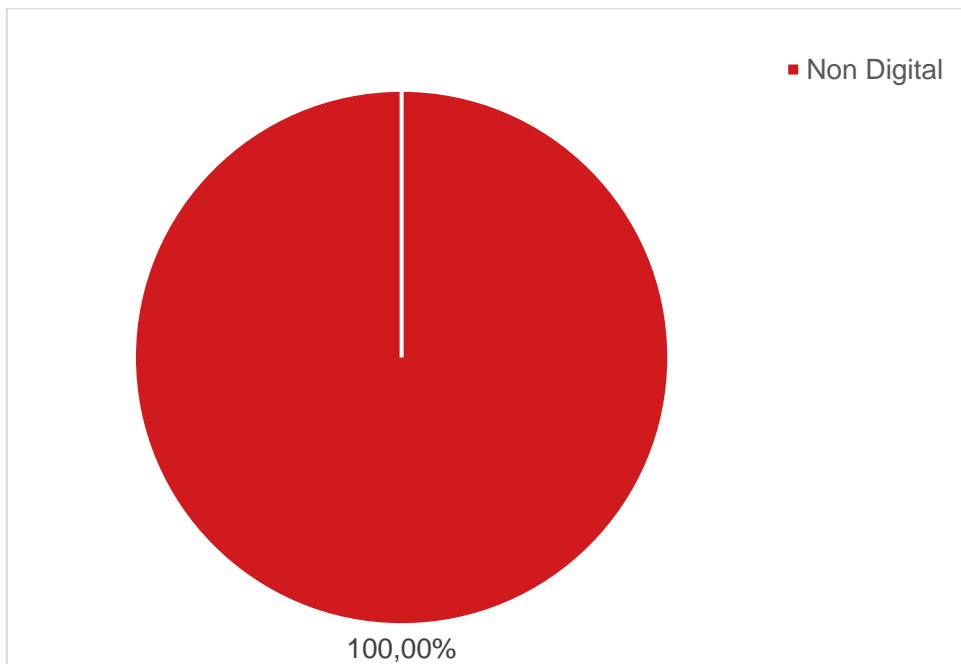
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan bentuknya, Inovasi dilaporkan pemerintah Kabupaten Flores Timur berbentuk Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

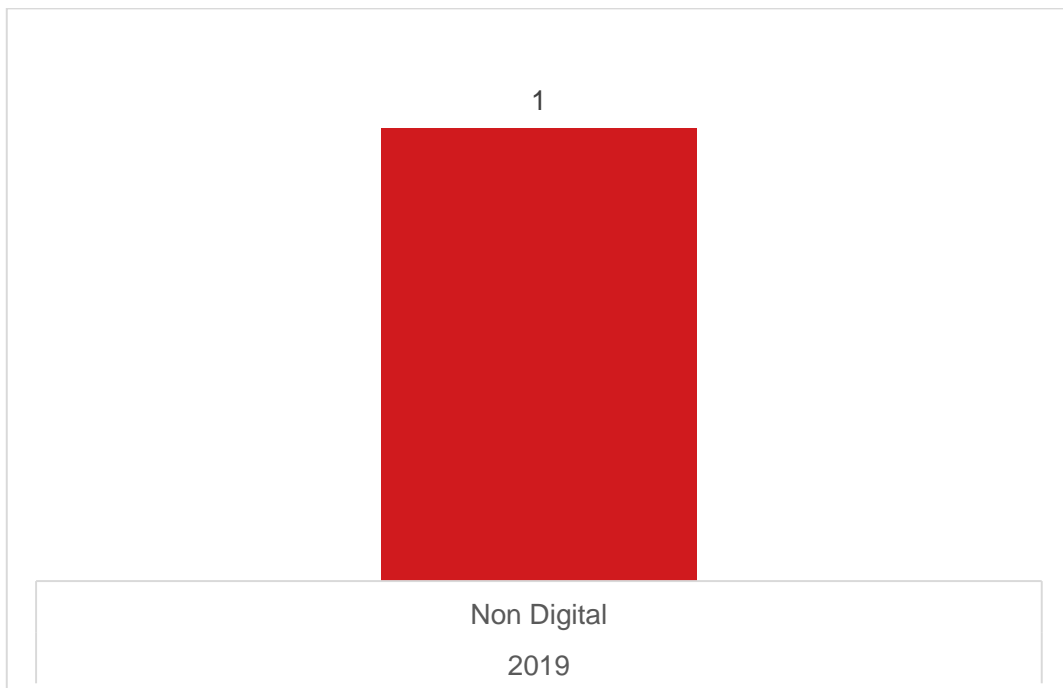
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 17. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Flores Timur

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Flores Timur merupakan inovasi Non Digital.

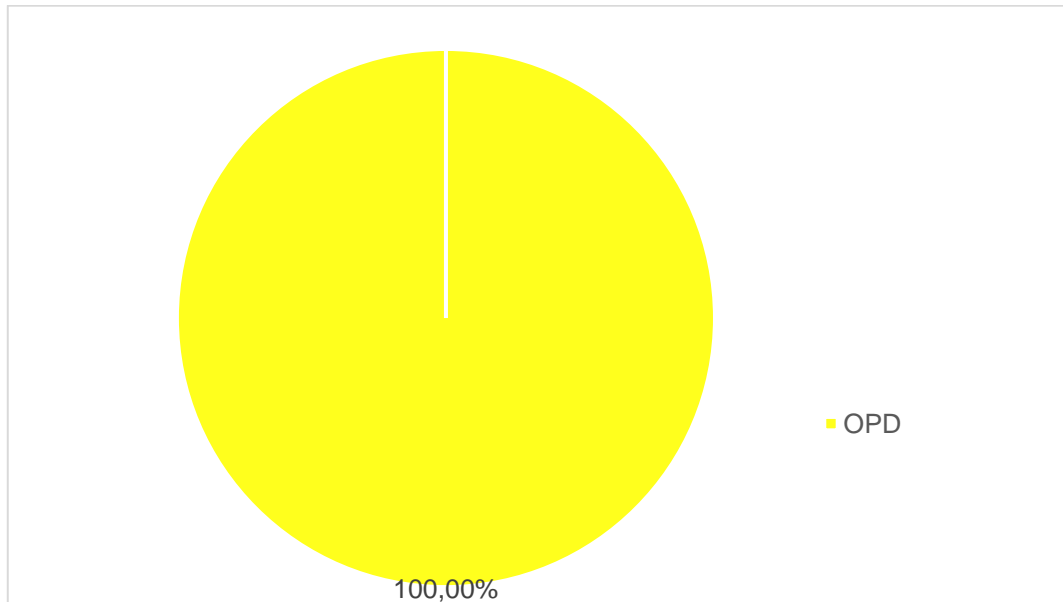
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 18. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan grafik di atas terdapat 1 inovasi jenis Non digital pada tahun 2019 di Kabupaten Flores Timur.

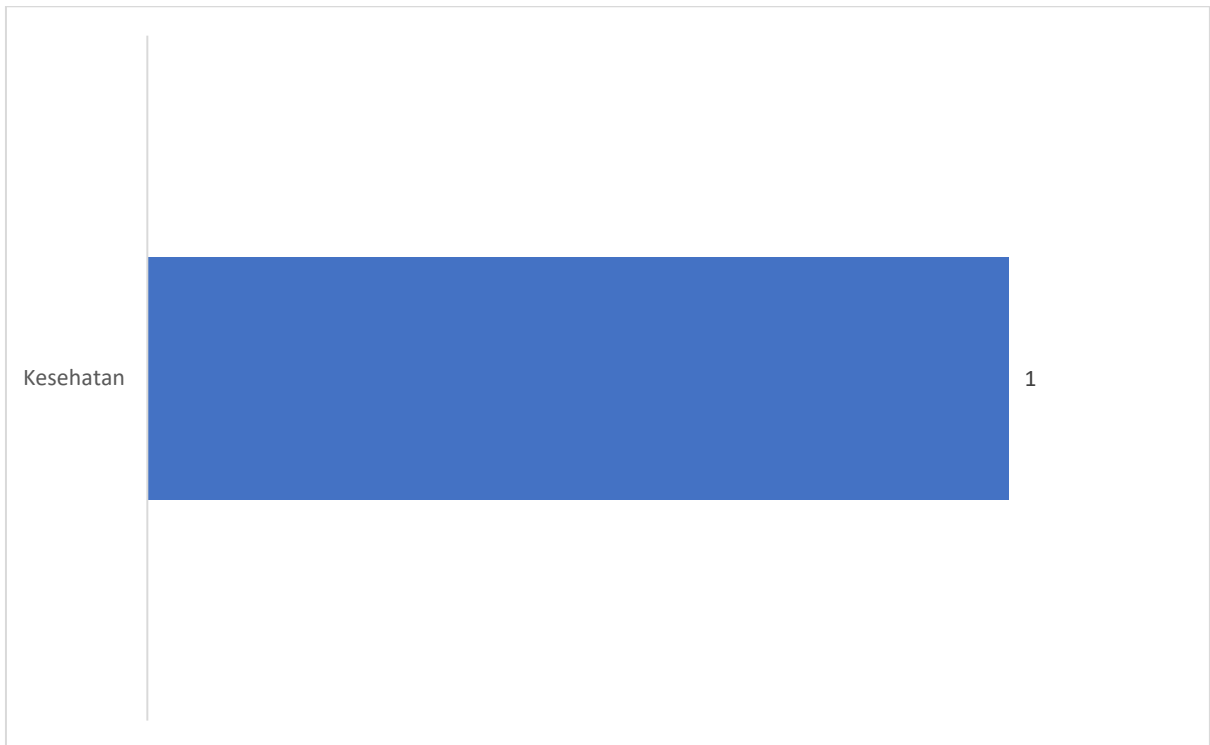
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 19. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Flores Timur

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah.

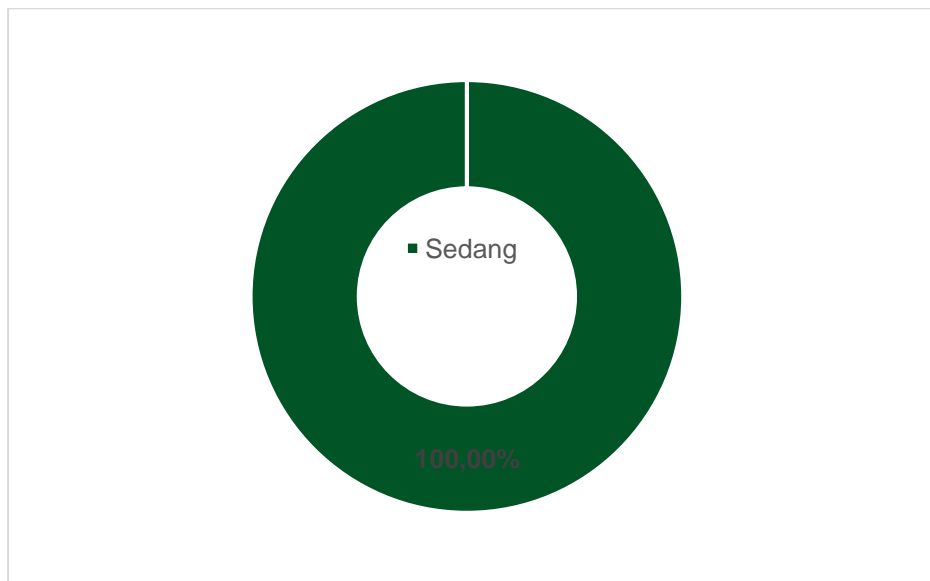
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 20. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Flores Timur

Inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Urusan Pemerintahan pada tahun 2021 merupakan inovasi kesehatan yang masuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib.

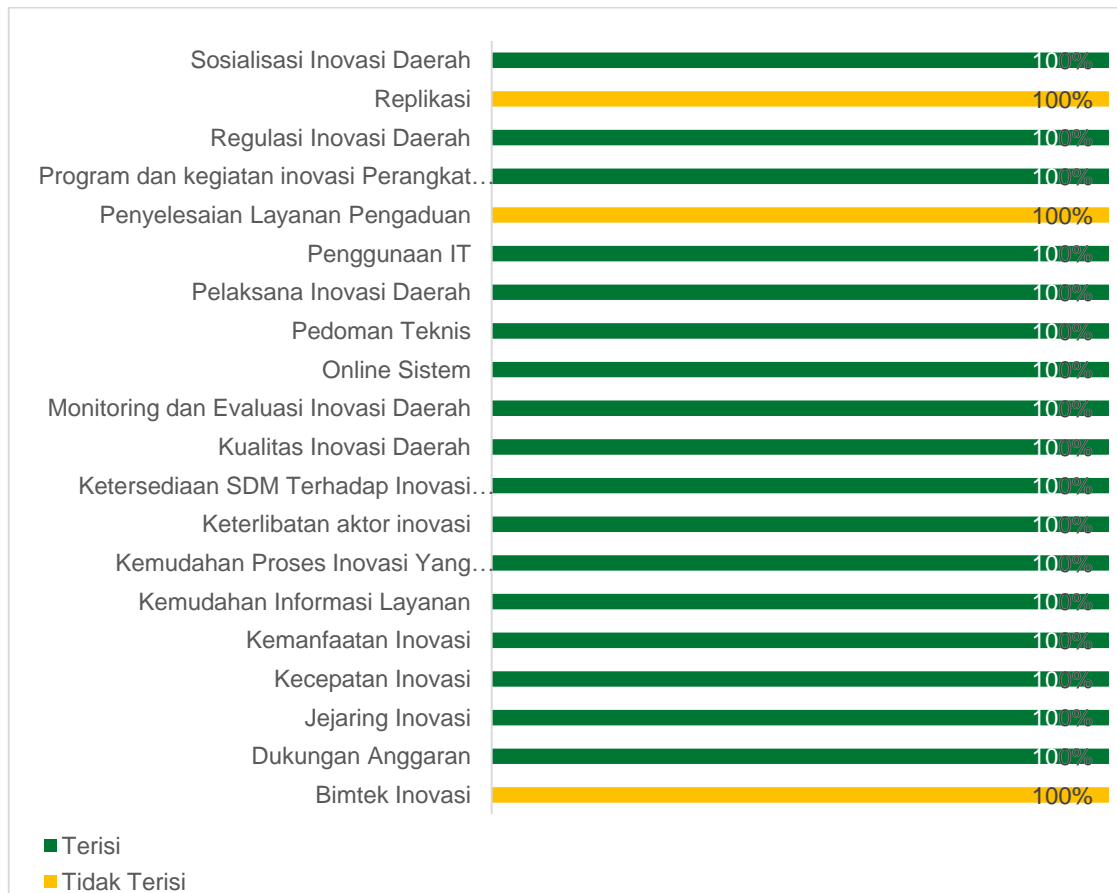
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 21. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Flores Timur

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua masih masuk kategori sedang. Skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

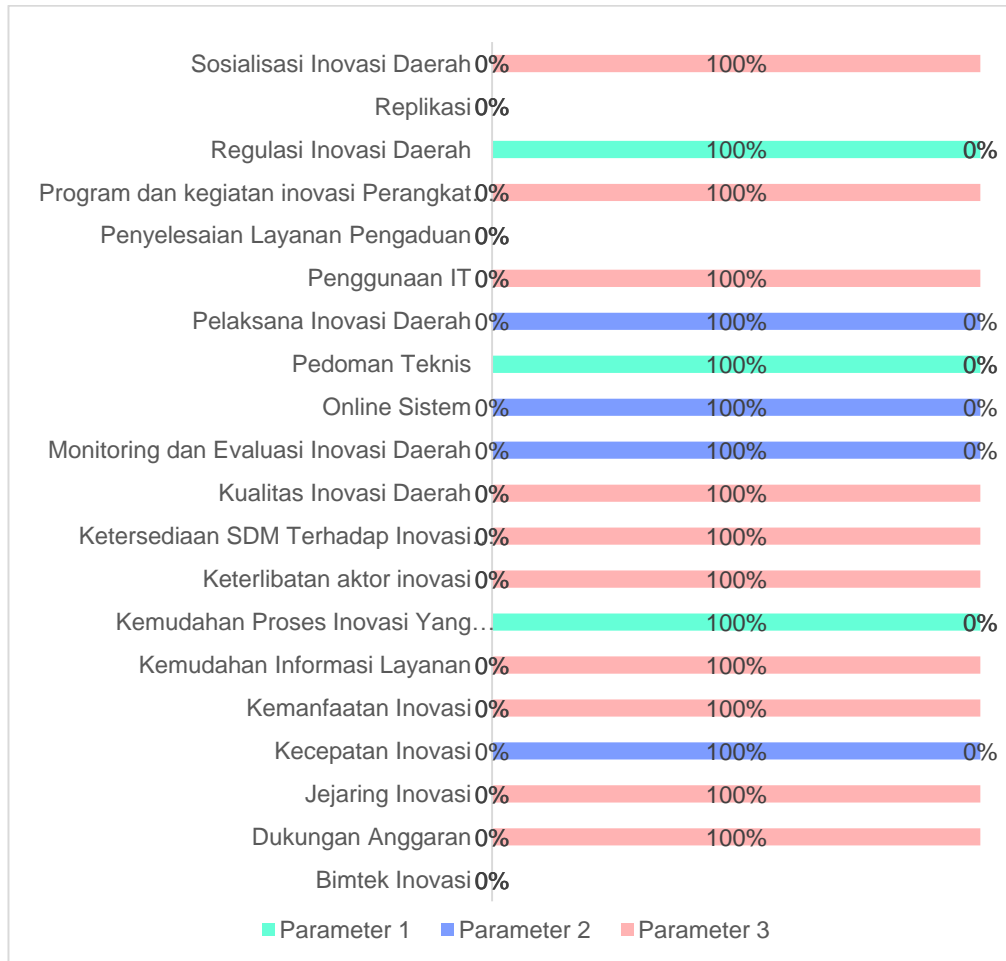


Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur

Satu inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Flores Timur, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 85% sedangkan 15% lainnya tidak terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian tertinggi yaitu 100% adalah pada indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Regulasi Inovasi Daerah, Program dan kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi, Jejaring Inovasi, dan Dukungan Anggaran. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi, Penyelesaian Layanan Pengaduan, dan Bimtek Inovasi yaitu sebesar 0% yang berarti tidak satu pun

inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Flores Timur mengisi data pendukung untuk indikator-indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 23. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sabu Raijua

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi ialah sebesar 100% yakni indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penggunaan IT, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi, Keterlibatan aktor inovasi, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Jejaring Inovasi, dan Dukungan Anggaran. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi sebesar 100%, yakni indikator Pelaksana Inovasi Daerah, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, dan Kecepatan Inovasi. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi

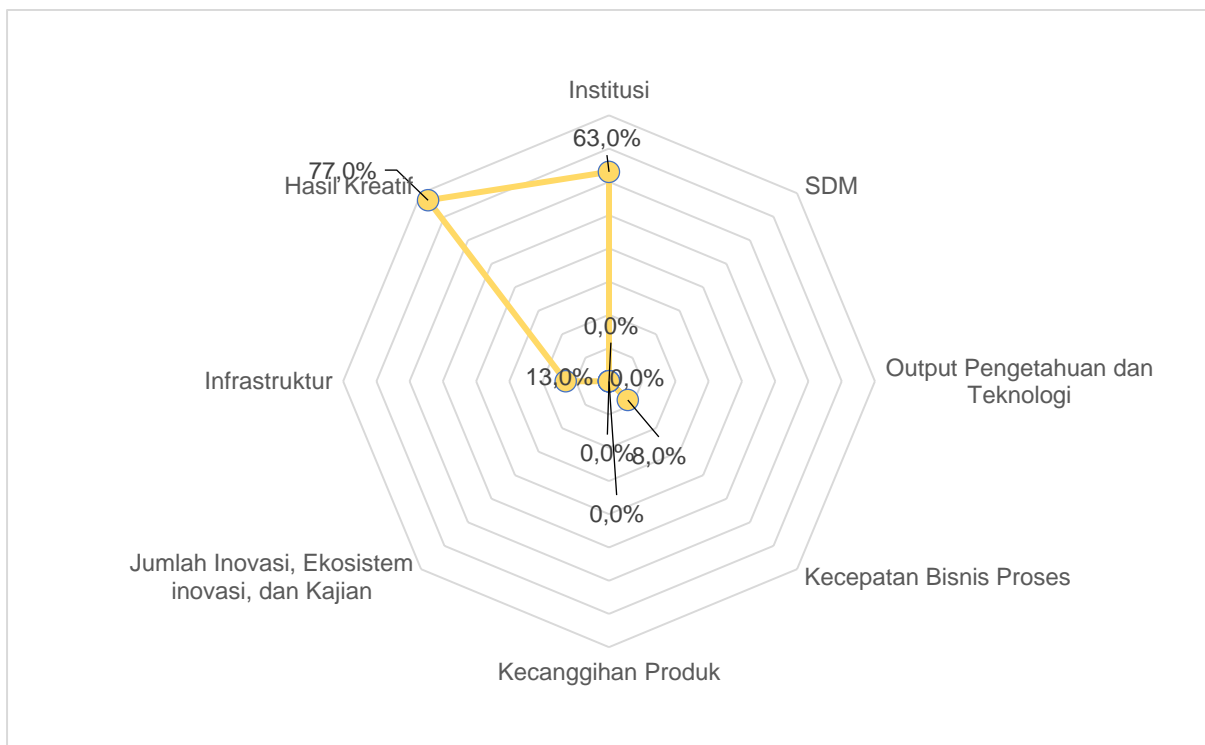
yang mencapai 100% ada pada beberapa indikator yaitu indikator Regulasi Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Sabu Raijua beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Sabu Raijua beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Gerobak Cinta	88

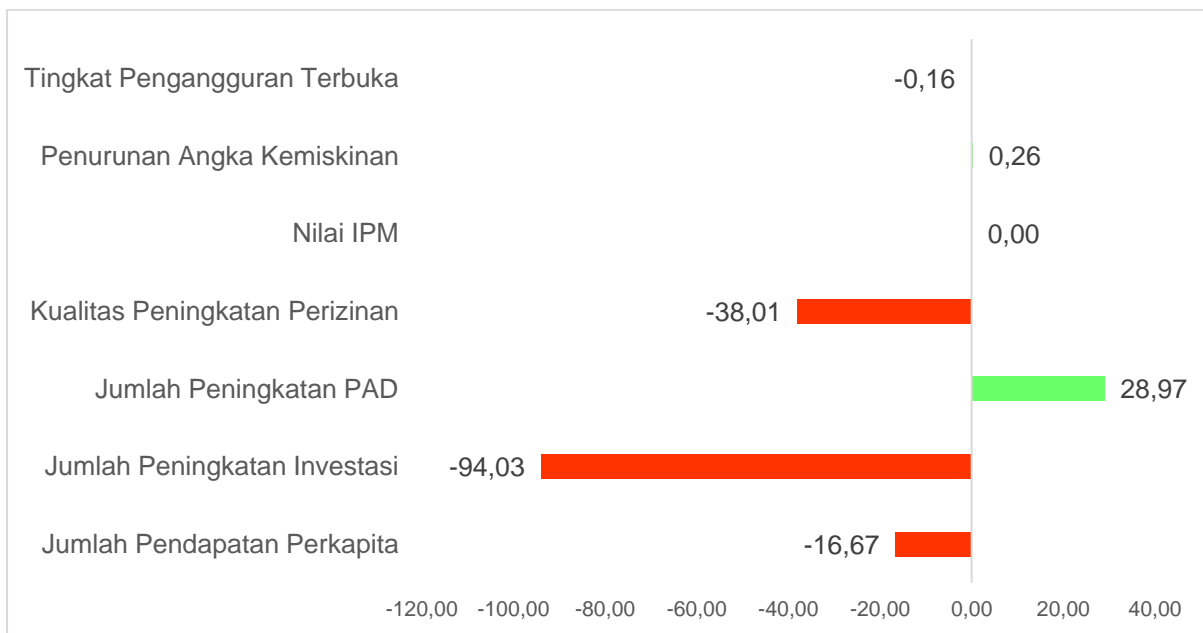
D. KABUPATEN KUPANG



Gambar 24. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kupang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas pada Kabupaten Kupang, variabel Hasil Kreatif adalah variabel yang telah mencapai skor maksimal (parameter 3) dengan capaian tertinggi yaitu dengan skor 77%. Variabel Institusi mencapai skor 63.0%, sedangkan variabel Infrastruktur dan Kecepatan Bisnis Proses masing-masing dengan skor 13.0% dan 8.0%. Sedangkan variabel dengan capaian terendah adalah pada variabel SDM, Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecanggihan Produk, dan Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi dan Kajian yaitu dengan skor 0%.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 25. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kupang

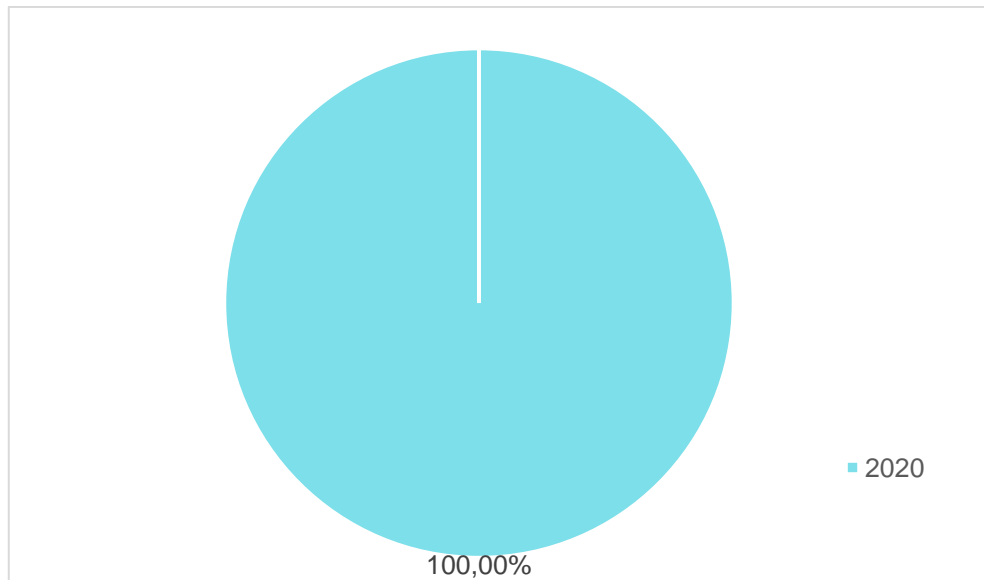
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Kupang mengalami peningkatan jumlah PAD sebesar 28.97% dimana nilai ini melampaui standar peningkatan PAD yang mengharuskan peningkatan minimal sebesar 8%. Di sisi lain, penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0.26% yang telah melampaui standar Penurunan Angka Kemiskinan yaitu sebesar 0.02%.

Selanjutnya, Jumlah Peningkatan Investasi di Kabupaten Kupang mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni sebesar 94.03 dimana nilai ini melampaui batas standar yang mengharuskan mengalami peningkatan minimal sebesar 0.45%. Kualitas Peningkatan Perizinan juga menurun cukup signifikan sebesar 38.01%, sementara standar yang ditetapkan mengharuskan kualitas perizinan mengalami peningkatan minimal sebesar 5%. Jumlah Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Kupang mengalami penurunan sebesar 16.67% yang melampaui batas maksimal penurunan sebesar 1.85%. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.16% yang masih dalam batas standar Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.92%.

Indikator Nilai IPM pada Satuan Pemerintah Daerah belum dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang untuk tahun pengukuran 2021.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

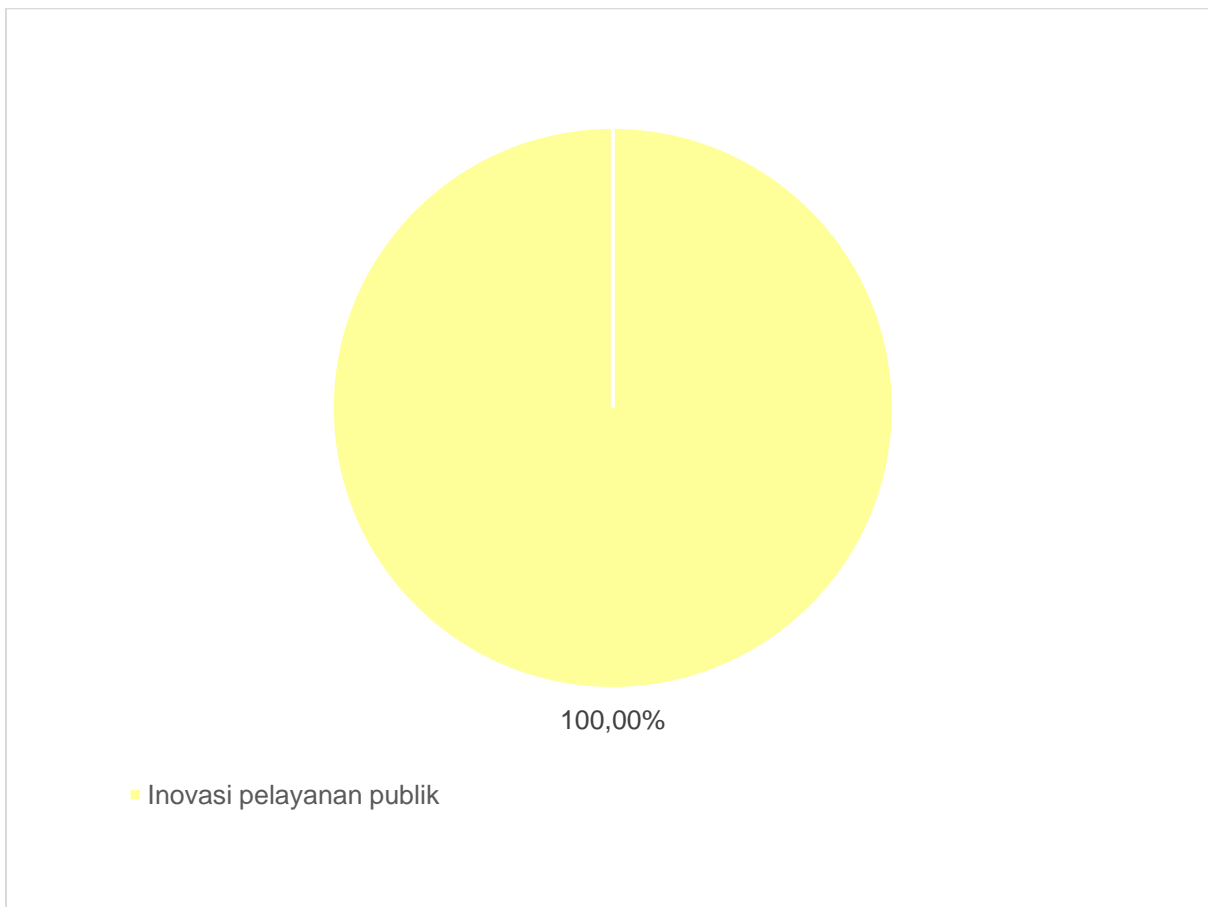
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kupang

Dilihat dari tahun penerapan inovasi mayoritas inovasi yang dilaporkan Kabupaten Kupang baru diterapkan pada tahun 2020, yaitu sebanyak 1 inovasi daerah.

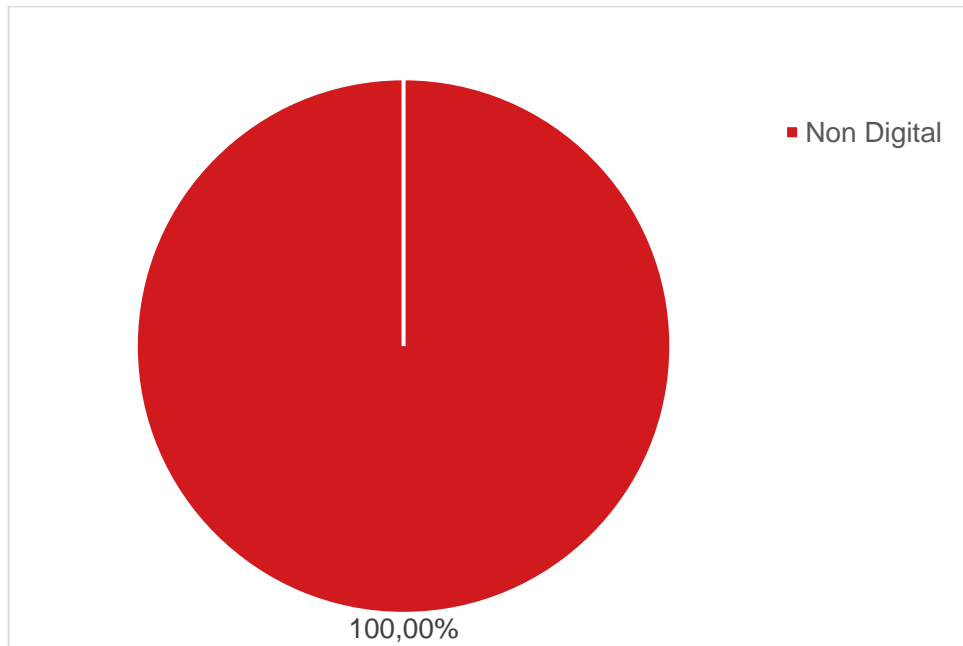
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kupang

Berdasarkan bentuknya, terdapat 1 inovasi bentuk Pelayanan Publik yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Kupang. Inovasi ini merupakan inovasi satu-satunya yang dilaporkan. Belum ada inovasi bentuk tata kelola pemerintahan daerah maupun Inovasi Daerah lainnya Sesuai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaporkan pada tahun penilaian 2021.

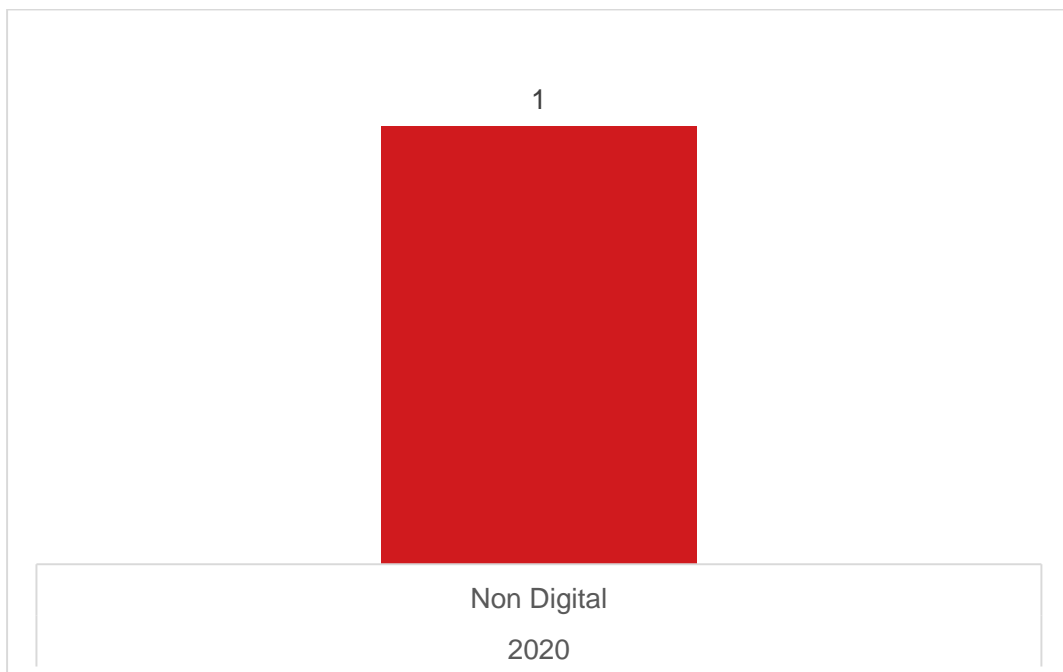
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 28. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kupang

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, satu-satunya inovasi yang dilaporkan berjenis Non Digital.

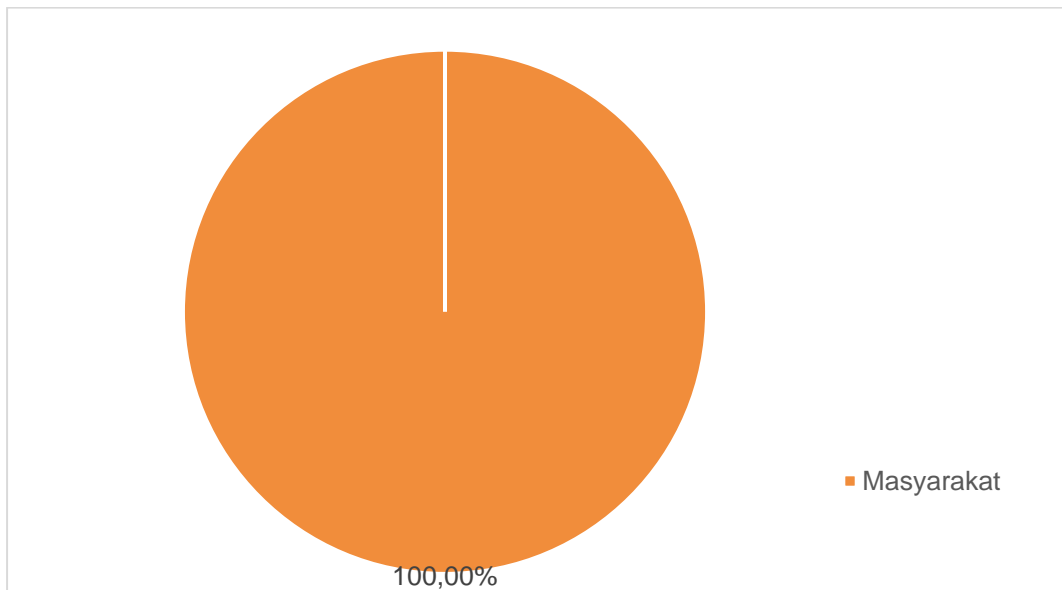
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 29. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kupang

Inovasi Non Digital sebanyak 1 inovasi pada tahun 2020 menurut laporan pemerintah Kabupaten Kupang, merupakan inovasi pertama yang dilakukan. Pada tahun 2019 belum terdapat inovasi serupa maupun inovasi jenis lain. Dikarenakan inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Lembata untuk tahun 2021 hanya diterapkan mulai tahun 2020, sehingga tidak bisa terlihat progres jumlah inovasi per tahunnya.

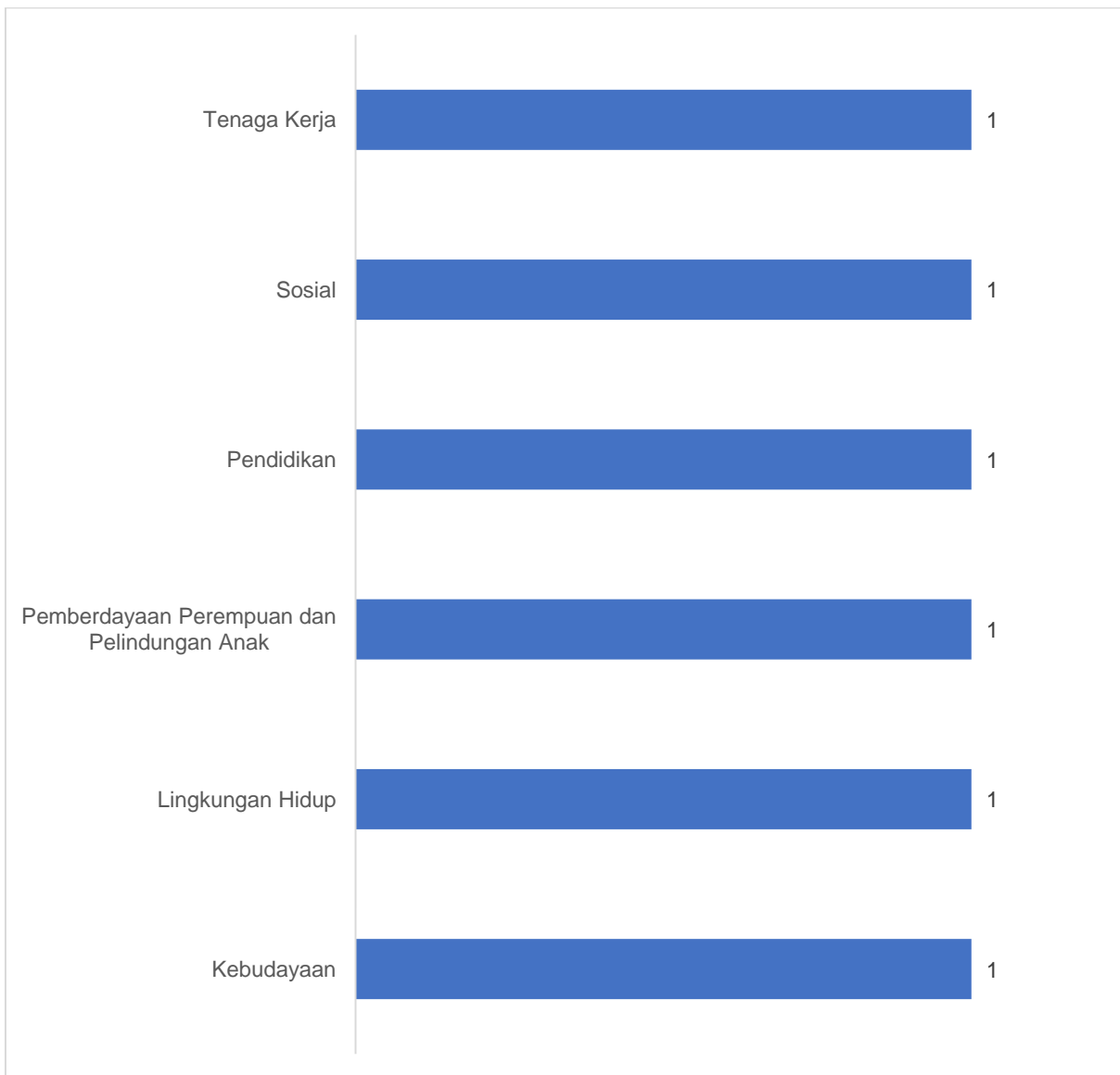
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 30. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kupang

Satu-satunya inovasi yang dilaporkan pada tahun 2021 diinisiasi sepenuhnya oleh Masyarakat. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Daerah, ASN maupun DPRD belum melaporkan menginisiasi inovasi di Kabupaten Kupang untuk laporan tahun 2021.

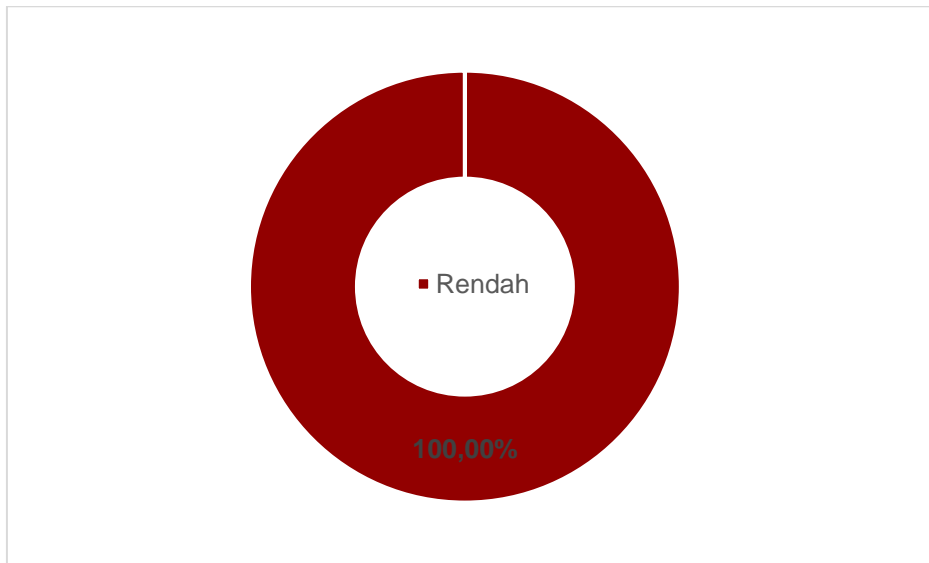
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 31. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kupang

Inovasi di Kabupaten Kupang sebanyak 1 inovasi daerah telah mencakup seluruh Urusan Pemerintahan Wajib yang terdiri dari Tenaga Kerja, Sosial, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Lingkungan Hidup, dan Kebudayaan.

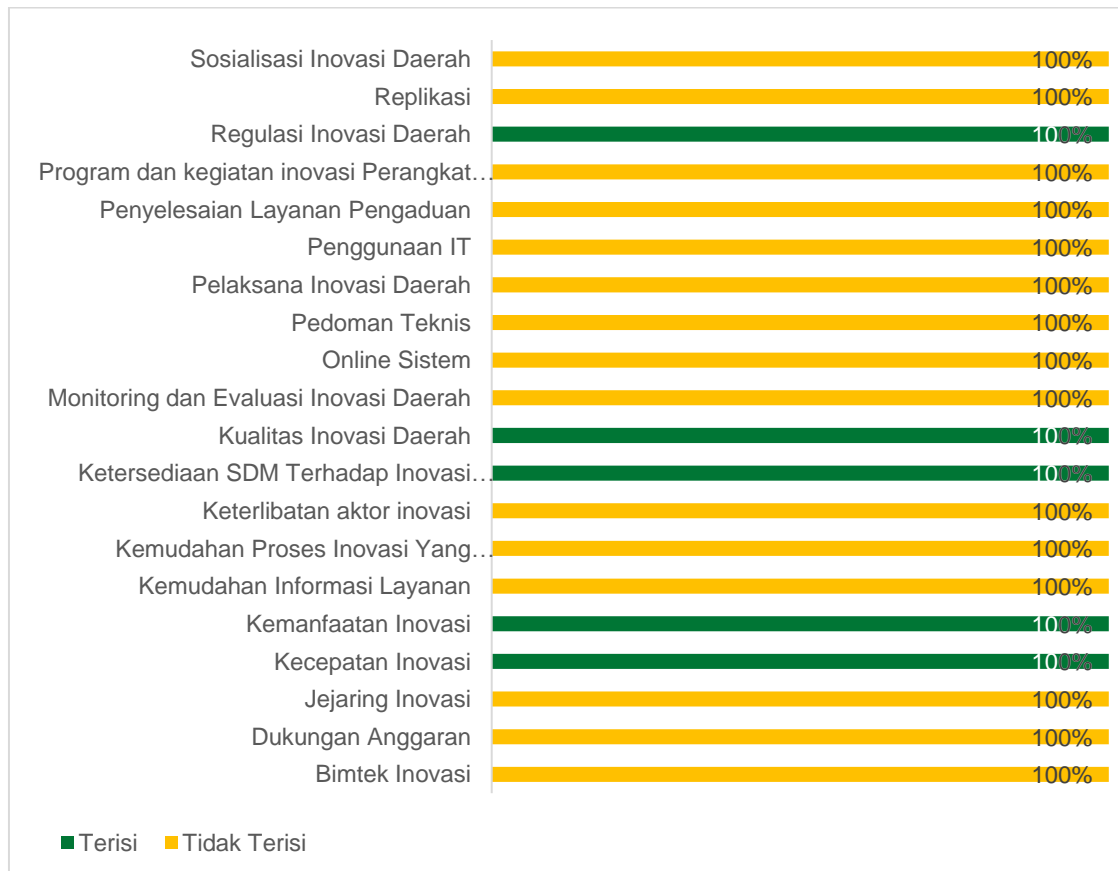
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 32. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kupang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Kupang, skor kematangan inovasinya masih berkategori rendah yaitu sebanyak 1 inovasi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan di bawah 50.

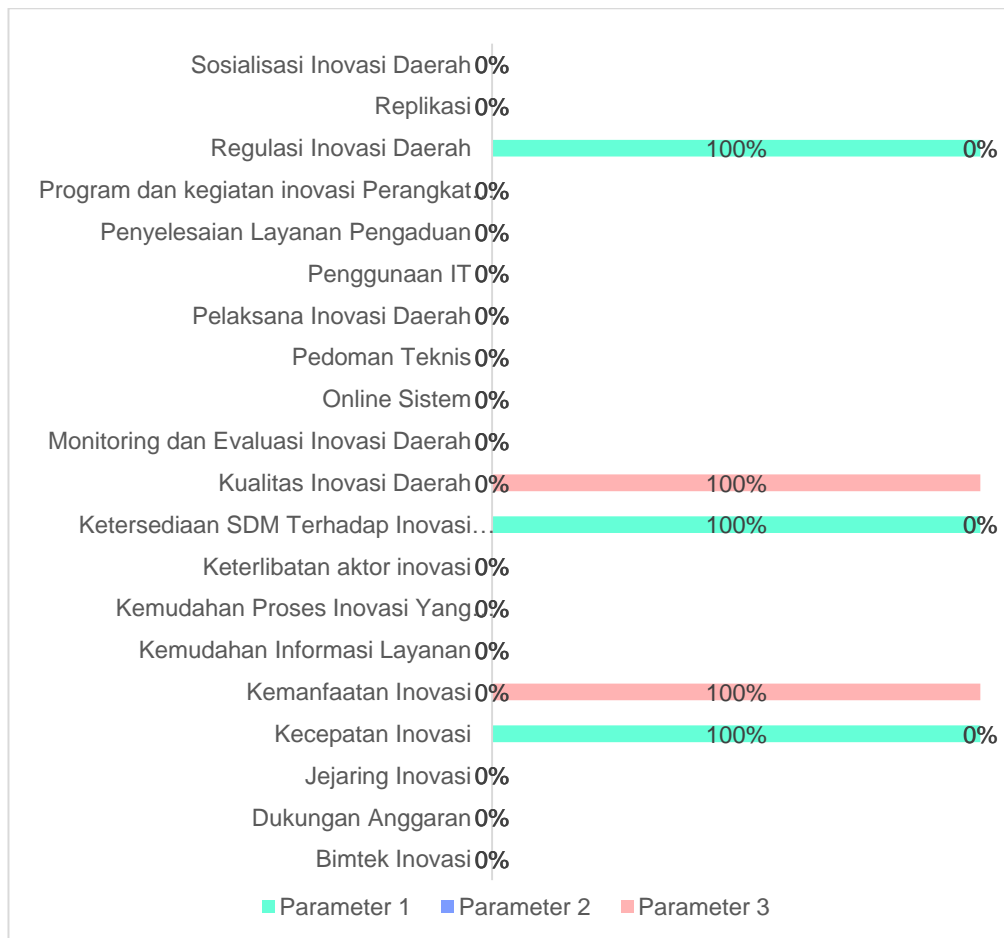
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kupang

Inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Kupang, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 25.00% sedangkan 75.00% lainnya tidak terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian tertinggi sebesar 100% adalah pada indikator Regulasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi, dan Kecepatan Inovasi. Sementara indikator lain memiliki tingkat keterisian 0% atau tidak diisi sama sekali.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 34. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Kupang

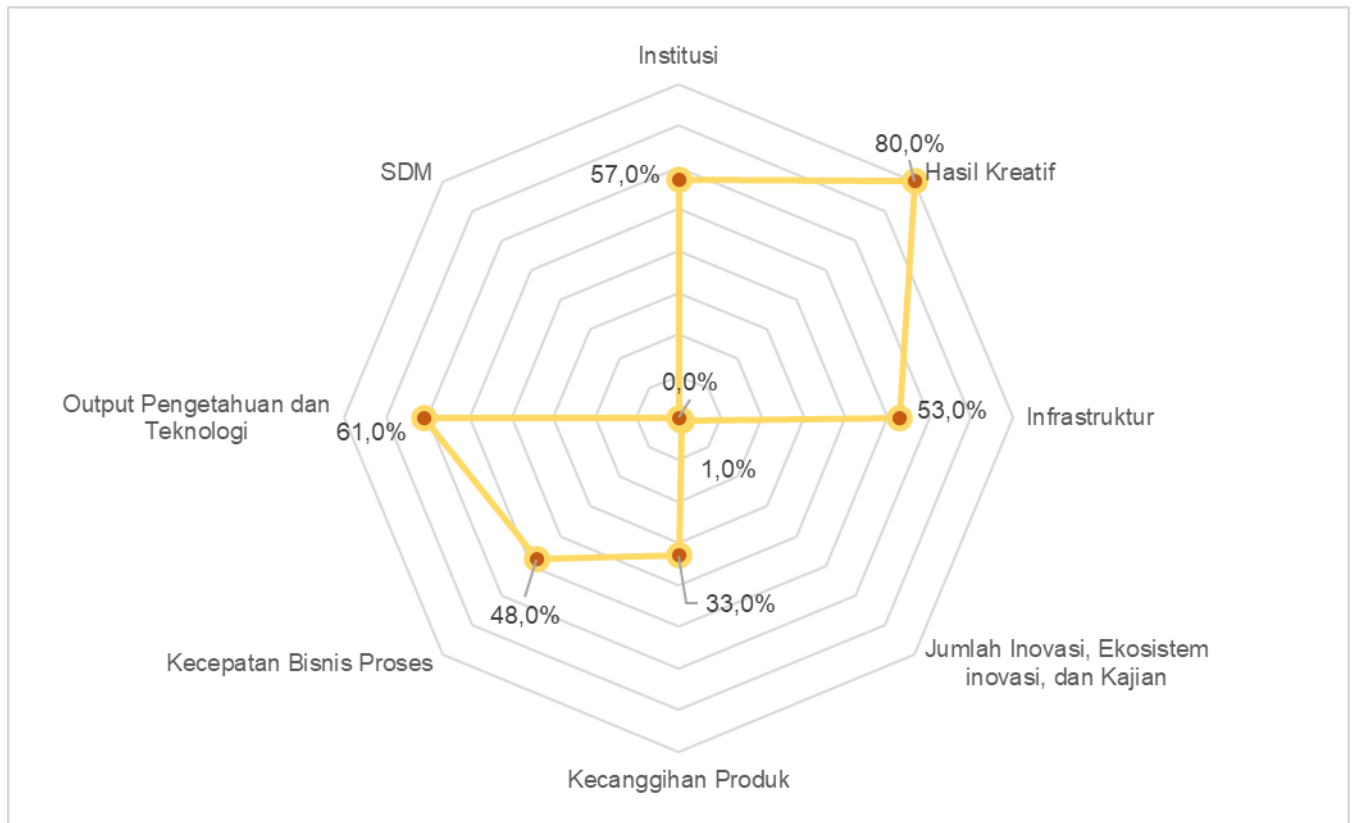
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah dan Kemanfaatan Inovasi yaitu sebesar 100%, artinya inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Kupang telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter ketiga untuk indikator Kualitas Inovasi Daerah dan Kemanfaatan Inovasi. Kemudian, berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa tidak ada indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua). Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah dan Kecepatan Inovasi sebesar 100%, artinya inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Kupang telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah dan Kecepatan Inovasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Kupang beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Kupang beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Sekolah Alam Manusak	39

E. KABUPATEN LEMBATA

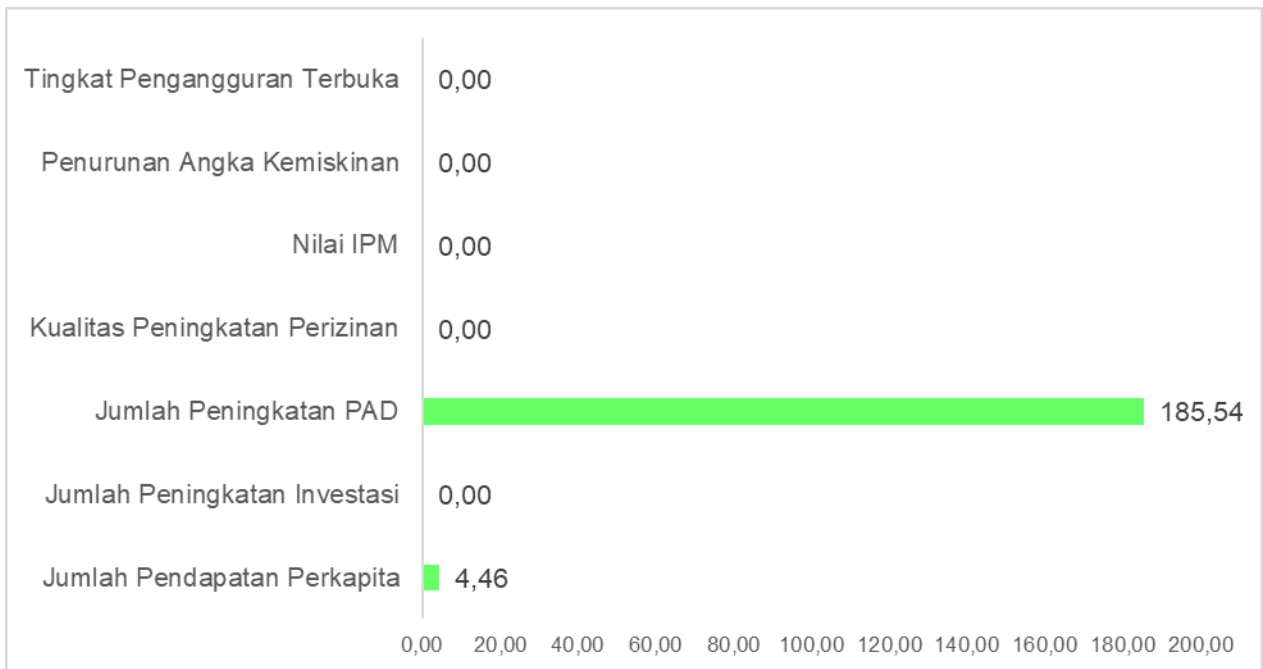


Gambar 35. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lembata

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Lembata dengan skor tertinggi sebesar 80.00% adalah variabel Hasil Kreatif. Sementara itu, variabel dengan skor terendah adalah SDM dan Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian, yakni masing-masing sebesar 0.00% dan 1.00%.

Variabel lainnya seperti SDM, Output Pengetahuan dan Teknologi, dan Infrastruktur yang dilaporkan untuk tahun pengukuran 2021 mendapat skor di atas 50%. Sementara variabel dengan skor di bawah 50% ialah Kecanggihan Produk dan Kecepatan Bisnis Proses.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

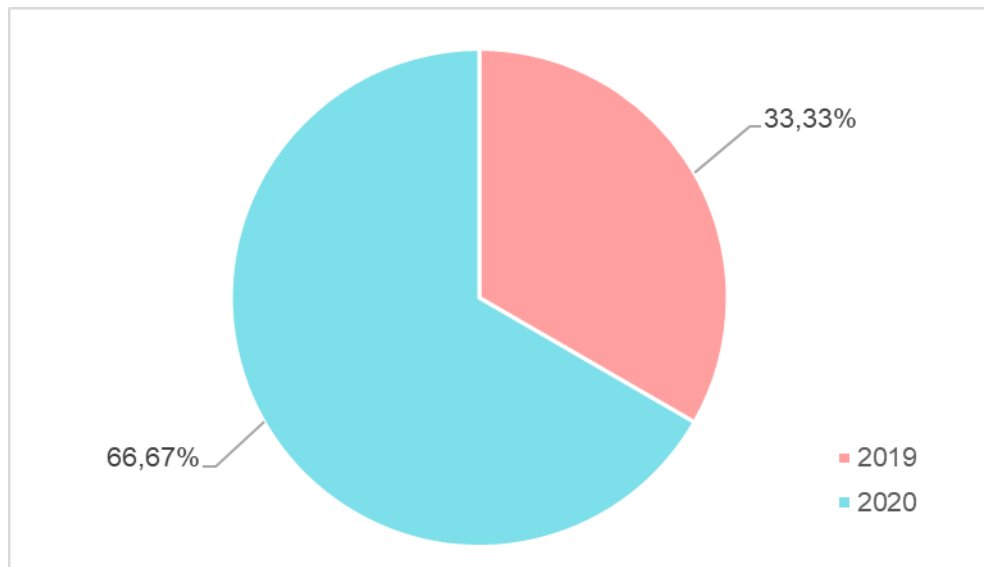


Gambar 36. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lembata

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa indikator-indikator pada aspek Satuan Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Lembata hanya Jumlah Peningkatan PAD sebesar 185.54% dan Jumlah Pendapatan Perkapita sebesar 4.46%. Presentase peningkatan untuk kedua indikator tersebut masih dalam batas wajar karena standar nilai indikator Jumlah Peningkatan PAD dan Jumlah Pendapatan Perkapita masing-masing sebesar 8% dan -1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

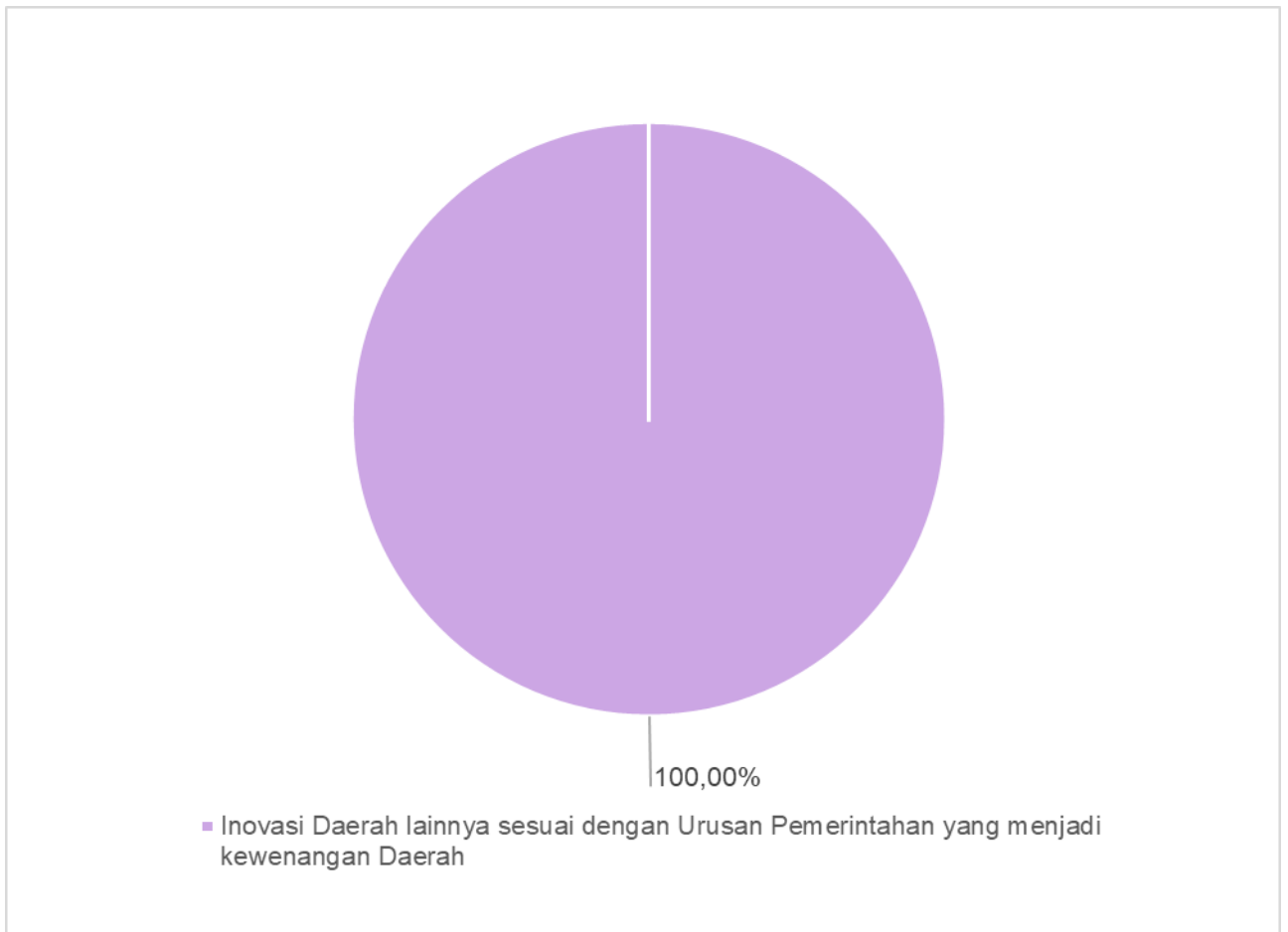
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Lembata

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebanyak 1 inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Lembata diterapkan pada tahun 2019, sedangkan 2 inovasi daerah diterapkan pada tahun 2020.

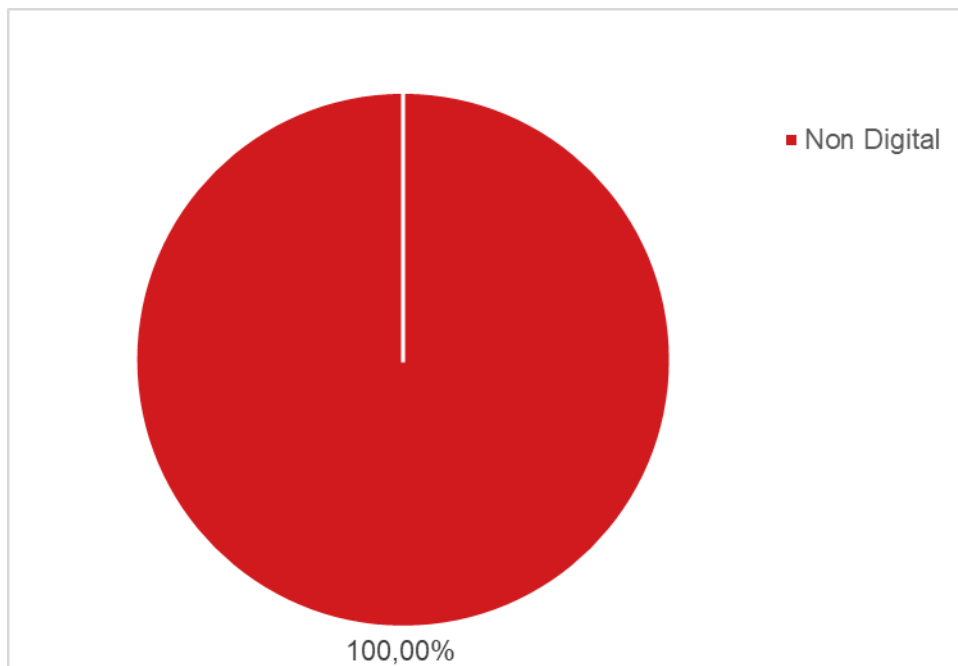
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Lembata

Berdasarkan bentuknya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Lembata, yakni sejumlah 3 (100%) inovasi, berbentuk Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

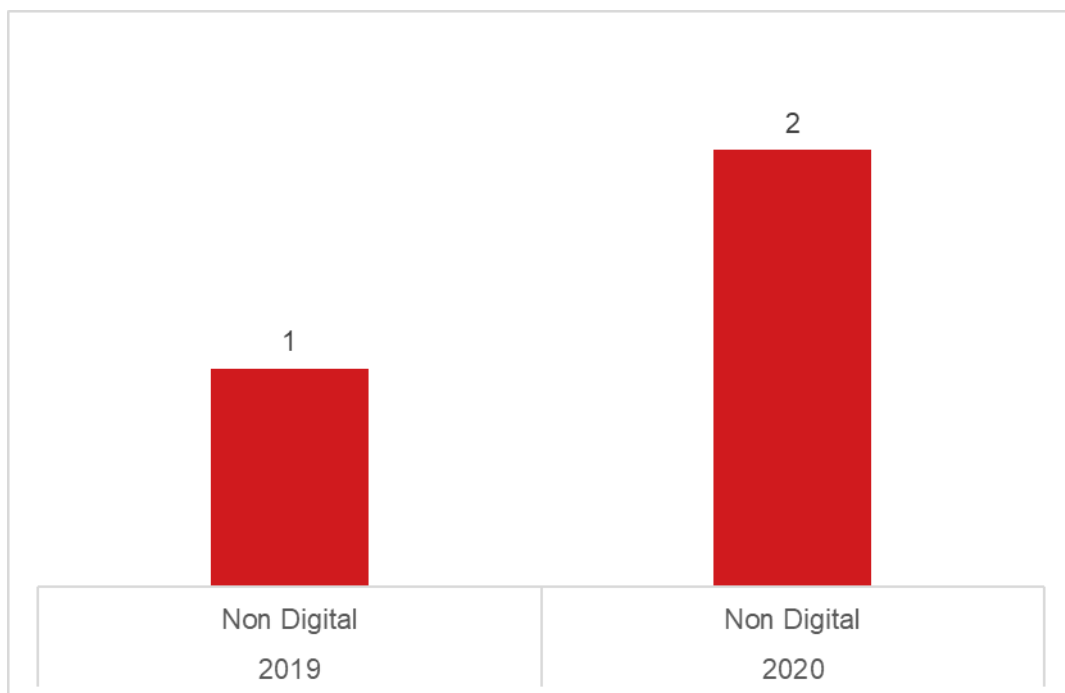
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 39. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Lembata

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, seluruh inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Lembata berjenis Non Digital, yaitu sebanyak 3 (100%) inovasi.

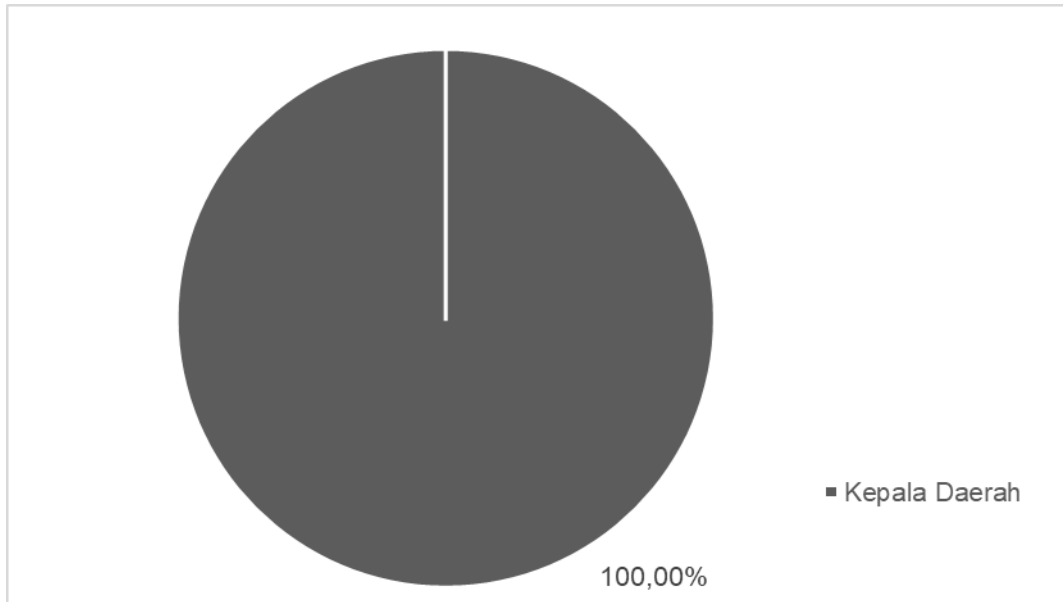
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 40. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Kabupaten Lembata

Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Lembata yang diterapkan pada tahun 2019 berbentuk Non Digital sejumlah 1 inovasi. Angka ini meningkat menjadi sejumlah 2 inovasi daerah berjenis Non Digital yang diterapkan pada tahun 2020.

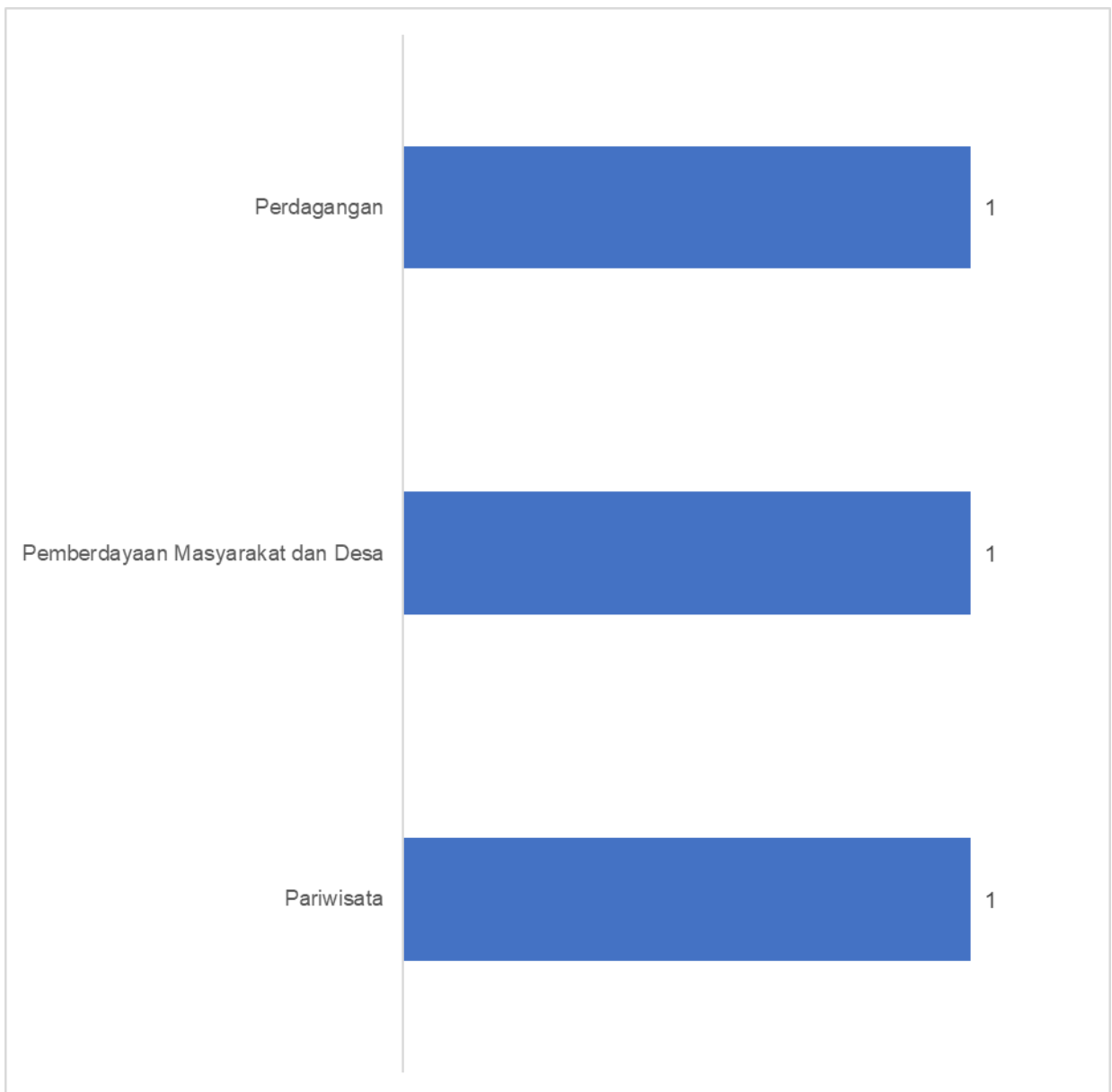
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 41. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Lembata

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Lembata pada tahun 2021 diinisiasi sepenuhnya oleh Kepala Daerah, yaitu sejumlah 3 (100%) inovasi. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Kepala Daerah dan DPRD belum melaporkan menginisiasi inovasi di Kabupaten Lembata untuk laporan tahun 2021.

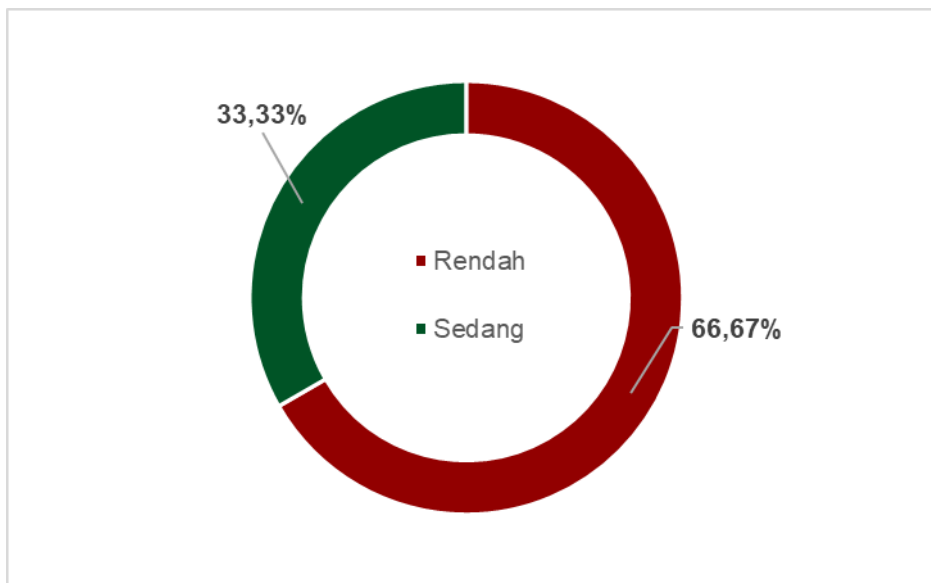
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 42. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Lembata

Inovasi daerah pada Kabupaten Lembata dari 3 inovasi yang dilaporkan terdiri dari 21inovasi urusan Perdagangan, 1 urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 1 urusan Pariwisata. Tidak ada satu pun inovasi yang berkaitan dengan Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

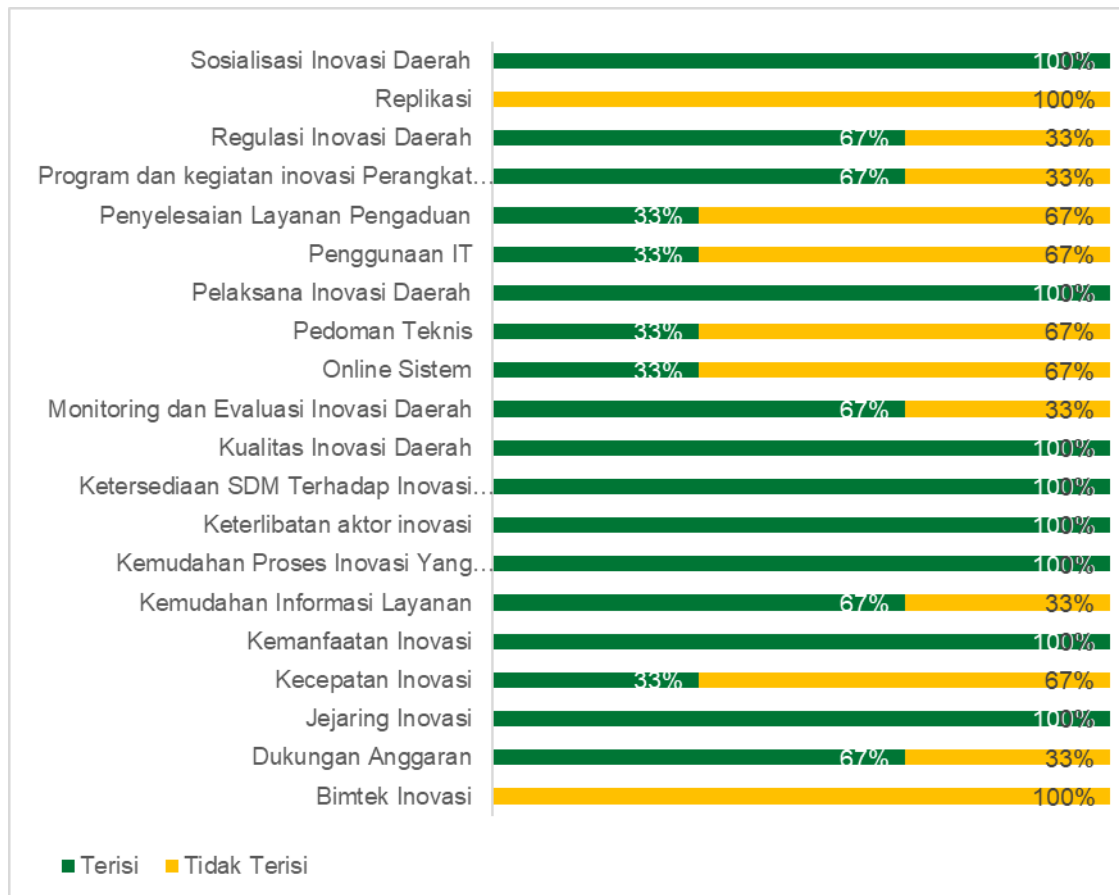
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 43. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Lembata

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, belum ada inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Lembata yang memiliki skor tinggi. Semua inovasi yang dilaporkan masih masuk katagori skor kematangan rendah (33.33%) dan sedang (66.67%). Skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan di bawah 50, sedangkan skor rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan diantara 50 dan 100.

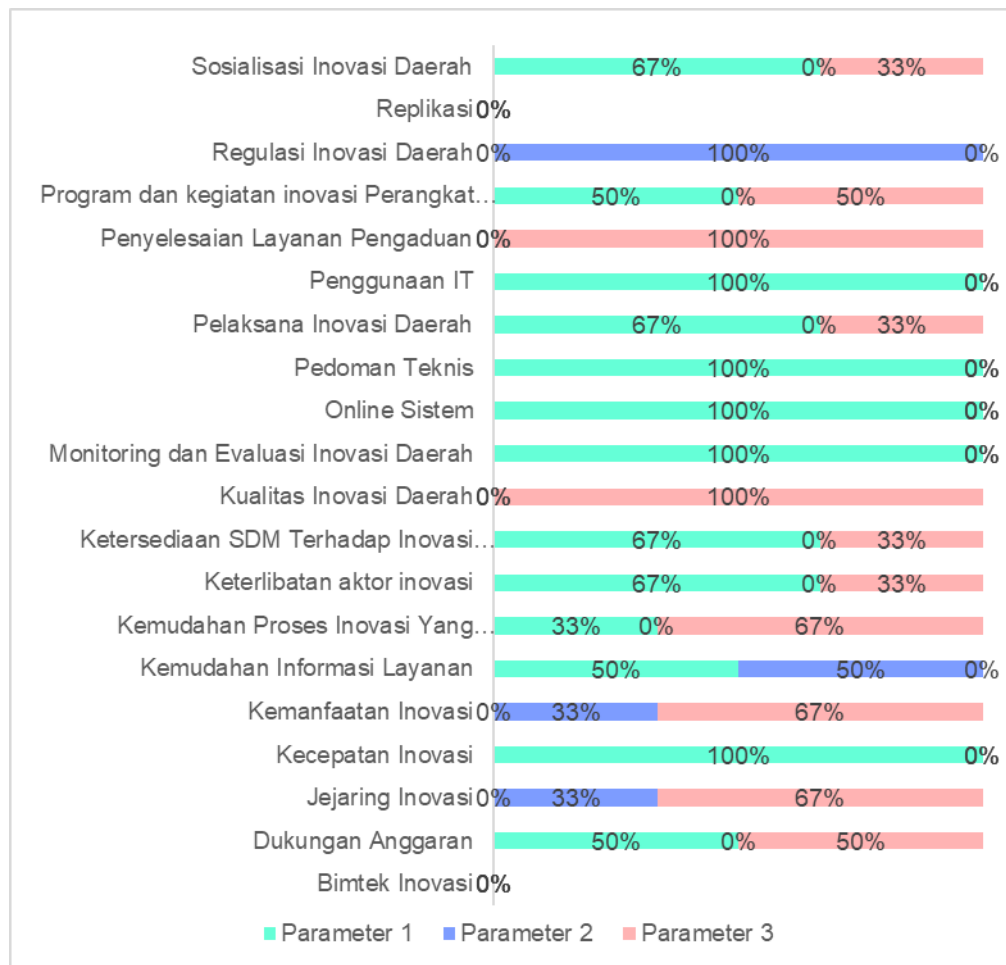
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lembata

Inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Lembata, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 65.00% sedangkan 35.00% lainnya tidak terisi data pendukung. Dari 3 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lembata, indikator dengan keterisian tertinggi ialah Sosialisasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan aktor inovasi, Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan, Kemanfaatan Inovasi, dan Jejaring Inovasi, yakni sebesar 100%. Sementara itu, indikator dengan tingkat keterisian terendah ialah Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Pedoman Teknis, Online Sistem, dan Kecepatan Inovasi, yakni masing-masing sebesar 33%.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 45. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Lembata

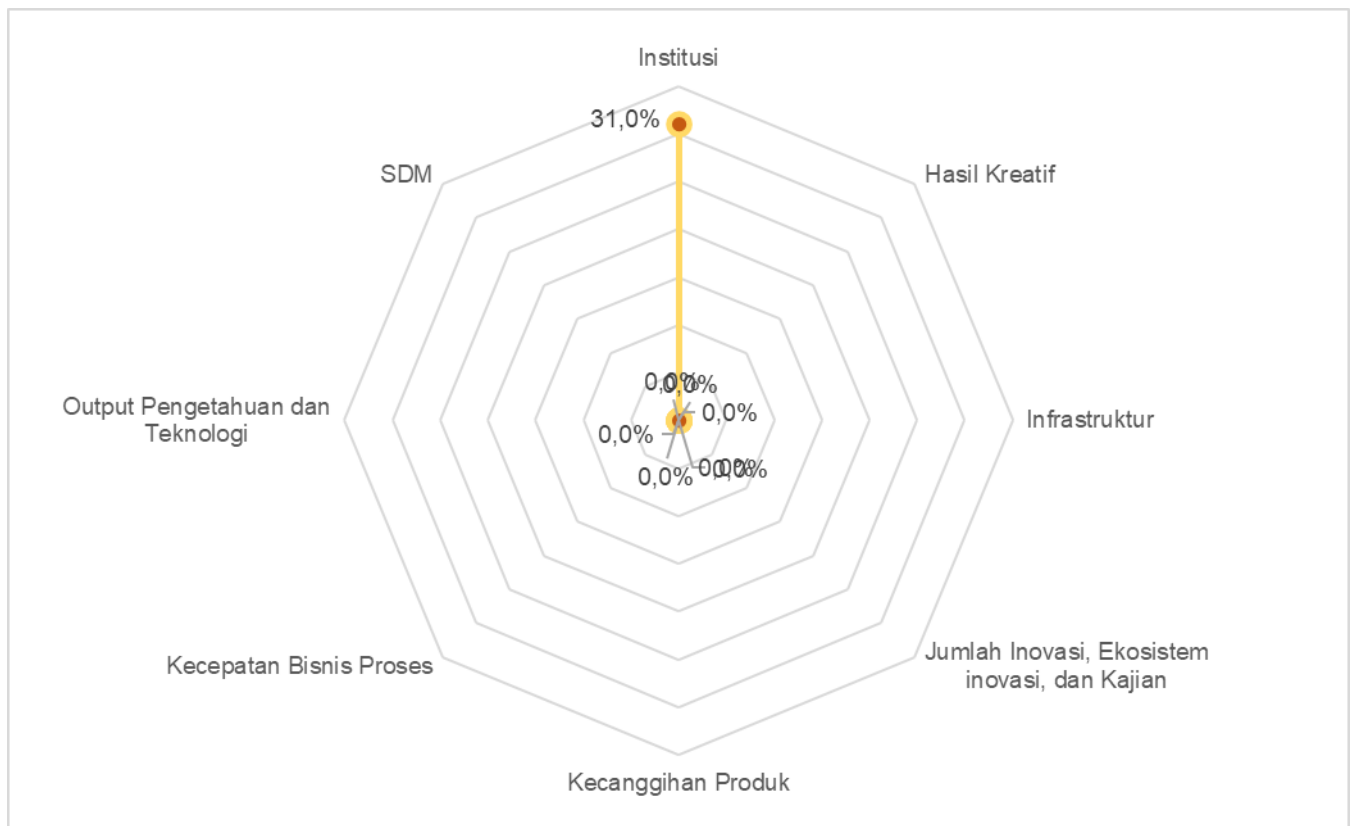
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Pelayanan Pengaduan dan Kualitas Inovasi daerah yaitu sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah yakni sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Penggunaan IT, Pedoman Teknis, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, dan Kecepatan Inovasi, yakni sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter 1 (satu).

j. Daftar Inovasi Kabupaten Lembata beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Lembata beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Pasar Barter Wulandoni Kabupaten Lembata Menuju New Normal Life	15
Pantai Wisata Lewolein Kabupaten Lembata Menuju Fase New Normal Life	27
Desa Tersenyum 2.0	61

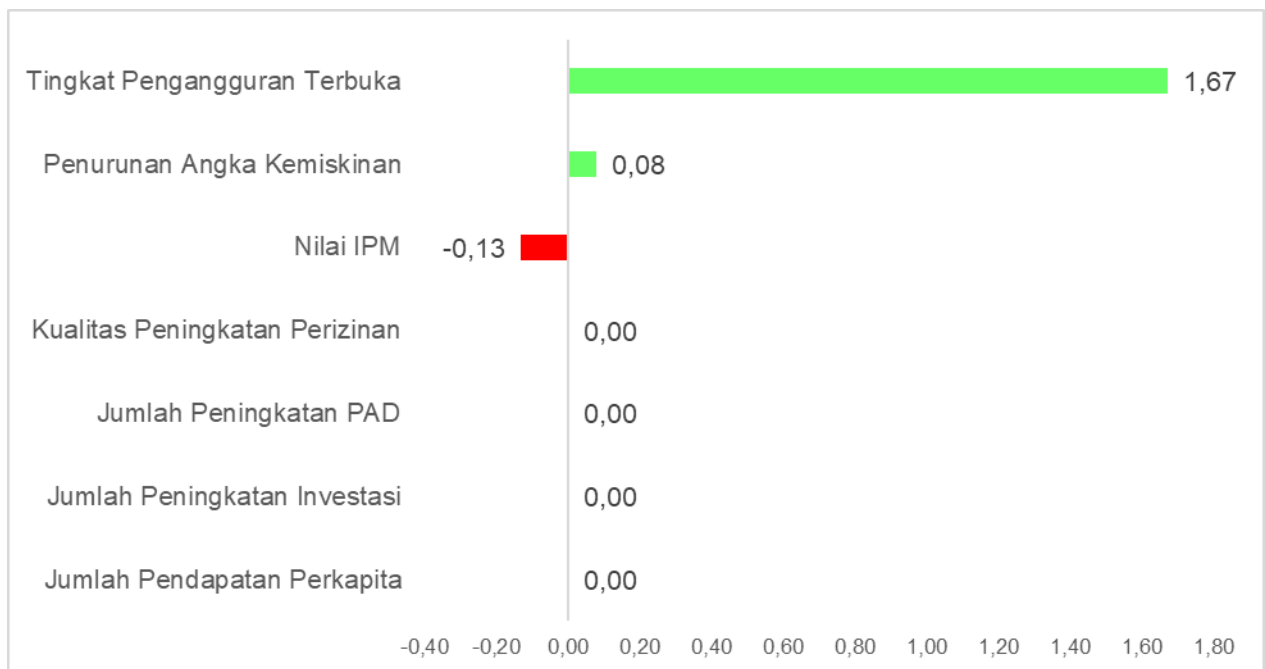
F. KABUPATEN MALAKA



Gambar 46. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Malaka

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Malaka mencapai skor maksimal (parameter 3) tertinggi pada variabel Institusi yaitu sebesar 31.0%. Sedangkan variabel lainnya memiliki skor 0.0% yang berarti capaian skor indikator-indikator di variabel tersebut masih rendah.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



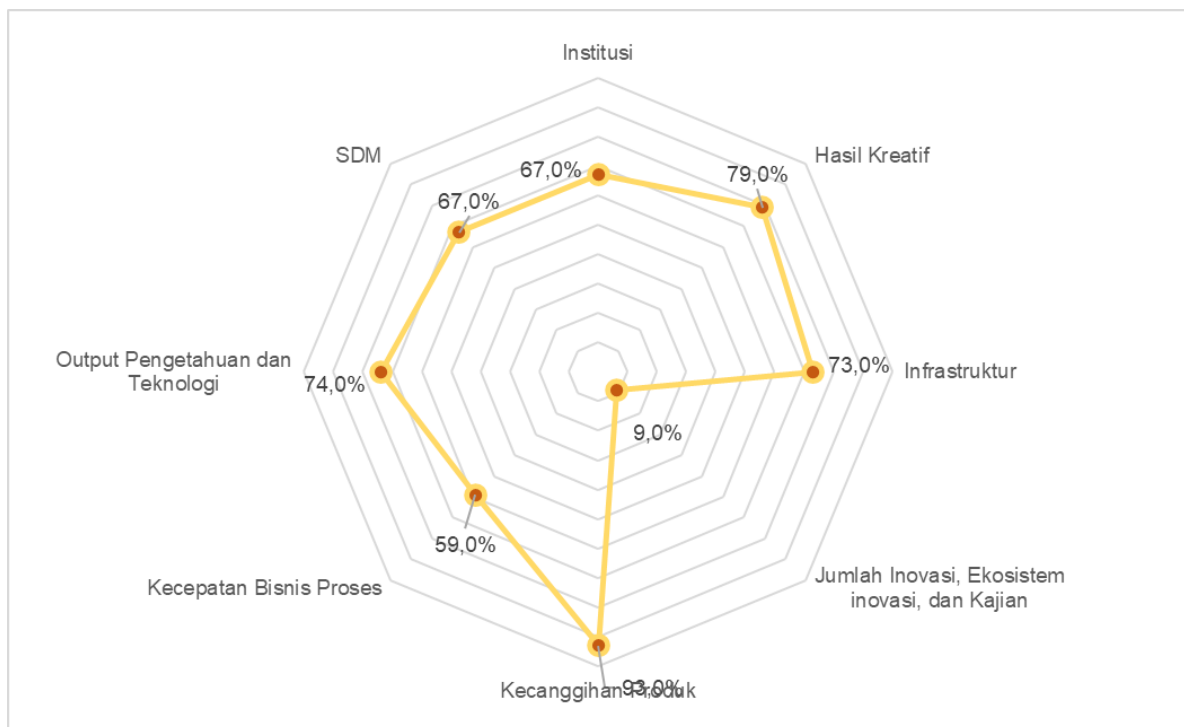
Gambar 47. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Malaka

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Dari grafik di atas terlihat sebagian besar indikator pada aspek Satuan Pemerintahan Daerah mengalami penurunan.

Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka terdapat peningkatan sebesar 1.67%, nilai ini di atas standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yaitu penurunan sebesar minimal 0.92%. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malaka mengalami peningkatan dalam upaya Penurunan Angka Kemiskinan, yaitu sebesar 0.08%, sedikit di atas standar nasional parameter IID yaitu naik 0.02%. Nilai IPM turun 0.13% di bawah standar nasional parameter IID yaitu sebesar 0% atau tetap.

Berdasarkan Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Malaka hanya mengisi Aspek Satuan Pemerintah Daerah saja dan tidak ada inovasi yang dilaporkan pada Aspek Satuan Inovasi Daerah

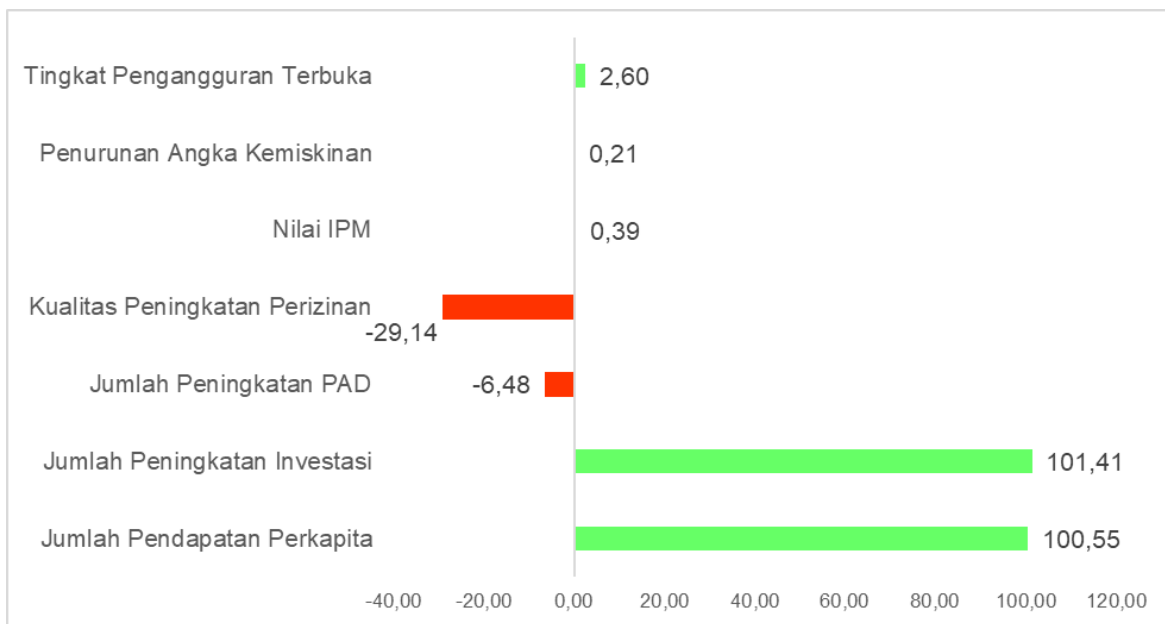
G. KABUPATEN MANGGARAI



Gambar 48. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Manggarai

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Manggarai memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk, yaitu 93.0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel Kecanggihan Produk sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masuk kategori rendah, yaitu 9% dimana secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut belum maksimal atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 49. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manggarai

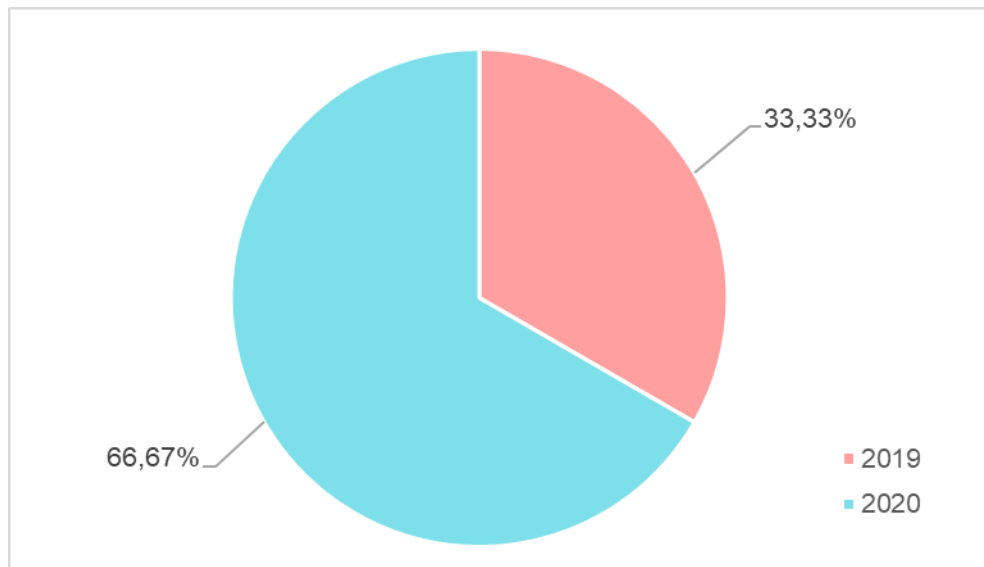
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manggarai mengalami perkembangan pada beberapa indikatornya. Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan sebesar 2.60%. Angka ini masih di atas standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yaitu penurunan maksimal 1.85%. Selanjutnya, pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, terlihat ada peningkatan sebesar 0.21% berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Manggarai. Angka ini berada di atas standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yaitu peningkatan minimal 0.02%.

Nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 0.39%. Namun pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan terjadi penurunan sangat signifikan yaitu sebesar 29.14% jauh di bawah standar nasional parameter IID yang seharusnya naik 5%. Pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, terdapat penurunan sebesar 6.48% namun nilai ini masih di bawah standar nasional IID yaitu dengan kenaikan sebesar 8%. Selanjutnya, pada indikator Jumlah Peningkatan Investasi terdapat peningkatan sebesar 101.41, nilai tersebut di atas standar nasional parameter IID yang mengharuskan naik sebesar 0.45%. Terakhir, pada indikator Jumlah

Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Manggarai menunjukkan kenaikan sebesar 100.55%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

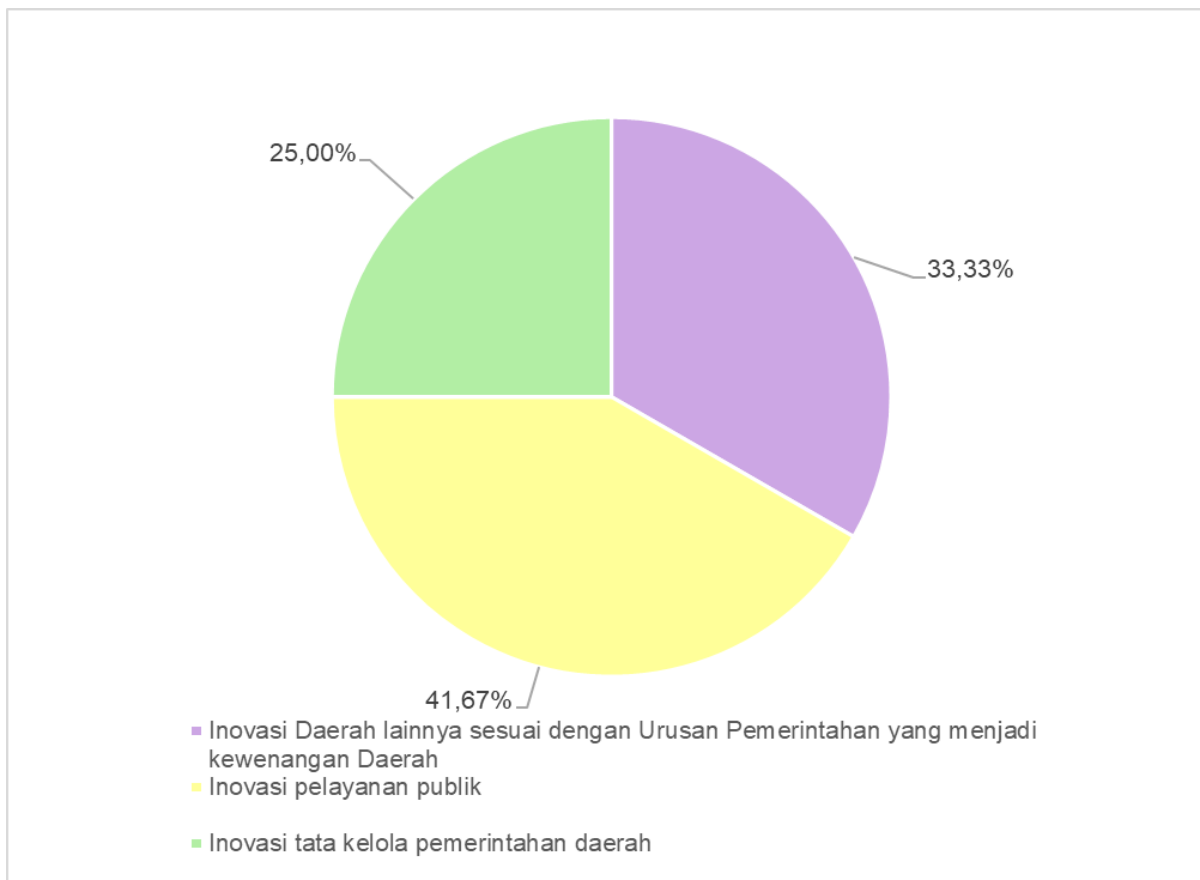
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 50. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Manggarai

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, 33.33% inovasi atau sejumlah 4 inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Manggarai, diterapkan pada tahun 2019. Sementara itu, 66.67% inovasi atau sejumlah 8 inovasi yang dilaporkan diterapkan pada tahun 2020.

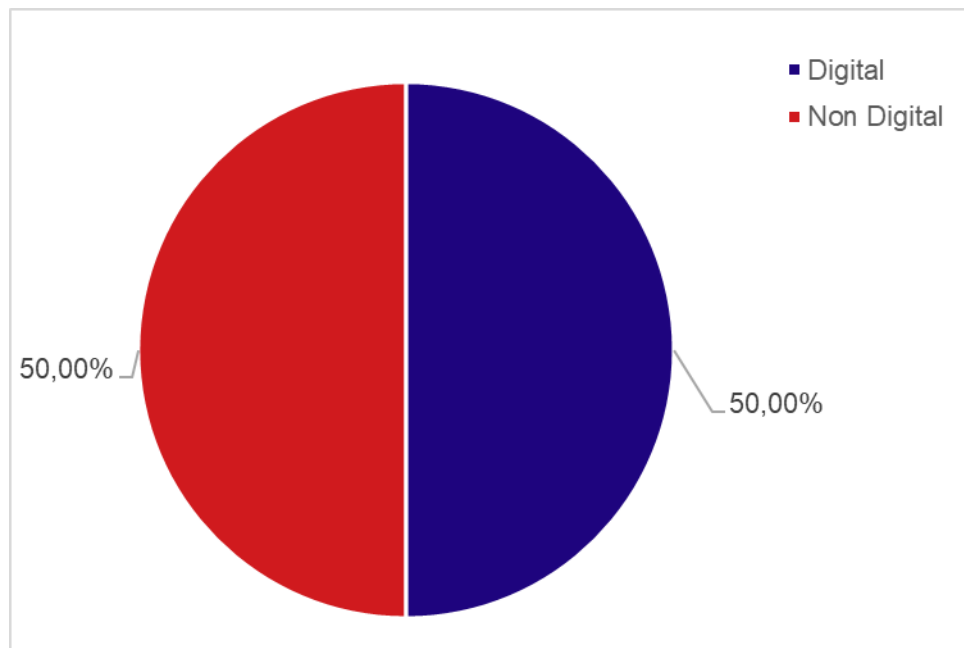
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Manggarai

Berdasarkan bentuknya 41.67% inovasi atau sejumlah 5 (lima) inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Manggarai berbentuk inovasi Pelayanan Publik. Sedangkan 25% inovasi atau sejumlah 3 (tiga) inovasi daerah yang berbentuk Inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Sementara sisanya, yaitu 33.33% inovasi atau sejumlah 4 inovasi daerah yang dilaporkan berbentuk Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

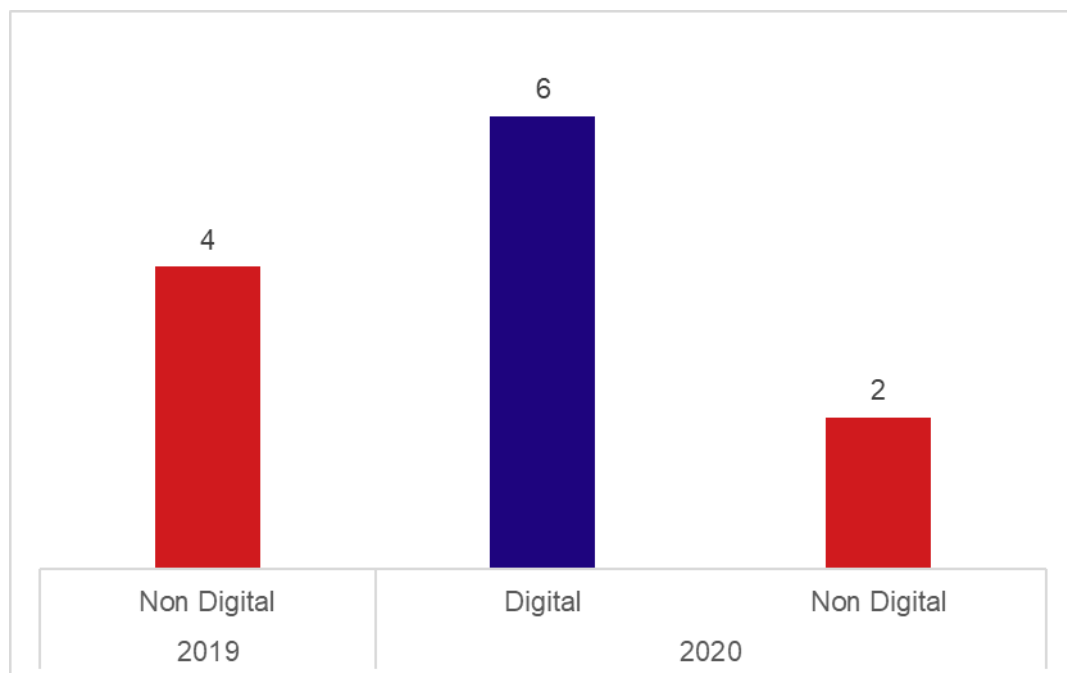
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 52. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Manggarai

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 6 (50%) inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Manggarai merupakan inovasi Non Digital. Sedangkan 6 (50%) inovasi lainnya berjenis Digital.

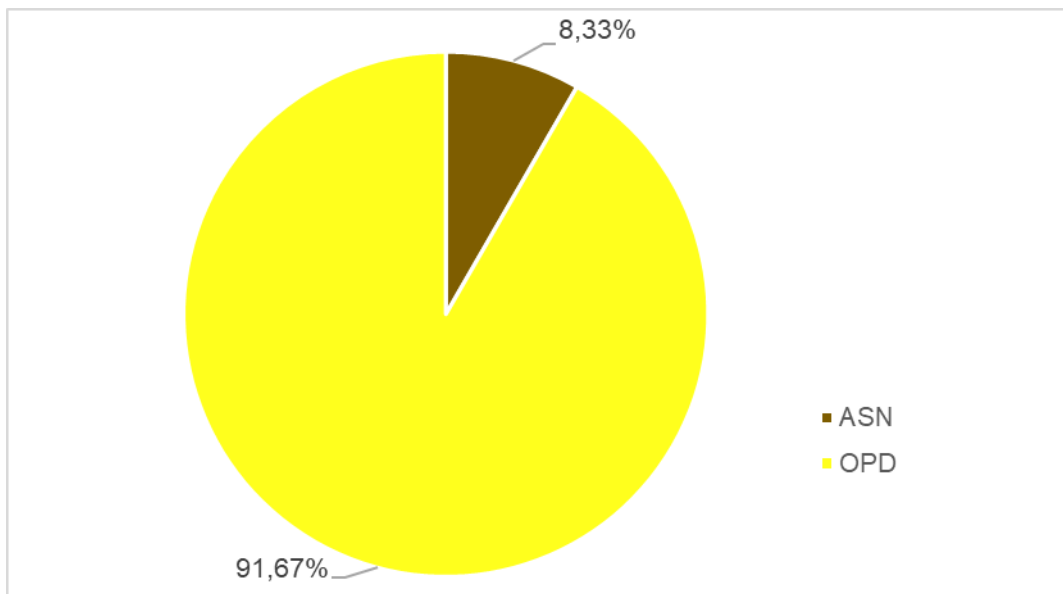
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 53. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Manggarai

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, untuk inovasi Non Digital. Inovasi Non Digital mengalami penurunan dari 4 inovasi pada tahun 2019 menjadi 2 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan untuk inovasi digital karena penerapan inovasi dimulai tahun 2020 maka tidak dapat dilihat progres peningkatan atau penurunan inovasi daerah.

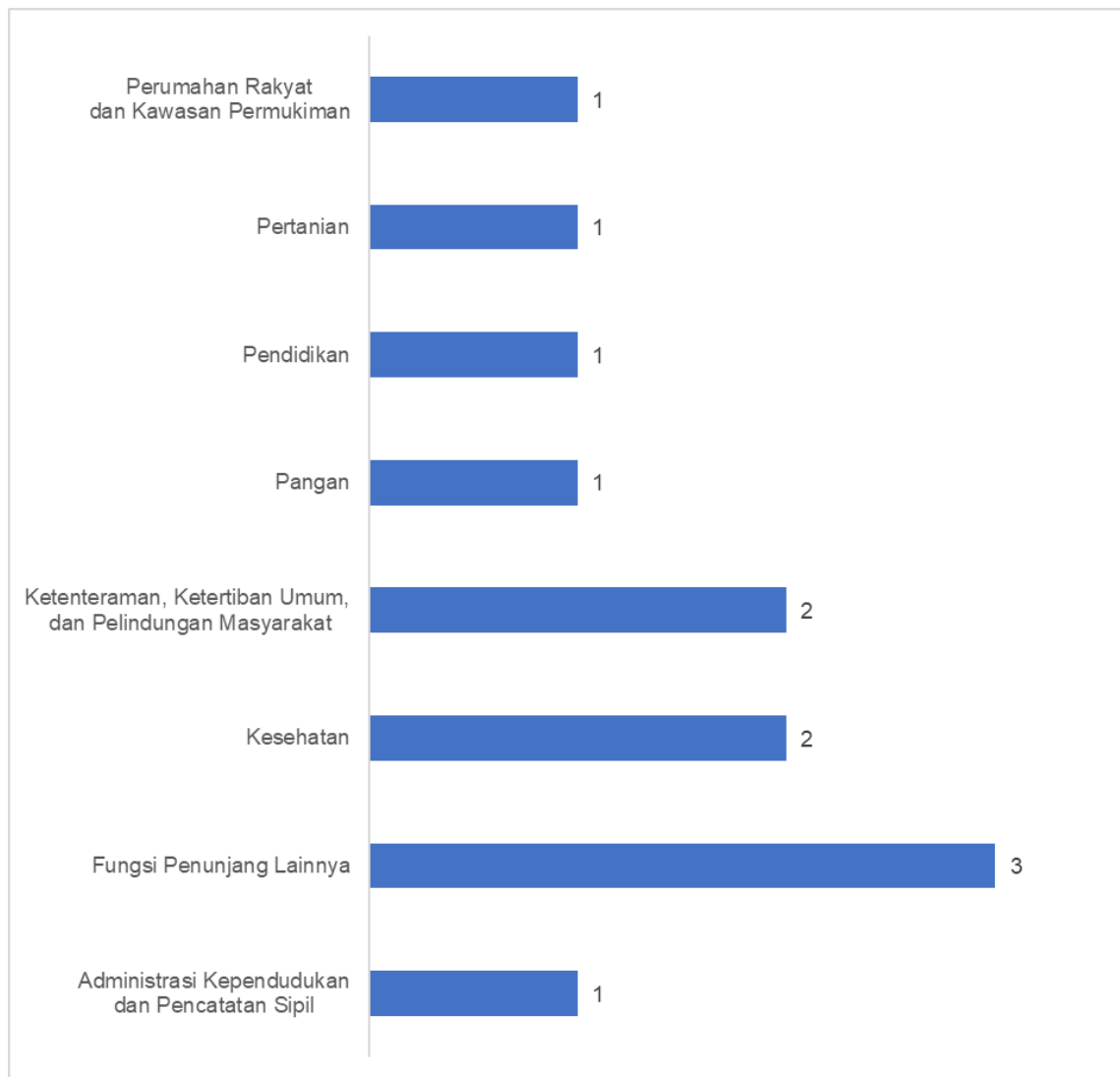
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 54. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Manggarai

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 yang diinisiasi oleh Organisasi Pemerintah Daerah yaitu sebanyak 91.67% atau sejumlah 11 inovasi daerah. Sedangkan sisanya, sebanyak 8.33% atau sejumlah 1 inovasi daerah diinisiasi oleh Aparatur Sipil Negara. Sementara itu, belum ada inovasi yang dilaporkan yang diinisiasi oleh Masyarakat, Kepala Daerah dan DPRD.

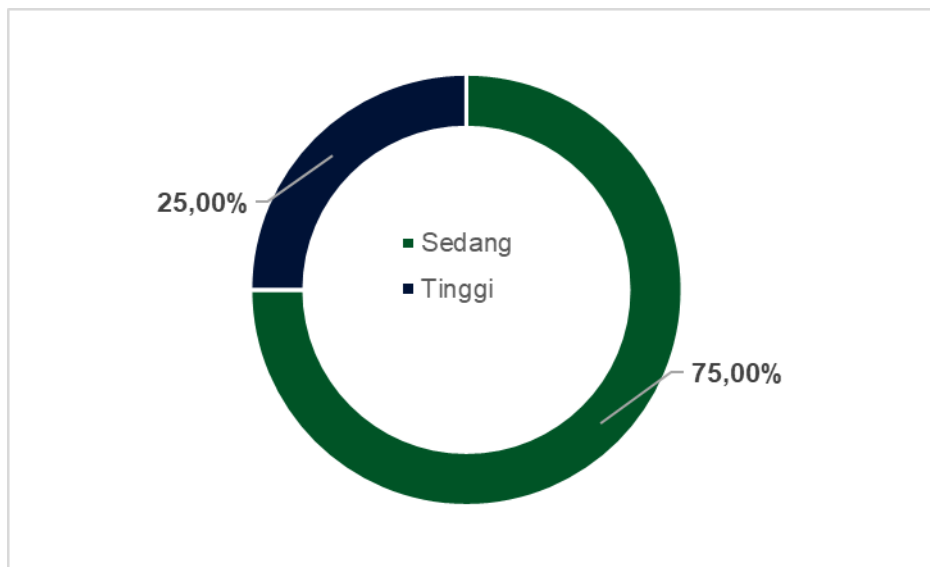
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 55. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Manggarai

Sebaran inovasi daerah menurut laporan pemerintah Kabupaten Manggarai berdasarkan urusan pemerintahan mencakup beberapa urusan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kesehatan, dan Pendidikan dengan masing-masing sejumlah 2 dan 1 inovasi daerah. Sementara itu, urusan Pertanian, Pangan, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil masing-masing sejumlah 1 inovasi daerah. sedangkan untuk urusan Fungsi Penunjang lainnya terdapat 3 inovasi daerah.

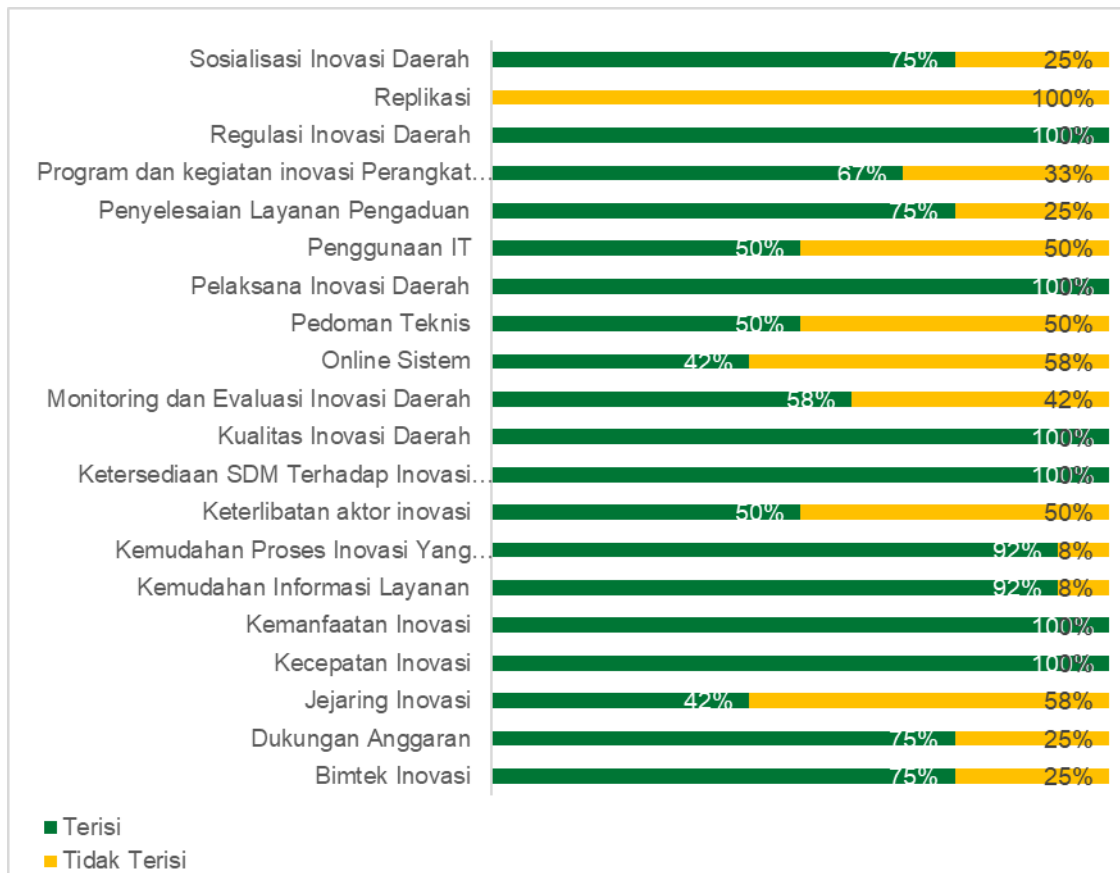
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 56. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Manggarai

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, dari 12 inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Manggarai, 9 diantaranya memiliki skor kematangan sedang. Sedangkan 3 inovasi lainnya masih memiliki skor kematangan yang tinggi.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

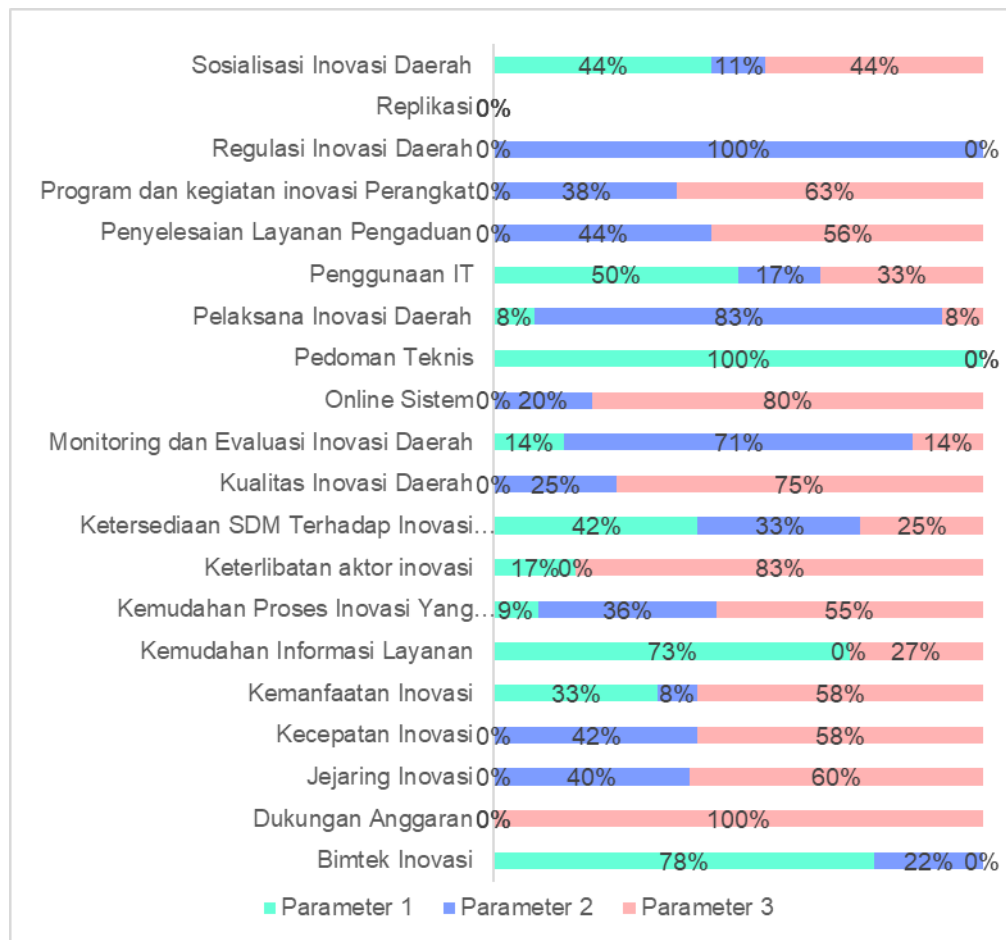


Gambar 57. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai

Dari 12 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manggarai, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 72.08% sedangkan 27.92% lainnya belum terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian tertinggi, mencapai 100% ada pada beberapa indikator yaitu Regulasi Inovasi Daerah, Pelaksana Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi, dan Kecepatan Inovasi.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah pada indikator Replikasi yakni sebesar 0%.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 58. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang mencapai 100% hanya indikator Dukungan Anggaran.

Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang mencapai 100% adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang mencapai 100% adalah indikator Pedoman Teknis.

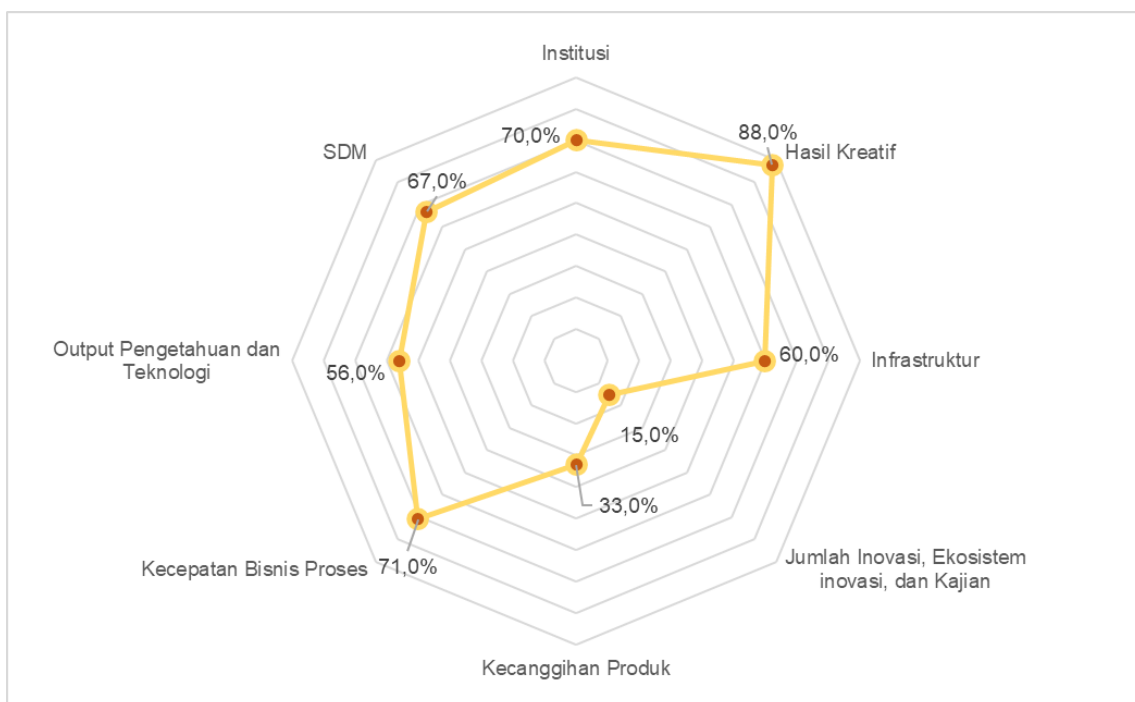
j. Daftar Inovasi Kabupaten Manggarai beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Manggarai beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Le Service (Layanan Berbasis Elektronik)	64
Pengembangan Hortikultura Pola SIMANTRI (Sistem Manajemen Pertanian Terintegrasi)	108

CERDAS	64
WA Grup Informasi Sampah (INSA)	95
GANTENG SEJAGAT NUCA LALE (BERGANDENG TANGAN MENJAGA GENERASI DARI STUNTING – NUK CAMA-CAMA ONE LONTO LEOK)	105
Telur Ayam Atasi Masalah	77
AK 48+ (Kepemilikan Akta Kelahiran 48Jam Pasca Partus + kepemilikan Kartu Keluarga)	115
Pendataan Backlog Rumah	97
KLINIK KIPAS DAMAI (KONSULTASI PENGAWASAN DAERAH MANGGARAI)	63
KLINIK BARJAS	88
PORAJAPALA (Pendaftaran Online Pasien Lama Rawat Jalan)	82
TABE NUCA LALE (Media Center Deteksi Dini ATHG Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)	70

H. KABUPATEN MANGGARAI BARAT

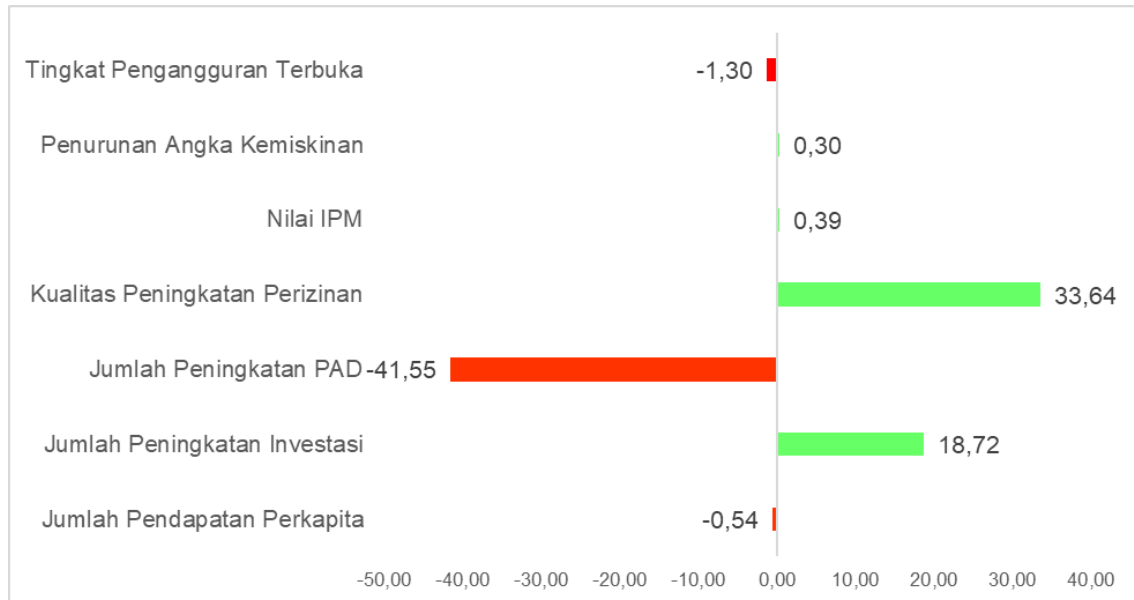


Gambar 59. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Manggarai Barat

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Manggarai Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif sebesar 88.0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masuk kategori rendah, yaitu 15.0% dimana

secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut belum maksimal atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 60. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manggarai Barat

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebanyak 1.30% dimana angka ini melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yang mengharuskan tingkat pengangguran terbuka maksimal turun 0.92%.

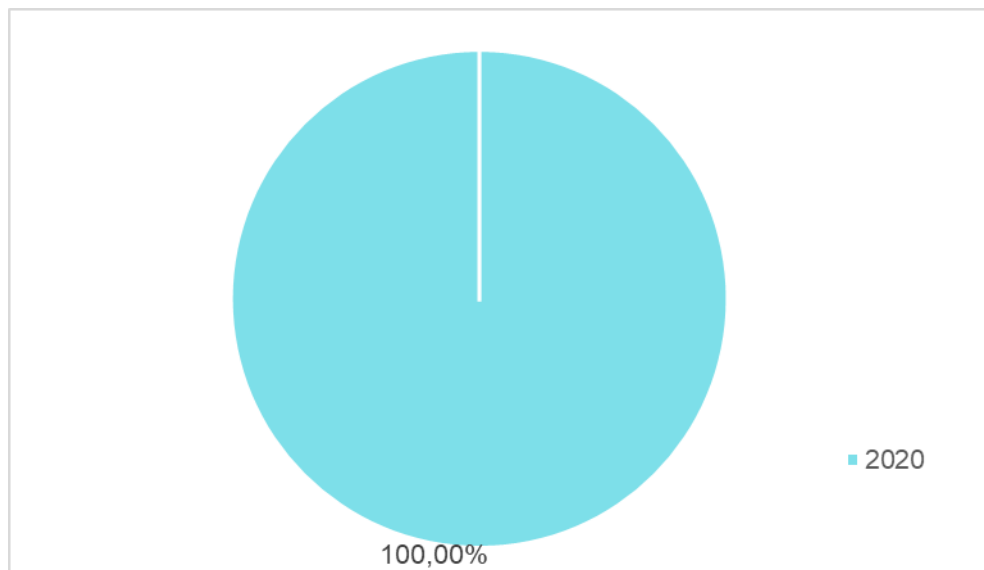
Selanjutnya, pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, terlihat ada peningkatan sebesar 0.30% berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Angka ini cukup melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yang seharusnya naik 0.02%. Nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 0.39%. Demikian pula pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan terjadi peningkatan sangat signifikan yaitu sebesar 33.64% jauh di atas standar nasional parameter IID yang seharusnya naik 5%.

Pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, terdapat penurunan sebesar 41.55% namun nilai ini masih di bawah standar nasional IID yaitu dengan minimal kenaikan sebesar 8%. Selanjutnya, pada indikator Jumlah Peningkatan Investasi

terdapat peningkatan sebesar 18.72%, nilai tersebut di atas standar nasional parameter IID yang mengharuskan naik sebesar 0.45%. Terakhir, pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan penurunan sebesar 0.54% dimana angka ini masih dalam kondisi wajar karena berada di atas standar nasional IID yaitu dengan maksimal penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

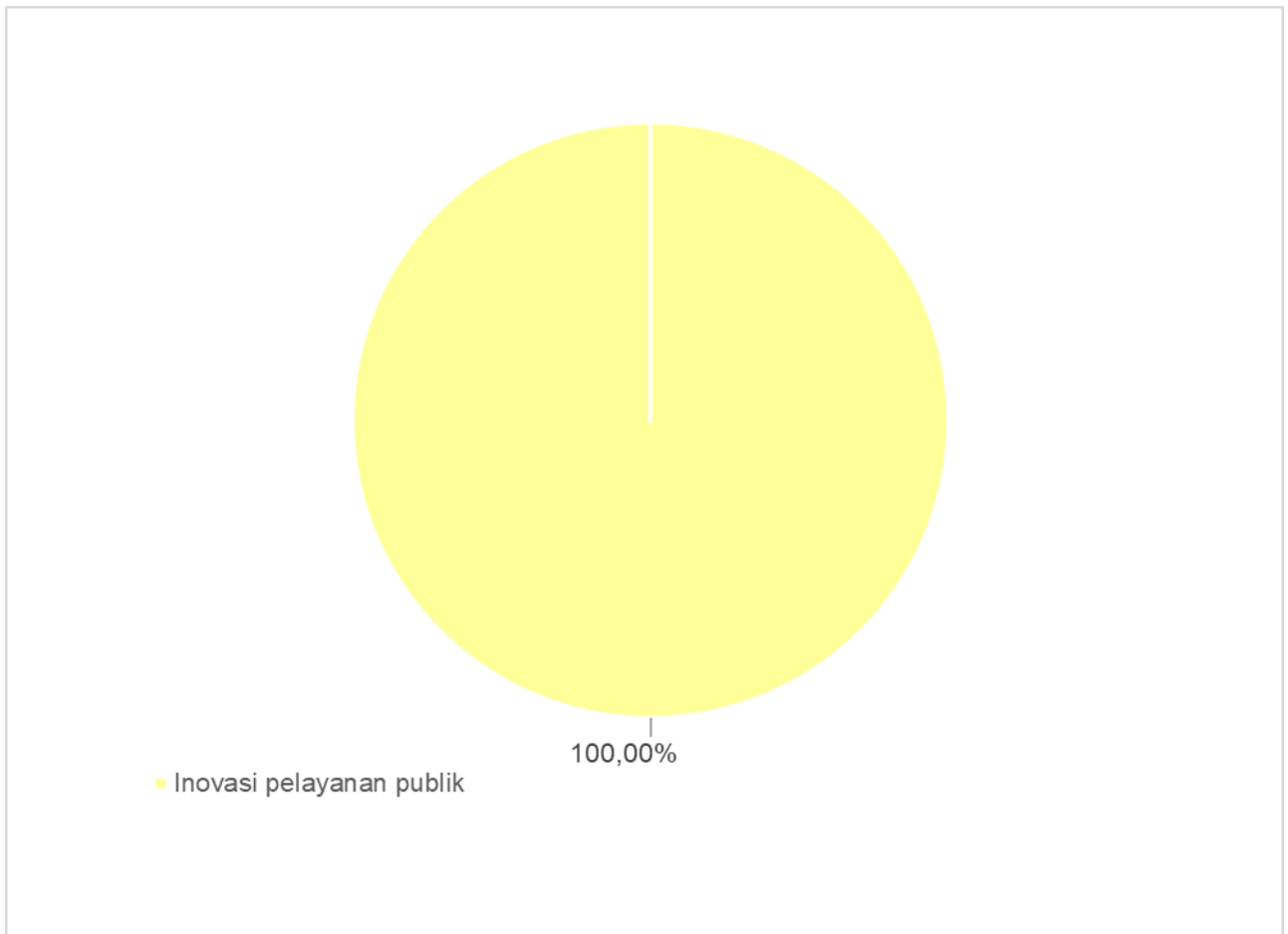
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 61. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Manggarai Barat

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat baru diterapkan pada tahun 2020, yakni sebanyak 2 inovasi daerah.

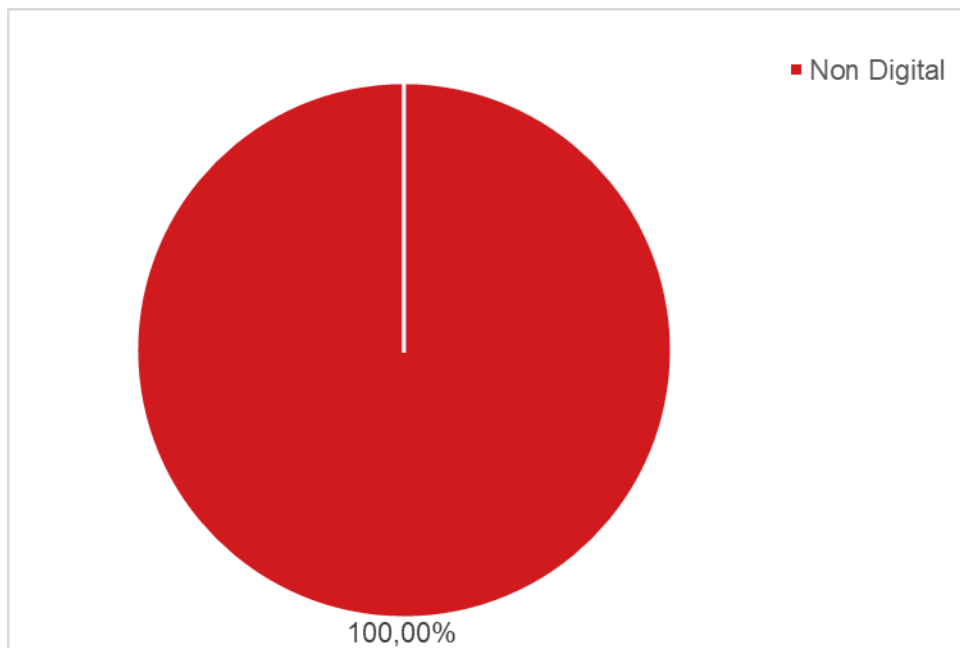
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Manggarai Barat

Berdasarkan bentuknya terdapat sebanyak 2 (100%) inovasi berbentuk Pelayanan Publik yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Sementara itu, berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa belum terdapat inovasi daerah di Kabupaten Manggarai Barat yang berbentuk Inovasi tata kelola pemerintahan daerah maupun Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

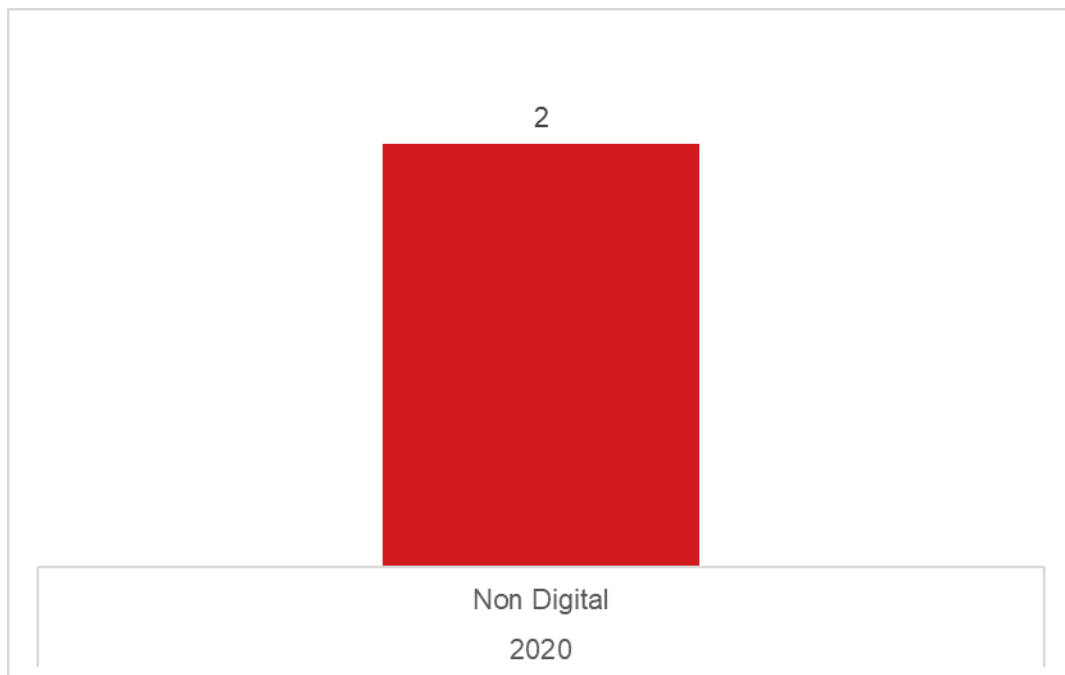
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 63. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Manggarai Barat

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 2 (100%) inovasi atau keseluruhan inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Manggarai Barat merupakan inovasi Non Digital. Sementara itu, belum terdapat inovasi dengan jenis digital maupun teknologi di Kabupaten Manggarai Barat.

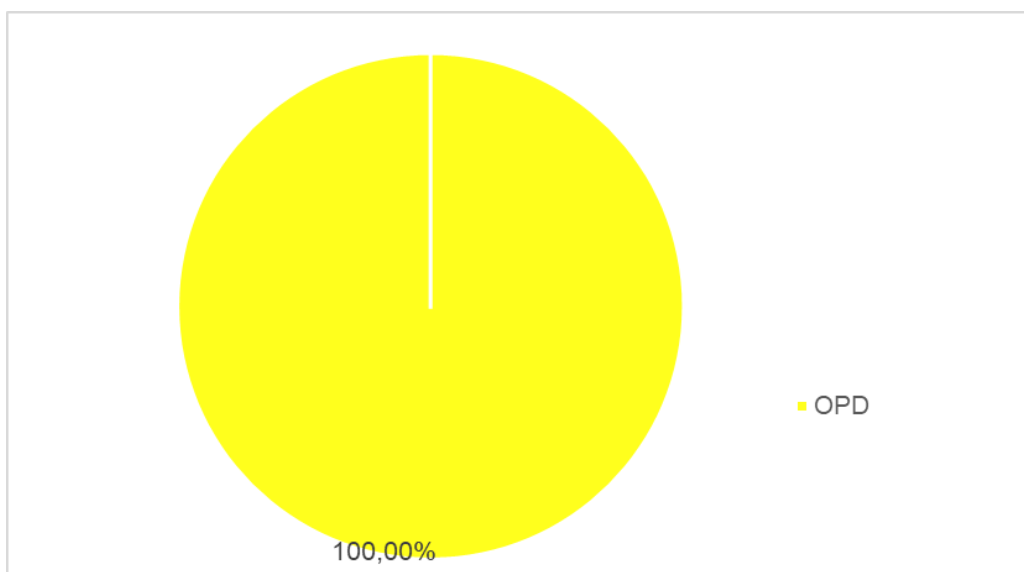
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 64. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Manggarai Barat

Berdasarkan grafik, tidak dapat dilihat progres penurunan maupun peningkatan inovasi daerah dari tahun ke tahun karena Kabupaten Manggarai Barat hanya melaporkan inovasi daerah yang diterapkan pada tahun 2020 sebanyak 2 inovasi berjenis non-digital.

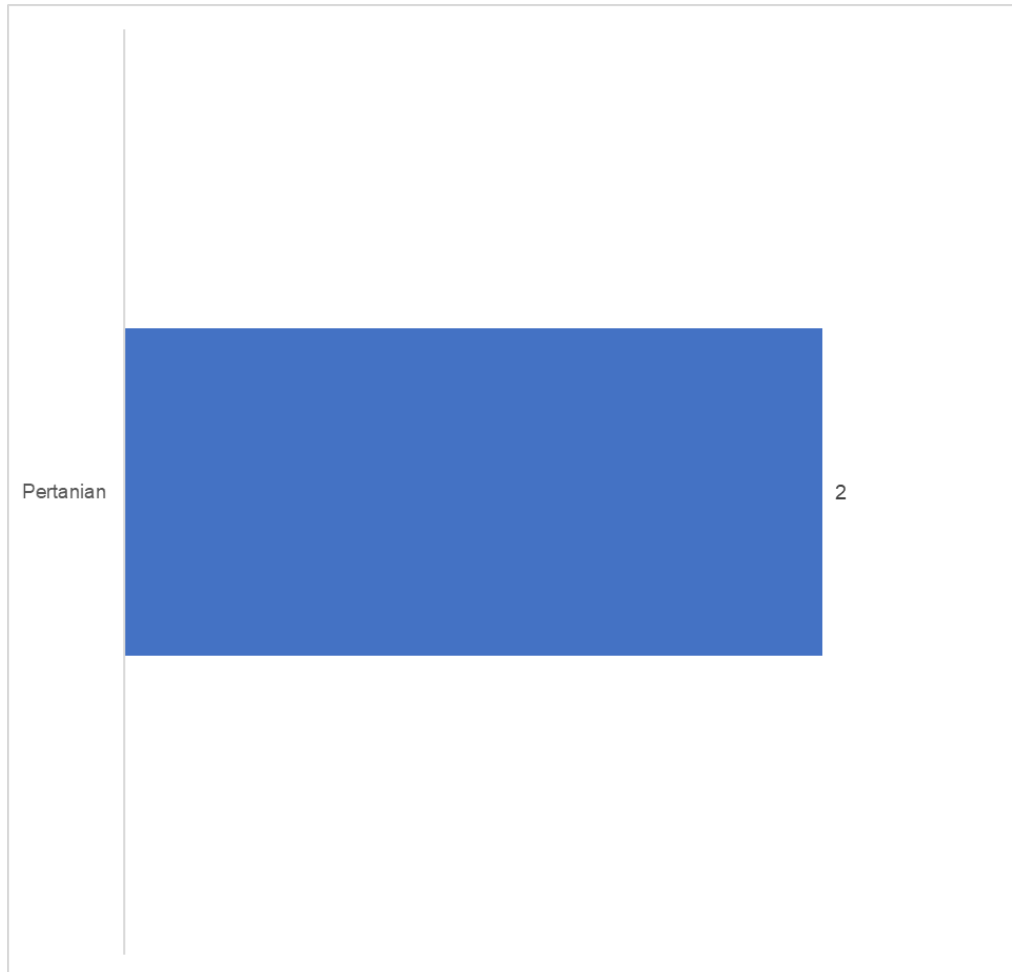
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 65. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Manggarai Barat

Seluruh inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 2 (100%) inovasi. Sementara itu, belum ada inovasi yang dilaporkan yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, ASN, Masyarakat dan DPRD.

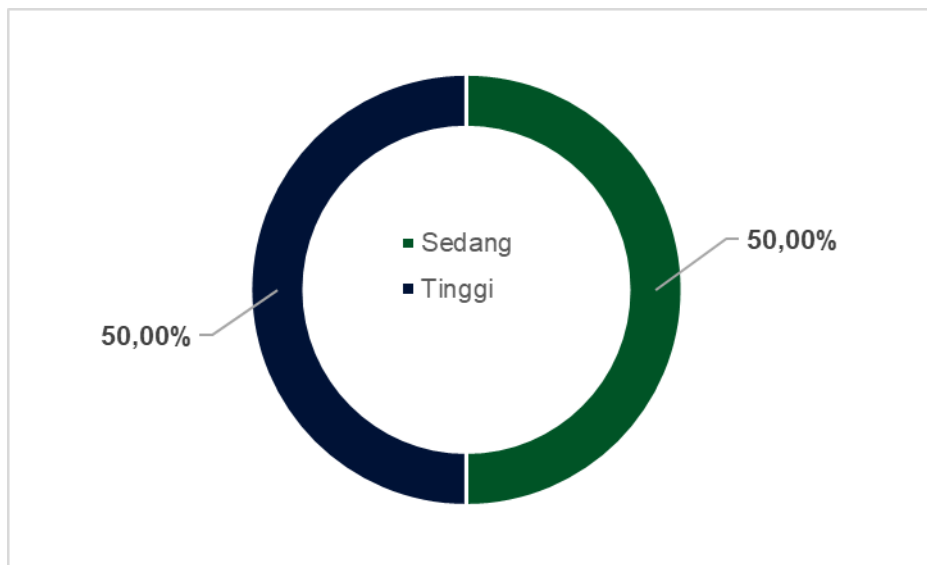
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 66. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Manggarai Barat

Sebaran inovasi daerah menurut laporan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan urusan pemerintahan tidak merata. Dua atau keseluruhan inovasi yang dilaporkan merupakan urusan pemerintahan pada bidang pertanian. Sementara pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar belum ada.

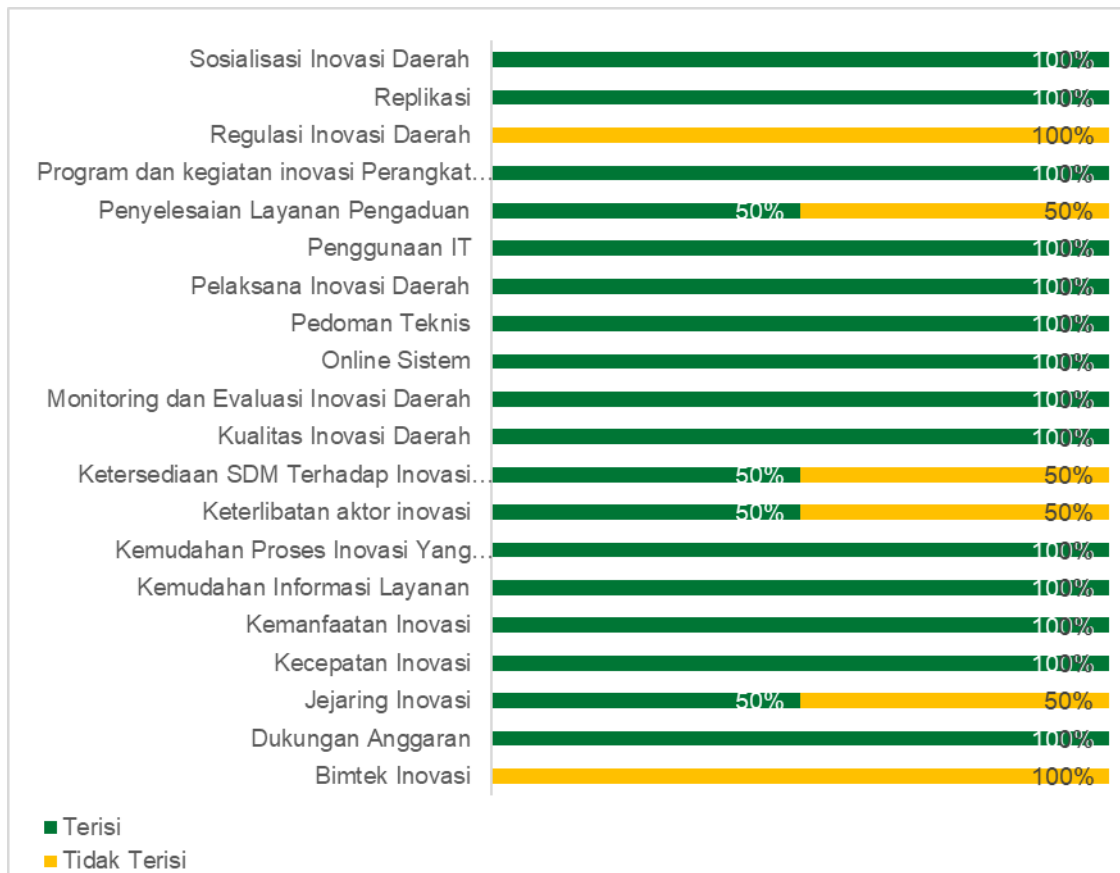
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 67. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Manggarai Barat

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 1 (50%) inovasi masih berada pada kategori sedang. Sedangkan 1 (50%) inovasi lainnya sudah memiliki skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

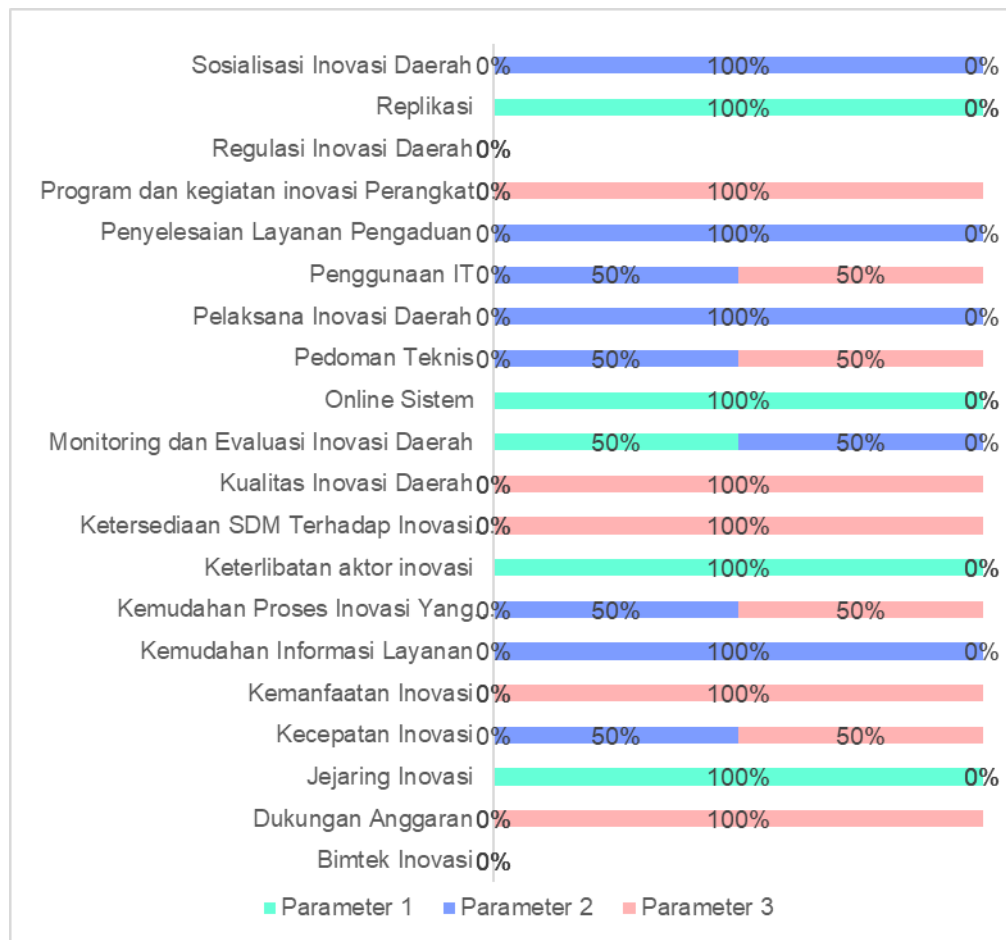
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 68. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Dari 2 inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, 80% dari total inovasi telah terisi data pendukung. Sedangkan sisanya, 20% masih belum terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian tertinggi yaitu sebesar 100% ada pada indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Replikasi, Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi Yang Diharapkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, dan Dukungan Anggaran. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian terendah yakni 0% ialah indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Bimtek daerah.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 69. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDm Terhadap Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Dukungan Anggaran yaitu sebesar 100%, Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Penyelesaian Pelayanan Pengaduan, Pelaksana Inovasi Daerah, dan Kemudahan Inforasi Layanan sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi, Online Sistem, Keterlibatan aktor inovasi, dan Jejaring Inovasi yakni sebesar 100%. Berarti

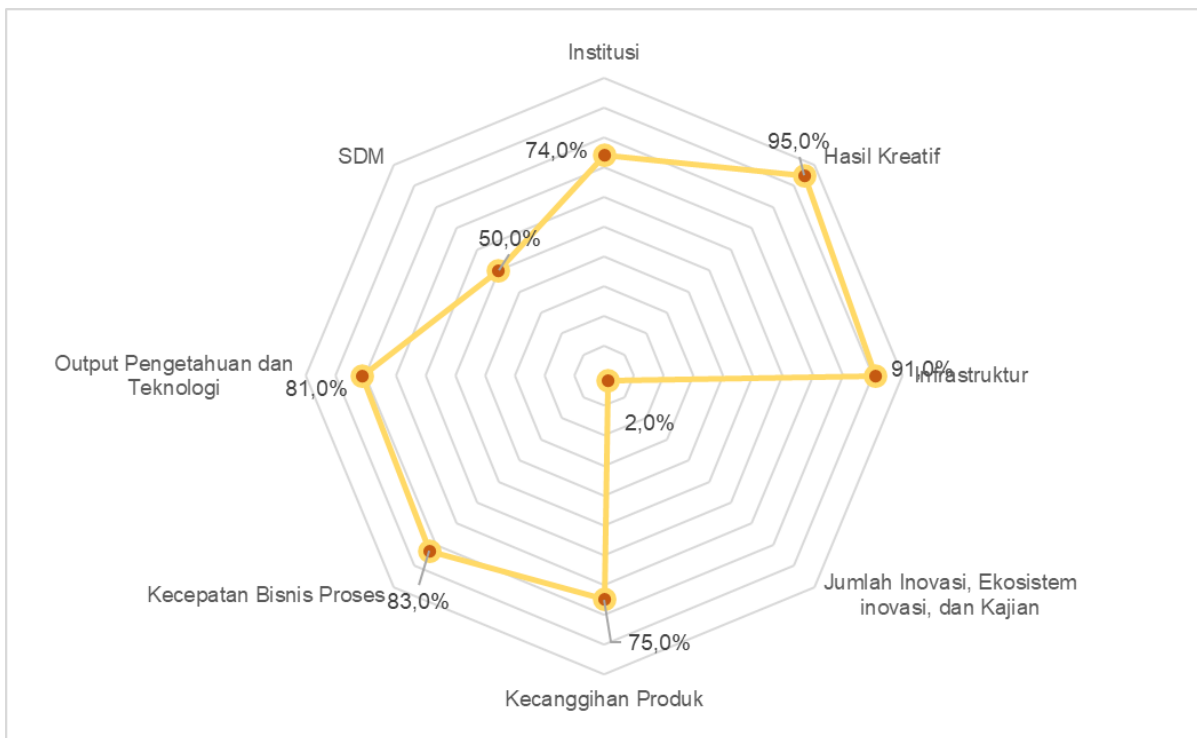
seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Bimtek Inovasi masuk dalam kategori parameter 1 (satu).

j. Daftar Inovasi Kabupaten Manggarai Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Manggarai Barat beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
KALDU Sapi/Kerbau (Kandang Layanan Terpadu untuk Ternak Sapi/Kerbau)	93
KUMBARA (Kunjungan Rumah Berantas Rabies)	101

I. KABUPATEN MANGGARAI TIMUR



Gambar 70. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Manggarai Timur memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif sebesar 91.0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masuk kategori rendah, yaitu 2.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut belum maksimal atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 71. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manggarai Timur

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka naik sebanyak 98.78% dimana angka ini melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yang mengharuskan tingkat pengangguran terbuka maksimal turun 0.92%.

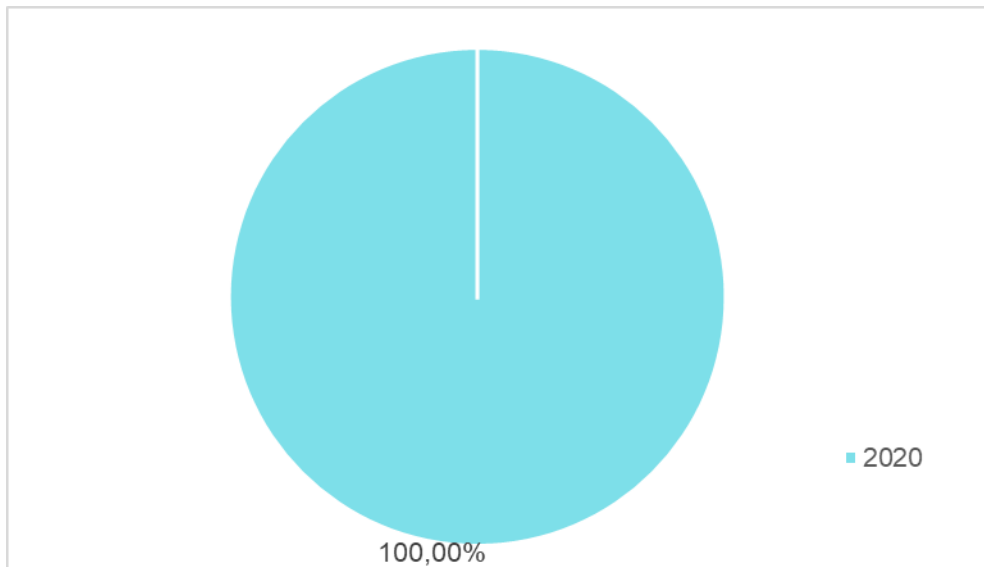
Selanjutnya, pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, terlihat ada peningkatan sebesar 27.00% berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Angka ini cukup melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yang seharusnya naik 0.02%. Nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 101.68%, dimana angka ini melebihi 100% yang berarti bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan yang diminta. Demikian pula pada indikator Jenis Peningkatan Investasi terjadi peningkatan melebihi 100% yakni sebesar 850.77% yang berarti bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan yang diminta.

Kualitas Peningkatan Perizinan terjadi penurunan sangat signifikan yaitu sebesar 81.64% jauh di bawah standar nasional parameter IID yang seharusnya naik 5%. Pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, terdapat peningkatan sebesar 13.57% dimana nilai ini di atas standar nasional IID yaitu dengan minimal kenaikan sebesar 8%. Terakhir, pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada

Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan kenaikan sebesar 4.99% dimana angka ini masih dalam kondisi wajar karena berada di atas standar nasional IID yaitu dengan maksimal penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

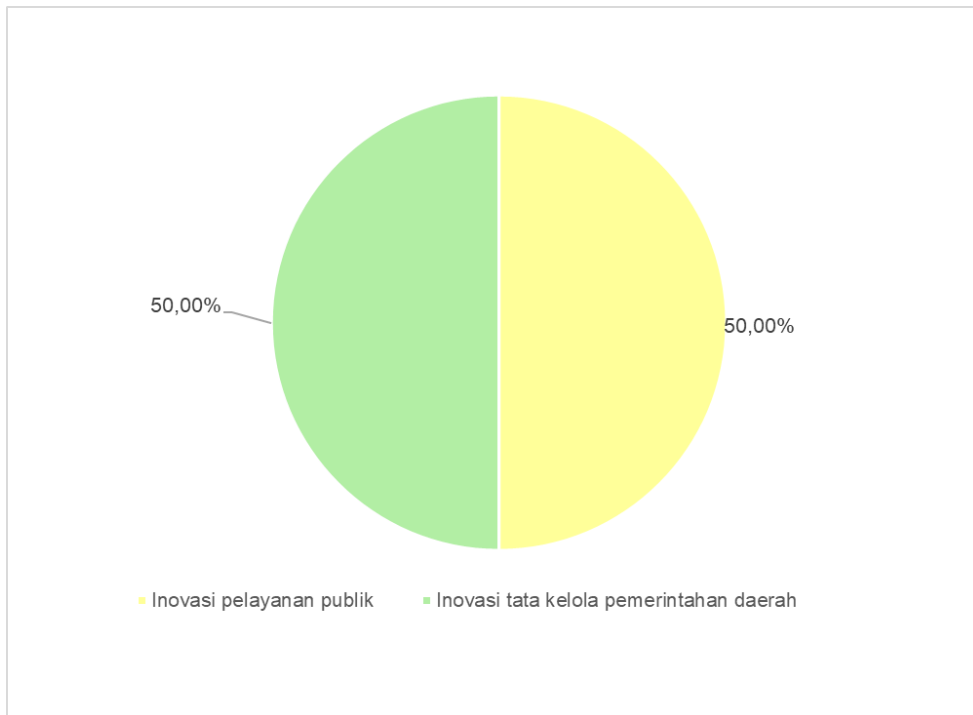
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 72. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Manggarai Timur

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur baru diterapkan pada tahun 2020, yakni sebanyak 4 inovasi daerah.

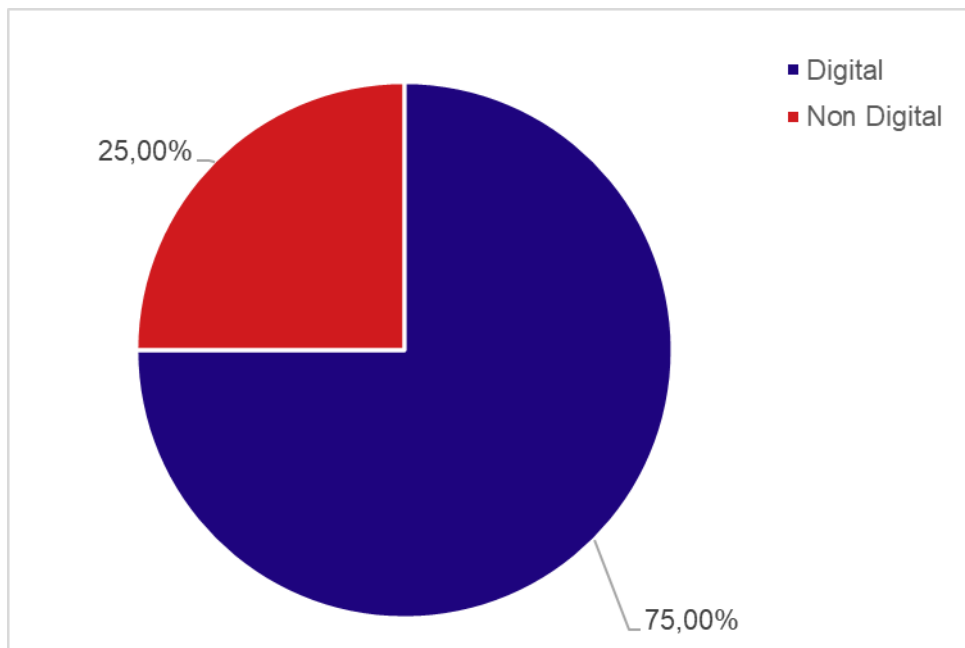
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan bentuknya terdapat sebanyak 2 (50%) inovasi berbentuk Pelayanan Publik yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Sedangkan 2 inovasi lainnya atau sebanyak 50% inovasi daerah sisanya berbentuk Inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Sementara itu, berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa belum terdapat inovasi daerah di Kabupaten Manggarai Timur yang berbentuk Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

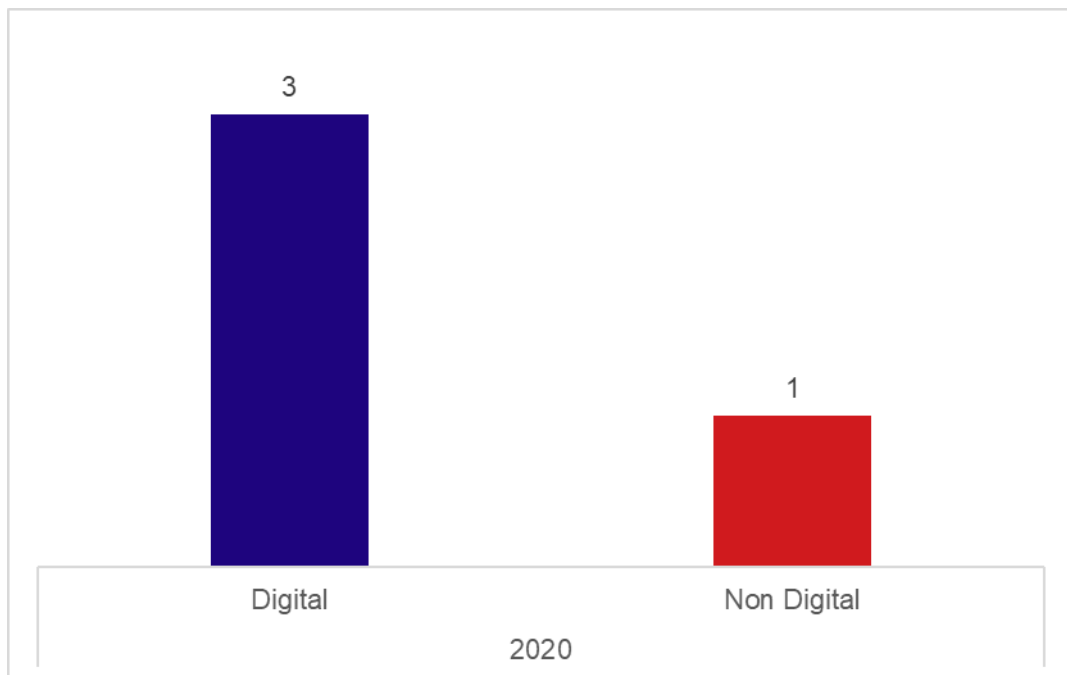
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 74. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Manggarai Timur

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 3 (75%) inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Manggarai Timur merupakan inovasi Digital. Sedangkan 1 inovasi lainnya atau sebanyak 25% inovasi daerah merupakan Inovasi Non Digital. Sementara itu, belum terdapat inovasi dengan jenis Teknologi di Kabupaten Manggarai Barat.

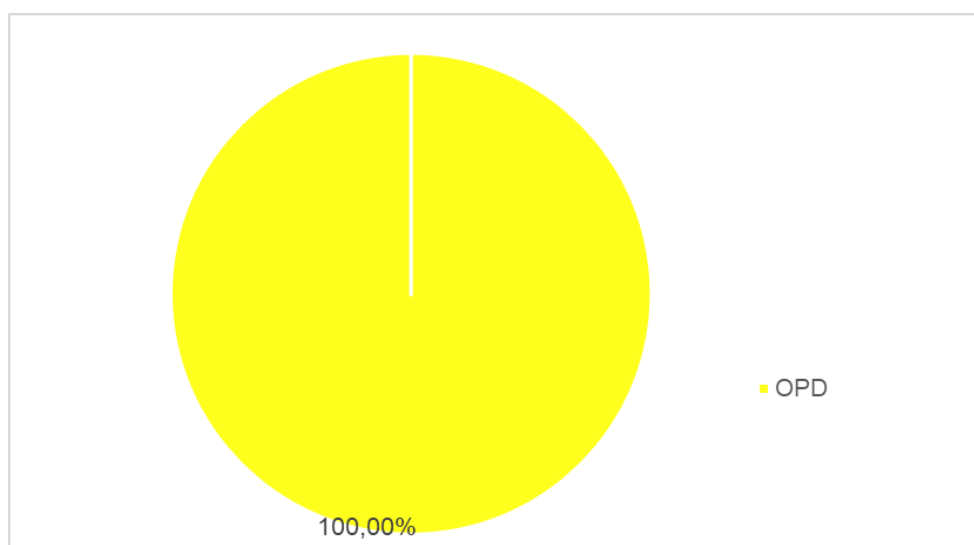
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 75. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan grafik, tidak dapat dilihat progres penurunan maupun peningkatan inovasi daerah dari tahun ke tahun karena Kabupaten Manggarai Barat hanya melaporkan inovasi daerah yang diterapkan pada tahun 2020 sebanyak 3 inovasi berjenis Digital dan sisanya sejumlah 1 inovasi berjenis Non Digital.

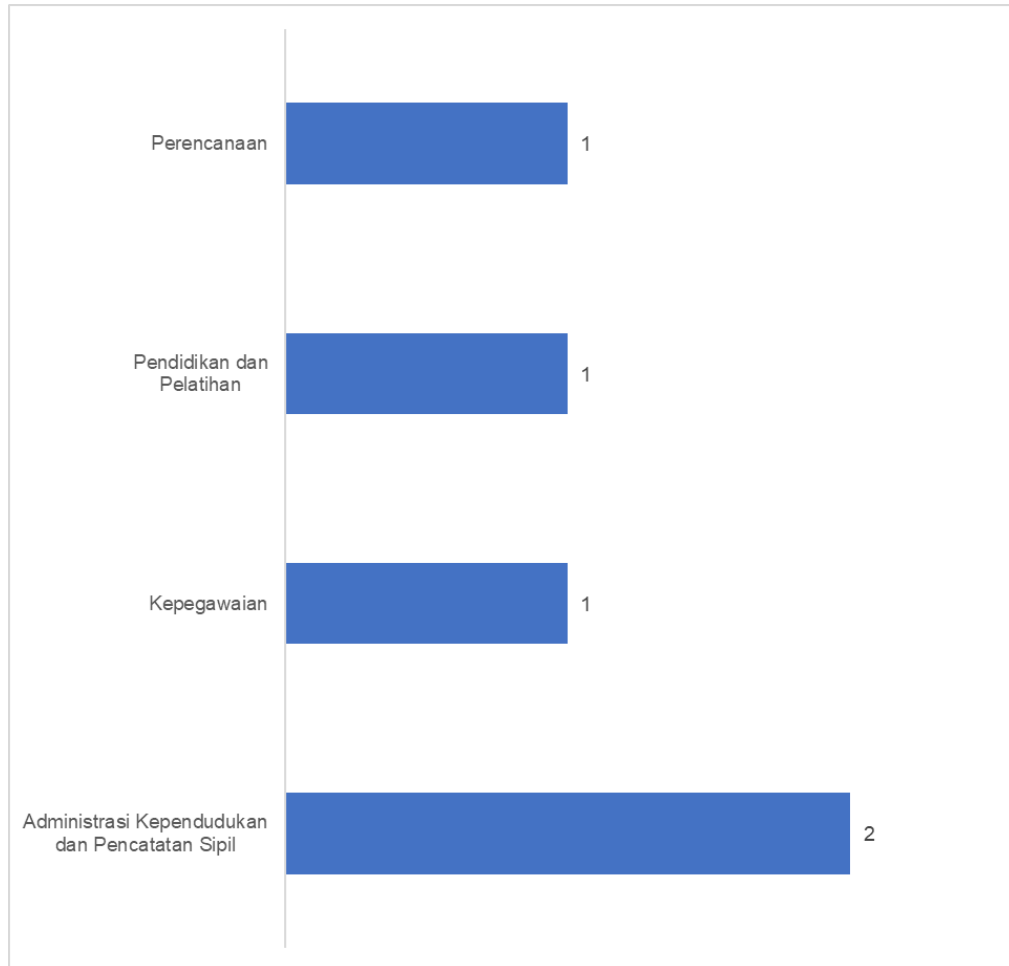
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 76. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Manggarai Timur

Seluruh inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 4 (100%) inovasi. Sementara itu, belum ada inovasi yang dilaporkan yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, ASN, Masyarakat dan DPRD.

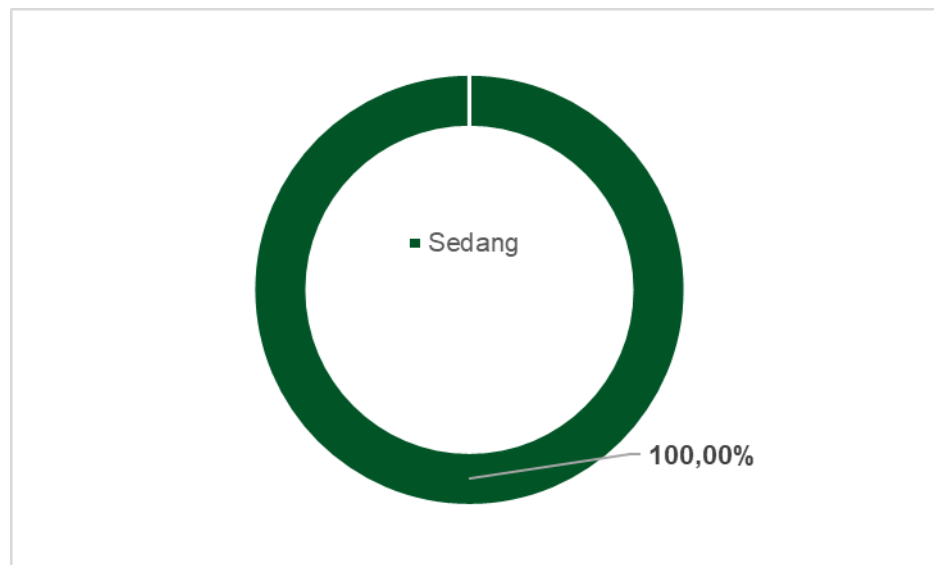
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 77. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Manggarai Timur

Sebaran inovasi daerah menurut laporan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Terdapat 1 (satu) inovasi daerah yang dilaporkan merupakan urusan pemerintahan perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Kepegawaian. Selanjutnya, dua dari seluruh inovasi daerah yang dilaporkan merupakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara inovasi daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar belum ada.

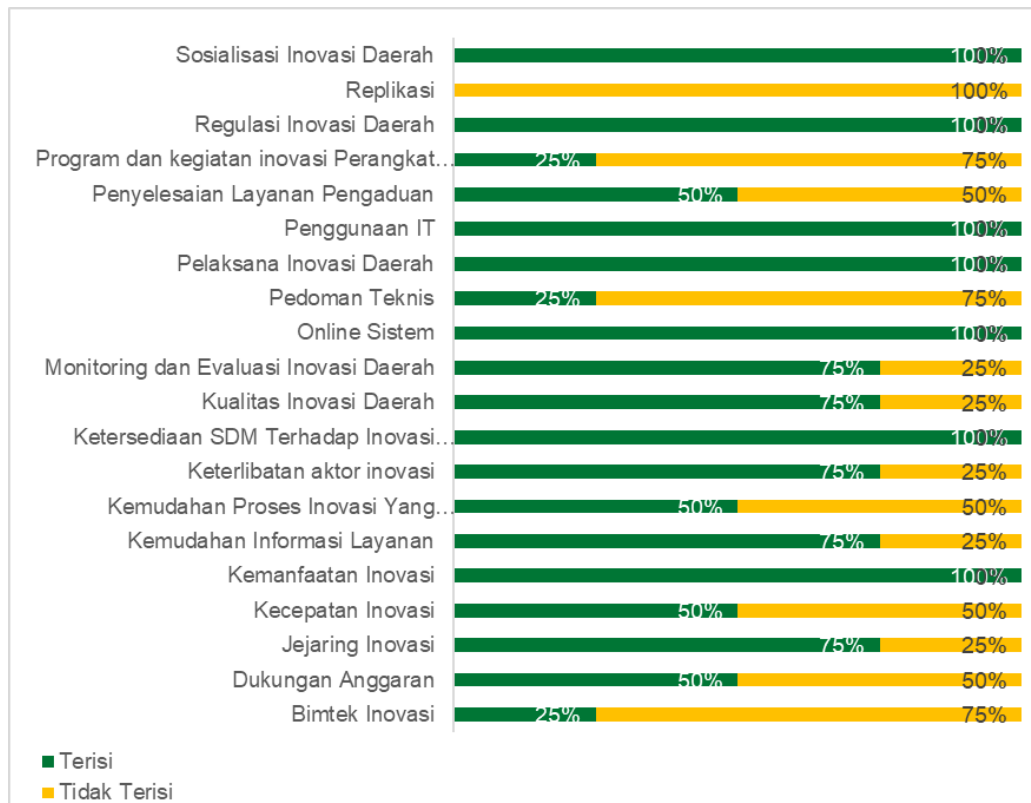
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 78. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Manggarai Timur

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur seluruh inovasi daerah yang dilaporkan inovasi masih berada pada kategori sedang. Sebagai informasi, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100.

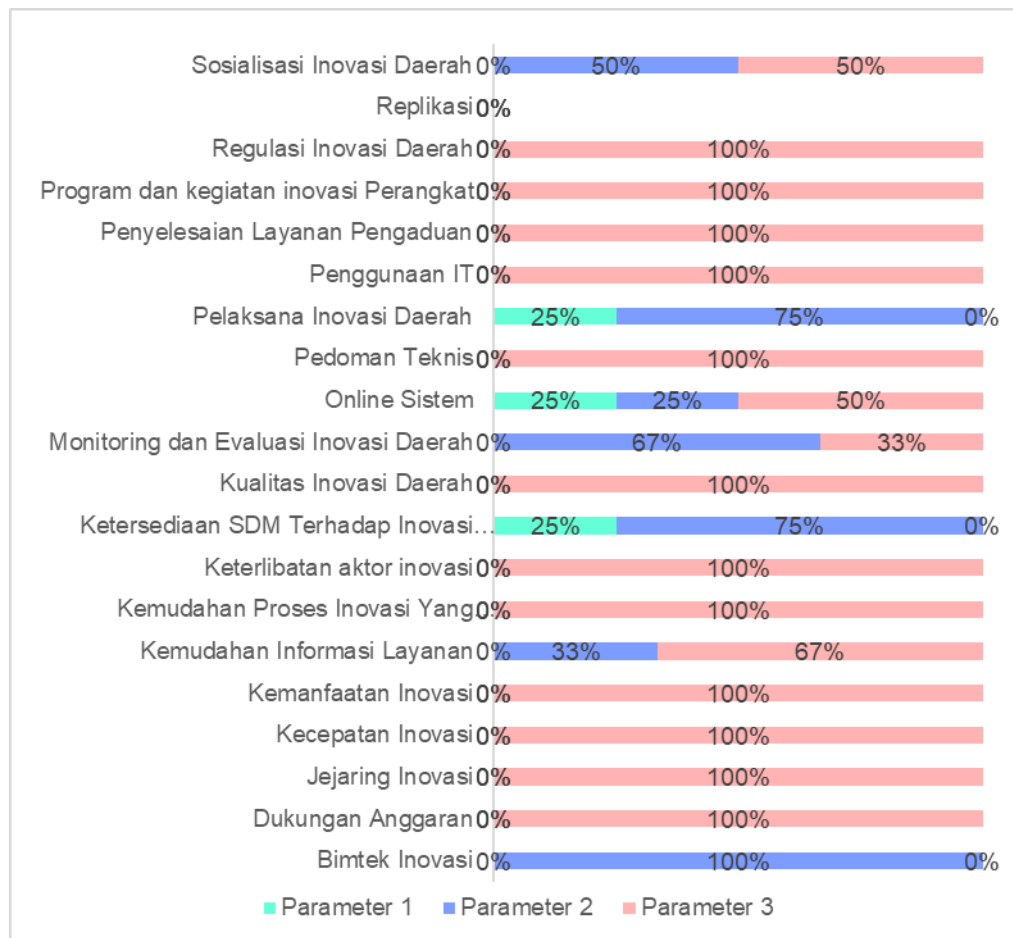
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 79. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Dari 4 inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, 67.50% dari total inovasi telah terisi data pendukung. Sedangkan sisanya, 32.50% masih belum terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian tertinggi yaitu sebesar 100% ada pada indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Regulasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Online Sistem, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, dan Kemanfaatan Inovasi. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian terendah yakni 0% ialah indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 80. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Pedoman Teknis, Kualitas Inovasi Daerah, Keterlibatan aktor inovasi, Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi, Jejaring Inovasi, dan Dukungan Anggaran.

Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah Bimtek Inovasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) seluruhnya memiliki presentase keterisian yang sama yaitu 25%, adalah indikator

Pelaksana Inovasi Daerah, Online Sistem, dan Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Manggarai Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Manggarai Barat beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Seber Plan	64
JEBOL ANDUK PE (Jemput Bola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil)	96
Pelayanan Online (Play On)	98
Website Resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Manggarai Timur	73

J. KABUPATEN NOGEKEO

Belum ada capaian berdasarkan variabel ukur indeks inovasi daerah dari Kabupaten Nogekeo mengingat belum adanya inovasi yang dilaporkan.

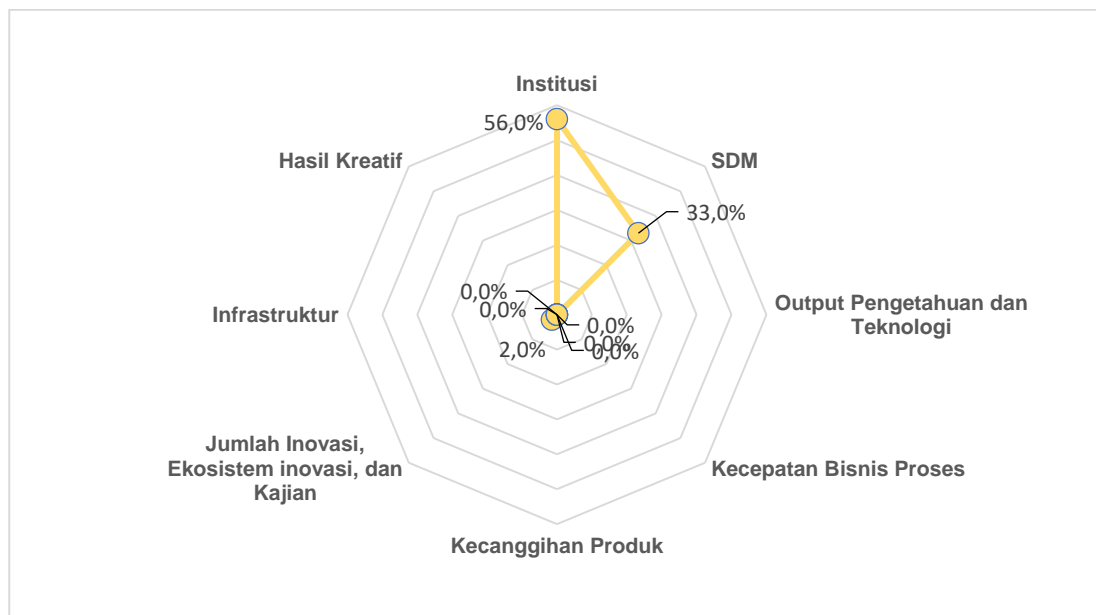
1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2021, belum ada inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nogekeo dilihat dari aspek satuan pemerintah daerah.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

Pada tahun 2021, belum ada inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nogekeo dilihat dari aspek satuan inovasi daerah.

K. KABUPATEN NGADA

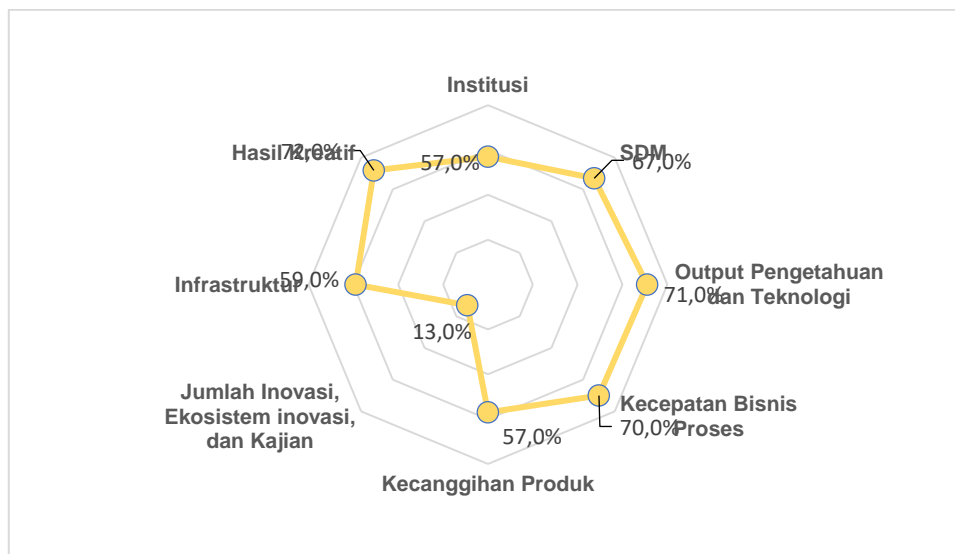


Gambar 81. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Ngada

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Ngada memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 56.0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Pada variabel SDM memperoleh skor 33.0%.

Selanjutnya, pada variabel lainnya seperti Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecepatan Bisnis Proses, Kecanggihan Produk, Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian, Infrastruktur serta Hasil Kreatif tidak ada data yang dapat direkap dikarenakan pemerintah Kabupaten Ngada belum melaporkan inovasi tahun 2021.

L. KABUPATEN ROTE NDAO



Gambar 82. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Rote Ndao memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 72.0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masuk kategori rendah, yaitu 13.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut belum maksimal atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

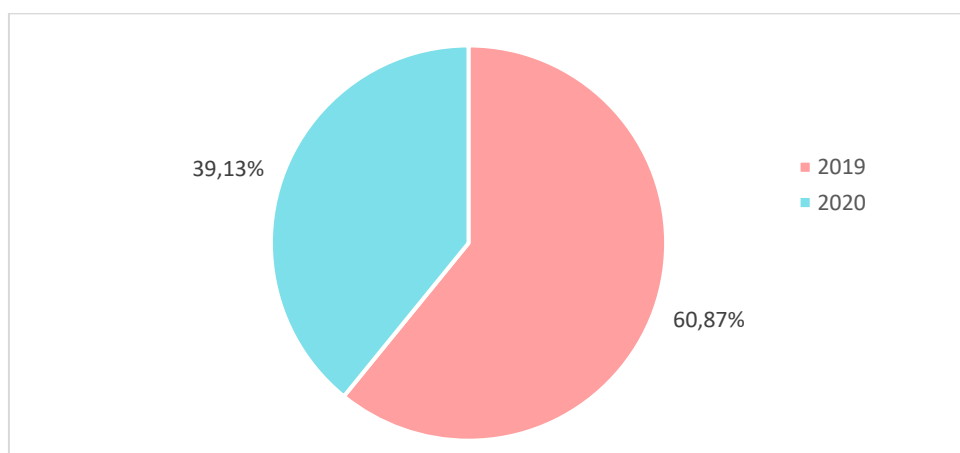


Gambar 83. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Rote Ndao

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Rote Ndao belum mengalami perkembangan yang signifikan. Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan yang tajam, jauh di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yaitu penurunan maksimal 1.85%. Selanjutnya, pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, tidak terlihat ada peningkatan berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 0.17%. Namun pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan terjadi penurunan sangat signifikan yaitu sebesar 4844.92% jauh di bawah standar nasional parameter IID yang seharusnya naik 5%. Pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, terdapat peningkatan sebesar 3.83% namun nilai ini masih di bawah standar nasional IID yaitu dengan kenaikan sebesar 8%. Selanjutnya, pada indikator Jumlah Peningkatan Investasi terdapat peningkatan sebesar 42.05%, di atas standar nasional parameter IID, nilai tersebut di atas standar nasional parameter IID yang mengharuskan naik sebesar 5%. Terakhir, pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Rote Ndao menunjukkan kenaikan sebesar 18.99%.

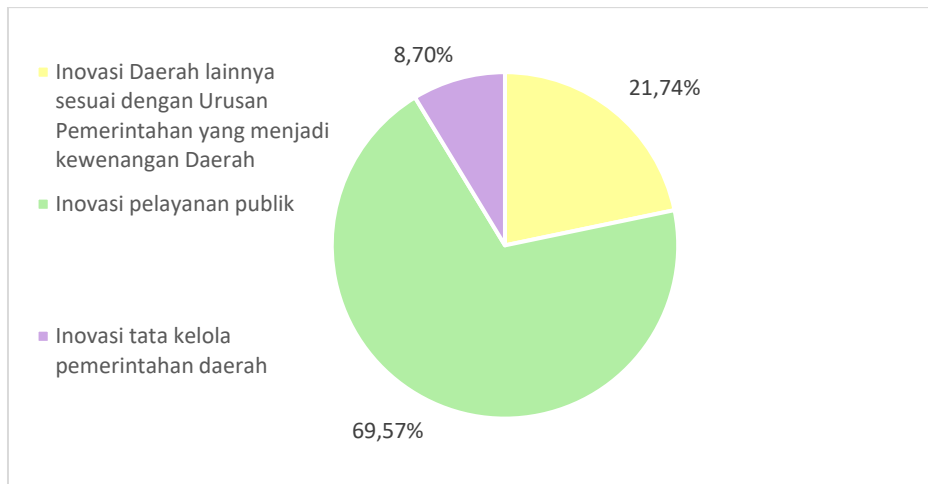
2. Aspek Satuan Inovasi Daerah
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Rote Ndao

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 14 (60.87%) inovasi dari 23 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 9 (39.13%) inovasi lainnya diterapkan pada 2020.

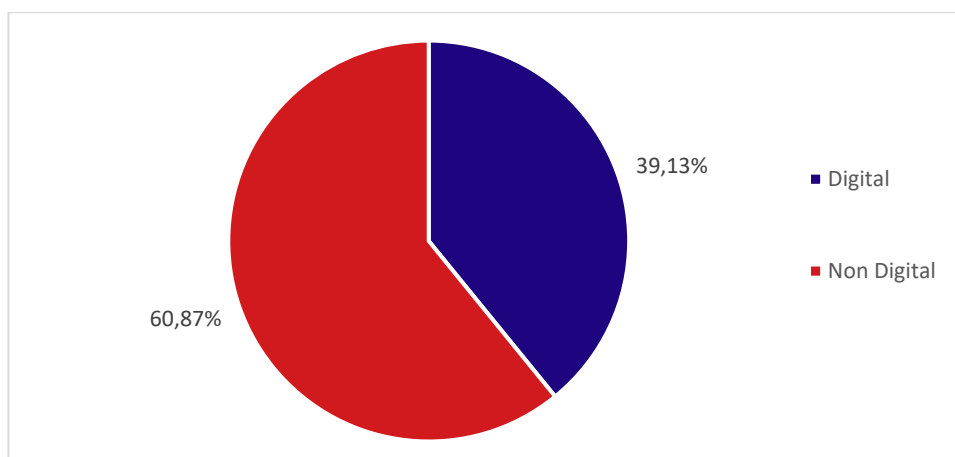
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 85. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan bentuknya terdapat sebanyak 16 (69.57%) inovasi berbentuk Pelayanan Publik adalah inovasi yang paling banyak dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Selanjutnya 5 (21.74%) inovasi adalah Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Urusan Pemerintahan. Sisanya sebanyak 2 (8.20%) inovasi adalah inovasi dalam bentuk Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

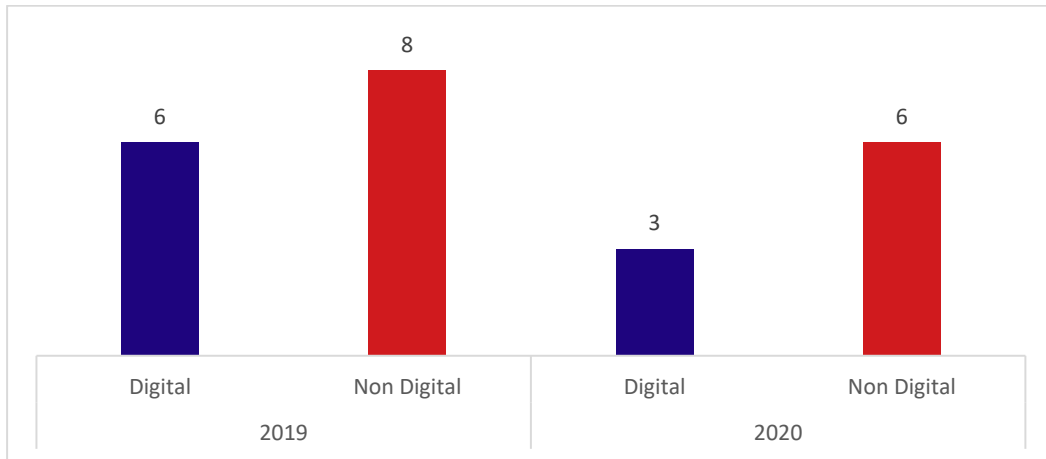


Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Rote Ndao

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 14 (60.87%) dari 19 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Rote

Ndao merupakan inovasi Non Digital. Selanjutnya 9 (39.13%) inovasi lainnya berjenis Digital.

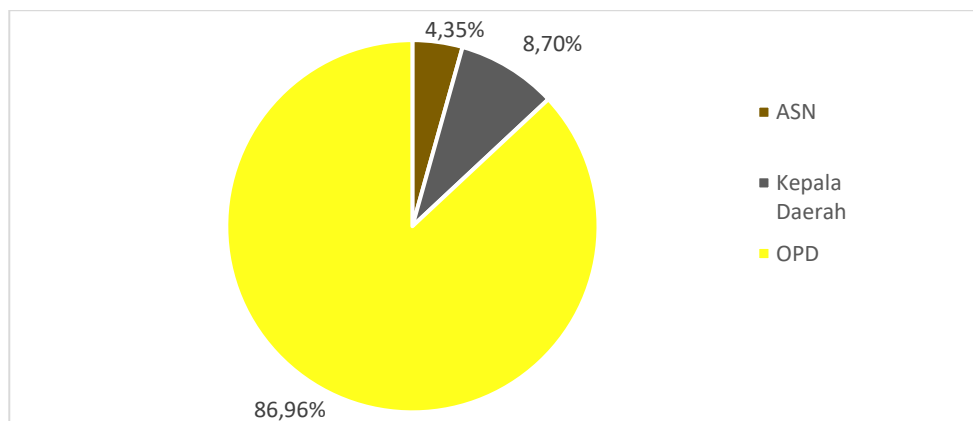
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 87. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Rote Ndao

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi Digital maupun inovasi Non Digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun menjadi 3 inovasi dari semulanya 6 inovasi pada tahun 2019. Demikian pula dengan inovasi Non Digital mengalami penurunan dari 8 inovasi pada tahun 2019 menjadi 6 inovasi pada tahun 2020.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

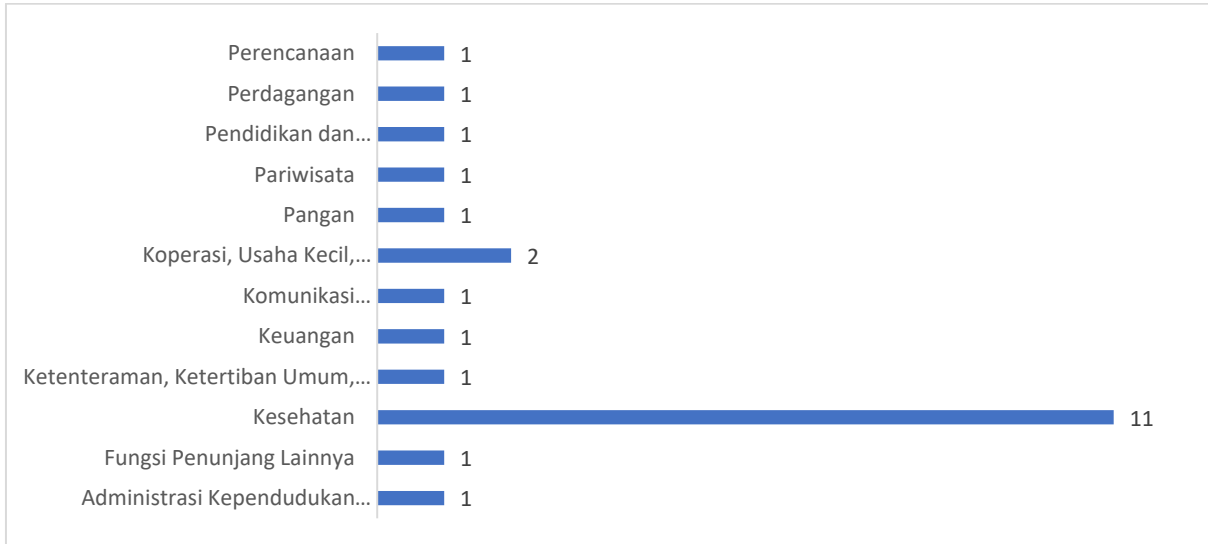


Gambar 88. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Rote Ndao

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 20 (86.96%) inovasi. Selanjutnya, 2 (8.70%) inovasi lainnya diinisiasi oleh Kepala

Daerah. Sisanya 1 (4.35%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Belum ada inovasi yang dilaporkan diinisiasi oleh Masyarakat dan DPRD.

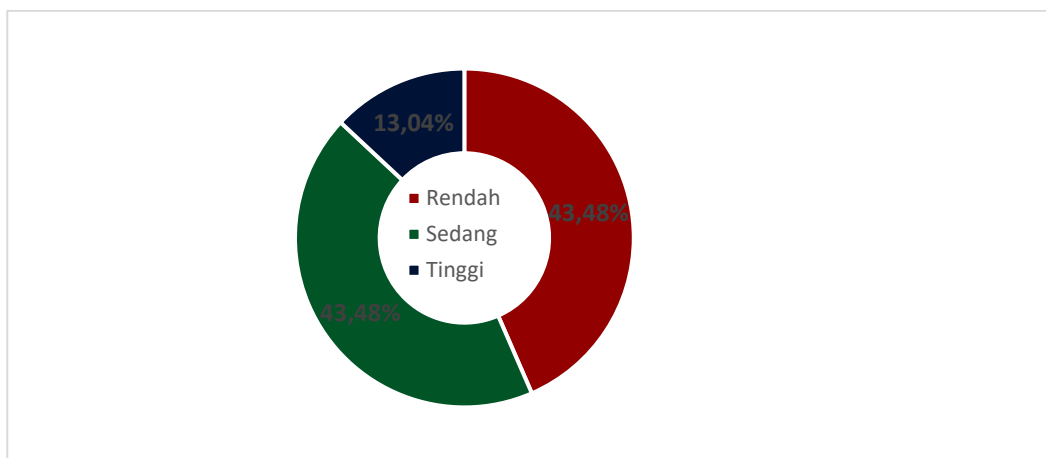
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 89. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Rote Ndao

Sebaran inovasi daerah menurut laporan pemerintah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata kecuali pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu pada Urusan Kesehatan di mana terdapat 11 inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Hanya terdapat 2 dari 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaporkan. Selain Urusan Kesehatan, terdapat pula 1 inovasi Urusan Trantibumlinmas.

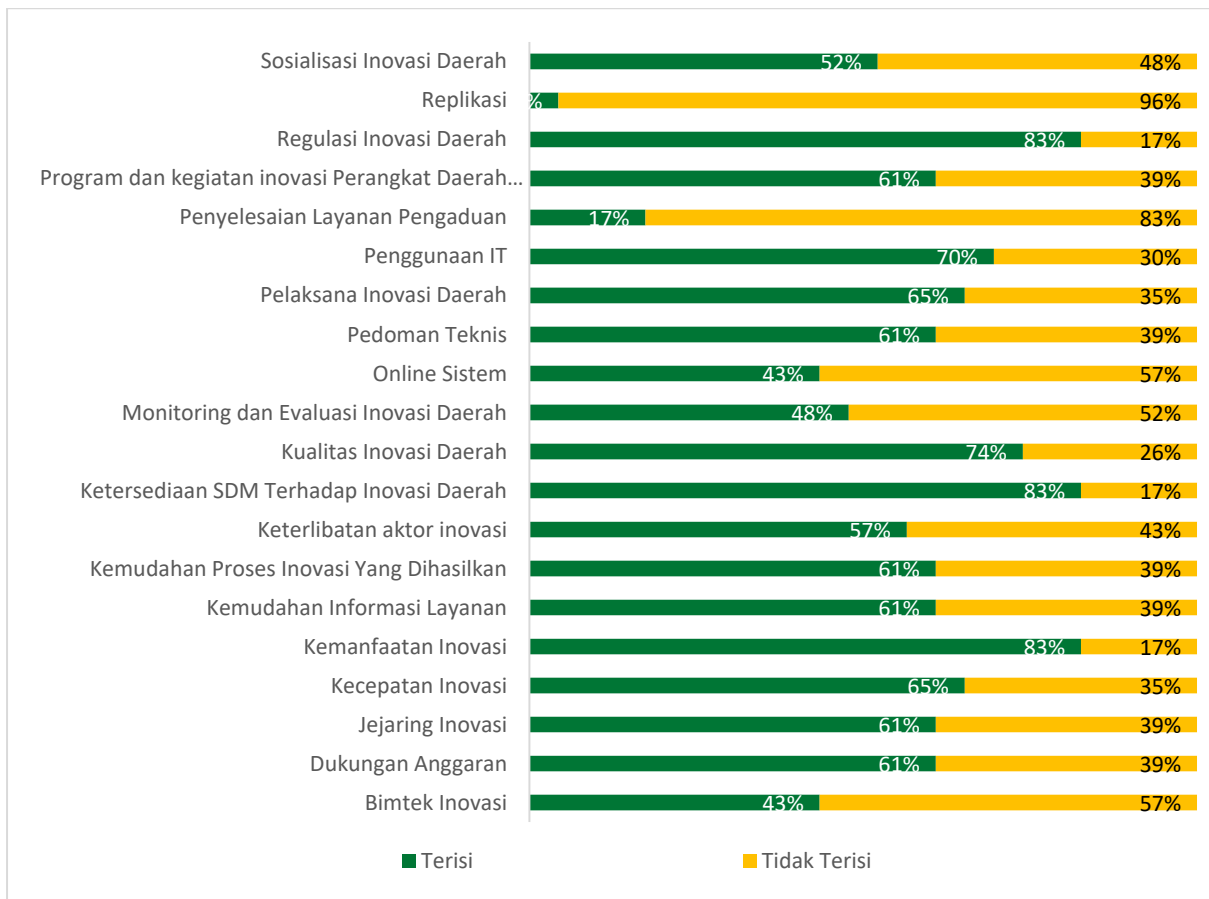
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 90. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Rote Ndao

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 10 (43.48%) inovasi masih berada pada kategori rendah. Sedangkan 10 (43.48%) inovasi lainnya sudah memiliki skor kematangan sedang. Sisanya 3 (13.04%) inovasi memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

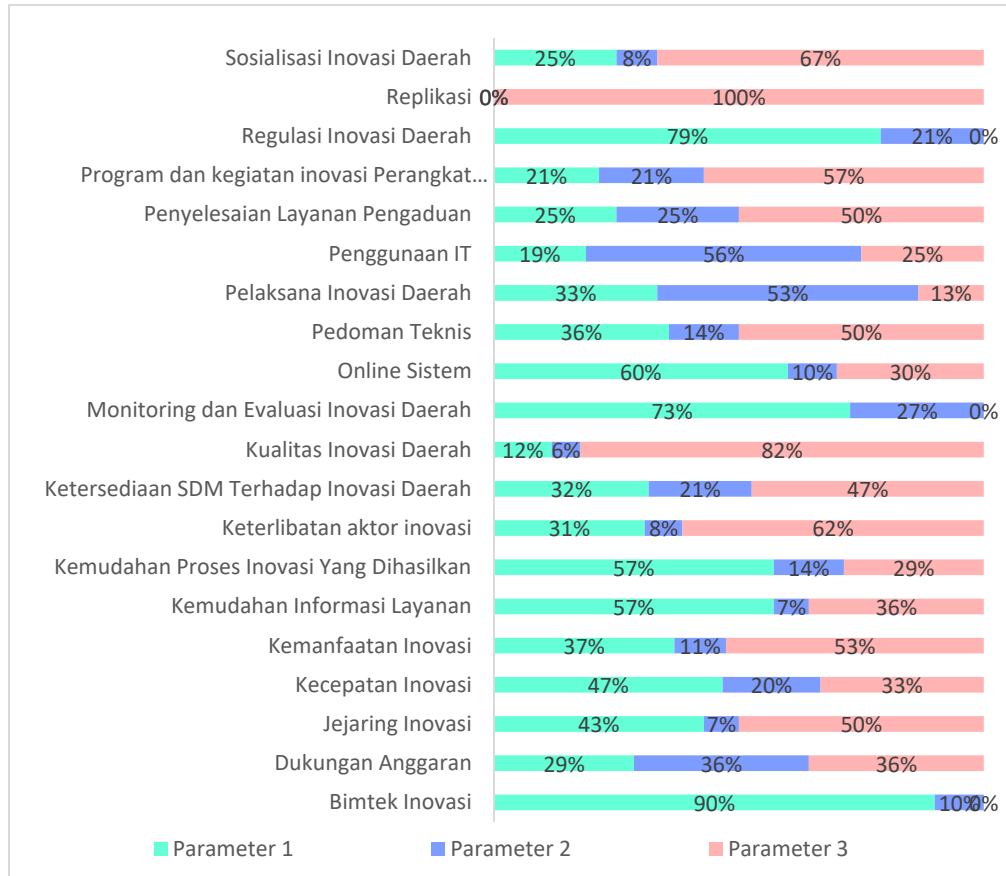


Gambar 91. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao

Dari 23 inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Rote Ndao, 57.61% dari total inovasi telah terisi data pendukung. Sedangkan sisanya, 42.39% masih belum terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian tertinggi yaitu sebesar 83% ada pada indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah dan indikator Kemanfaatan Inovasi. Selanjutnya, indikator

dengan tingkat keterisian terendah adalah pada indikator Replikasi yaitu hanya terisi 4%. Artinya hanya ada 1 inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang terisi data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 92. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao

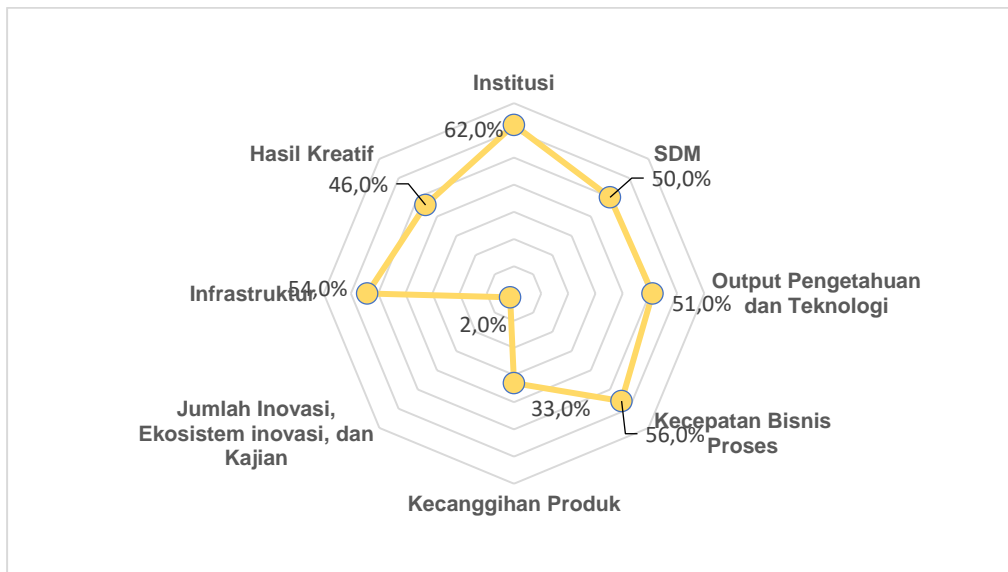
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 100%, Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Penggunaan IT sebesar 56% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 90%. Berarti 90% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Bimtek Inovasi masuk dalam kategori parameter 1 (satu).

j. Daftar Inovasi Kabupaten Rote Ndao beserta Skor Kematangannya

Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Rote Ndao beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
E-Planning	113
"SUARA PAGI" UPTD PUSKESMAS BAA	58
MAI HITA FO'A FO SELA AI'FO dengan M3SC	0
ROTE CERDAS	84
Mama Bo'i Rote (Data Base Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir)	85
Management Pengelolaan Dana Desa untuk Pencegahan Korupsi	0
Pendataan dan Pemetaan Sarana Sanitasi Dasar Berbasis Android menggunakan Aplikasi AVENSA MAPS	70
Operasi Timbang Terpadu (OTT) Lintas Sektor	103
Karantina Desa bagi Orang dari Area Resiko Covid 19	12
Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan	56
Aplikasi Administrasi Perkantoran (SIMAYA)	15
Promosi Destinasi Pariwisata Lewat Media elektronik	73
JEBOL HAMIL (JEMPUT BOLA IBU HAMIL)	28
PEMERIKSAAN IVA	102
Pelatihan Pembuatan Ti'i Langga	48
Operasi Timbang Terpadu	0
" ITA ESA TAFOFO'A ROTE NDAO "	46
Kerajinan Hasil Olahan	63
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)	79
"BUKA MATA POSYANDU"	0
Penilaian Koperasi Sehat	63
Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan	76
WHAATS UP INFO BENCANA DESA/KELURAHAN	0

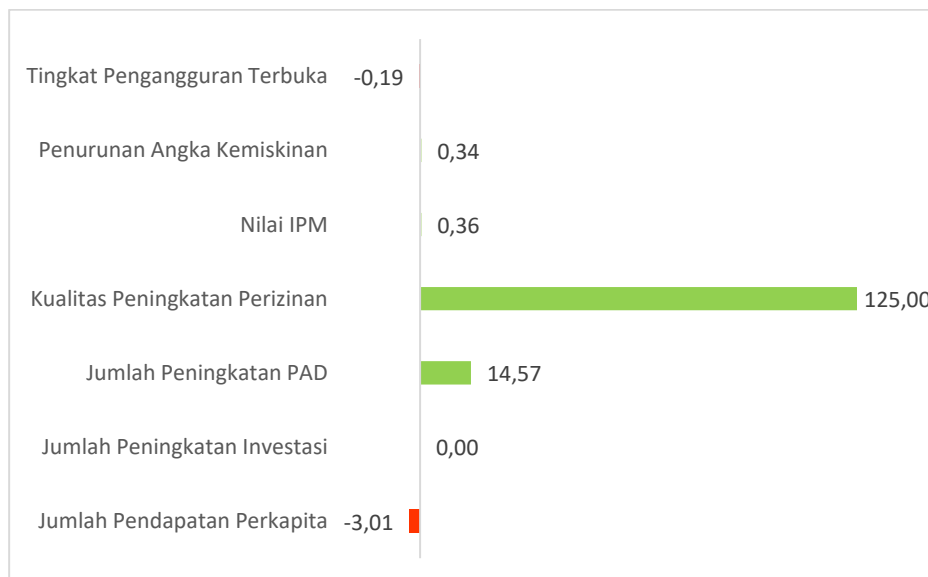
M. KABUPATEN SABU RAIJUA



Gambar 93. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sabu Raijua

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel Institusi pada Kabupaten Sabu Raijua adalah variabel ukur indeks inovasi daerah dengan skor maksimal (parameter 3) dengan capaian tertinggi yaitu sebesar 62.0%. Selanjutnya, variabel dengan capaian yang rendah atau tidak maksimal (parameter 1) adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi dan Kajian yaitu hanya mencapai 2.0%.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 94. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sabu Raijua

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat

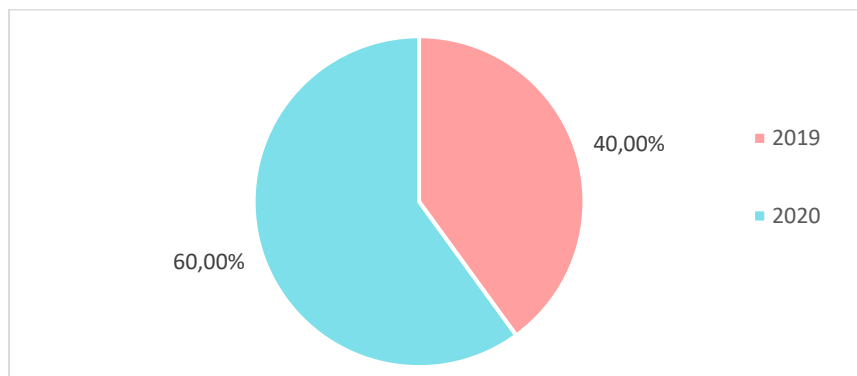
aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sabu Raijua sudah mengalami perkembangan namun belum signifikan untuk semua indikator.

Pada grafik terlihat bahwa indikator Tingkat Pengangguran Terbuka terdapat penurunan sebesar 0.19% namun angka tersebut masih di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yang seharusnya turun 0.92%. Pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan terdapat peningkatan sebesar 0.34%, angka tersebut sedikit di atas dari standar nasional parameter IID yaitu meningkat 0.02%. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan sebesar 0.36% dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan standar nasional parameter IID sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 125%, jauh di atas standar nasional parameter IID yang mengharuskan meningkat 5%.

Peningkatan PAD pada Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan peningkatan 14.57%, nilai tersebut lebih tinggi dari standar nasional parameter IID yaitu naik 8%. Jumlah Peningkatan Investasi yang dilaporkan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua adalah 0% atau tidak ada peningkatan inovasi. Selanjutnya Jumlah Pendapatan Perkapita menurun 3,01%, lebih rendah dari standar nasional parameter IID yaitu penurunan maksimal 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

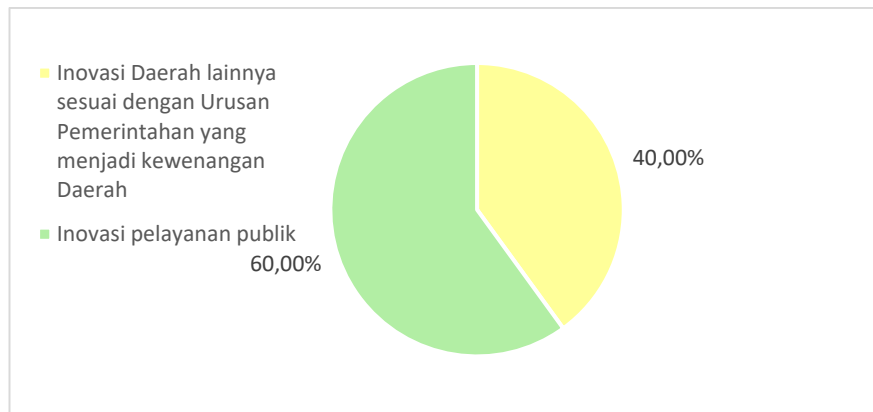
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sabu Raijua

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, 60% atau sebanyak 3 inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Sabu Raijua baru diterapkan pada tahun 2020. Sedangkan 40% atau 2 inovasi telah diterapkan sejak tahun 2019.

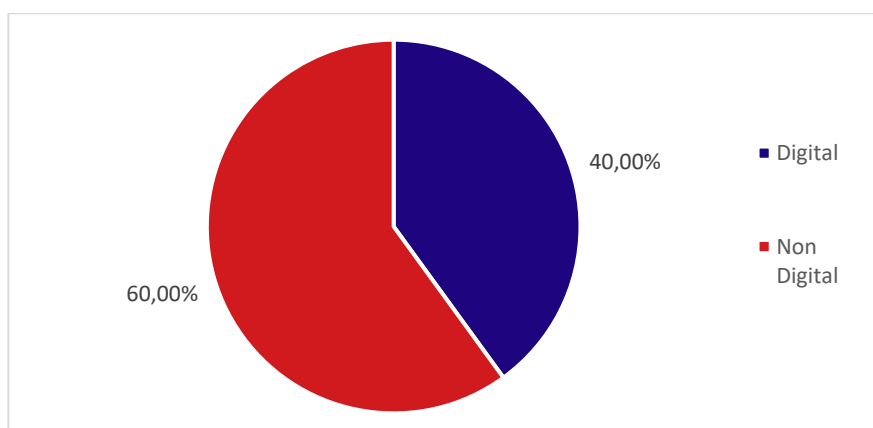
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 96. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sabu Raijua

Berdasarkan bentuknya, Inovasi Pelayanan Publik yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua ada sejumlah 3 (60%) inovasi Dan Inovasi Daerah Bentuk Lain yang Sesuai dengan Urusan Pemerintahan ada sebanyak 2 (40%) inovasi.

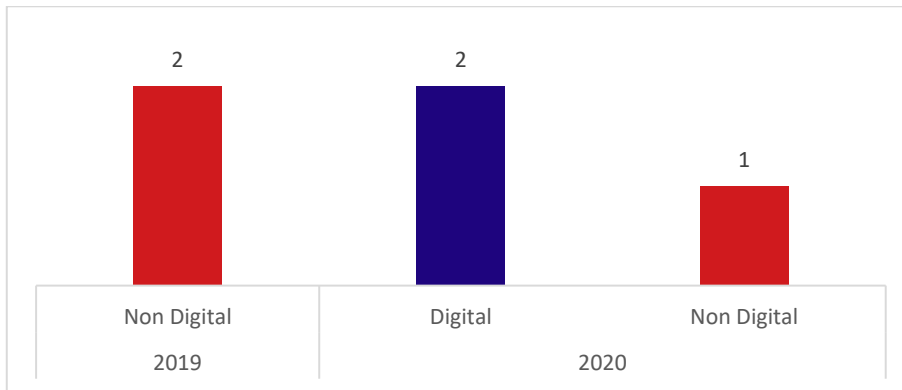
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sabu Raijua

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya 3 (60%) dari 5 inovasi daerah yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua merupakan inovasi Non Digital dan sisanya 2 (40%) inovasi merupakan inovasi Digital.

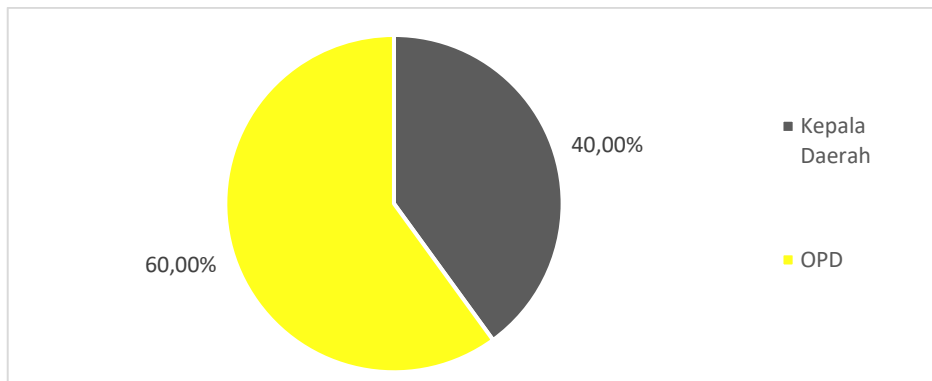
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 98. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sabu Raijua

Jumlah inovasi jenis Non digital menurun menjadi 1 inovasi di tahun 2020 dari sebelumnya ada 2 inovasi pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 di Kabupaten Sabu Raijua meningkat menjadi 2 inovasi dari sebelumnya tidak ada inovasi jenis tersebut di tahun 2019.

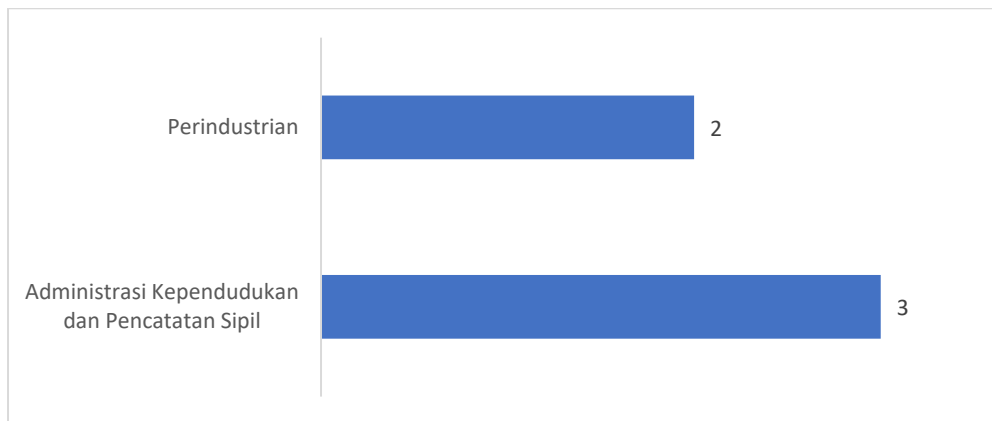
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 99. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sabu Raijua

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 3 (60%) inovasi. Sementara sisanya 2 (40%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

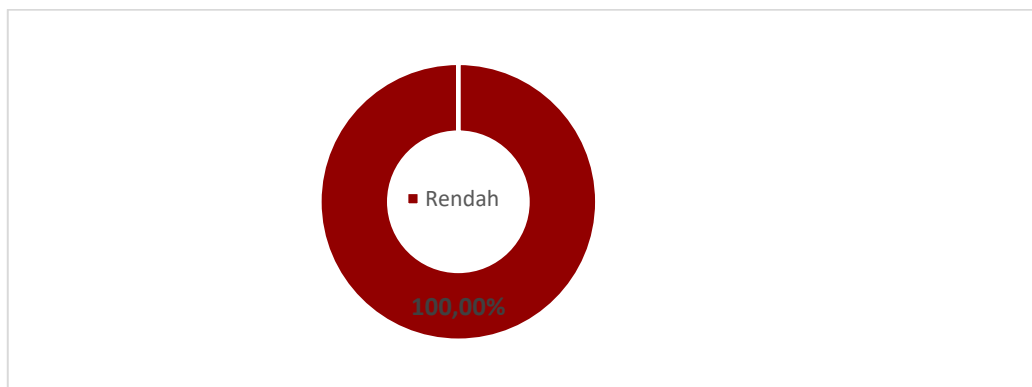
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 100. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sabu Raijua

Inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Urusan Pemerintahan pada tahun 2021 terbagi 2 urusan, yaitu 2 urusan Perindustrian dan 3 urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Belum ada satu pun inovasi yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaporkan pemerintah Sabu Raijua.

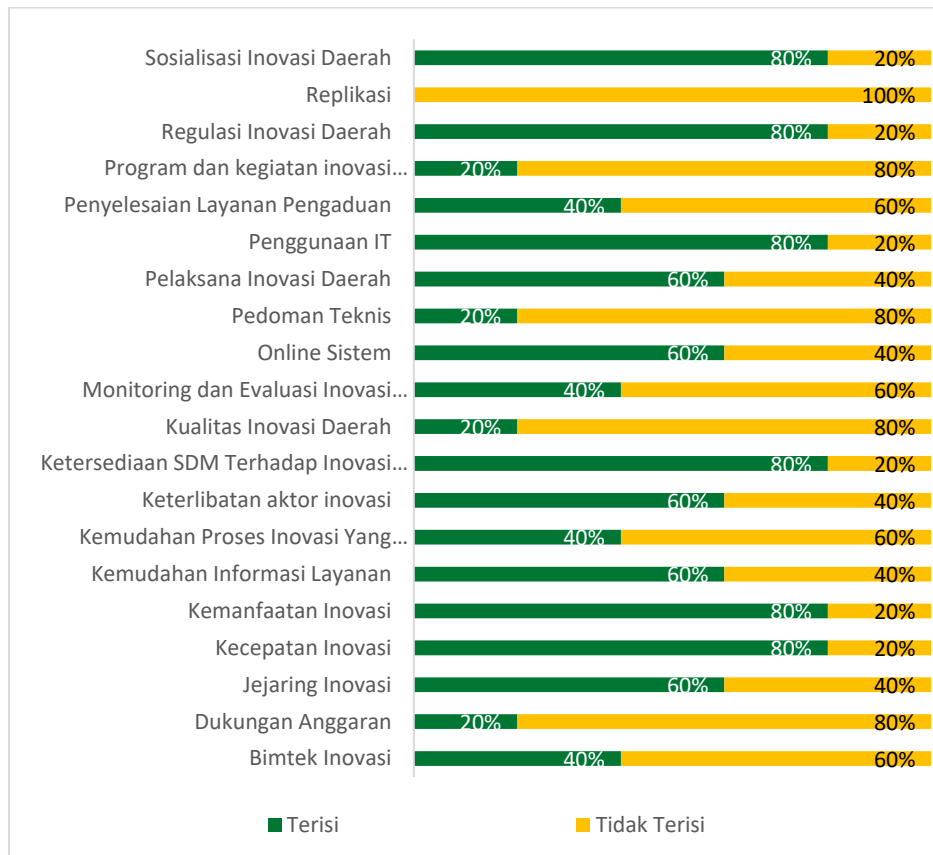
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 101. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sabu Raijua

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, semua (100%) inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua masih masuk kategori rendah. Skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan di bawah 50.

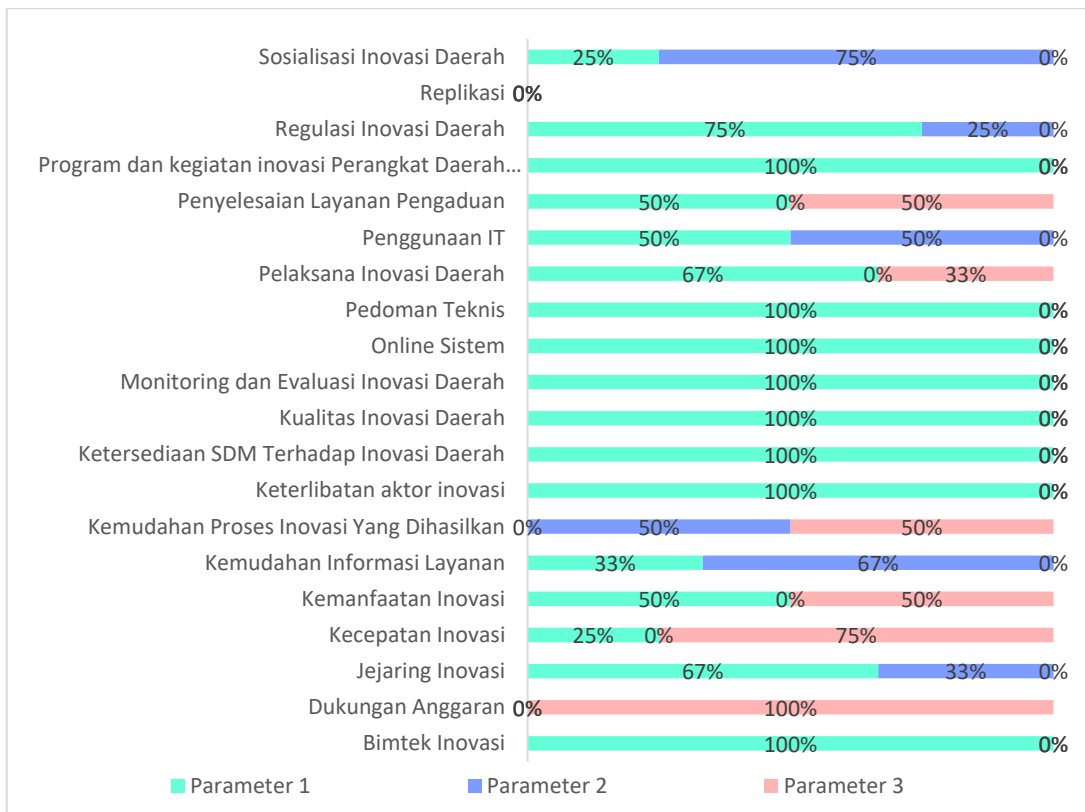
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 102. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sabu Raijua

Dari 5 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sabu Raijua, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 51% sedangkan 49% lainnya tidak terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian tertinggi yaitu 80% adalah pada indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Ragulasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi dan Kecepatan Inovasi. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 0% yang berarti tidak satu pun inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengisi data pendukung untuk indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 103. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sabu Raijua

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran yaitu sebesar 100%. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah sebesar 75%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi yang mencapai 100% ada pada beberapa indikator yaitu indikator Pedoman Teknis, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, dan Bimtek Inovasi.

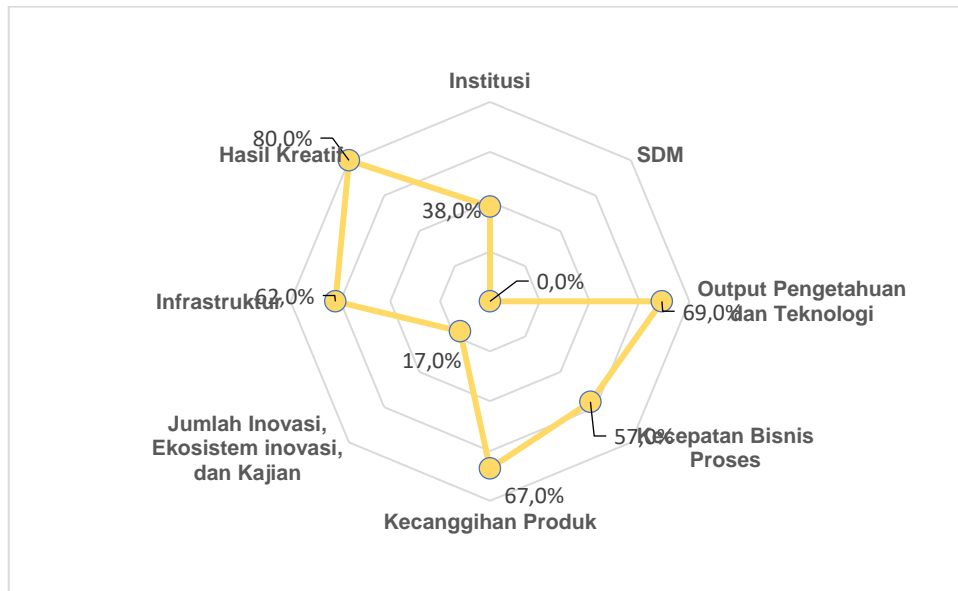
j. Daftar Inovasi Kabupaten Sabu Raijua beserta Skor Kematangannya

Tabel 10. Daftar Inovasi Kabupaten Sabu Raijua beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Pengembangan Garam Kualitas Premium Dengan Metode Geomembran HDPE 500 Micron	0
Garam Nataga Cap Otak	0

Anak Lahir Pulang Bawa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga	22
Pelayanan Online via WhatsApp dan Facebook	0
PELDESKOL SARA	6

N. KABUPATEN SIKKA



Gambar 104. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sikka

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas pada Kabupaten Sikka, variabel Hasil Kreatif adalah variabel yang telah mencapai skor maksimal (parameter 3) dengan capaian tertinggi yaitu dengan skor 80%. Sedangkan variabel dengan capaian terendah adalah pada variabel SDM yaitu dengan skor 0%

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



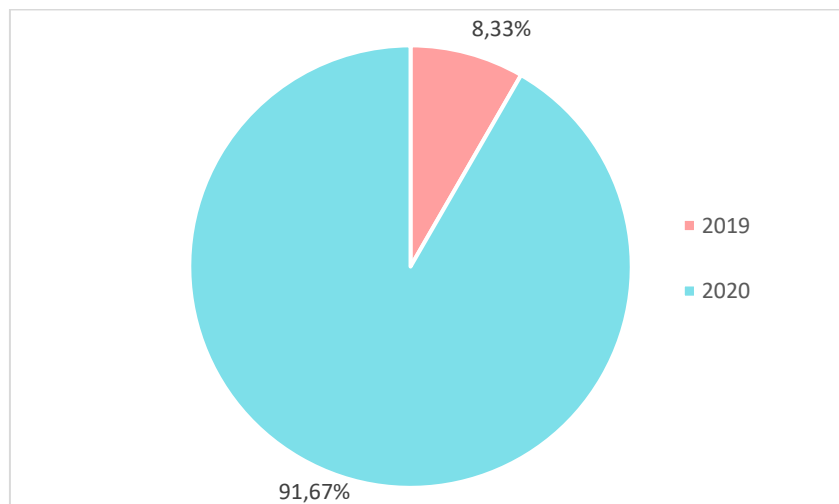
Gambar 105. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sikka

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Sikka hanya memasukkan data pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan. Terlihat bahwa terdapat penurunan sebesar 7.85% pada indikator tersebut yang masih di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID).

Indikator lain pada Satuan Pemerintah Daerah belum dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka untuk tahun pengukuran 2021.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

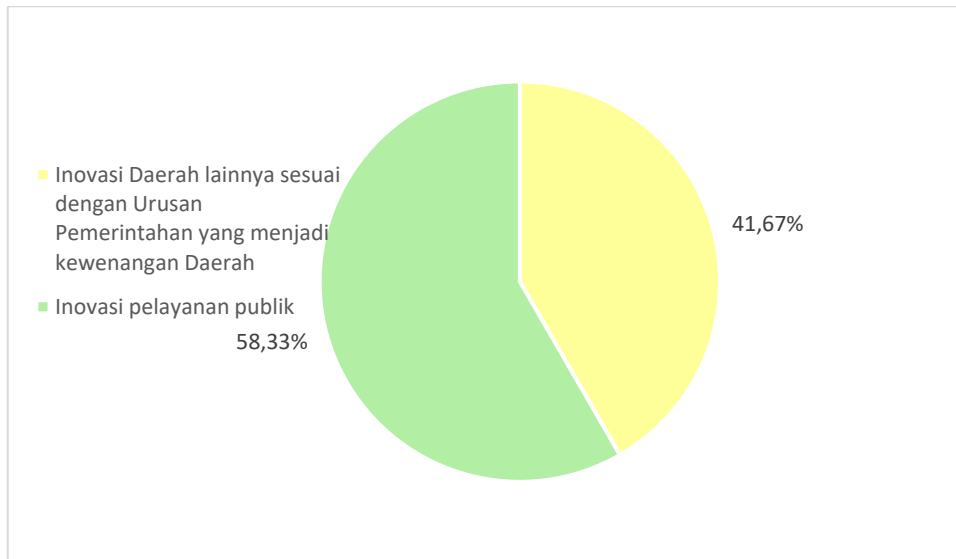
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sikka

Dilihat dari tahun penerapan inovasi mayoritas inovasi yang dilaporkan Kabupaten Sikka baru diterapkan pada tahun 2020, yaitu sebanyak 11 (91.67%). Sisanya, 8% atau 1 inovasi sudah diterapkan pada tahun 2019.

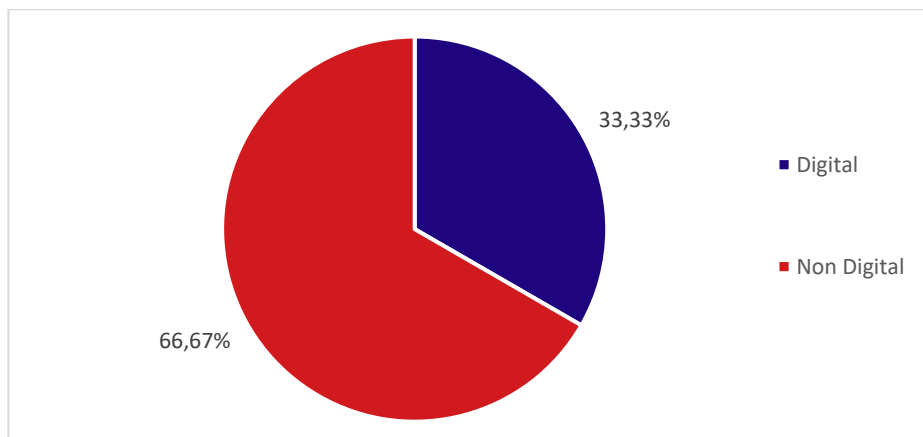
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 107. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sikka

Berdasarkan bentuknya, terdapat 7 (58.33%) inovasi bentuk Pelayanan Publik yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sikka. Selanjutnya, Inovasi Daerah Bentuk Lain Yang Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan ada sejumlah 5 (41.67%) inovasi. Belum ada inovasi bentuk tata kelola pemerintahan daerah yang dilaporkan pada tahun penilaian 2021.

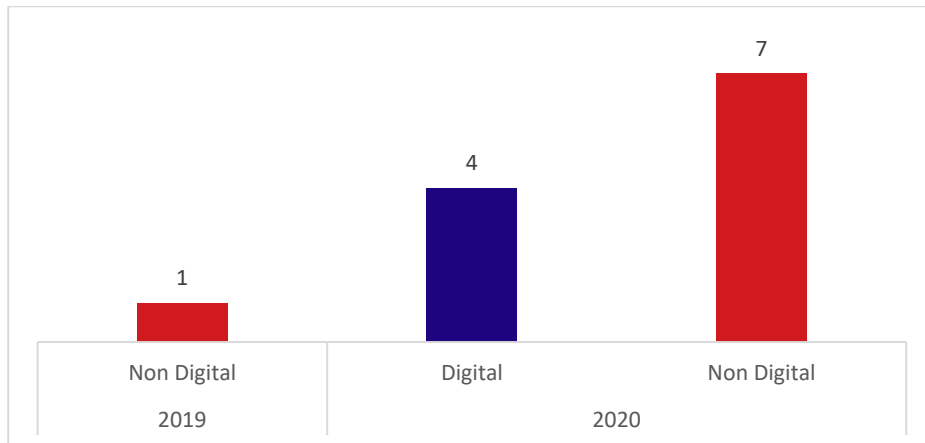
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sikka

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi berjenis Non Digital, yaitu sebanyak 8 (66.67%) inovasi. Sedangkan sisanya sebanyak 4 (33.33%) inovasi berjenis Digital.

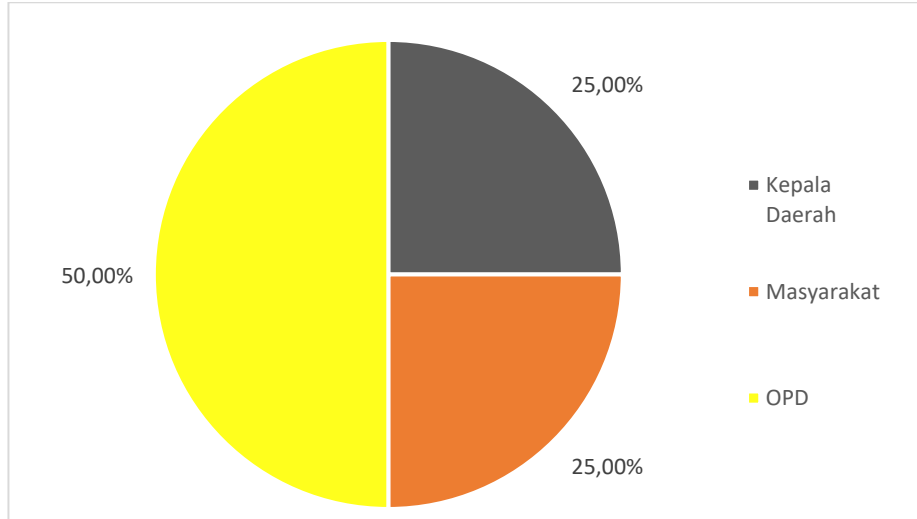
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 109. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sikka

Inovasi Non Digital meningkat dari 1 inovasi menjadi 7 pada tahun 2020 menurut laporan pemerintah Kabupaten Sikka. Sedangkan inovasi Digital meningkat menjadi 4 inovasi pada tahun 2020 dari sebelumnya tidak ada inovasi Digital pada tahun 2019.

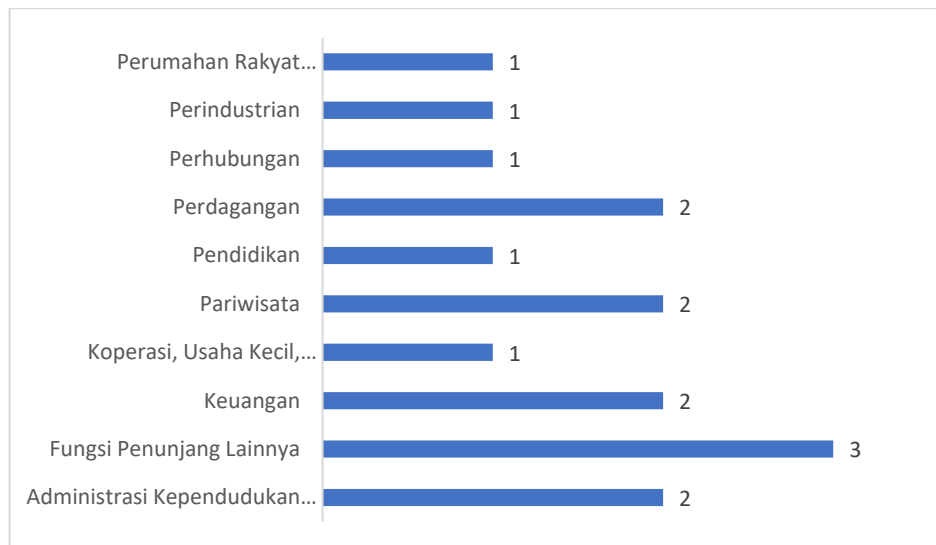
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 110. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sikka

50% atau 3 dari 6 inovasi yang dilaporkan pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan sisanya masing-masing 25% atau 3 inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah dan Masyarakat. Belum ada inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Sikka yang dilaporkan oleh ASN dan DPRD.

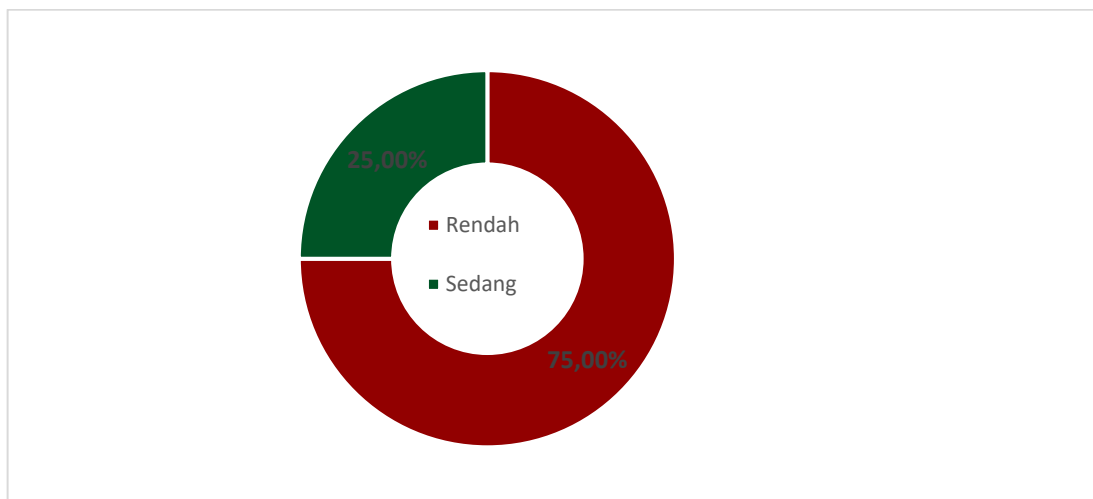
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 111. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sikka

Sebaran inovasi berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang di Kabupaten Sikka mencakup 2 dari 6 urusan diantaranya 1 inovasi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, serta 1 inovasi urusan Pendidikan. Inovasi terbanyak ada pada Urusan Fungsi Penunjang Lainnya yaitu sebanyak 3 inovasi.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

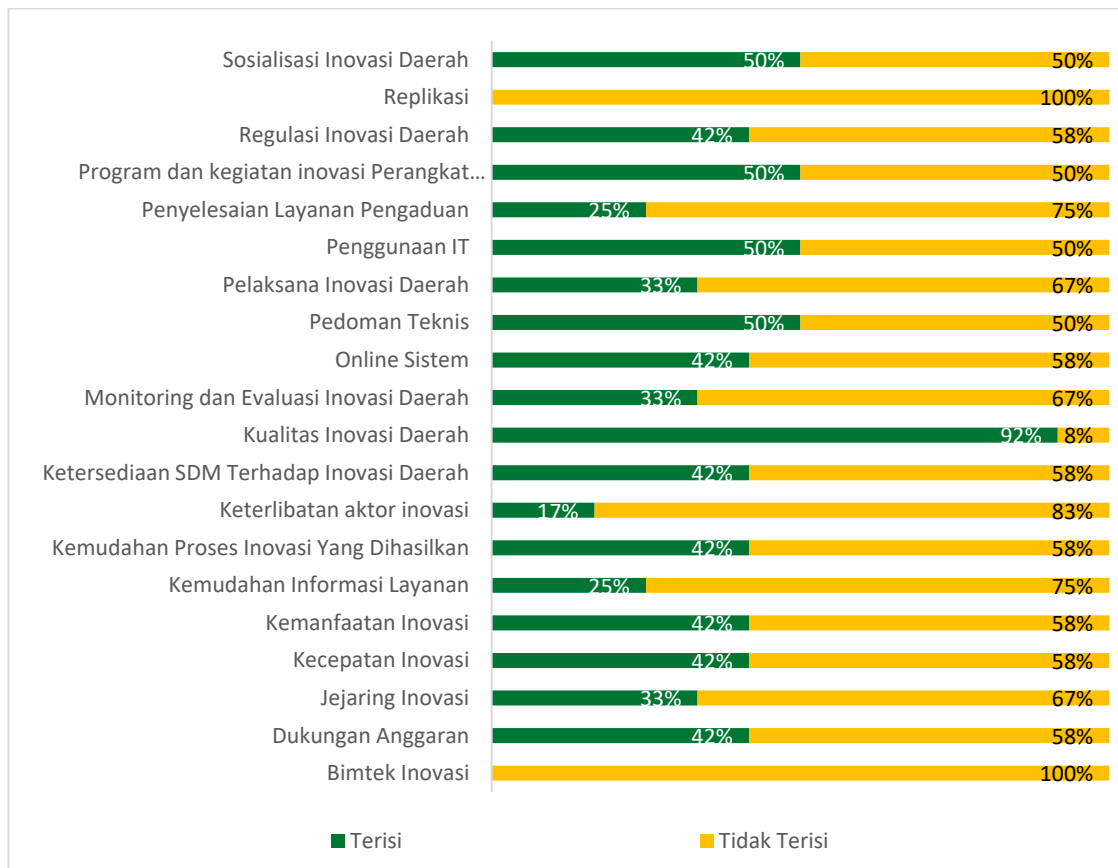


Gambar 112. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sikka

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sikka, skor kematangan inovasinya masih berkategori rendah yaitu sebanyak 9 (75%) inovasi. Sedangkan sisanya 3

(25%) inovasi berkategori sedang. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan di bawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

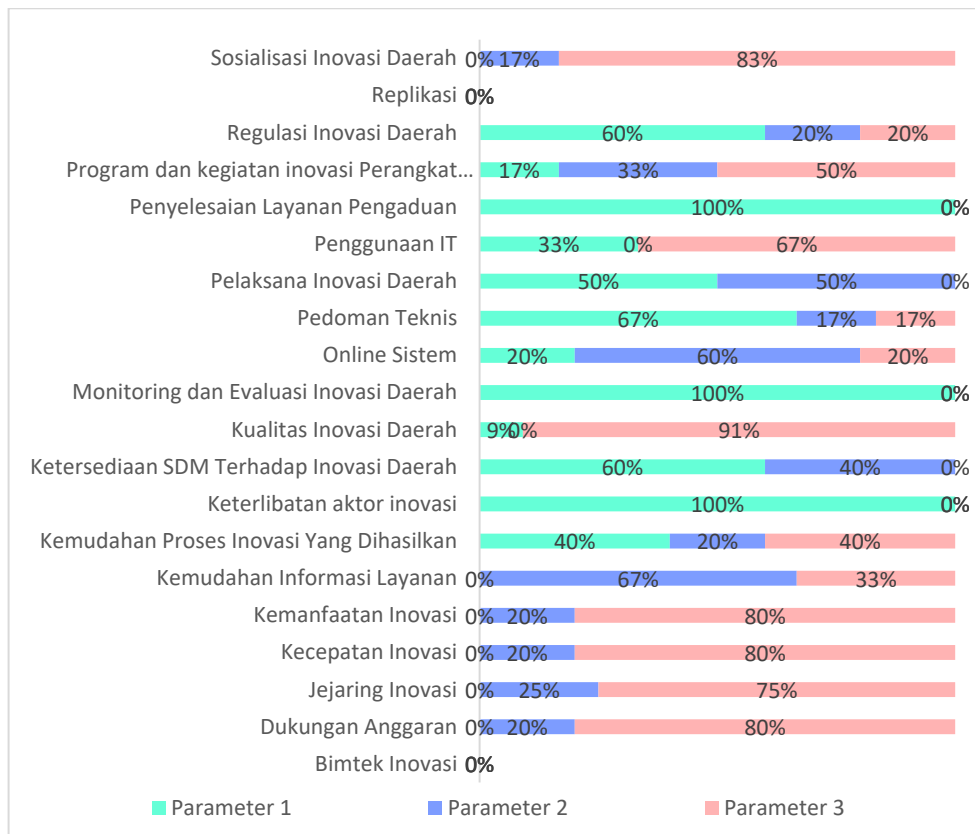
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 113. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sikka

Dari 20 inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Sikka, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 37.50% sedangkan 62.50% lainnya tidak terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian tertinggi adalah pada indikator Kualitas Inovasi Daerah yaitu sebesar 92%. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi dan Bimtek Inovasi yaitu sebesar 0% artinya tidak satu pun inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 114. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah yaitu sebesar 91%. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kemudahan Informasi Layanan sebesar 67%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 100%, artinya semua inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sikka telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah.

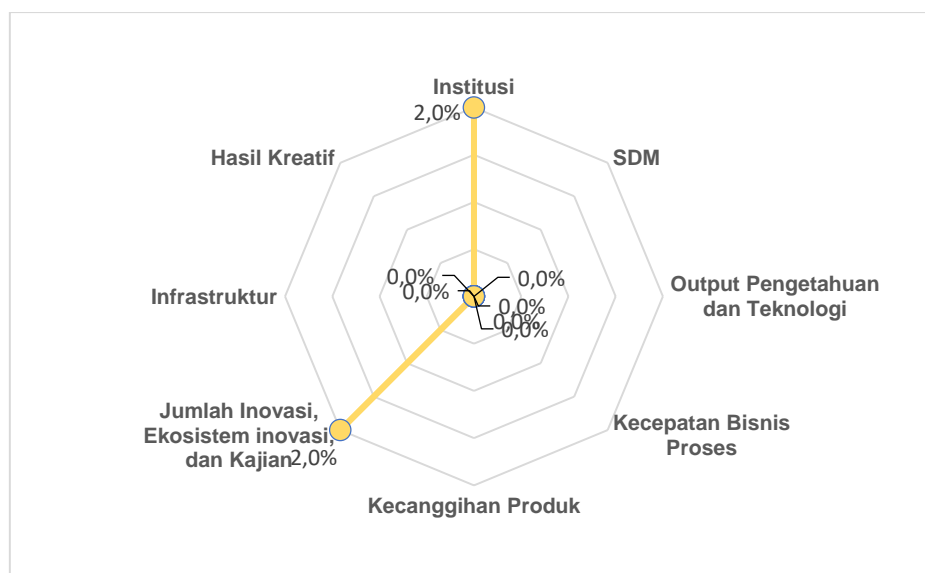
j. Daftar Inovasi Kabupaten Sikka beserta Skor Kematangannya

Tabel 11. Daftar Inovasi Kabupaten Sikka beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
PTSP Dispedukcapil Kabupaten Sikka Bebas Covid-19	15
New Normal Pasar Maumere	15

New Normal Rumah Makan Maumere	15
Hotel Pantai Wailiti - Maumere	15
New Normal Pasar Modern Maumere	15
Wisata Budaya Maumere Bebas Covid-19	15
Transportasi Umum Maumere	15
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa bagi Mahasiswa	91
Sistem Informasi Sikka Rumah Tidak Layak Huni (SIM RTLH)	77
Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Online (PBB P2) "Si P@P@ On"	91
Pengintegrasian Data Pertanahan dengan PBB P2 dan BPHTB secara online	18
Pengajuan Layanan Kependudukan via WhatsApp	12

O. KABUPATEN SUMBA BARAT



Gambar 115. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumba Barat

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, hanya 2 variabel yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat, yaitu variabel Institusi dengan skor 2.0% serta variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian juga mendapatkan skor serupa yaitu 2.0%.

Variabel lainnya seperti SDM, Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecepatan Bisnis Proses, Kecanggihan Produk, Infrastruktur dan Hasil Kreatif belum dilaporkan untuk tahun pengukuran 2021.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

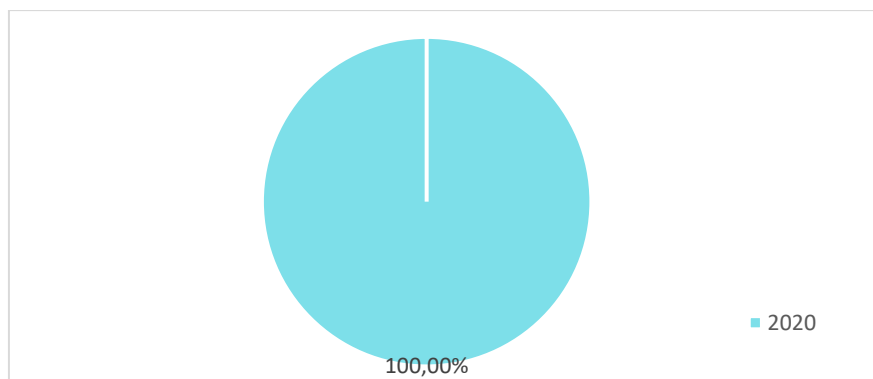
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,00
Penurunan Angka Kemiskinan	0,00
Nilai IPM	0,00
Kualitas Peningkatan Perizinan	0,00
Jumlah Peningkatan PAD	0,00
Jumlah Peningkatan Investasi	0,00
Jumlah Pendapatan Perkapita	0,00

Gambar 116. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumba Barat

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa indikator-indikator pada aspek Satuan Pemerintah Daerah tidak ada satu pun data yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

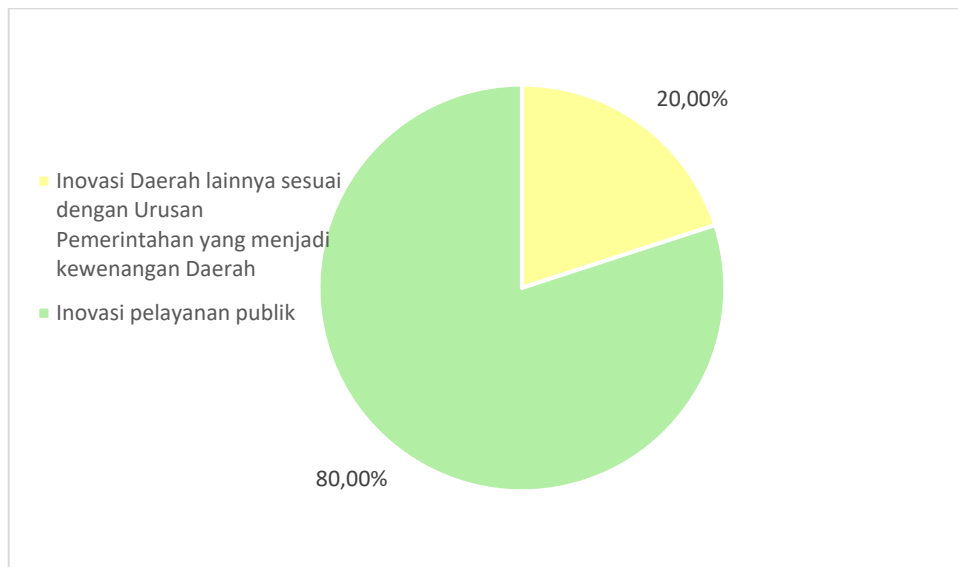
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 117. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, keseluruhan inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Barat diterapkan pada tahun 2020.

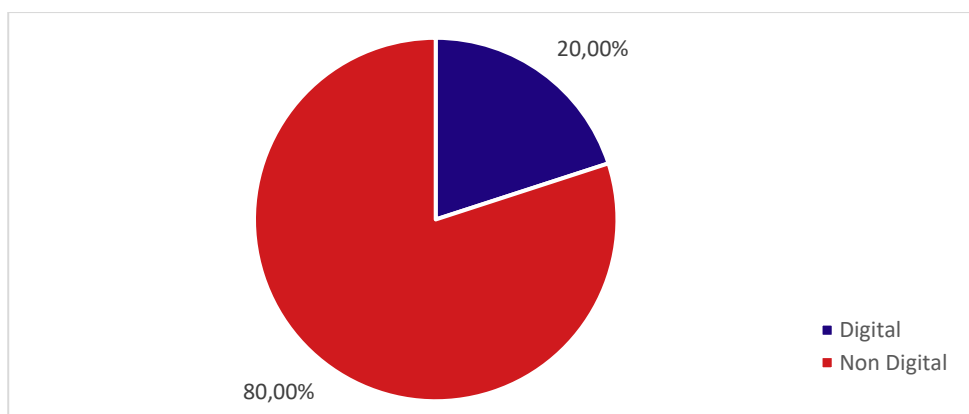
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 118. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat

Berdasarkan bentuknya, inovasi bentuk Pelayanan Publik adalah inovasi yang paling banyak dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat, yaitu sejumlah 4 (80.00%) inovasi. Sedangkan 1 (20.00%) sisanya adalah Inovasi Daerah Lainnya Sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

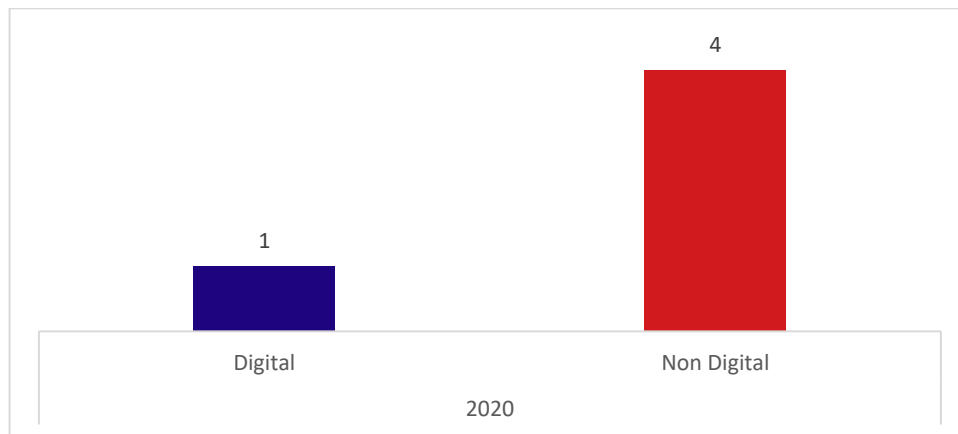
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 119. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Barat berjenis Non Digital, yaitu sebanyak 4 (80%) inovasi. Sedangkan sisanya sebanyak 1 (20%) inovasi berjenis Digital.

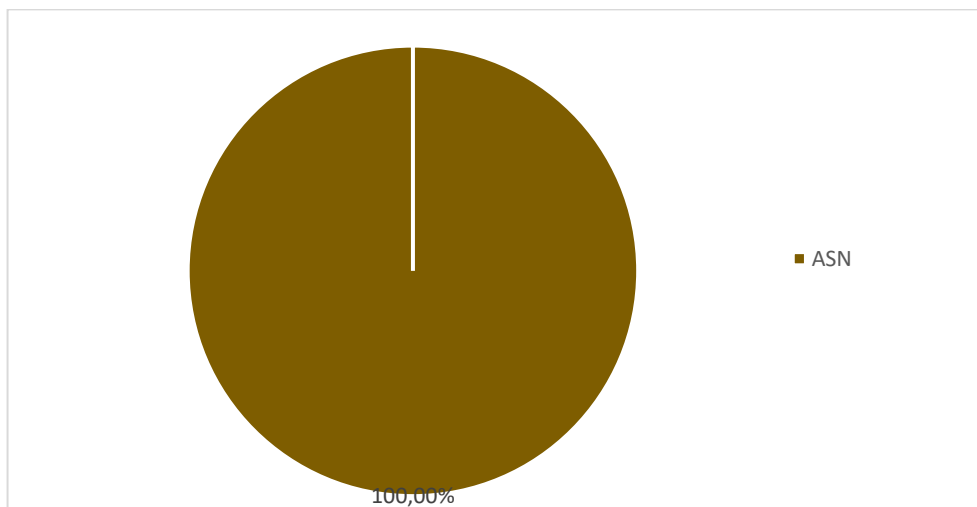
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 120. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Kabupaten Sumba Barat

Dikarenakan inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk tahun 2021 hanya diterapkan mulai tahun 2020, sehingga tidak bisa terlihat progres jumlah inovasi per tahunnya.

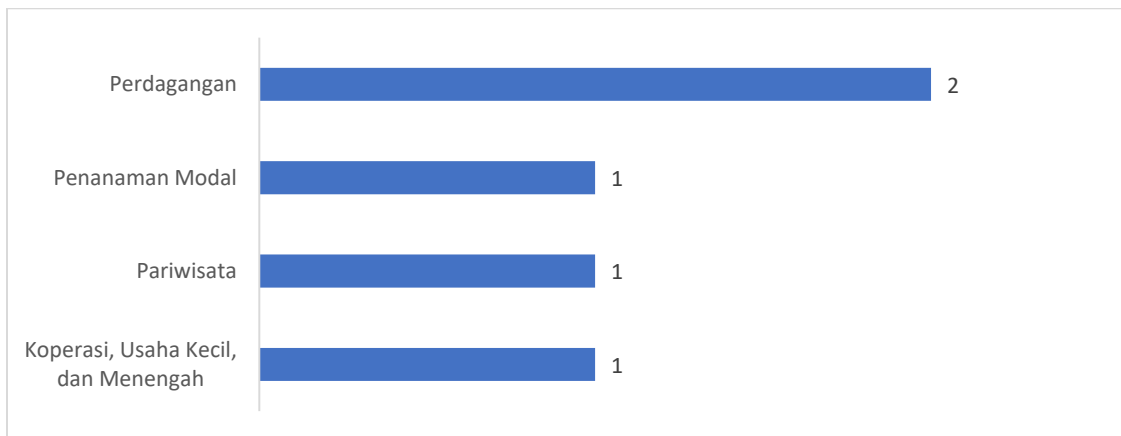
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 121. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2021 diinisiasi sepenuhnya oleh ASN, yaitu sejumlah 5 (100%) inovasi. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Kepala Daerah dan DPRD belum melaporkan menginisiasi inovasi di Kabupaten Sumba Barat untuk laporan tahun 2021.

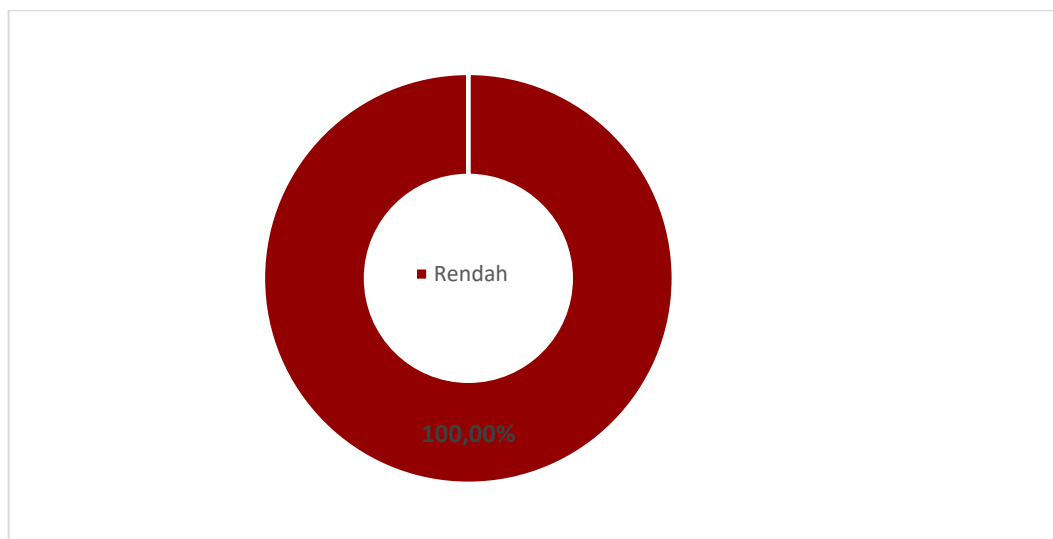
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 122. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumba Barat

Inovasi daerah pada Kabupaten Sumba Barat dari 5 inovasi yang dilaporkan terdiri dari 2 inovasi urusan Perdagangan, 1 urusan Penanaman Modal, 1 urusan Pariwisata dan 1 urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Tidak ada satu pun inovasi yang berkaitan dengan Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

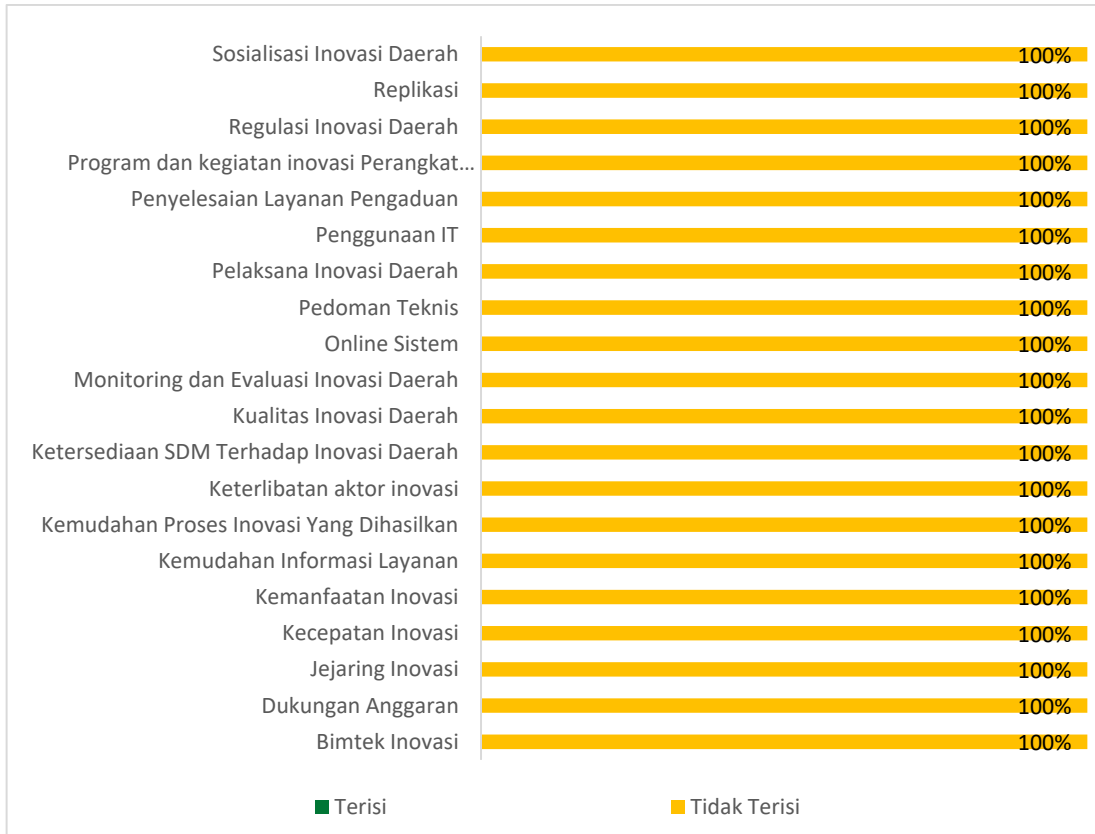


Gambar 123. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumba Barat

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, belum ada inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang memiliki skor tinggi dan sedang. Semua inovasi yang dilaporkan masih masuk katagori skor

kematangan rendah. Skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan di bawah 50.

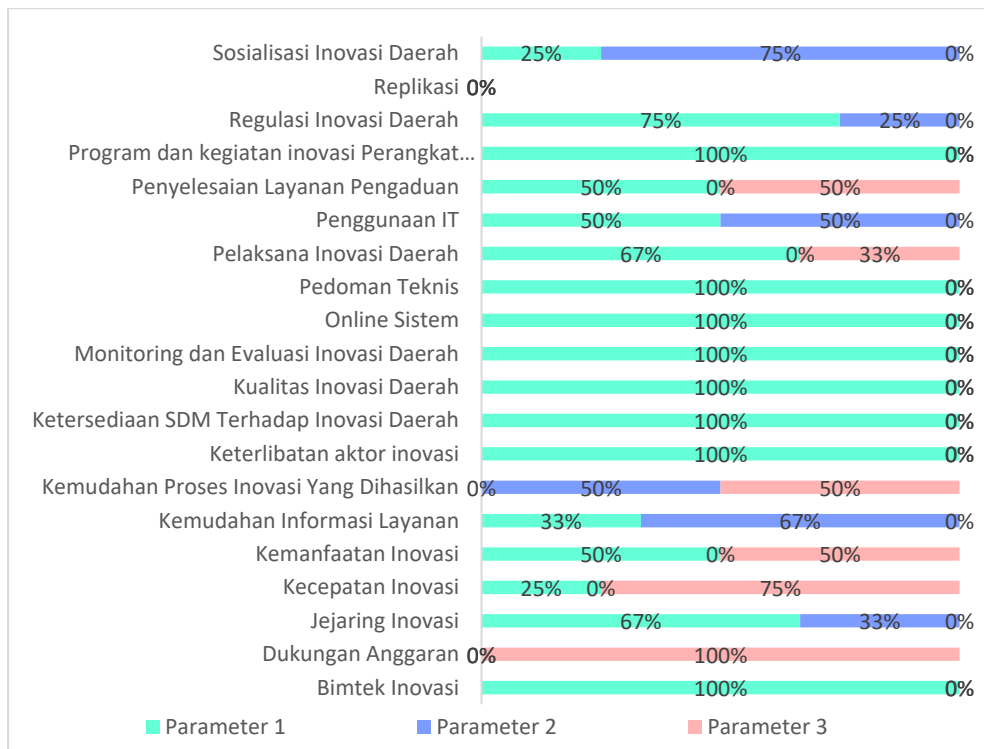
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 124. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Barat

Dari 5 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumba Barat, 100% atau keseluruhan inovasi yang dilaporkan tidak terisi data pendukung.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 125. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Barat

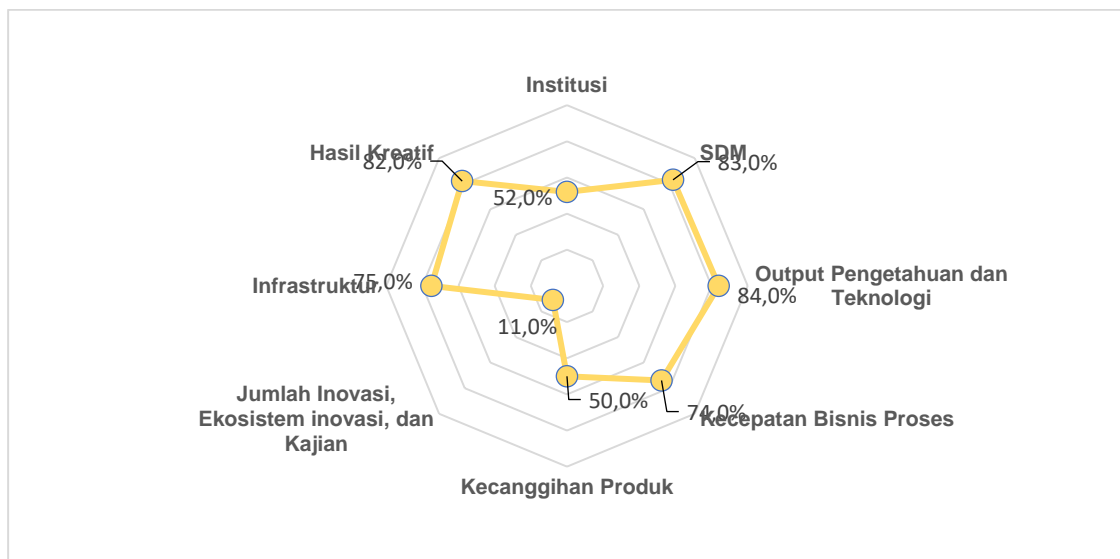
Dikarenakan tidak satu pun inovasi yang dilaporkan dilengkapi dengan data pendukung, sehingga tidak dapat dideskripsikan tingkat keterisian parameter dalam indikator satuan inovasi daerah.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Sumba Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 12. Daftar Inovasi Kabupaten Sumba Barat beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Pelayanan DPMPSTP Sehat Bebas Covid19	0
Restoran Sehat Bebas Covid19	0
Belanja Tenang Covid19 Hilang	0
Pasar Tradisional Bangkit Lawan Covid19	0
Kampung Wisata Praijing Menghadapi New Normal	0

P. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



Gambar 126. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai skor maksimal (parameter 3) tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi yaitu sebesar 84.0%. Sedangkan variabel dengan capaian terendah adalah pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian dengan skor 11.0%. yang berarti capaian skor indikator-indikator di variabel tersebut masih rendah.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 127. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat

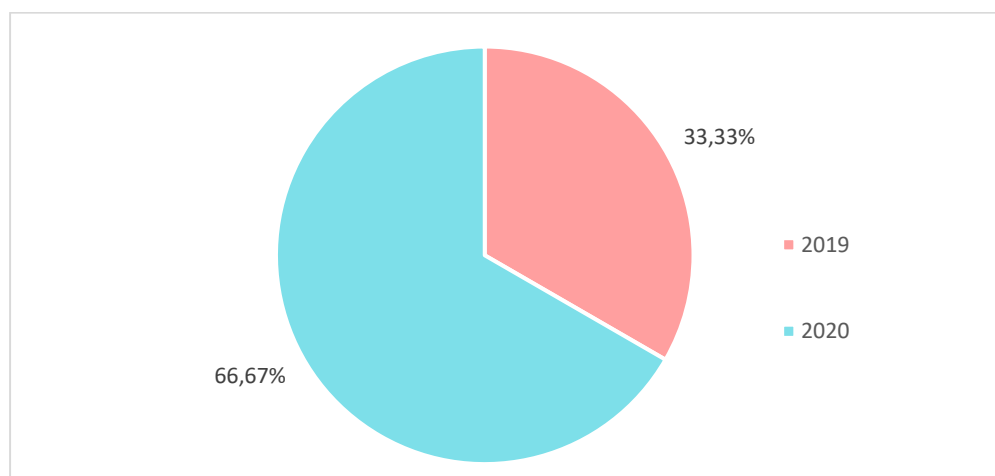
aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Dari grafik di atas terlihat sebagian besar indikator pada aspek Satuan Pemerintahan Daerah mengalami penurunan.

Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka terdapat penurunan sebesar 1.11%, nilai ini di atas standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yaitu penurunan sebesar minimal 0.92%. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami peningkatan dalam upaya Penurunan Angka Kemiskinan, yaitu sebesar 0.06%, sedikit di atas standar nasional parameter IID yaitu naik 0.02%. Nilai IPM naik 0.32% di atas standar nasional parameter IID yaitu sebesar 0% atau tetap.

Pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan dilaporkan terjadi peningkatan sebesar 12.82%, nilai ini di atas standar nasional parameter IID yang harusnya naik minimal 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD menurun 4.89% jauh di bawah standar nasional parameter IID yang seharusnya naik setidaknya 8%. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan Investasi juga menurun sebesar 14.20% di bawah standar nasional parameter IID yang seharusnya naik 0.45%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita di Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami penurunan sebesar 56.48%, jauh di bawah standar nasional parameter IID yang seharusnya turun maksimal 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

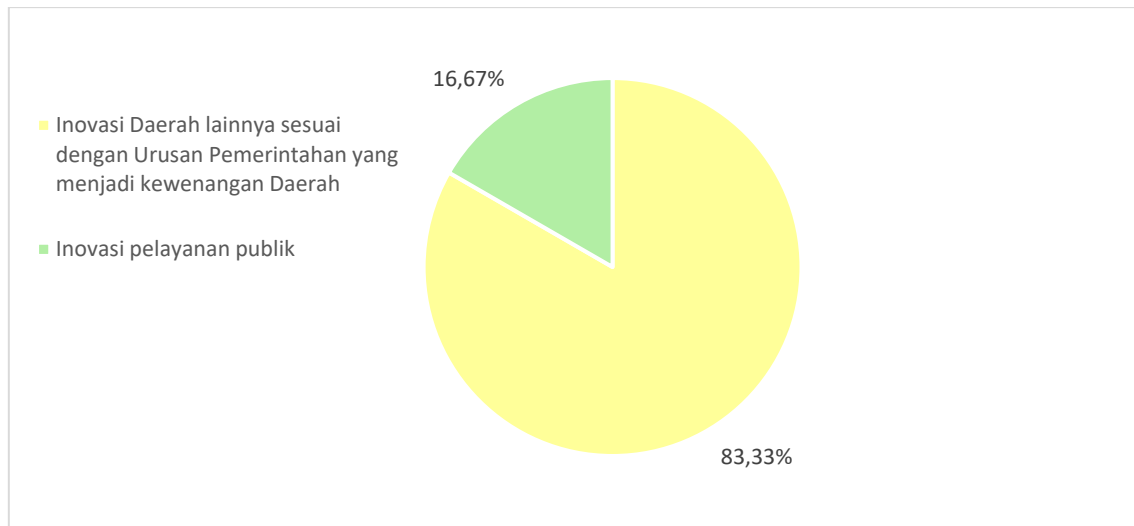
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 128. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Dilihat dari tahun penerapan inovasi 66.67% atau sebanyak 4 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumba Barat Daya baru diterapkan pada tahun 2020. Sedangkan 33.33% atau 2 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2019.

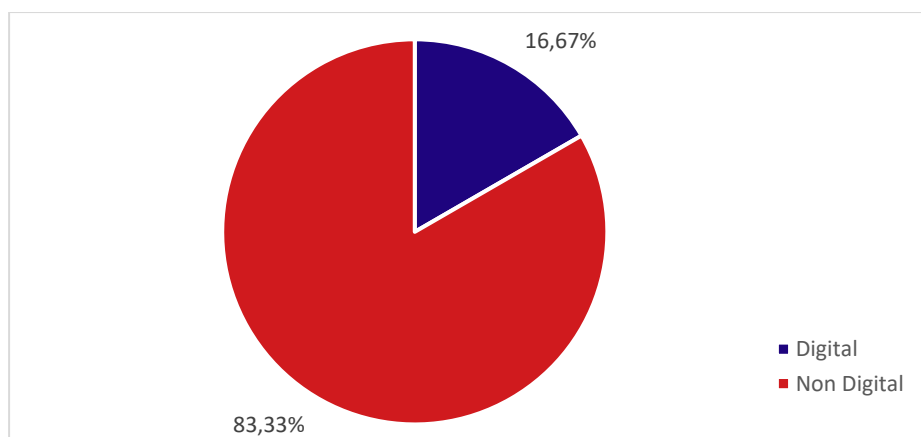
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 129. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan bentuknya mayoritas inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah inovasi yang berbentuk Pelayanan Publik, yaitu sebanyak 5 (83.33%) inovasi. Sisanya 1 (16.67%) inovasi adalah inovasi Daerah bentuk Lain yang Sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

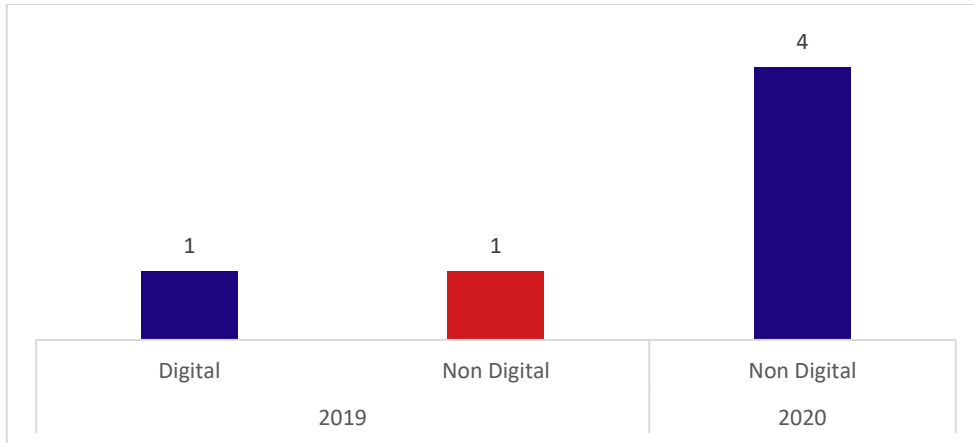
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 130. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, inovasi berjenis non digital ada sebanyak 5 (83.33%) inovasi. Sedangkan sisanya sebanyak 1 (16.67%) inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berjenis Digital.

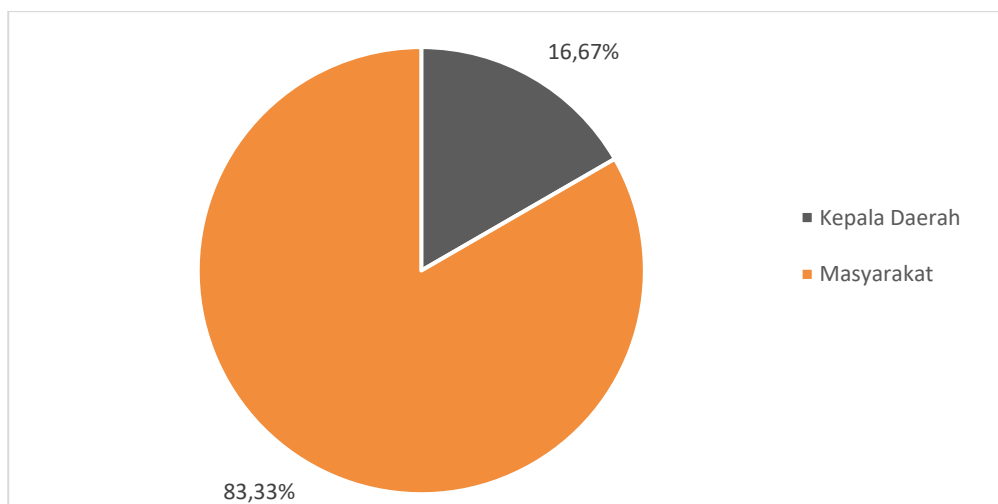
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 131. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumba Barat Daya

Inovasi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang berjenis Digital meningkat menjadi 4 inovasi di tahun 2020 dari sebelumnya ada 1 inovasi jenis Digital di tahun 2019. Sedangkan inovasi Non Digital tidak dilaporkan pada tahun 2020 setelah sebelumnya ada 1 inovasi di tahun 2019.

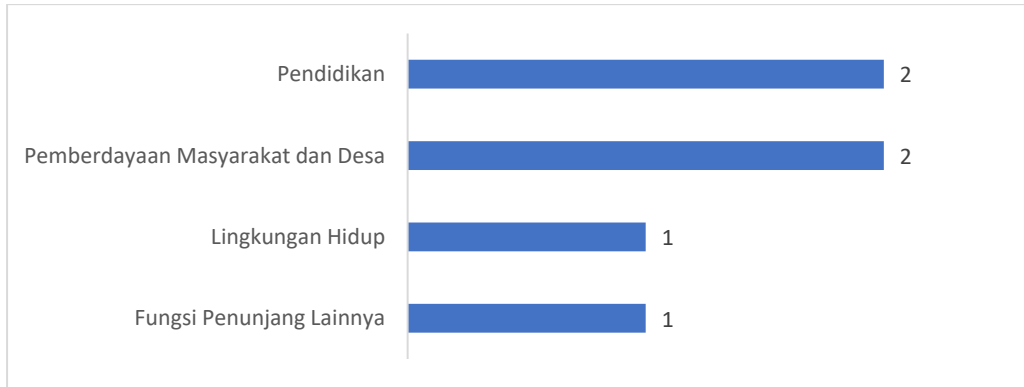
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 132. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh Masyarakat, yaitu sejumlah 5 (83.33%) inovasi. Sementara sisanya 1 (16.67%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Belum ada inovasi yang dilaporkan diinisiasi oleh OPD, ASN dan DPRD.

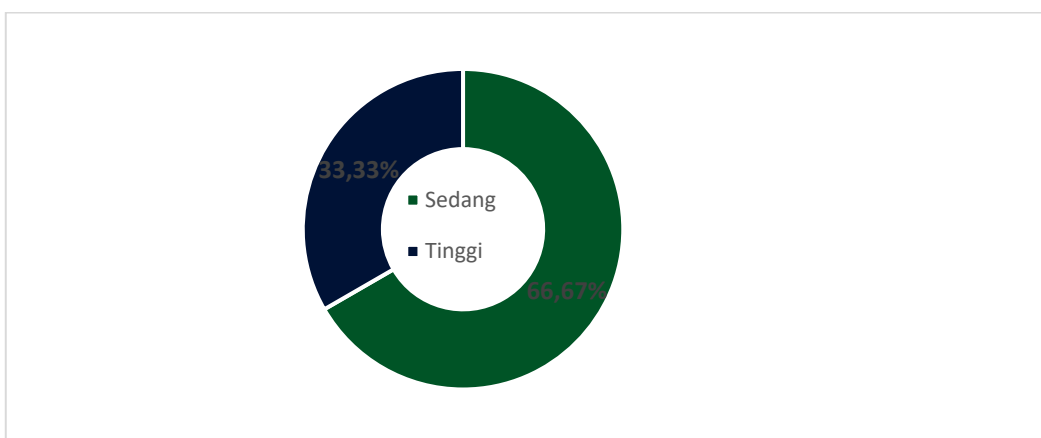
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 133. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Dari 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya hanya melaporkan inovasi pada 1 urusan saja, yaitu urusan Pendidikan, sebanyak 2 inovasi. Selain itu ada juga inovasi berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu 2 inovasi pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta 1 inovasi urusan Lingkungan Hidup. Sisanya ada 1 inovasi pada Fungsi Penunjang Lainnya.

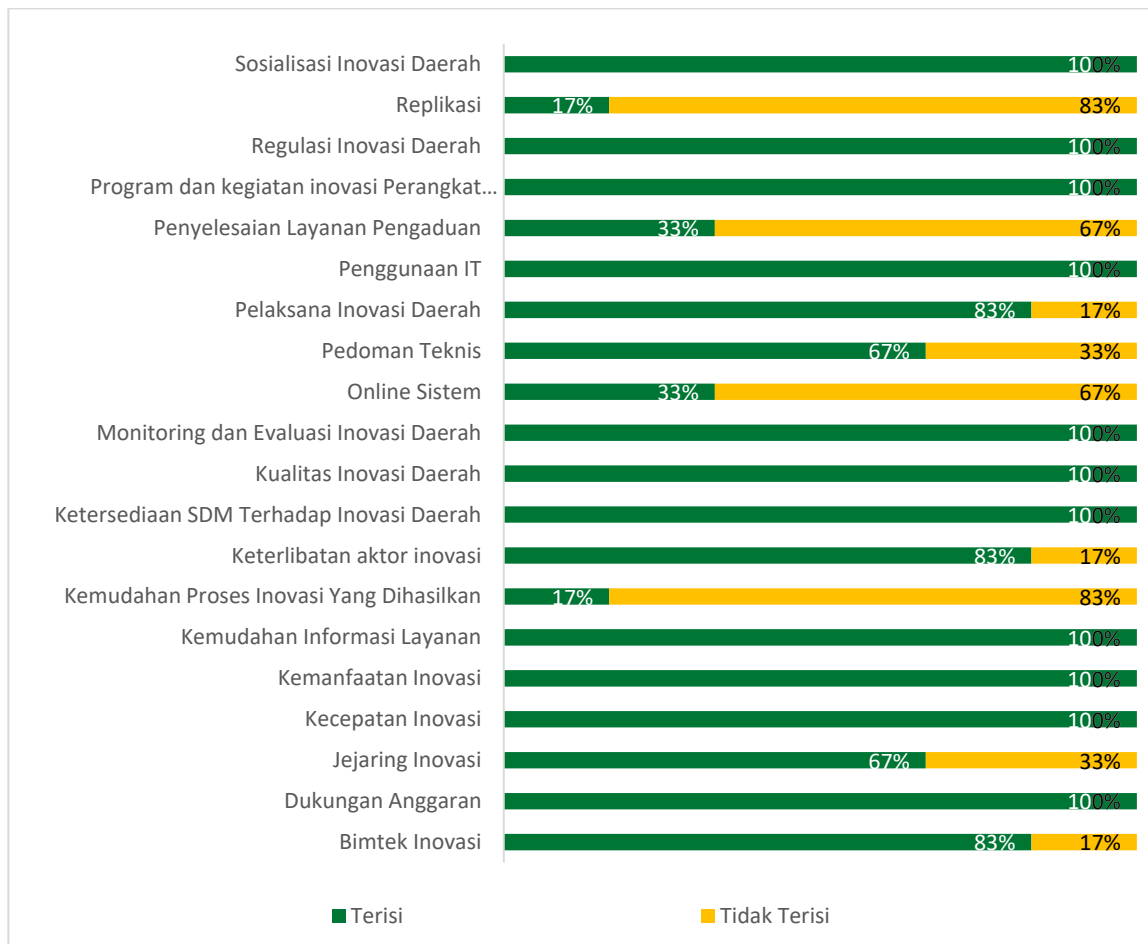
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 134. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, 4 dari 6 inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berkategori skor kematangan sedang. yaitu sebanyak 16 (45.71%) inovasi. Sedangkan 2 (33.33%) inovasi lainnya sudah memiliki skor kematangan tinggi.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



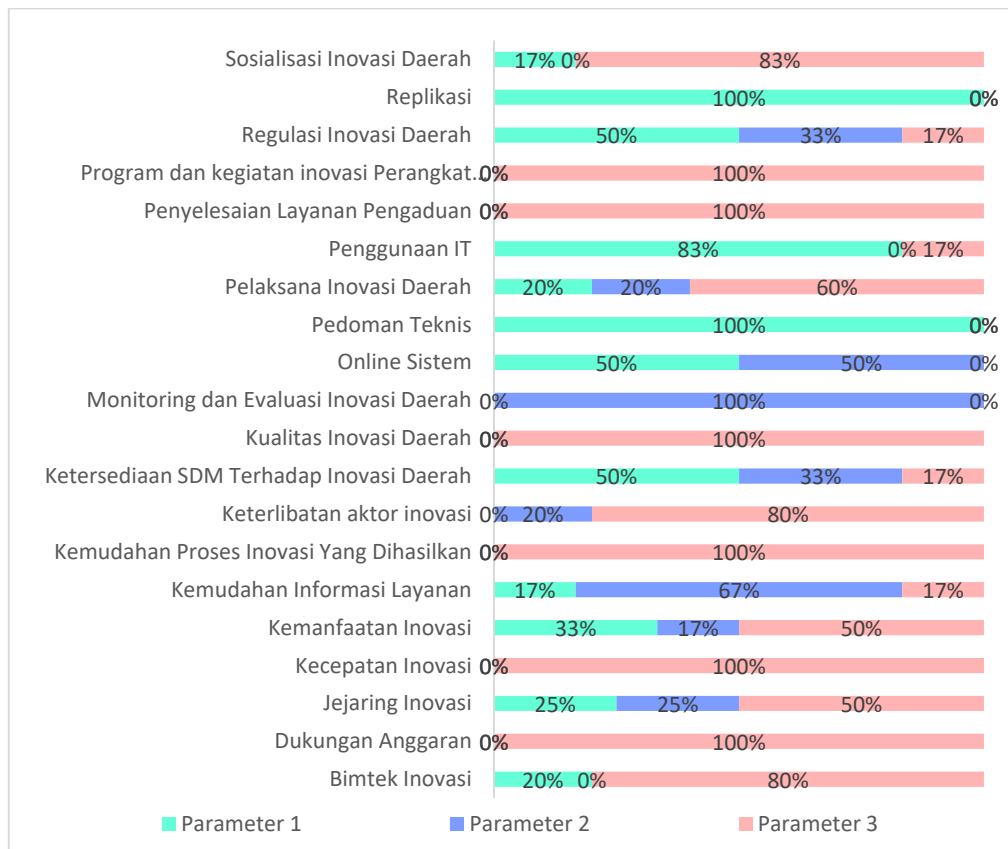
Gambar 135. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

Dari 6 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumba Barat Daya, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 79.17% sedangkan 20.83% lainnya belum terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian tertinggi, mencapai 100% ada pada beberapa indikator yaitu Sosialisasi Inovasi Daerah, Regulasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah pada RKPD, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah,

Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi dan Dukungan Anggaran.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah pada indikator Replikasi dan Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan yaitu sebesar 17%.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 136. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah pada RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan serta Dukungan Anggaran yaitu mencapai 100%. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 100%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100%, artinya 100% atau semua inovasi telah

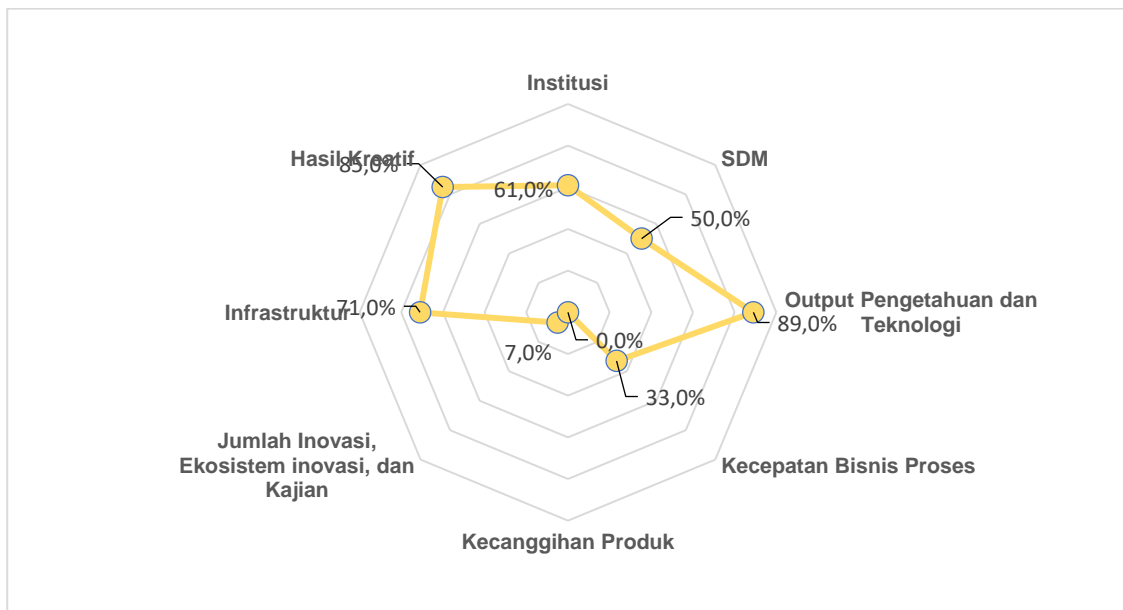
terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Replikasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Sumba Barat Daya beserta Skor Kematangannya

Tabel 13. Daftar Inovasi Kabupaten Sumba Barat Daya beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Pusat Pengelolaan Sampah Plastik di Kabupaten Sumba Barat Daya	102
Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pasca Panen Kopi Robusta Kabupaten Sumba Barat Daya di Desa Lagalete	97
Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pasca Panen Kopi Robusta Kabupaten Sumba Barat Daya di Desa Kadi Roma	97
Sekolah Alam Dyatame	87
James First Course (JF Course)	91
Sistem Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Online	116

Q. KABUPATEN SUMBA TENGAH

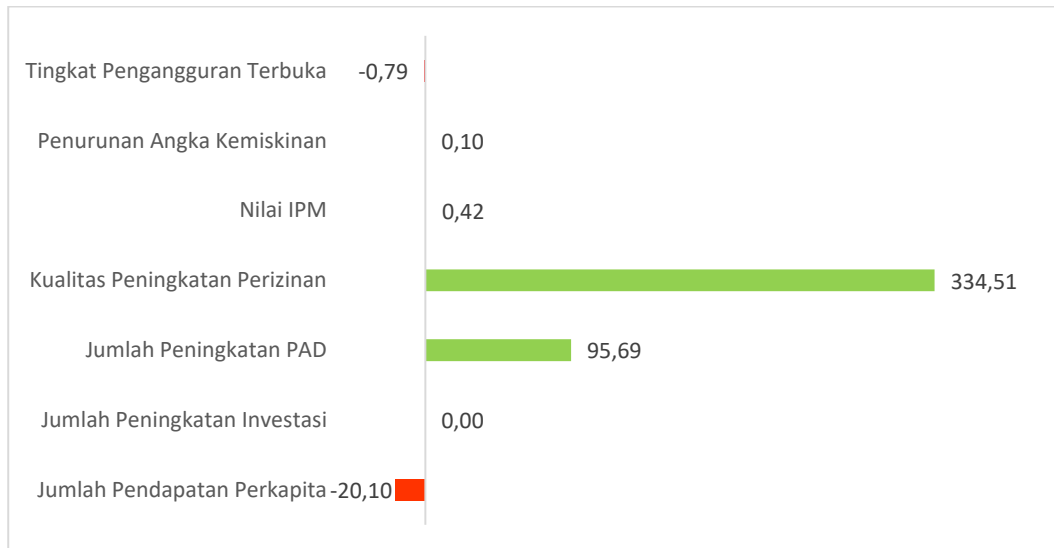


Gambar 137. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumba Tengah

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sumba Tengah memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 89.0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3).

Namun skor variabel Kecanggihan Produk masuk kategori rendah, yaitu 0% dimana secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut belum maksimal atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 138. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumba Tengah

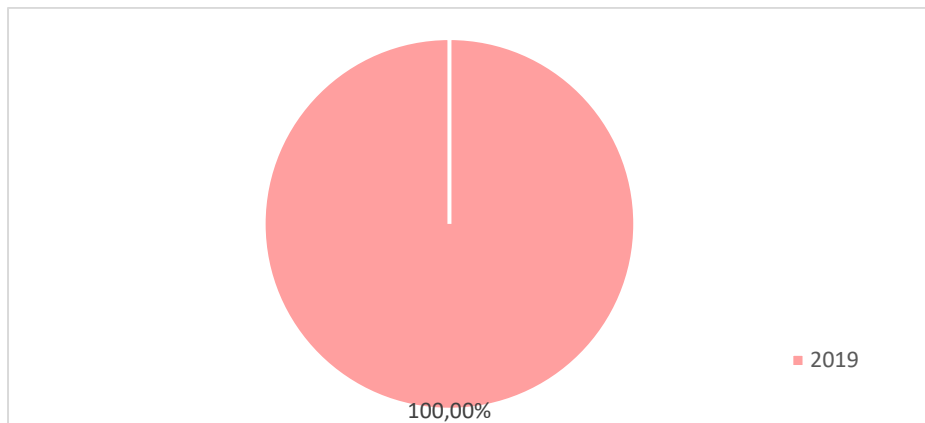
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumba Tengah mengalami perkembangan pada sebagian besar indikatornya. Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.79%. Angka ini masih di atas standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yaitu penurunan maksimal 1.85%. Selanjutnya, pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, tidak terlihat ada peningkatan berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

Nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 0.17%. Namun pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan terjadi penurunan sangat signifikan yaitu sebesar 4844.92% jauh di bawah standar nasional parameter IID yang seharusnya naik 5%. Pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, terdapat peningkatan sebesar 3.83% namun nilai ini masih di bawah standar nasional IID yaitu dengan kenaikan sebesar 8%. Selanjutnya, pada indikator Jumlah Peningkatan Investasi terdapat

peningkatan sebesar 42.05%, di atas standar nasional parameter IID, nilai tersebut di atas standar nasional parameter IID yang mengharuskan naik sebesar 5%. Terakhir, pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Sumba Tengah menunjukkan kenaikan sebesar 18.99%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

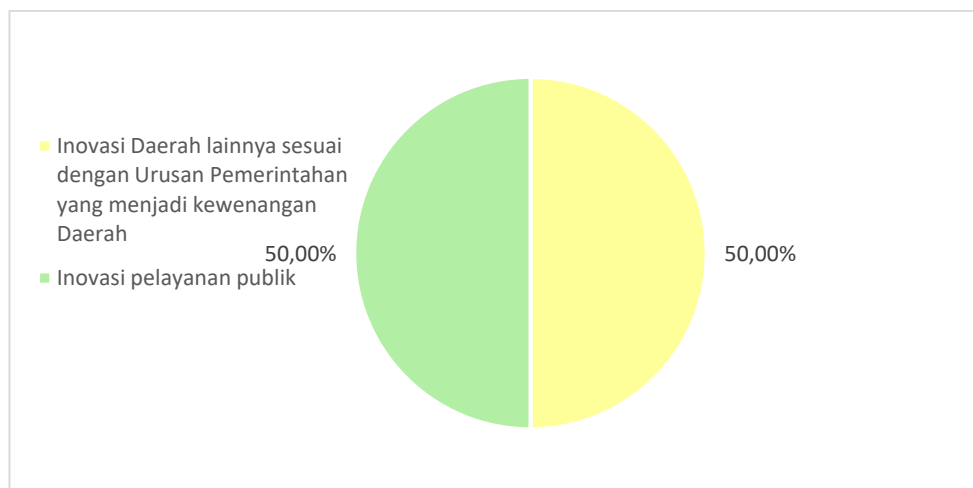
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 139. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumba Tengah

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, 100% inovasi atau sejumlah 2 inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, diterapkan pada tahun 2019.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

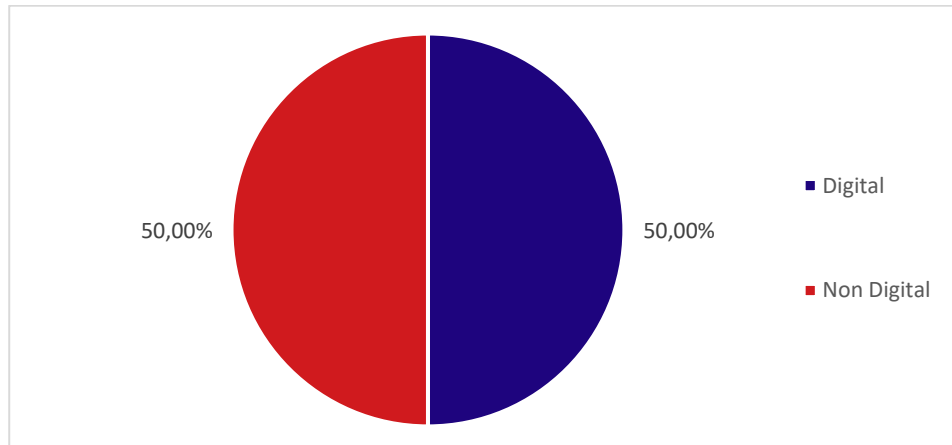


Gambar 140. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumba Tengah

Berdasarkan bentuknya 1 (satu) inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah berbentuk inovasi Pelayanan Publik. Sedangkan 1

(satu) inovasi lainnya ada inovasi daerah yang sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

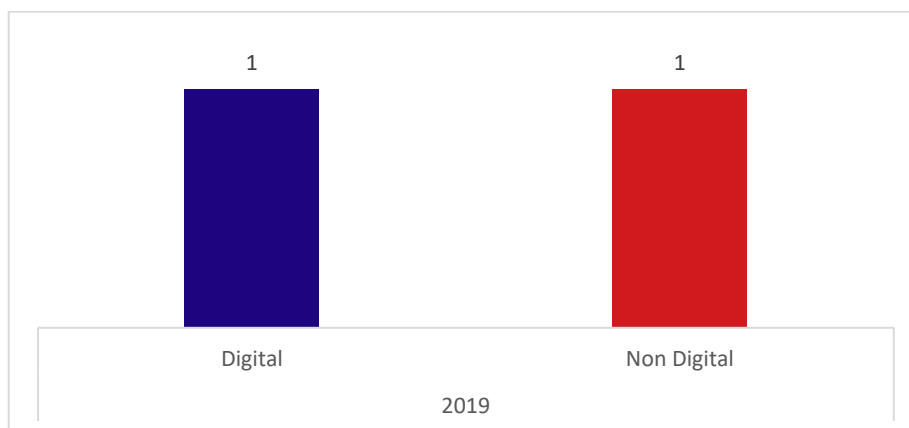
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 141. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumba Tengah

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 1 (50%) inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Sumba Tengah merupakan inovasi Non Digital. Sedangkan 1 (50%) inovasi lainnya berjenis Digital.

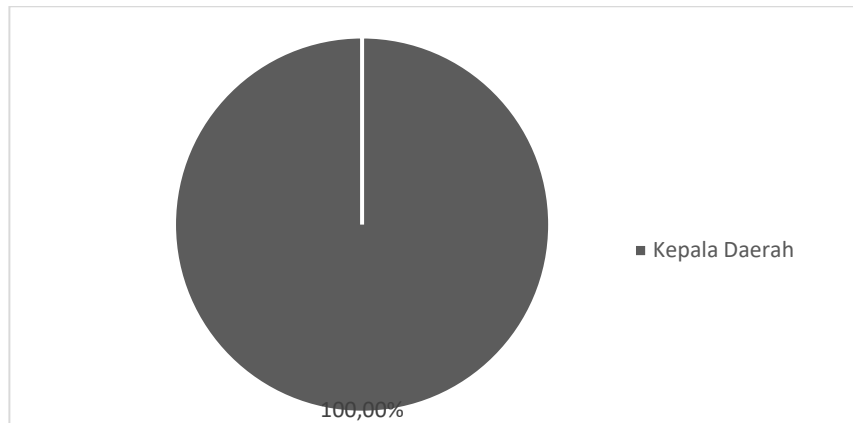
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 142. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumba Tengah

Dikarenakan inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk tahun 2021 hanya diterapkan mulai tahun 2019, sehingga tidak bisa terlihat progres jumlah inovasi per tahunnya.

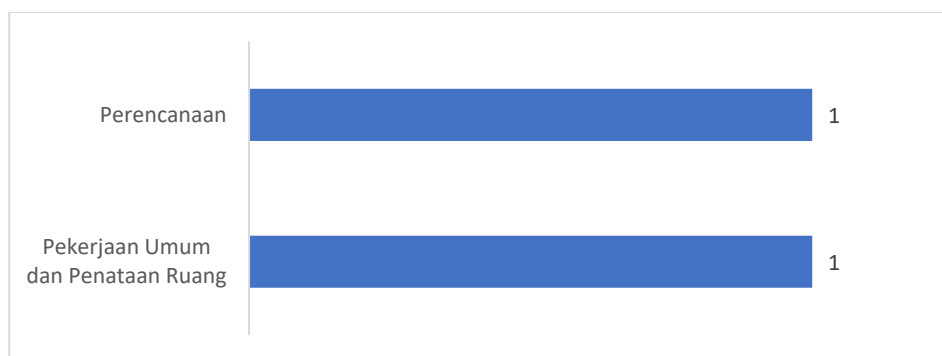
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 143. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumba Tengah

Keseluruhan inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2021 diinisiasi oleh Kepala Daerah yaitu sebanyak 2 inovasi. Belum ada inovasi yang dilaporkan diinisiasi oleh OPD, ASN, Masyarakat dan DPRD.

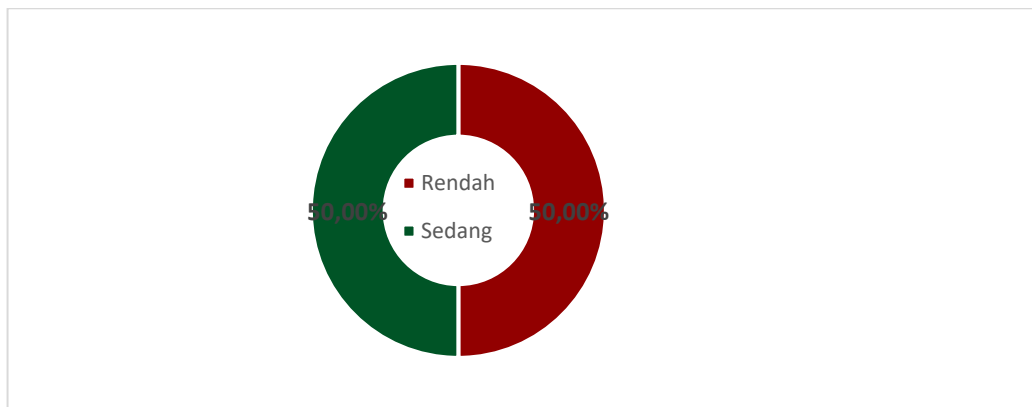
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 144. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Rote Ndao

Sebaran inovasi daerah menurut laporan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan urusan pemerintahan mencakup 2 urusan. 1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Serta ada 1 inovasi dari urusan Perencanaan.

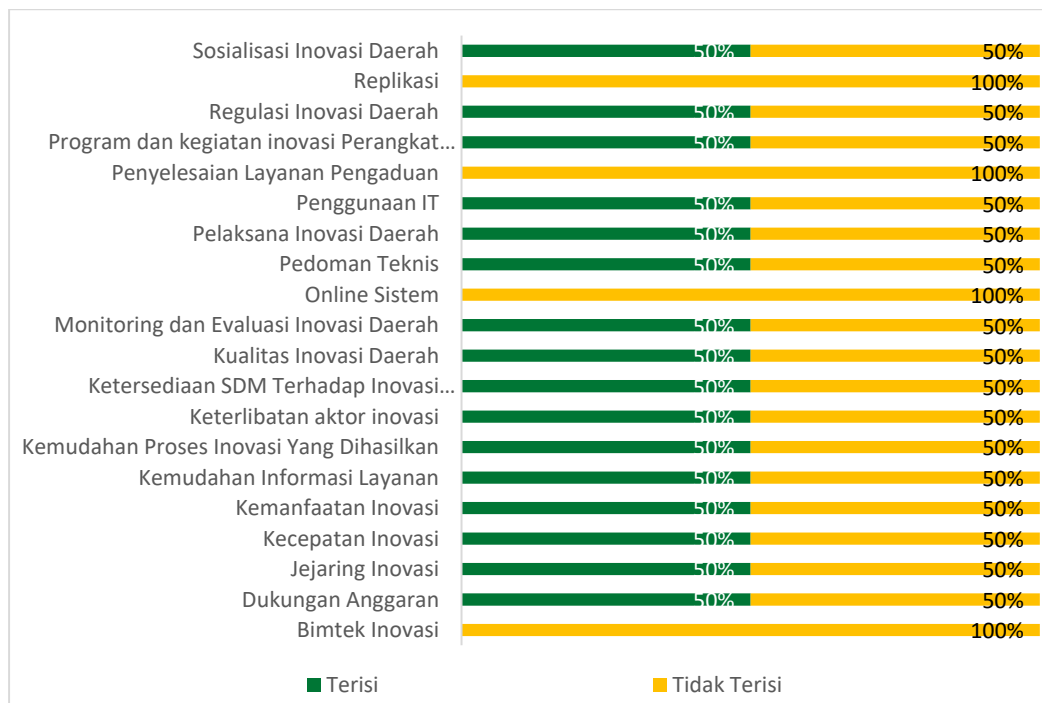
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 145. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumba Tengah

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, dari 2 inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, 1 diantaranya memiliki skor kematangan sedang. Sedangkan 1 inovasi lainnya masih memiliki skor kematangan yang rendah.

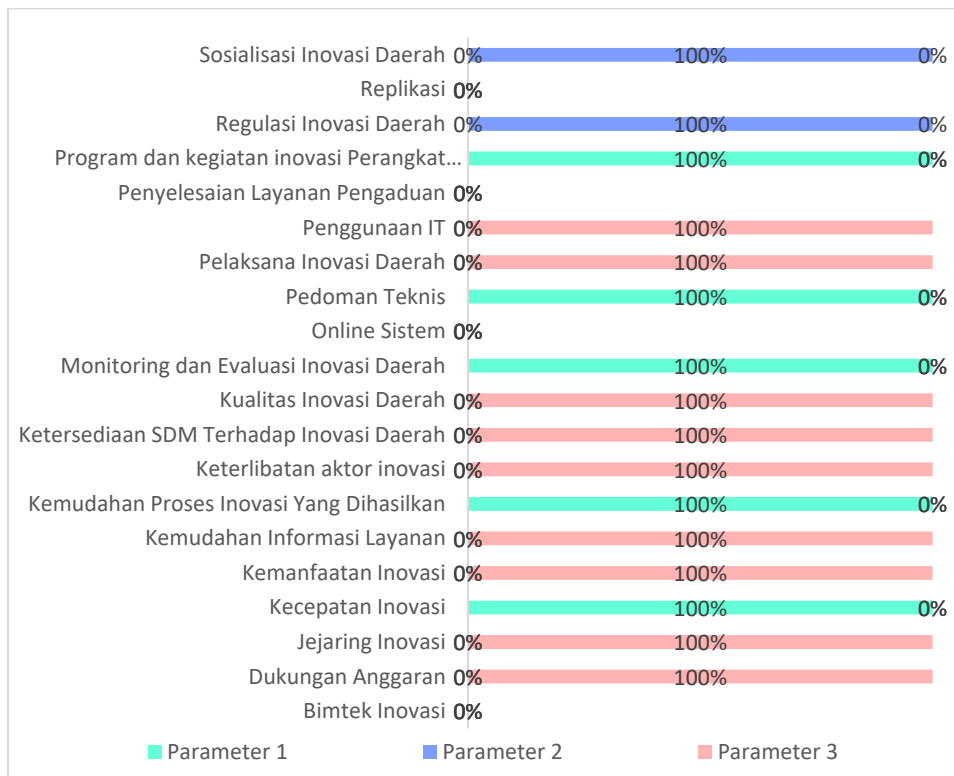
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 146. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Tengah

Dari 2 inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, tingkat keterisian data pendukungnya hanya mencapai maksimal 50%. Sedangkan ada beberapa indikator yang tidak sama sekali dilengkapi dengan data pendukung, diantaranya adalah indikator Replikasi, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Online Sistem dan Bimtek teknologi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 147. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Tengah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang mencapai 100%, adalah indikator Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Jejaring Inovasi serta Dukungan Anggaran.

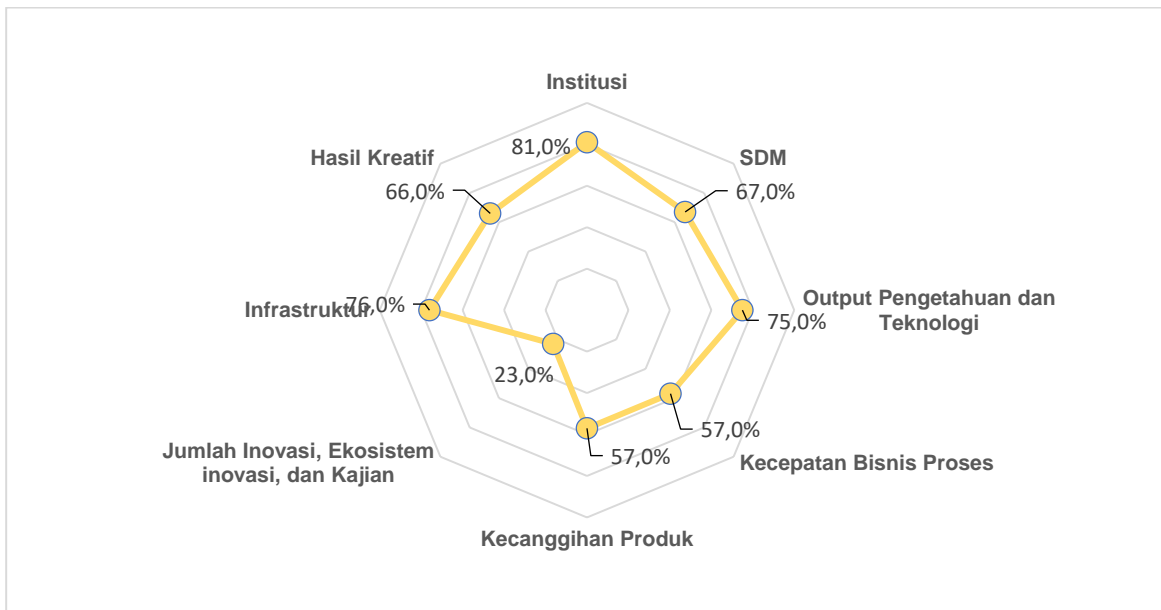
Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang mencapai 100% adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah dan Regulasi Inovasi Daerah. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang mencapai 100% adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah

dalam RKPD, Pedoman Teknis, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan serta Kecepatan Inovasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Sumba Tengah beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri	0
PRO OLI MILA	82

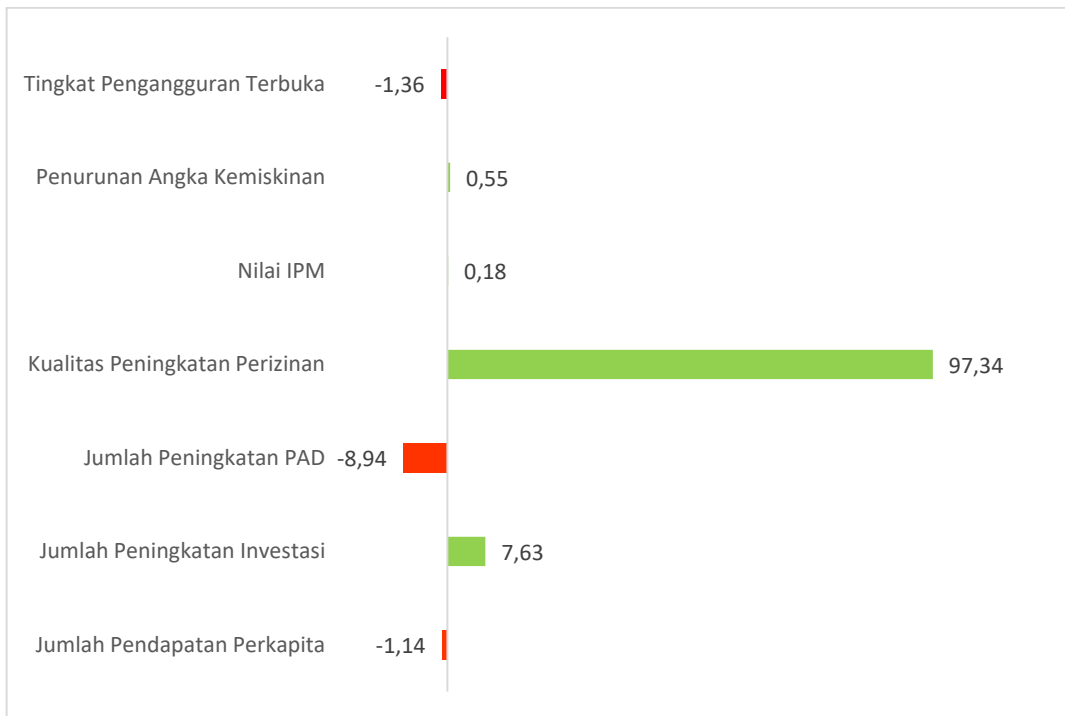
R. KABUPATEN SUMBA TIMUR



Gambar 148. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumba Timur

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sumba Timur memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi sebesar 81.0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masuk kategori rendah, yaitu 23.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut belum maksimal atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



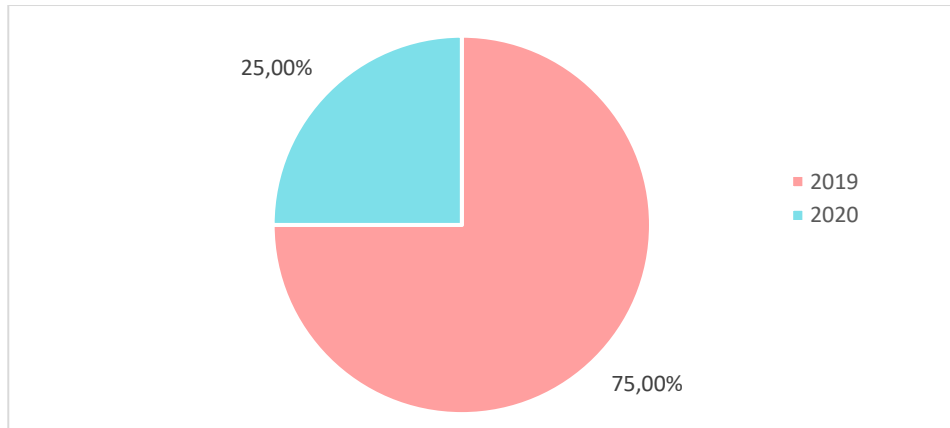
Gambar 149. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumba Timur

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebanyak 1.36%. Namun jumlah jauh di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yaitu penurunan maksimal 1.85%. Selanjutnya, pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, tidak terlihat ada peningkatan berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

Nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 0.17%. Namun pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan terjadi penurunan sangat signifikan yaitu sebesar 4844.92% jauh di bawah standar nasional parameter IID yang seharusnya naik 5%. Pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, terdapat peningkatan sebesar 3.83% namun nilai ini masih di bawah standar nasional IID yaitu dengan kenaikan sebesar 8%. Selanjutnya, pada indikator Jumlah Peningkatan Investasi terdapat peningkatan sebesar 42.05%, di atas standar nasional parameter IID, nilai tersebut di atas standar nasional parameter IID yang mengharuskan naik sebesar 5%. Terakhir, pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Sumba Timur menunjukkan kenaikan sebesar 18.99%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

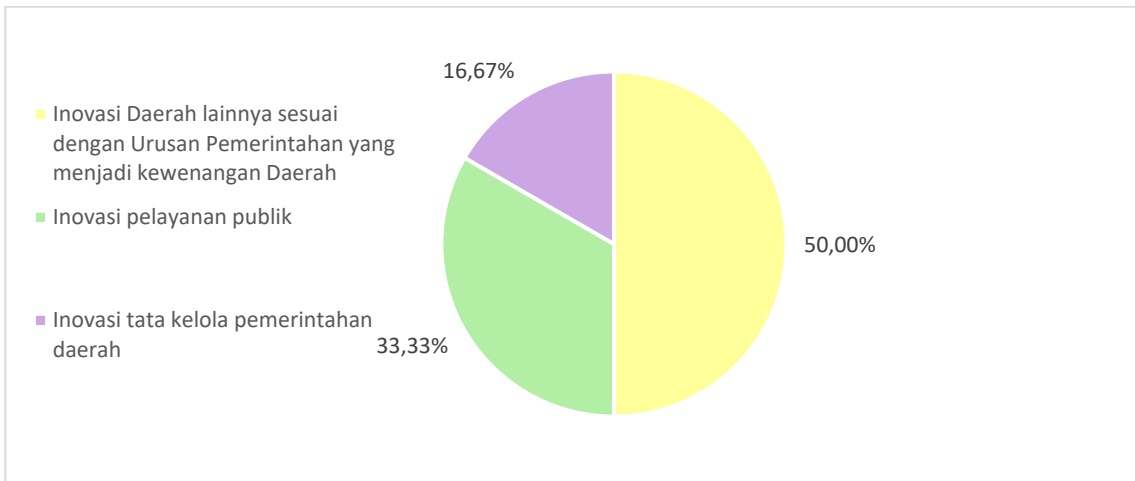
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 150. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumba Timur

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 9 (75%) inovasi dari 12 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 3 (25%) inovasi lainnya diterapkan pada 2020.

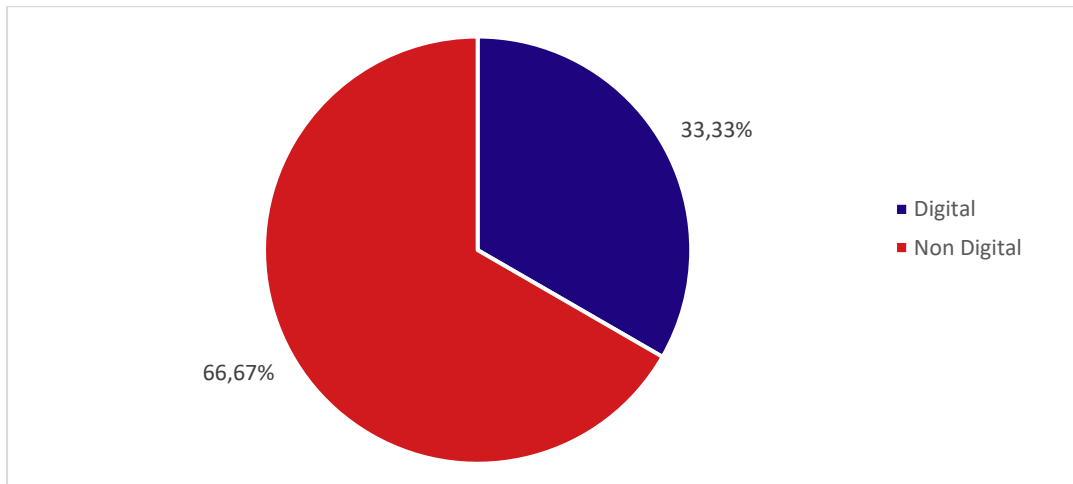
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 151. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumba Timur

Berdasarkan bentuknya sebagian besar inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebanyak 6 (50%) adalah Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Urusan Pemerintahan. Sedangkan 4 (33%) inovasi berbentuk Pelayanan. Sisanya sebanyak 2 (17%) inovasi adalah inovasi dalam bentuk Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

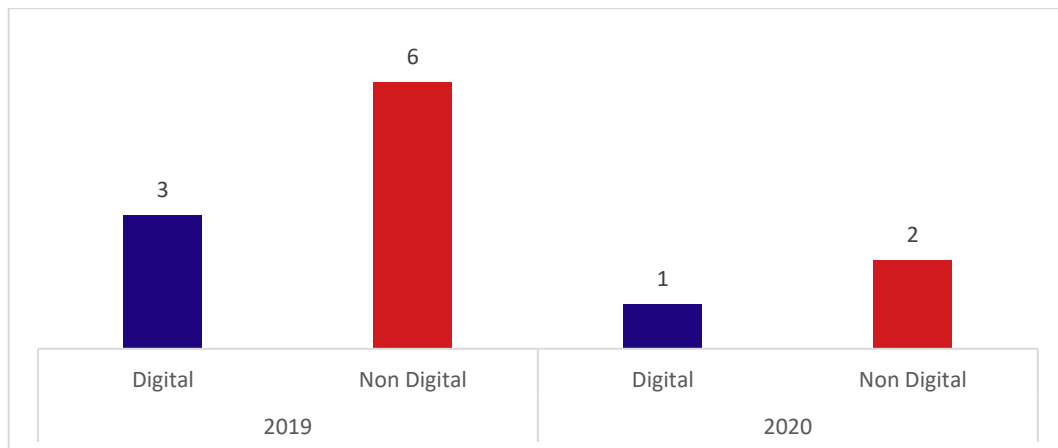
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 152. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumba Timur

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 8 (66.67%) dari 12 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Sumba Timur merupakan inovasi Non Digital. Sedangkan 4 (33.33%) inovasi lainnya berjenis Digital.

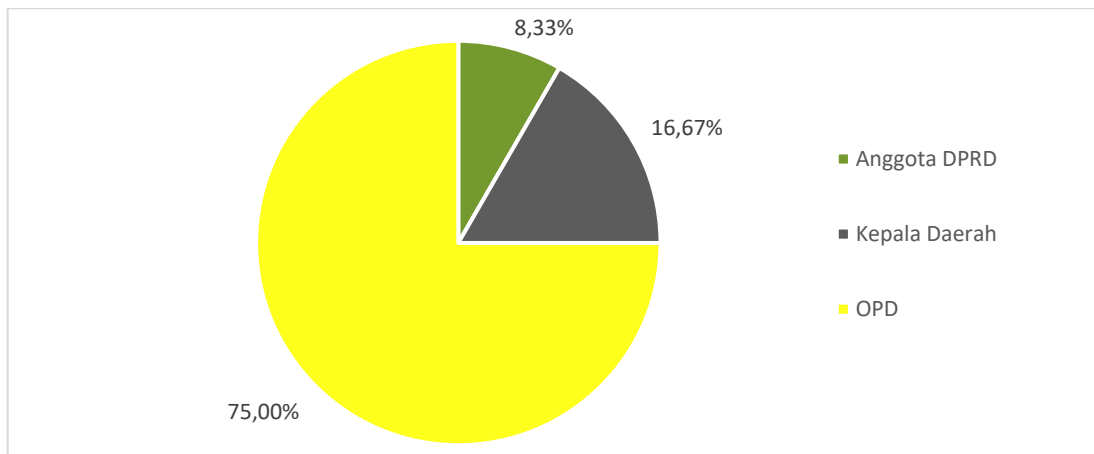
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 153. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumba Timur

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi Digital maupun inovasi Non Digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun menjadi 1 inovasi dari semula 3 inovasi pada tahun 2019. Demikian pula dengan inovasi Non Digital mengalami penurunan dari 6 inovasi pada tahun 2019 menjadi 2 inovasi pada tahun 2020.

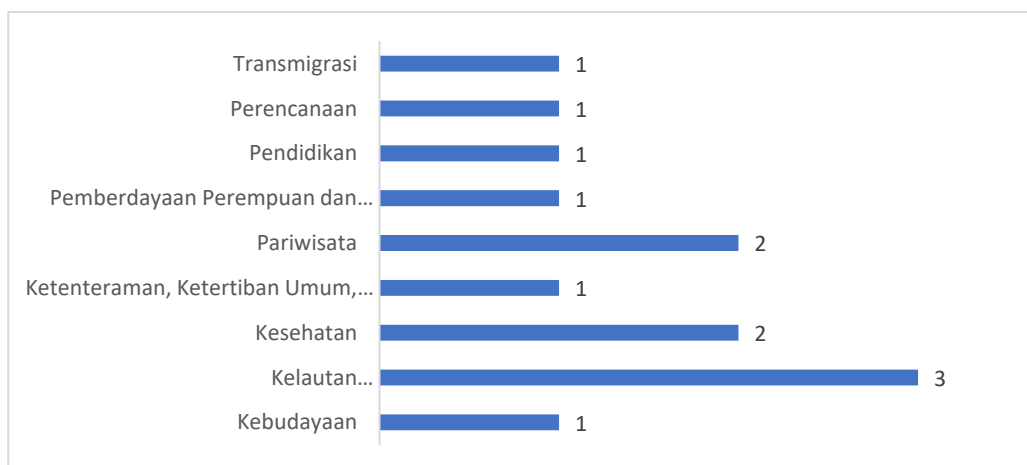
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 154. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumba Timur

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 9 (75%) inovasi. Selanjutnya, 2 (16.67%) inovasi lainnya diinisiasi oleh Kepala Daerah. Sisanya 1 (8.33%) inovasi diinisiasi oleh Anggota DPRD. Belum ada inovasi yang dilaporkan diinisiasi oleh Masyarakat dan ASN.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

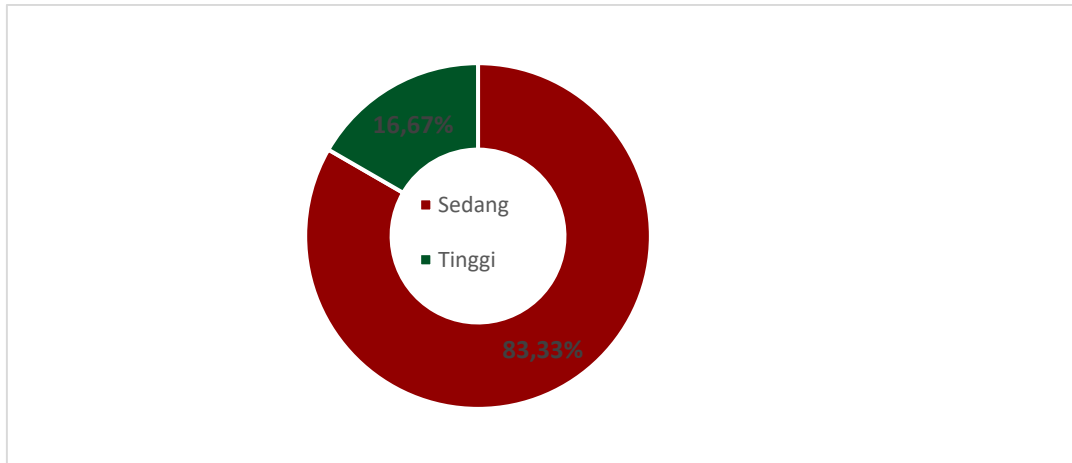


Gambar 155. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumba Timur

Sebaran inovasi daerah menurut laporan pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang berkaitan dengan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebanyak 1 inovasi urusan Pendidikan, 1 inovasi urusan Trantibumlinmas, dan 1 inovasi urusan Kesehatan. Belum ada inovasi urusan PU dan Penataan Ruang, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta

Urusan Sosial yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan inovasi terbanyak yaitu sebanyak 3 inovasi adalah inovasi Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu urusan Kalautan dan Perikanan.

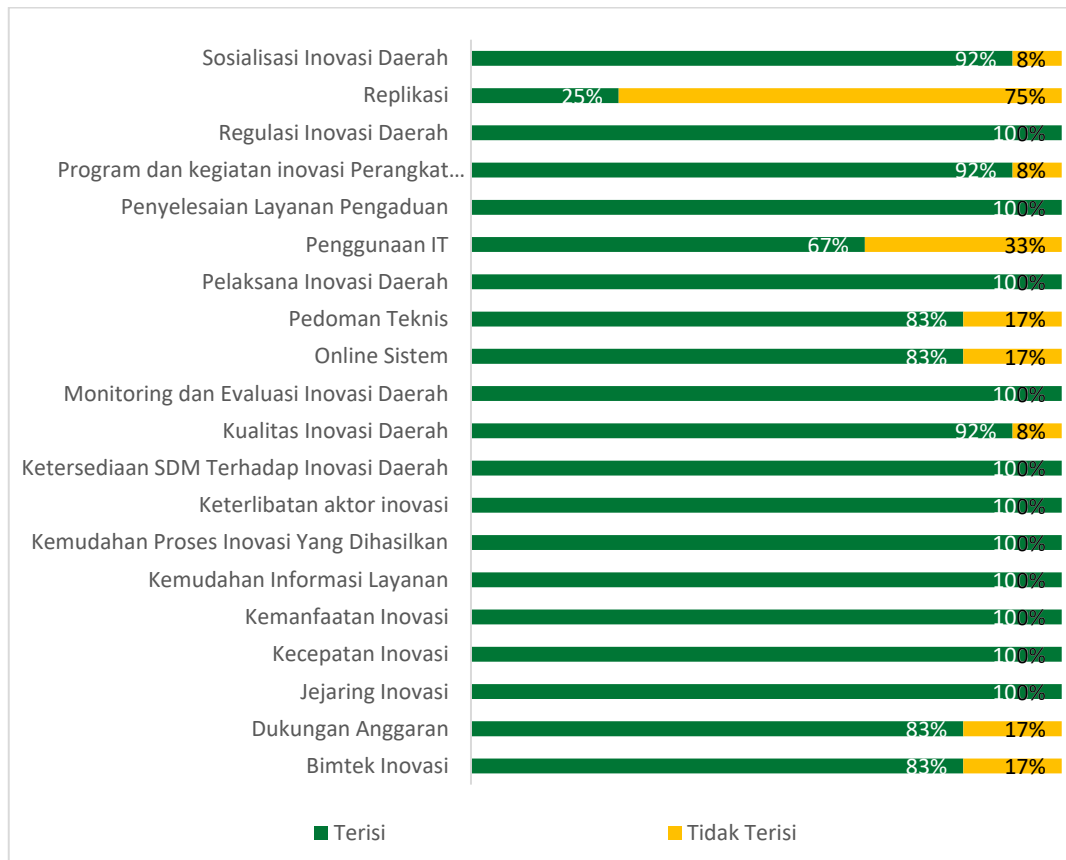
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 156. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumba Timur

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Timur sebanyak 10 (83.33%) inovasi memiliki skor kematangan sedang. Selebihnya, sebanyak 2 (16.67%) inovasi sudah memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

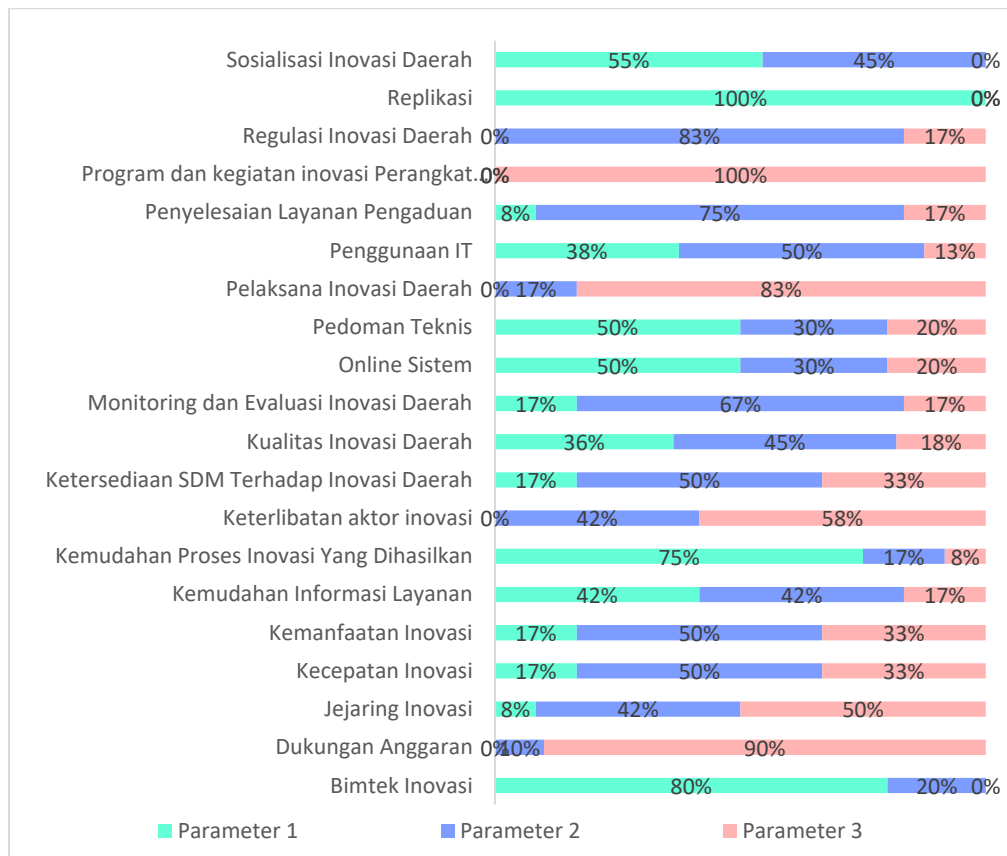
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 157. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Timur

Dari 12 inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur, 90% dari total inovasi telah terisi data pendukung. Sedangkan sisanya, 10% masih belum terisi data pendukung. Sebagian besar Indikator telah mencapai tingkat keterisian tertinggi yaitu sebesar 100%. Indikator dengan tingkat keterisian terendah adalah indikator Replikasi dengan tingkat keterisian hanya 25%. Hal ini berarti dari 12 inovasi baru 3 inovasi saja yang terisikan data pendukung untuk indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 158. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Timur

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD yaitu sebesar 100%. Kemudian indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 83% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100%. Berarti 100% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Replikasi masuk dalam kategori parameter 1 (satu).

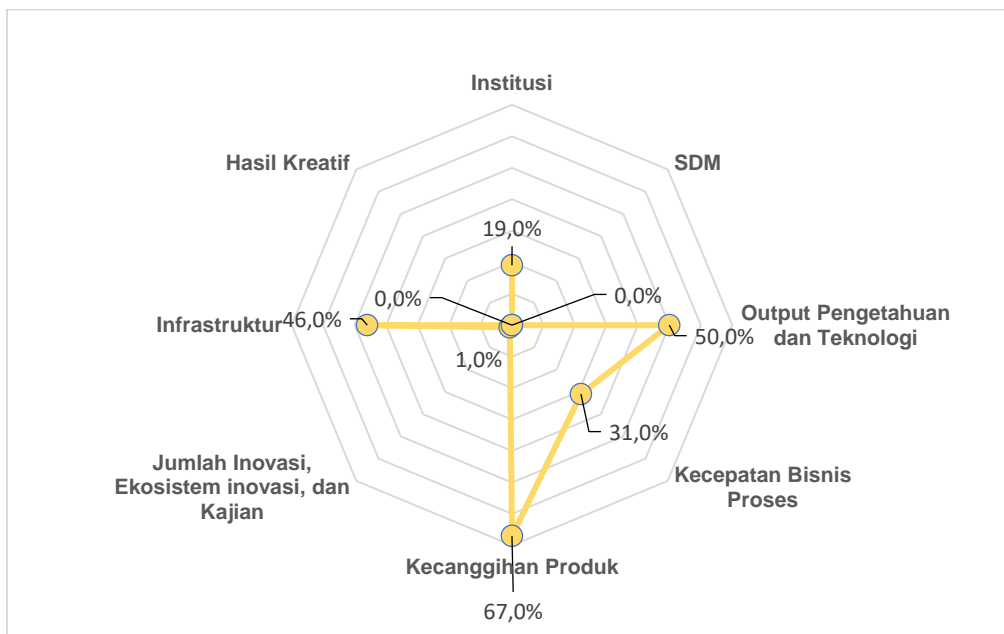
j. Daftar Inovasi Kabupaten Sumba Timur beserta Skor Kematangannya

Tabel 14. Daftar Inovasi Kabupaten Sumba Timur beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
SUMBA HOME CARE	89

Nama Inovasi	Skor Kematangan
"SI MANIS" = SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	99
"DARLINE" = PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN PASIEN MENGGUNAKAN APLIKASI WHATSAPP	107
"BANG KEKMEL" = PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MELOLO	101
"FESTIVAL SANDELWOOD" PARADE 1001 KUDA SANDEL DAN FESTIVAL TENUN IKAT	93
"SILAM" = SITUS LAMBANAPU	89
"RUMAH AMAN" COLABORATION STAKEHOLDER LINK DALAM PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU BAGI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	98
"GEMALA" GERAKAN MASUK LAUT SUMBA TIMUR	84
"PIK" PAGU INDIKATIF KECAMATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	87
"KUSUKA" KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	96
"RIPUDAR" RESTOCKING IKAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN	92
"OPA" OPERASI PADANG	93

S. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



Gambar 159. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk sebesar 67,0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel

Kecanggihan Produk sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel SDM dan Hasil Kreatif memiliki skor terendah, yaitu 0%.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



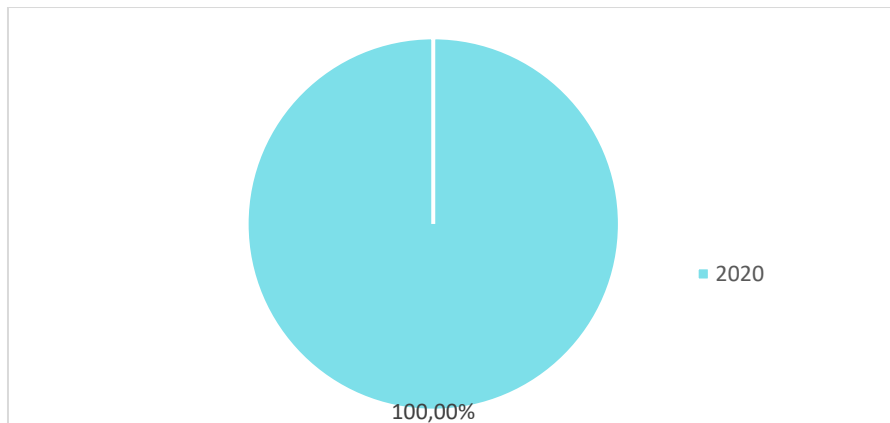
Gambar 160. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa indikator Kualitas Peningkatan Perizinan menurun 33.95%, jauh di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yaitu peningkatan minimal 5%. Begitu pula dengan indikator Jumlah Peningkatan PAD yang menurun hingga 153.23%, jauh di bawah standar nasional parameter IID yang seharusnya naik sebesar minimal 8%.

Untuk indikator selebihnya yaitu, Tingkat Pengangguran Terbuka, Penurunan Angka Kemiskinan, Nilai IPM, Jumlah Peningkatan Investasi dan Jumlah Pendapatan Perkapita tidak dapat dinilai karena Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak memasukkan/mengupload data.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

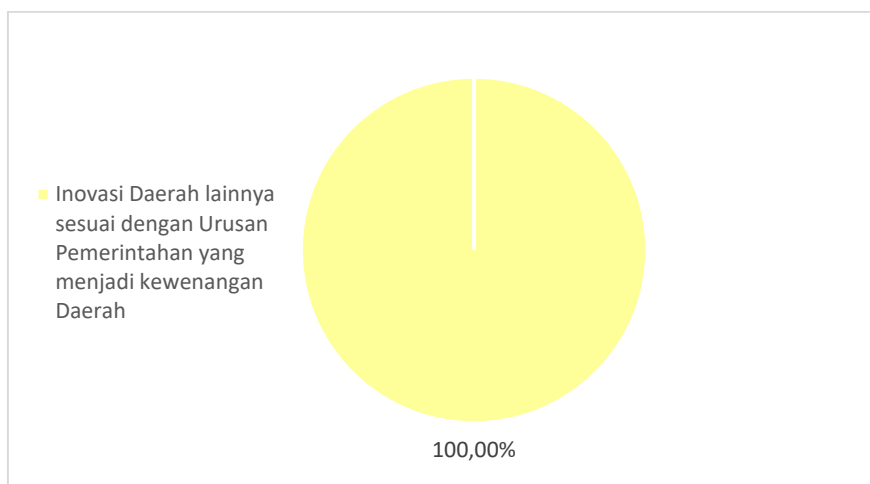
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 161. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, keseluruhan inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan baru diterapkan pada tahun 2020.

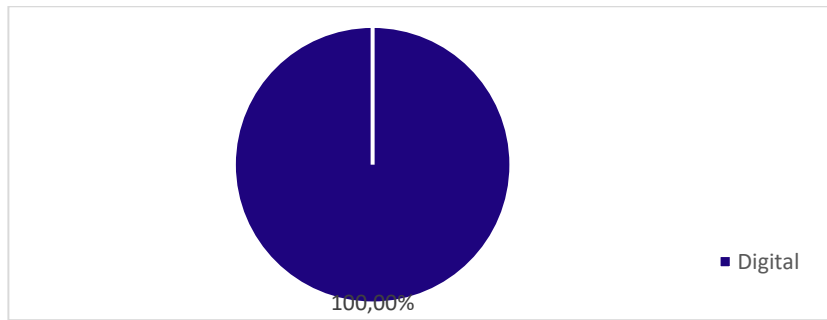
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 162. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Berdasarkan bentuknya seluruh (100%) inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Urusan Pemerintahan. Tidak ada inovasi berbentuk Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang dilaporkan.

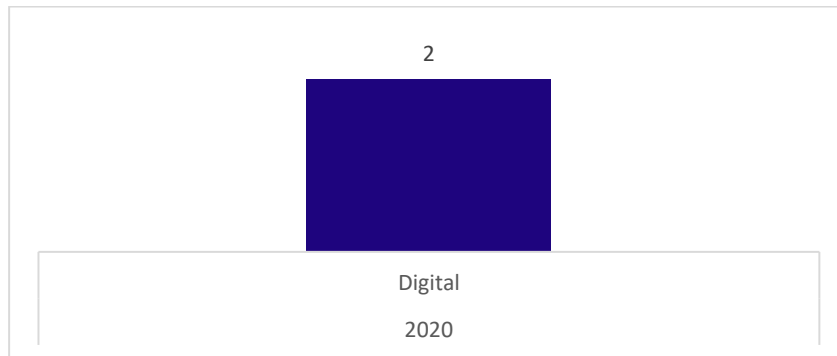
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 163. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya keseluruhan inovasi yang dilaporkan adalah inovasi jenis Digital.

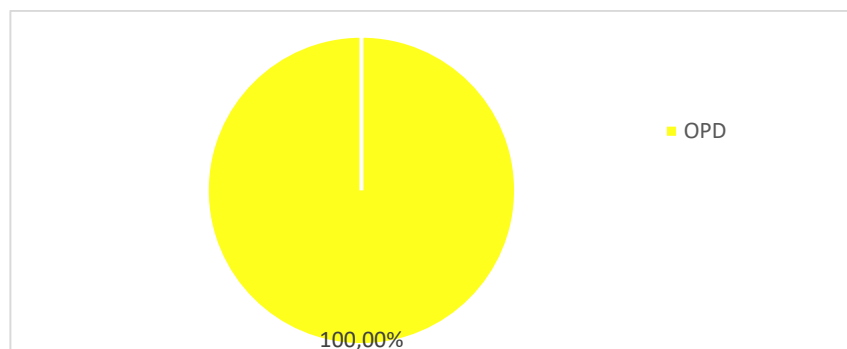
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 164. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Timor Tengah Selatan

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa tahun 2020 dilaporkan 2 inovasi berjenis Digital dari sebelumnya tidak ada satu pun inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2019.

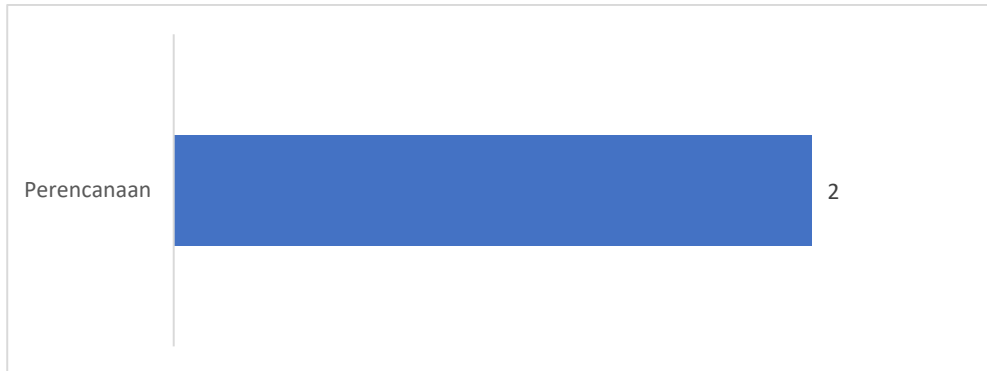
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 165. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Keseluruhan (100%) inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan diinisiasi oleh perangkat daerah. Belum ada inovasi yang dilaporkan diinisiasi oleh Kepala Daerah, Masyarakat, ASN dan DPRD.

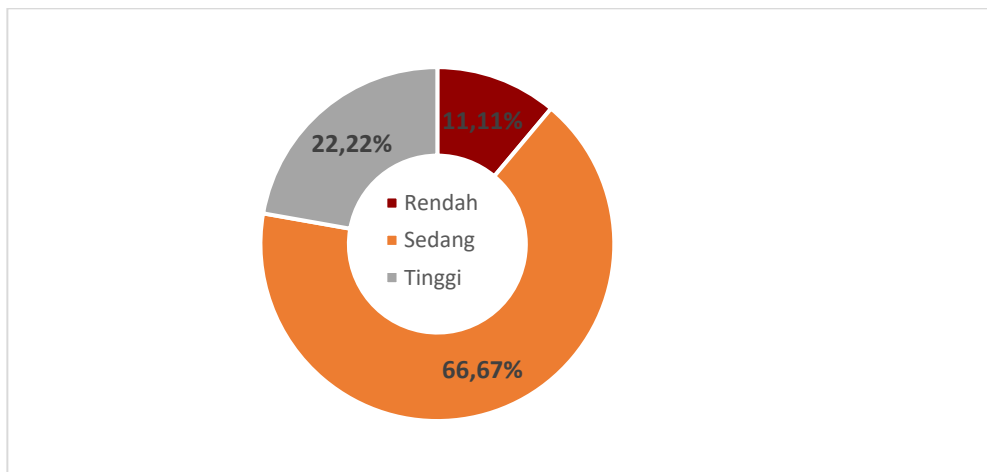
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 166. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Inovasi daerah menurut laporan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan hanya ada 2 inovasi dari Urusan Perencanaan. Tidak ada inovasi yang dilaporkan berkaitan dengan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

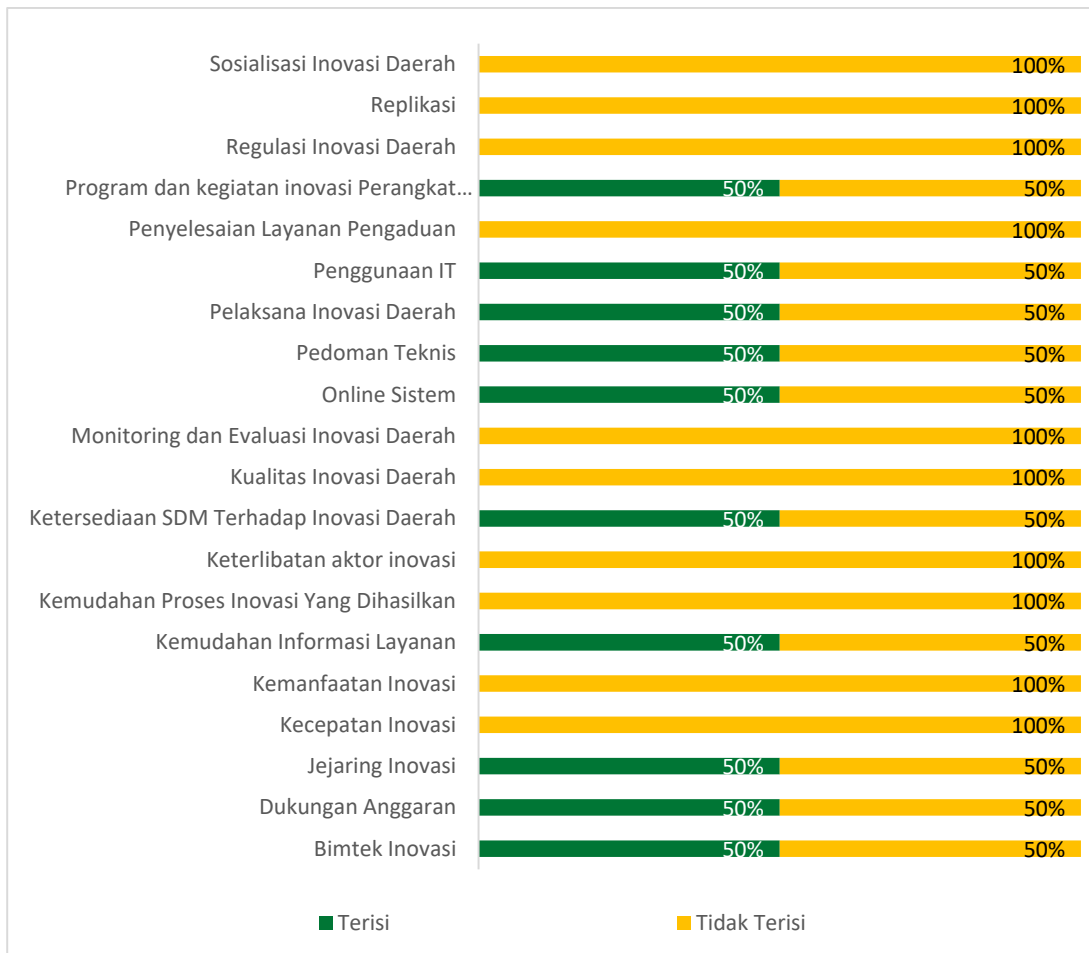


Gambar 167. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan keseluruhan (100%) inovasi masih masuk katergori tingkat skor kematangan rendah. Sebagai informasi,

skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50.

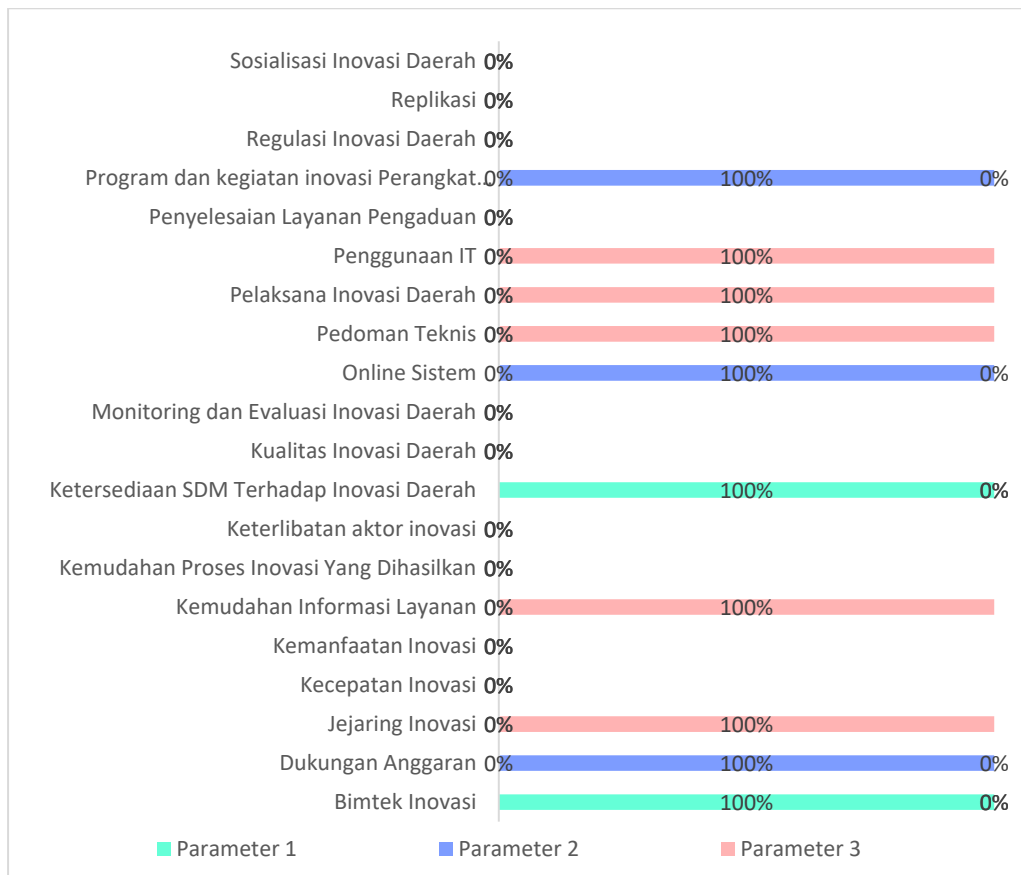
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 168. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dari 2 inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, 75% dari total inovasi tidak terisi data pendukung, baru 25% saja yang telah terisi data pendukung. 10 indikator tidak dilengkapi dengan data pendukung sama sekali. Sedangkan 10 indikator lainnya hanya dilengkapi data pendukung dengan tingkat keterisian maksimal sebesar 50%.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 169. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

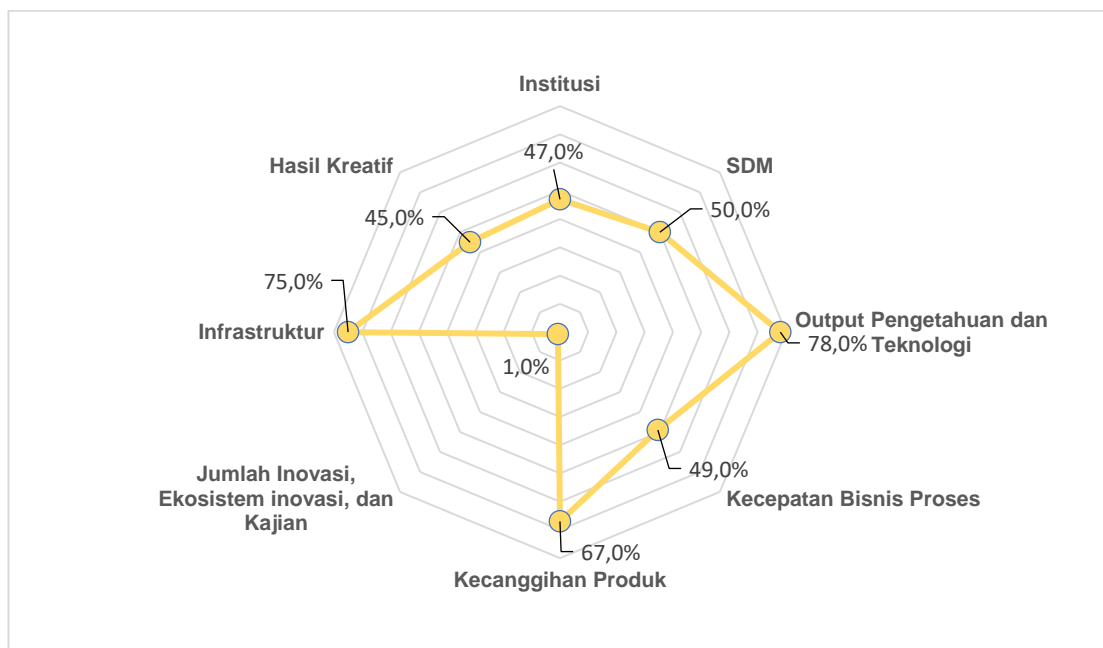
2 inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penggunaan IT, Pelaksanaan Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Kemudahan Informasi Layanan, dan Jejaring Inovasi yaitu sebesar 100%. Kemudian indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Online Sistem dan Dukungan Anggaran sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah dan indikator Bimtek Inovasi, yaitu sebesar 100%. Berarti 100% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter 1 (satu).

j. Daftar Inovasi Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta Skor Kematangannya

Tabel 15. Daftar Inovasi Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Aplikasi E-planning dan E-budgeting	0
Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	0

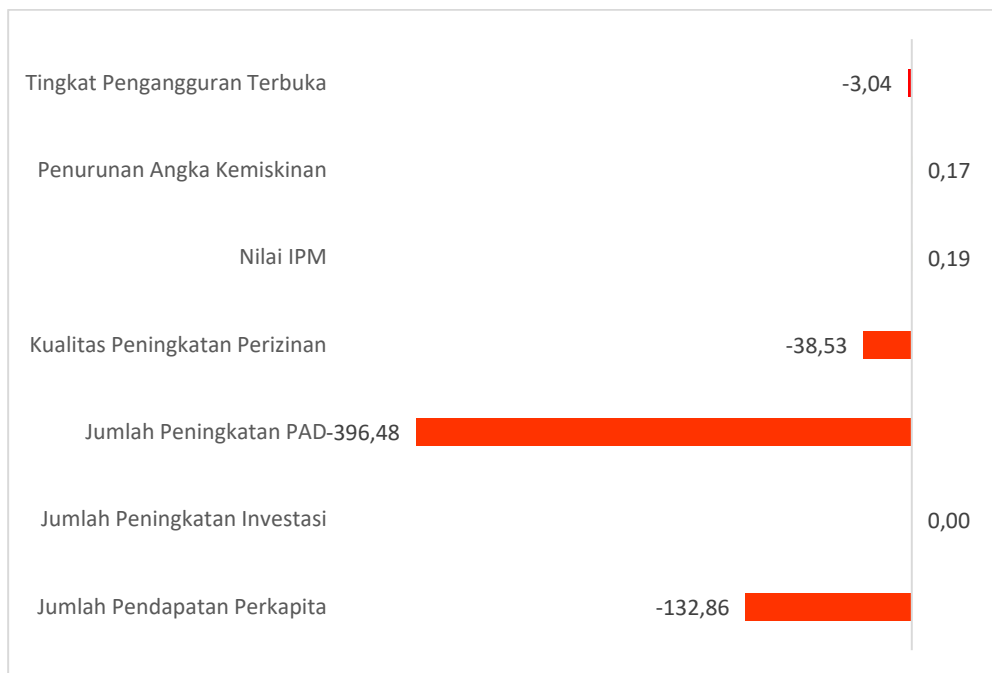
T. KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



Gambar 170. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sebesar 78,0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Sedangkan variabel dengan capaian terendah adalah pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian dengan Capaian sebesar 1%.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



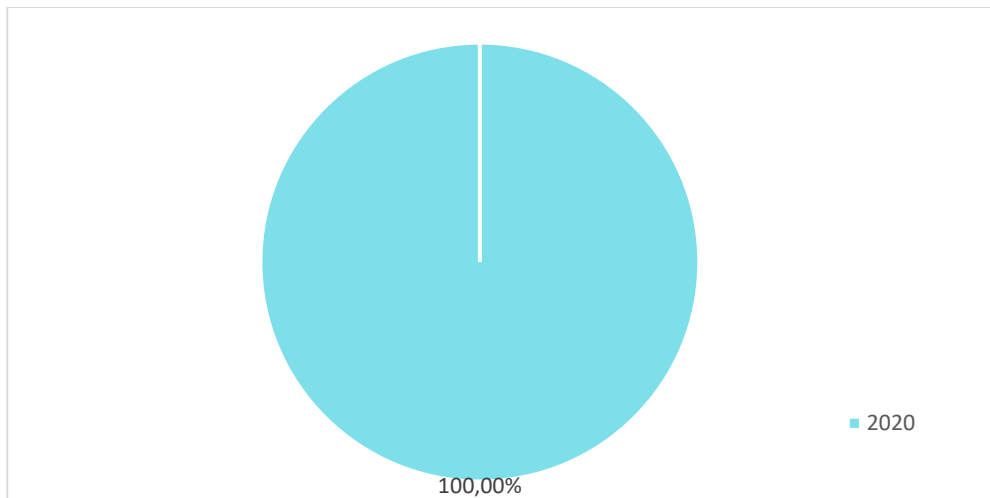
Gambar 171. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menurun 3.04%, nilai ini masih di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yang seharusnya turun maksimal 0.92%. Selanjutnya, untuk indikator Penurunan Angka Kemiskinan terdapat peningkatan sebesar 0.17% sedikit di atas standar nasional parameter IID yaitu naik minimal 0.02%. Pada indikator Nilai IPM, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melaporkan peningkatan sebesar 0.19%.

Selanjutnya, pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan terdapat penurunan sebesar 38.53%, di bawah standar nasional parameter IID yang seharusnya naik 5%. Pada indikator Jumlah Peningkatan PAD menurun tajam sebesar 396.48%, jauh di bawah standar nasional parameter IID yaitu dengan peningkatan sebesar 8%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi tidak terlihat ada perubahan sedangkan pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menurun 132.86%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

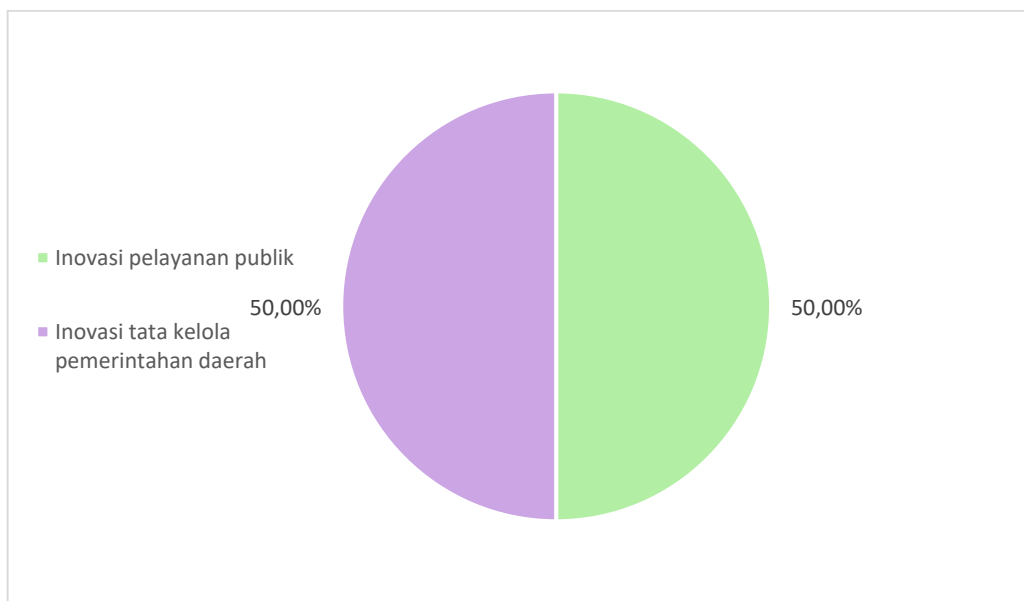
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 172. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, keseluruhan inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara baru diterapkan pada tahun 2020.

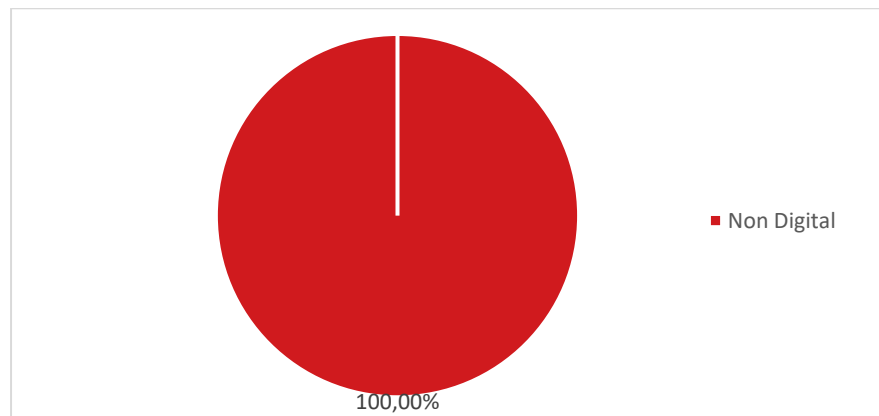
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 173. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Berdasarkan bentuknya 1 (50%) inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara adalah inovasi bentuk Pelayanan Publik dan 1 (50%) inovasi lainnya adalah inovasi berbentuk Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

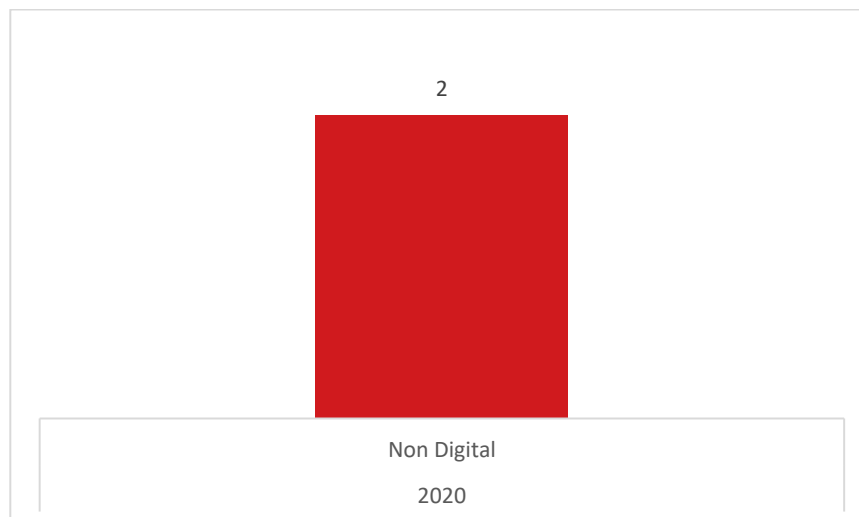
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 174. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya keseluruhan inovasi yang dilaporkan adalah inovasi jenis Non Digital.

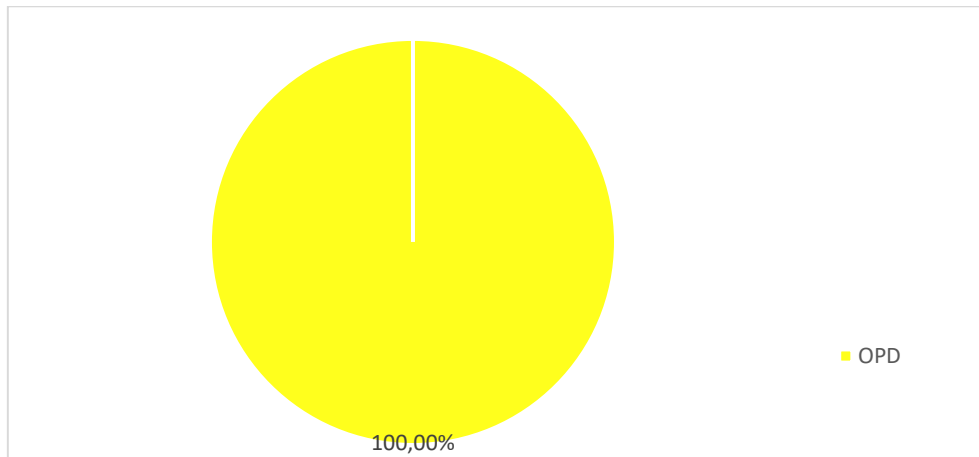
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 175. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Timor Tengah Utara

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa tahun 2020 dilaporkan 2 inovasi berjenis Non Digital dari sebelumnya tidak ada satu pun inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2019.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 176. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Keseluruhan (100%) inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara diinisiasi oleh perangkat daerah. Belum ada inovasi yang dilaporkan diinisiasi oleh Kepala Daerah, Masyarakat, ASN dan DPRD.

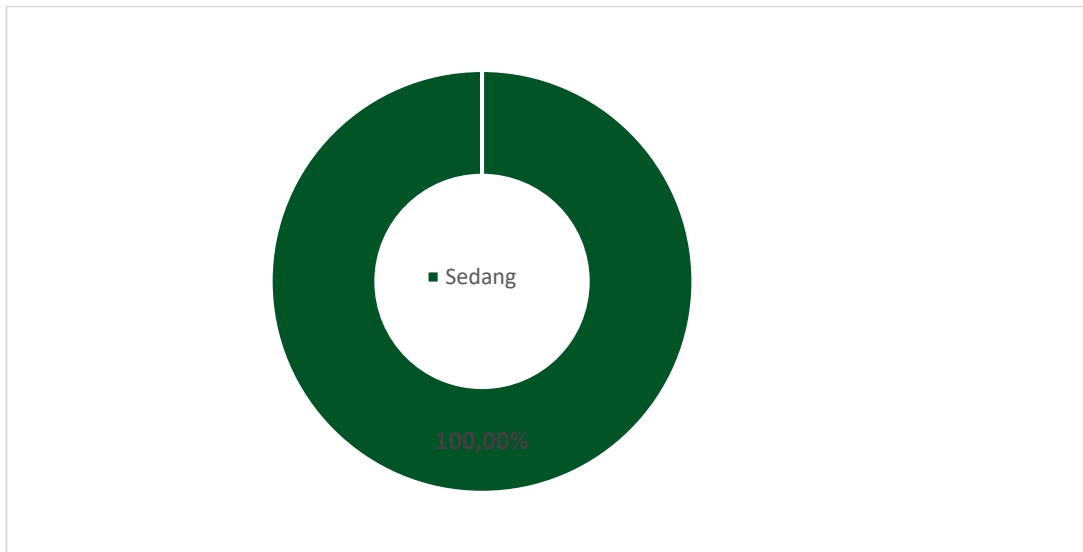
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 177. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara hanya ada 1 dari 6 Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi inovasi daerah, yaitu pada Urusan Sosial terdapat 1 inovasi.

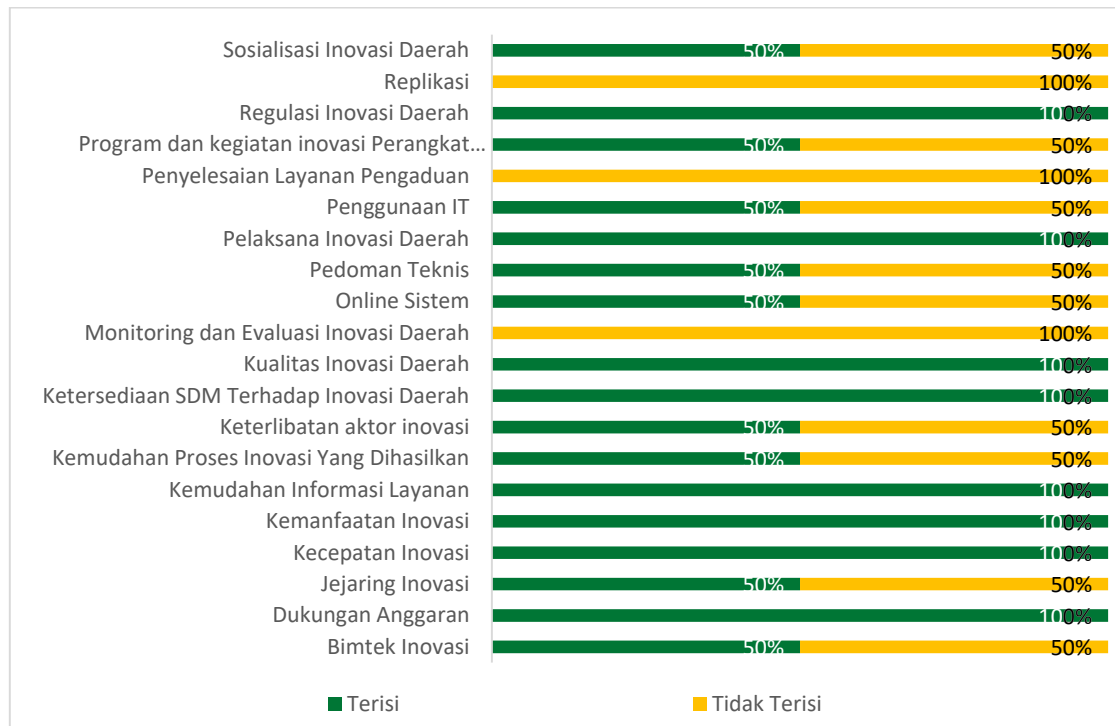
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 178. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Timor Tengah Utara

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara keseluruhan (100%) inovasi masih masuk kategori tingkat skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

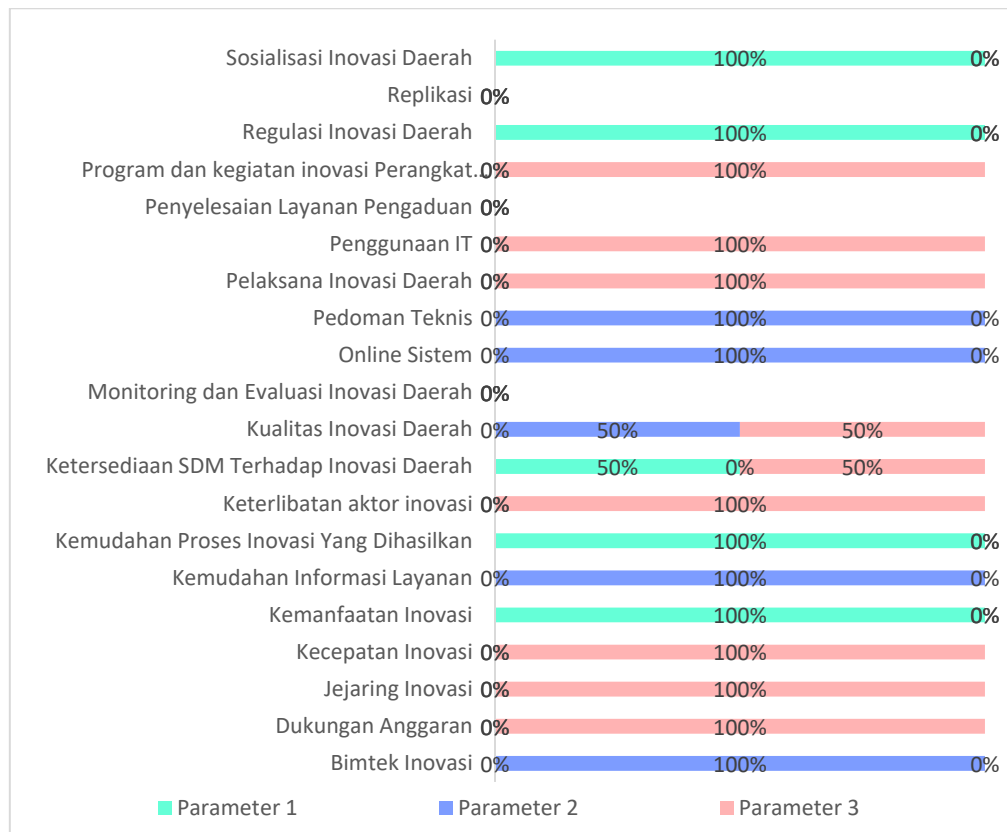
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 179. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Dari 2 inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, 62.5% dari total inovasi telah terisi data pendukung, sedangkan 37.5% belum terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian mencapai 100% adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, Pelaksana Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi dan Kecepatan Inovasi. Sedangkan inovasi dengan tingkat ketidakterisian tertinggi adalah ada pada indikator Replikasi, Penyelesaian Layanan Pengaduan, serta Monev Inovasi Daerah.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 180. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

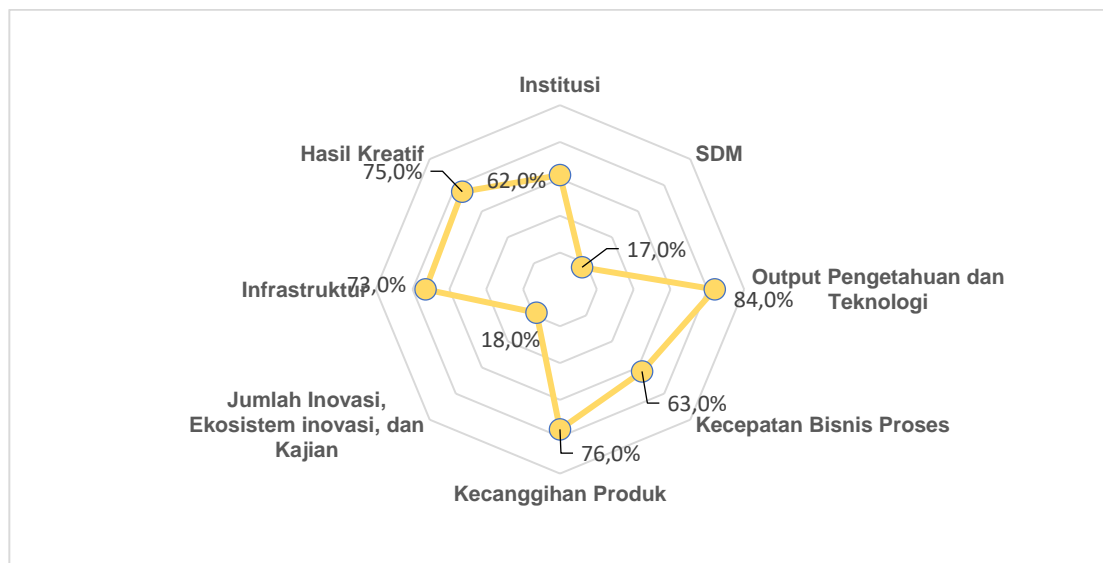
Berdasarkan indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa mayoritas atau sebesar 40% indikator telah terisi dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga). Sedangkan masing-masing 22.5% indikator terisi pada tingkat keterisian parameter 1 (satu) dan parameter 2 (dua).

j. Daftar Inovasi Kabupaten Timor Tengah Utara beserta Skor Kematangannya

Tabel 16. Daftar Inovasi Kabupaten Timor Tengah Utara beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Booklet Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. TTU	63
Forum Data dan Pelatihan Admin E-Database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Perangkat Daerah pada Bapelitbangda Kab. TTU	76

U. KOTA KUPANG



Gambar 181. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Kupang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Kupang memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sebesar 84.0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Sedangkan variabel dengan capaian terendah adalah pada variabel SDM dengan Capaian sebesar 17%.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



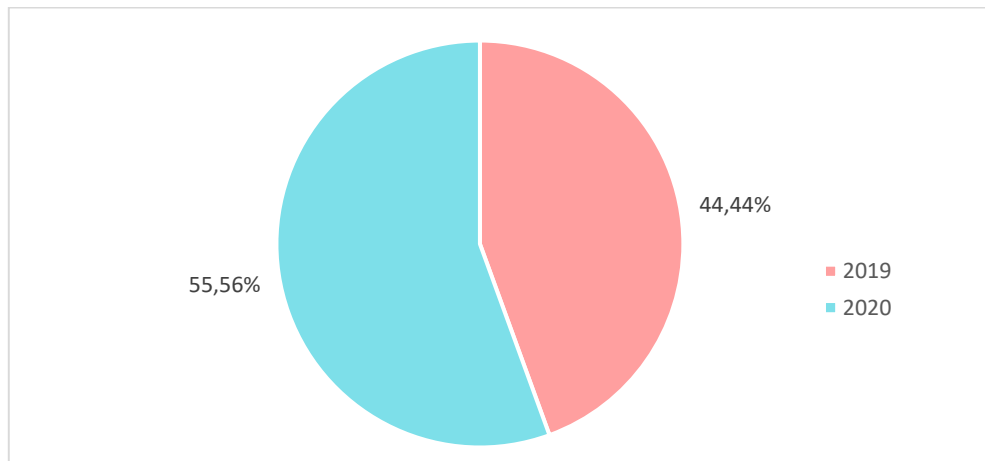
Gambar 182. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Kupang

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menurun drastis sebanyak 500%, nilai ini masih di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah (IID) yang seharusnya turun maksimal 0.92%. Selanjutnya, untuk indikator Penurunan Angka Kemiskinan dan Niai IPM tidak terdapat perubahan.

Selanjutnya, pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan terdapat penurunan sebesar 37.67%, di bawah standar nasional parameter IID yang seharusnya naik 5%. Pada indikator Jumlah Peningkatan PAD menurun sebesar 1.48%, di bawah standar nasional parameter IID yaitu dengan peningkatan sebesar 8%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi terdapat peningkatan sebesar 5.88%. Nilai ini sudah di atas standar nasional parameter IID yaitu meningkat 0.45%. Sedangkan pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang dilaporkan pemerintah Kota Kupang meningkat 6.07%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

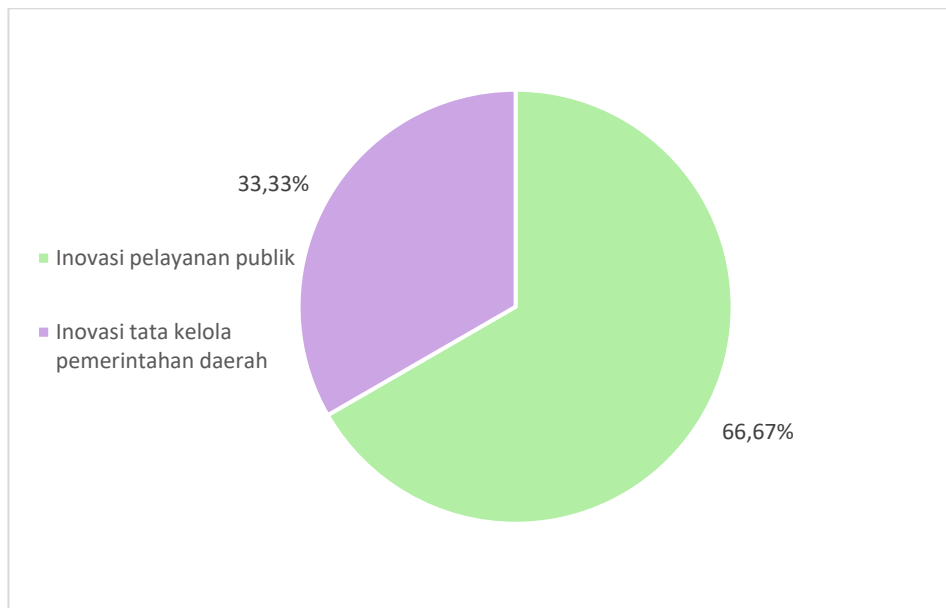
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 183. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Kupang

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sejumlah 5 (55.56%) inovasi baru diterapkan pada tahun 2020. Sedangkan 4 inovasi lainnya dari total 9 inovasi yang dilaporkan pemerintah Kota Kupang, telah diterapkan sejak tahun 2019.

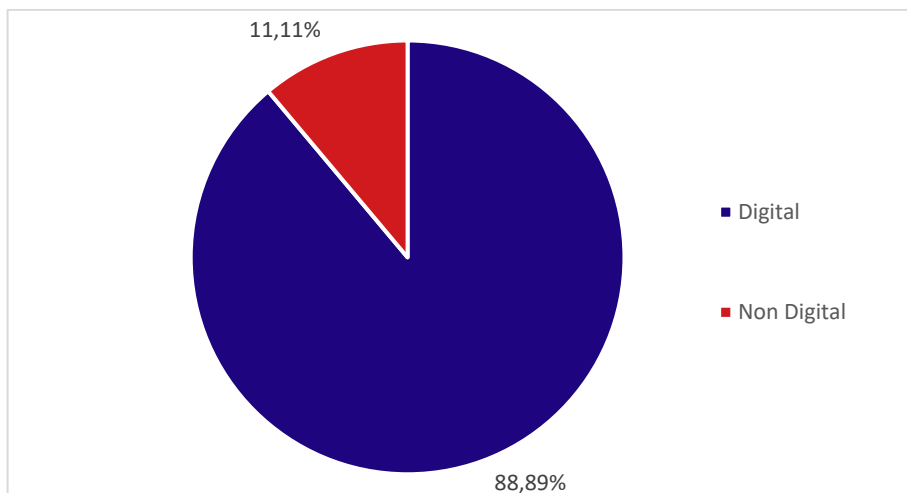
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 184. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Kupang

Berdasarkan bentuknya mayoritas atau sebanyak 6 (66.67%) inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kota Kupang adalah inovasi bentuk Pelayanan Publik dan 3 (33.3%) inovasi lainnya adalah inovasi berbentuk Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

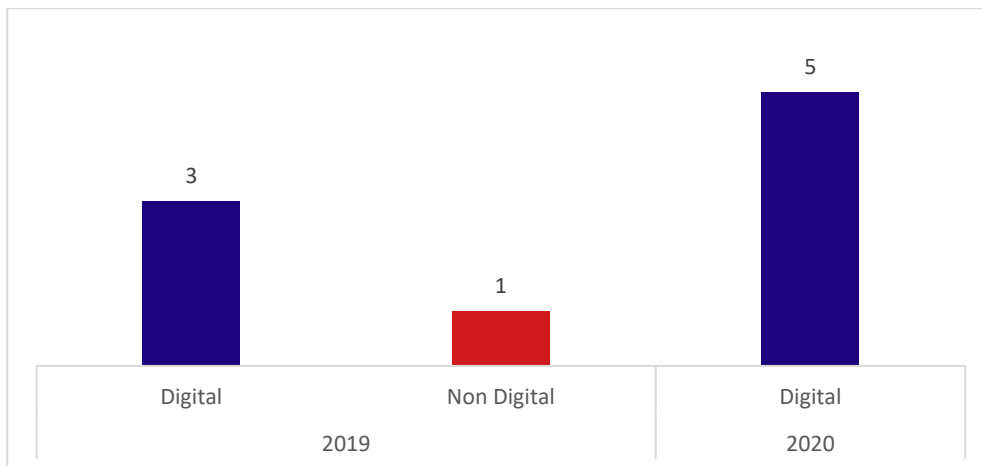
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 185. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Kupang

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya mayoritas (88.89%) inovasi yang dilaporkan pemerintah Kota Kupang adalah inovasi berjenis Digital yaitu sebanyak 8 inovasi. Sedangkan sisanya 1 (11.11%) inovasi berjenis Non Digital.

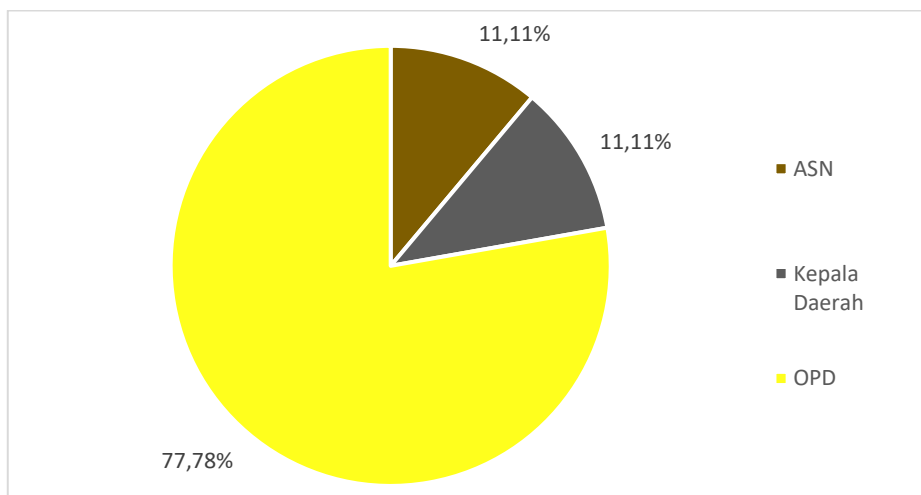
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 186. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Kupang

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terdapat peningkatan pada inovasi berjenis Digital. Terdapat 5 inovasi Digital pada tahun 2020 dari sebelumnya ada 3 inovasi Digital pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk inovasi jenis Non Digital mengalami penurunan dari yang semulanya ada 1 pada tahun 2019, namun tidak ada laporan untuk inovasi jenis tersebut pada tahun 2020.

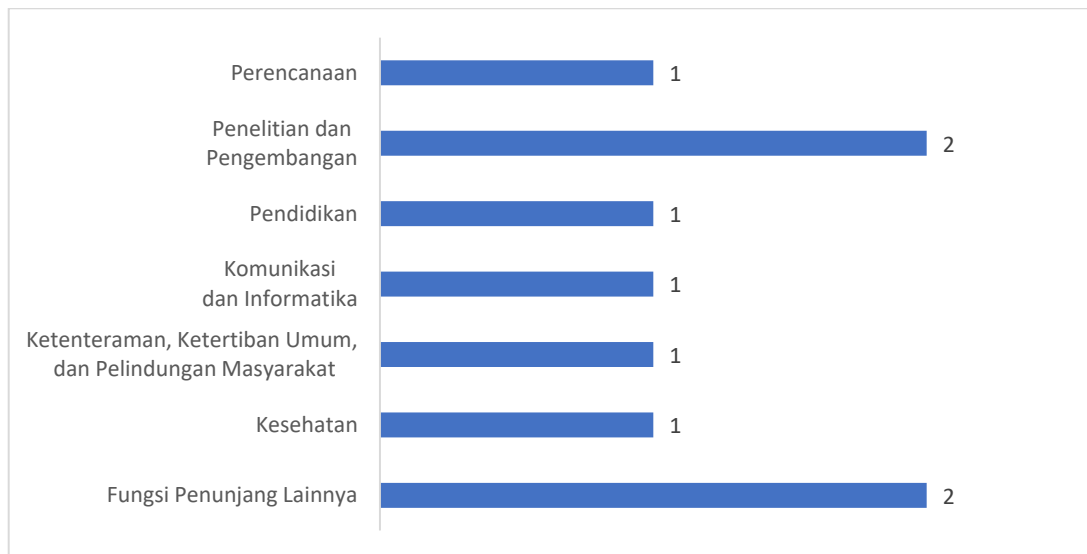
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 187. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Kupang

Mayoritas yaitu sebanyak 7 (22.28%) inovasi yang dilaporkan pemerintah Kota Kupang diinisiasi oleh perangkat daerah. Masing-masing 1 inovasi lainnya diinisiasi oleh Kepala Daerah dan ASN. Belum ada inovasi yang dilaporkan diinisiasi oleh Masyarakat dan DPRD.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

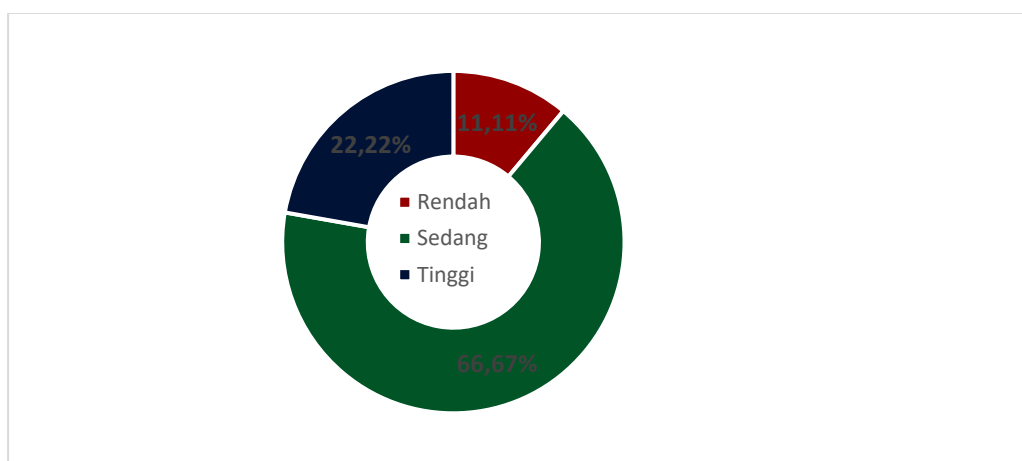


Gambar 188. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Kupang

Berdasarkan laporan pemerintah Kota Kupang terdapat 3 dari 6 Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi inovasi daerah di Kota Kupang, yaitu masing-masing 1 inovasi pada urusan Pendidikan, urusan Trantibumlinmas dan urusan Kesehatan.

Selanjutnya, ada 1 inovasi urusan Perencanaan, 2 inovasi pada urusan Penelitian dan Pengembangan, 1 inovasi urusan Komunikasi dan Informatika. Sisanya ada 2 inovasi berkaitan dengan fungsi penunjang lainnya.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

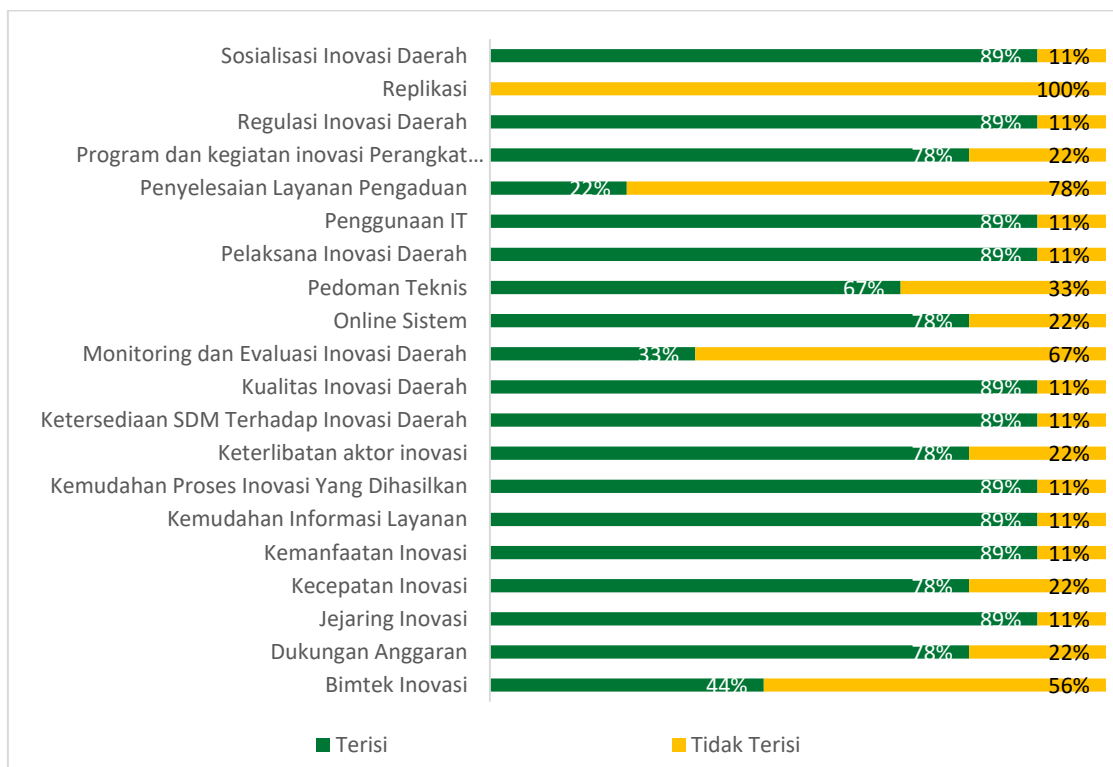


Gambar 189. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Kupang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi yang dilaporkan pemerintah Kota Kupang mayoritas 66.67% atau sebanyak 6 inovasi memiliki skor kematangan sedang. 2 (22.22%) inovasi sudah mencapai tingkat skor kematangan tinggi. Sedangkan 1 inovasi lainnya masih berada pada tingkat skor kematangan yang dikategorikan rendah.

Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

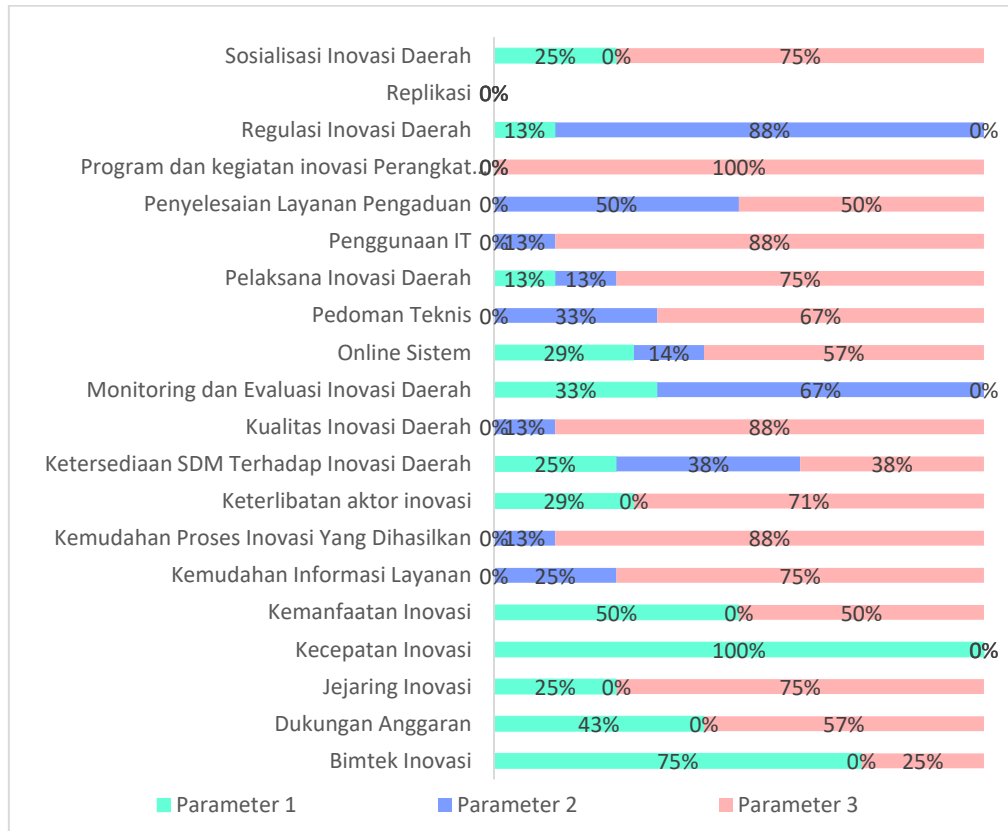


Gambar 190. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Kupang

Berdasarkan laporan inovasi daerah yang dilaporkan pemerintah Kota Kupang, secara keseluruhan, tingkat keterisian data pendukung sudah mencapai 72.22%, selebihnya sebesar 27.78% belum terisi data pendukung. Mayoritas indikator sudah mencapai tingkat keterisian maksimal mencapai 89%. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian terendah adalah indikator Replikasi dengan

tingkat keterisian 0%, berarti tidak satu pun inovasi dilengkapi dengan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 191. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Kupang

Berdasarkan indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa mayoritas atau sebesar 53.87% indikator telah terisi dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga). Sedangkan 18,21% lainnya diisi dengan parameter 2 (dua) dan 22.92% indikator diisi dengan parameter 1 (satu).

Indikator dengan tingkat keterisian pada parameter 3 (tiga) tertinggi mencapai 100% yaitu pada indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian tertinggi pada parameter 2 (dua) adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian sebesar 88%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) tertinggi adalah indikator Kecepatan Inovasi yaitu sebesar 100%. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan pemerintah Kota Kupang dilengkapi dengan data pendukung pada parameter 1 (satu) untuk indikator Kecepatan Inovasi.

j. Daftar Inovasi Kota Kupang beserta Skor Kematangannya

Tabel 17. Daftar Inovasi Kota Kupang beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
SIPINTAR (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) dengan tandatangan elektronik	75
Website Balitbangda Kota Kupang	76
E-Pokir	0
Brigade Kupang Sehat (BKS)	92
Kupang Smart City	100
Kajian Tata Kelola Teknologi Informasi pada Layanan Informasi Publik menuju penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Pemerintah Kota Kupang oleh balitbangda kota kupang	93
Kajian Kesiapan UMKM Tenun Ikat Dalam Pemanfaatan Inovasi Teknologi E-COMMERCE di Kota Kupang oleh balitbangda kota kupang	93
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online Dinas Pendidikan Kota Kupang	103
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Kupang	93

The Page Left is Blank

BAB III

PEMBAHASAN REKOMENDASI

Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 21 Kabupaten/Kota namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

A. KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kabupaten Sumba Timur memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 58,36 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sumba Timur melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

B. KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kabupaten Manggarai Barat memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 55,96 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Manggarai Barat melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

C. KABUPATEN BELU

Kabupaten Belu memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 54,04 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Belu melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

D. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 52,81 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sumba Barat Daya melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

E. KABUPATEN MANGGARAI

Kabupaten Manggarai memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 49,63 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Manggarai melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

F. KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kabupaten Manggarai Timur memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 48,02 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Manggai Timur melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

G. KABUPATEN FLORES TIMUR

Kabupaten Flores Timur memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 47,88 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Nusa Tenggara

Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Flores Timur melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

H. KOTA KUPANG

Kota Kupang memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 47,34 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Kupang melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

I. KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA

Kabupaten Timur Tengah Utara memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 37,56 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Timur Tengah Utara melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

J. KABUPATEN ROTE NDAO

Kabupaten Rote Ndao memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 34,86 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Rote Ndao melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

K. KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kabupaten Sumba Tengah memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 29,99 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN

Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sumba Tengah melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

L. KABUPATEN KUPANG

Kabupaten Kupang memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 27,08 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kupang melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

M. KABUPATEN LEMBATA

Kabupaten Lembata memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 24,17 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Lembata melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

N. KABUPATEN SIKKA

Kabupaten Sikka memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 23,29 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sikka melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

O. KABUPATEN SABU RAIJUA

Kabupaten Sabu Rijua memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 15,04 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sabu Raijua melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

P. KABUPATEN NGADA

Kabupaten Ngada memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 11,20 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Ngada melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

Q. KABUPATEN MALAKA

Kabupaten Malaka memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 5,60 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Malaka melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

R. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 3,56 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Timor Tengah

Selatan melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

S. KABUPATEN ALOR

Kabupaten Alor memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 3,20 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Alor melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

T. KABUPATEN NAGEKEO

Kabupaten Nagekeo memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 2,80 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Nagekeo melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

U. KABUPATEN SUMBA BARAT

Kabupaten Sumba Barat memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 0,80 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sumba Barat melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah